

Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Oil Palm Plantation
Fund Management Agency



Efektivitas Operasional untuk Mempercepat Pertumbuhan Sawit Indonesia yang Berkelanjutan

**Operational Effectiveness to Accelerate
Sustainable Growth of Indonesia's Palm Oil**

2019 Laporan Tahunan
Annual Report

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPPPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPPPKS
Tanggung Jawab Sosial BPPPKS
Laporan Keuangan Audited

Tema Laporan Tahunan 2019
Theme of 2019 Annual Report



**Efektivitas Operasional untuk Mempercepat
Pertumbuhan Sawit Indonesia
yang Berkelanjutan**
**Operational Effectiveness to Accelerate
Sustainable Growth of Indonesia's Palm Oil**

Sejak kehadirannya di tahun 2015, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya disebut BDPKKS, telah menjalankan kebijakan Pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna, secara profesional dan akuntabel, untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan; promosi; peremajaan; sarana dan prasarana; pemenuhan kebutuhan pangan; hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit; penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

Dalam mewujudkan mandat tersebut, BDPKKS menerapkan strategi operasional yang efektif guna optimalisasi penghimpunan dana. Selain itu, BDPKKS terus berupaya menjalin kerjasama strategis dengan berbagai institusi baik bilateral dan multilateral agar komoditas kelapa sawit dan turunannya diakui di dunia internasional telah berjalan sesuai prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan, serta terus mengkampanyekan narasi positif tentang sawit berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan inisiatif BDPKKS untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Since 2015, the Oil Palm Plantation Fund Management Agency, hereinafter referred to as OPPFMA, has implemented Government's policies in sustainable palm oil development programs through the funding, development, and fund disbursement of palm oil funds in an integrated and effective manner, professionally and accountably, for the benefit of resource human resources development; research and development; promotion; replanting; facilities and infrastructure; fulfillment of food security; downstream of palm oil plantation industry; and provision and utilization of biofuels.

OPPFMA implements an effective operational strategy to optimize the funding to actualize the mandate. In addition, OPPFMA strives to establish strategic cooperation with various institutions both bilaterally and multilaterally so that palm oil commodity and its derivatives are recognized internationally, in accordance with sustainable business principles, and campaign for positive narratives on sustainable palm oil. All these efforts shall actualize OPPFMA's initiatives to support the Sustainable Development Goals (SDGs).

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
 Profil BPDPKS
 Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
 Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
 Laporan Keuangan Audited

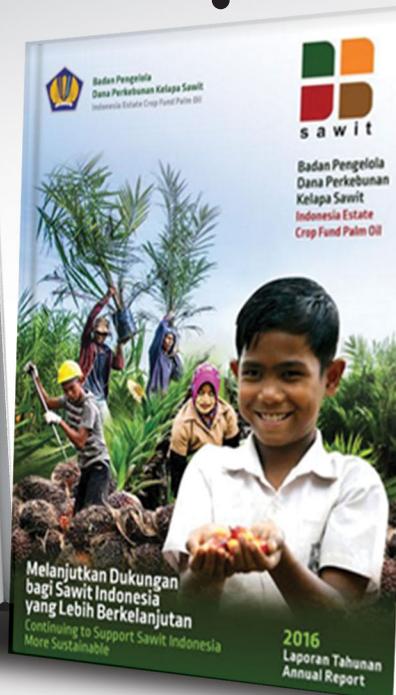
Kesinambungan Tema

Theme Continuity

2015



2016



2017



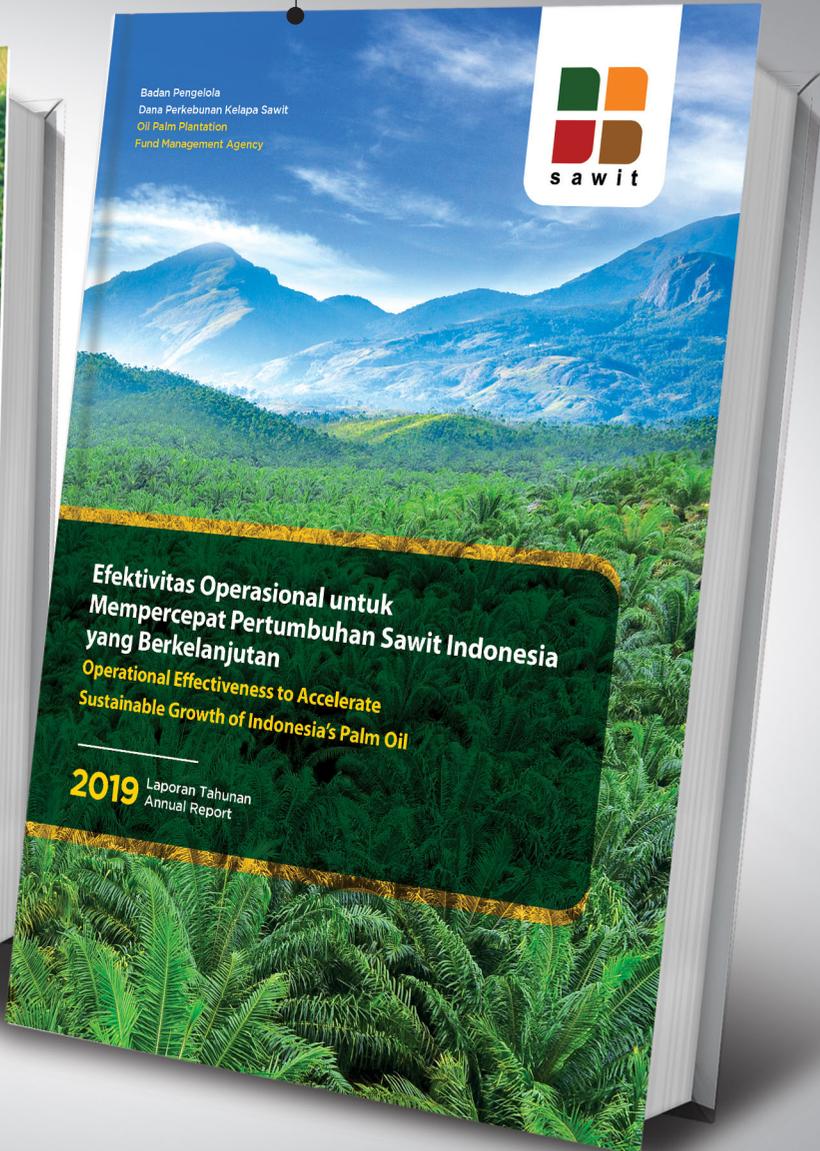
OPPFMA'S Governance
OPPFMA'S Social Responsibility
Audited Financial Statements

Background
Report to The Regulators and Stakeholders
OPPFMA'S Profile
Operational & Financial Performance Discussion and Analysis



2018

2019



Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
 Profil BDPKKS
 Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
 Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
 Laporan Keuangan Audited

Daftar Isi

Contents

01

Pendahuluan Background

1	— Tema dan Penjelasan Tema	Theme and Theme Descriptions
2	— Kesenambungan Tema	Theme Continuity
4	— Daftar Isi	Table of Contents
6	— Ringkasan Kinerja Tahun 2019	Performance Highlights in 2019
10	— Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional Tahun 2019	Financial and Operational Data Highlights in 2019
14	— Peristiwa Penting Tahun 2019	Significant Events in 2019
21	— Testimoni	Testimonial

22

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan Report to The Regulators and Stakeholders

24	— Laporan Dewan Pengawas	Supervisory Board's Report
34	— Profil Dewan Pengawas	Supervisory Board's Profiles
44	— Laporan Direksi	Board of Directors' Report
54	— Profil Direksi	Board of Directors' Profiles
60	— Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2019	Statement of Accountability to 2019 Annual Report

62

Profil BDPKKS OPPFMA'S Profile

64	— Profil BDPKKS	OPPFMA's Profile
66	— Riwayat Singkat Riwayat BDPKKS	OPPFMA's Brief History
70	— Visi Misi dan Tujuan BDPKKS	OPPFMA's Vision, Mission, & Objectives
73	— Tugas, Fungsi dan Strategi BDPKKS	OPPFMA's Duties, Function, and Strategy
76	— Budaya Kerja BDPKKS	OPPFMA's Work Culture
77	— Makna Logo BDPKKS	OPPFMA's Logo
78	— Struktur Organisasi BDPKKS	OPPFMA's Organization Chart
80	— Pejabat Struktural BDPKKS	OPPFMA's Structural Officers
82	— Sumber Daya Manusia BDPKKS	OPPFMA's Human Resources
94	— Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite Audit, Divisi Perusahaan, Satuan Pemeriksa Internal dan Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko	Education and / or Training of the Supervisory Board, Directors, Audit Committee, Corporate Division, Internal Audit Unit and Compliance & Risk Management Division
98	— Lembaga Profesi Penunjang BDPKKS	OPPFMA's Supporting Institutions
99	— Audit Eksternal BDPKKS	OPPFMA's External Audit
100	— Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di setiap Propinsi di Indonesia Tahun 2019	Area and Palm Oil Production by Province and Farming Category, 2019
106	— Peta Sebaran Pendanaan Penelitian dan Pengembangan Sawit (2015-2019)	Map of the OPPFMA's Training Fund for the Community and Scholarship as of the end of 2019



108

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan Operational and Financial Performance Discussion and Analysis

110	— Analisis Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan	Operational And Financial Performance Discussion and Analysis
116	— Kontribusi BDPKKS kepada Negara	OPPFMA Contribution to the State
120	— Analisis Kinerja Operasional	Operational Performance Analysis
168	— Analisis Kinerja Keuangan	Financial Performance Analysis
178	— Manajemen Struktur Modal	Capital Structure Management
180	— Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020	Comparisons between 2018 Target and Performance Realization and 2019 Projections
184	— Informasi Keuangan Lainnya	Other Financial Information
186	— Prospek dan Strategi Usaha	Business Prospect and Strategy

320

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS OPPFMA'S Social Responsibility

366

Laporan Keuangan Audited Audited Financial Statements

200

Tata Kelola BDPKKS OPPFMA'S Governance

202	— Pendahuluan	Background
204	— Komite Pengarah BDPKKS	OPPFMA'S Steering Committee
210	— Dewan Pengawas	Supervisory Board
220	— Komite Audit	Audit Committee
226	— Sekretaris Dewan Pengawas	Secretary of the Supervisory Board
228	— Direksi	Board of Directors
238	— Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi	Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors
249	— Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi	Remuneration Policy of the Supervisory Board and Board of Directors
251	— Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas Dan Direksi	Diversity Policy for the Composition of the Supervisory Board and Board of Directors
259	— Satuan Pemeriksa Internal	Internal Audit Unit
268	— Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Compliance and Risk Management
285	— Sistem Pengendalian Internal	Internal Control
289	— Kode Etik BDPKKS	OPPFMA'S Code of Conduct
292	— Perkara Penting yang Sedang Dihadapi BDPKKS	Important Cases Faced by the BDPKKS
293	— Sistem Pelaporan Pelanggaran	Whistleblowing Reporting Mechanism
298	— Akuntan Publik	Public Accountant
303	— Akses Informasi dan Data BDPKKS	Access to OPFMA'S Information and Dat
306	— Pengadaan Barang dan Jasa	Procurement of Goods and Services
313	— Sistem Manajemen Mutu	Quality Management System
315	— Teknologi Informasi	Information Technology

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
 Profil BPDPKS
 Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
 Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
 Laporan Keuangan Audited

Ringkasan Kinerja BPDPKS sampai dengan 2019

OPPFMA's Performance Summary up to 2019

Capaian Program Peremajaan SDM Sawit (2015-2019)

Achievement of Palm Oil HR replanting Program (2015-2019)

Uraian Description		2016	2017	2018	2019
Luas Lahan (Ha)	Land Area (Ha)	254	2.933	12.541	88.331
Jumlah Pekebun	Smallholders	116	1.409	5.654	38.618
Dana PSR (Rp dalam miliar)	PSR Fund (Rp billion)	635	7.320	31.268	2.255,03

BPDPKS berkomitmen untuk memperkuat sektor kelapa sawit nasional melalui meningkatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) di tingkat petani. Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari program utama yang dijalankan saat ini, sesuai harapan pemerintah untuk memperkuat program PSR. Sampai dengan tahun 2019 BPDPKS telah melaksanakan PSR ke area lahan seluas 88.331 ha yang dimiliki oleh 38.618 Pekebun. Hal ini berhasil meningkatkan penyaluran dana untuk PSR sebesar Rp2.255,03 miliar.

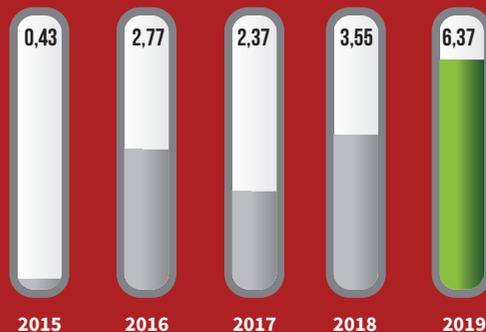
OPPFMA is committed to strengthening the national palm oil sector by increasing the Small-Scale Palm Oil replanting Program (PSR) and implementing Good Agricultural Practices (GAP) at the smallholders' level. These steps were taken as part of the main program currently implemented, in line with the government's expectations to strengthen the PSR program. Until 2019, OPPFMA has implemented PSR on 88,331 ha of land, owned by 38,618 Smallholders. This succeeded in increasing the PSR fund disbursement by Rp2,255.03 billion.





Komitmen BPDPKS Mendukung Program Mandatori Biodiesel 30% (B30) Tahun 2020

OPPFMA's Commitment to Supporting 30% Biodiesel (B30) Mandatory Program in 2020



BPDPKS berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah di sektor industri sawit, baik dari hulu hingga hilir, khususnya kepentingan petani sawit. Salah satunya adalah mendukung implementasi B30 merupakan upaya memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen dari Business As Usual (BAU) pada 2020 dan pengurangan emisi 29 persen pada 2030. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 program mandatori Biodiesel telah disalurkan sebesar 15,49 Juta KL.

OPPFMA is committed to supporting all government programs in the palm oil industry sector, from upstream to downstream, especially for the interests of palm oil smallholders. One of them is to support B30 implementation, an effort to fulfill the government's commitment to reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions by 26 percent from Business as Usual (BAU) in 2020 and reducing emissions by 29 percent by 2030. From 2015 to 2019, the Biodiesel mandatory program has been distributed amounted to 15.49 million KL.

Capaian Program Pengembangan SDM Sawit (2015-2019) Achievement of Palm Oil HR Development Program (2015-2019)



Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
 Profil BDPKKS
 Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
 Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
 Laporan Keuangan Audited

Ringkasan Kinerja BDPKKS sampai dengan 2019 OPPFMA's Performance Summary up to 2019

Jenis pelatihan (bagi Petani Sawit dan Masyarakat Umum) Training type (for Smallholders and the Public)

- | | |
|--|---|
| 1. Pelatihan penumbuhan kebersamaan pekebun (PKP); | 1. Smallholders' togetherness (PKP) training; |
| 2. Pelatihan penguatan kelembagaan; | 2. Institution's strengthening training; |
| 3. Pelatihan pengembangan kelembagaan dan usaha; | 3. Institutional and business development training; |
| 4. Pelatihan Kepemimpinan; | 4. Leadership Training; |
| 5. Pelatihan Manajemen Administrasi dan Keuangan; | 5. Administrative and Financial Management Training; |
| 6. Pelatihan Teknik Budidaya; | 6. Cultivation Technique Training; |
| 7. Pelatihan ISPO; | 7. ISPO Training; |
| 8. Pelatihan Panen dan Pascapanen; | 8. Harvest and Post-Harvest Training; |
| 9. Pelatihan Informasi Pasar dan Promosi; | 9. Market Information and Promotion Training; |
| 10. Pelatihan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkebunan; | 10. Training on Management of Plantation Facilities and Infrastructure; |
| 11. Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan. | 11. Plantation Location Mapping Techniques. |

Program Studi Program Beasiswa Perkebunan Kelapa Sawit Palm Oil Plantation Scholarship Program

- | | |
|---|--|
| 1. Pembibitan Kelapa Sawit | 1. Palm Oil Cultivation of Seedlings |
| 2. Pemeliharaan Kelapa Sawit | 2. Palm Oil Nurturing |
| 3. Budidaya Tanaman Perkebunan | 3. Plantation Cultivation |
| 4. Budidaya Tanaman Perkebunan | 4. Plantation Cultivation |
| 5. Teknik Kimia | 5. Chemical Engineering |
| 6. Teknik Mesin | 6. Mechanical Engineering |
| 7. Akuntansi | 7. Accounting |
| 8. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 8. Plantation Crop Production Technology |
| 9. Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | 9. Palm Oil Processing Technology |
| 10. Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit | 10. Palm Oil Plantation Cultivation |
| 11. Manajemen Logistik | 11. Logistics Management |
| 12. Teknik Pengolahan Kelapa Sawit | 12. Palm Oil Processing Techniques |
| 13. Perawatan dan Perbaikan Mesin | 13. Machinery Repair and Maintenance |
| 14. Teknik Informatika | 14. Informatics Engineering |
| 15. Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | 15. Plantation Product Processing Technology |
| 16. Budidaya Perkebunan | 16. Plantation Cultivation |
| 17. Teknologi Pengolahan Sawit | 17. Palm Processing Technology |

Total kelas pelatihan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2015 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 107 kelas pelatihan dengan total SDM/peserta terdiri dari petani dan masyarakat umum sebanyak 3.300 orang dilaksanakan di 19 Provinsi di Indonesia. Adapun total penerima beasiswa yang telah dilaksanakan sebanyak 1950 peserta. Meliputi jenjang Pendidikan Program Diploma I, Diploma III dan Diploma IV.

There was a total of 107 training classes that have been carried out from 2015 up to December 2019, with 3,300 HR/participants, consisting of smallholders and the public in 19 Provinces in Indonesia. There were 1,950 scholarship recipients. Includes Diploma I, Diploma III and Diploma IV Education levels.

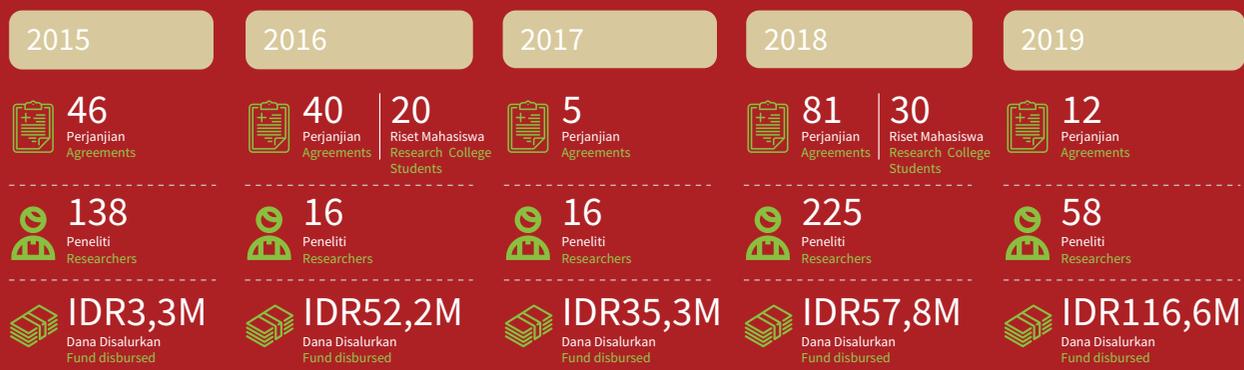


Capaian Program Penelitian dan Pengembangan Sawit (2015-2019)

Achievement of Palm Oil Research and Development Program (2015-2019)

Selama kurun waktu 2015 - 2019 BDPKS telah melaksanakan Program Pendanaan Pengembangan Sawit dengan bidang penelitian dan pengembangan yang mencakup Bioenergi, Budidaya, Pangan dan Kesehatan, Oleokimia dan Biomaterial, Pasca Panen dan Pengolahan, Sosial Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Pasar dan TIK serta Lingkungan dengan capaian sebagai berikut:

During 2015-2019, OPPFMA implemented the Palm Oil Development Funding Program in the research and development field, including Bioenergy, Cultivation, Food and Health, Oleochemistry and Biomaterials, Post-Harvest and Processing, Socio-Economics, Business, Management, Markets and ICT, and the Environment with achievements as follows:



Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
 Profil BDPKPS
 Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKPS
 Tanggung Jawab Sosial BDPKPS
 Laporan Keuangan Audited

Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional Tahun 2019

Financial and Operational Data Overview in 2019

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

(dalam Rp in Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Financial Position Statement	2015	2016	2017	2018	2019
Aset Assets	6.447.069.468.161	5.772.734.755.548	11.865.868.411.275	20.971.433.886.205	16.627.894.945.109
Aset Lancar Current Assets	6.446.836.634.828	5.757.640.522.316	11.851.159.824.294	20.959.252.287.096	16.618.126.359.223
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	232.833.333	15.094.233.232	14.708.586.981	12.181.599.109	9.768.585.886
Liabilitas Liabilities	17.339.031.941	602.045.717.305	859.191.982.927	879.713.883.878	620.093.141.256
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	17.339.031.941	602.045.717.305	859.191.982.927	879.713.883.878	620.093.141.256
Ekuitas Equity	6.429.730.436.220	5.170.689.038.243	11.006.676.428.348	20.091.720.002.327	16.007.801.803.853

(dalam Rp in Rupiah)

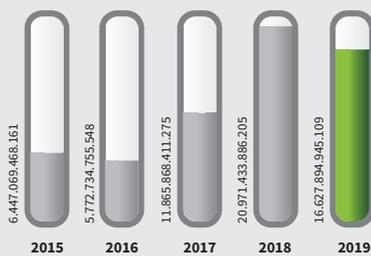
Laporan Aktivitas Statement of Activity	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Income	6.981.019.217.854	12.321.204.623.969	14.782.736.571.602	15.422.257.275.263	1.491.321.969.072
Beban Expenses	551.287.775.134	(11.577.229.646.947)	(10.946.738.536.497)	(6.337.213.701.284)	(5.574.785.467.546)
Pengembalian setoran dari kas negara Refund of deposits from the state treasury	-	-	2.000.000.000.000	-	-
Kenaikan/(penurunan) aset neto tidak terikat Increase/(decrease) in unrestricted net assets	-	(1.259.052.042.977)	5.835.998.035.105	9.085.043.573.979	(4.083.918.198.474)
Aset neto tidak terikat awal tahun Unrestricted net assets at the beginning of the year	-	6.429.730.436.220	5.170.678.393.243	11.006.676.428.348	20.091.720.002.327
Aset neto tidak terikat akhir tahun Unrestricted net assets at the end of the year	6.429.730.436.220	5.170.678.393.243	11.006.676.428.348	20.091.720.002.327	16.007.801.803.853

(dalam Rp in Rupiah)

Laporan Arus Kas Statement of Cash Flows	2015	2016	2017	2018	2019
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows (used for)/provided from operating activities	6.442.406.435.456	1.303.611.901.381	4.021.710.047.373	8.804.098.616.113	(4.369.346.606.167)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Net cash provided from (used for) investing activities	(3.962.033.850.000)	3.945.123.562.400	(8.563.899.000.725)	8.931.784.648.214	(181.125.138.809)
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Net cash flow (used for) financing activities	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)	2.000.000.000.000	-	-
Kenaikan/(penurunan) bersih pada kas dan setara kas Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	2.480.372.585.456	3.248.735.463.781	(2.542.188.953.352)	17.735.883.264.327	(550.471.744.976)
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	-	2.480.372.585.456	5.729.108.049.237	3.186.919.095.885	20.922.802.360.212
Kas dan Setara Kas pada akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of the year	2.480.372.585.456	5.729.108.049.237	3.186.919.095.885	20.922.802.360.212	16.372.330.615.236

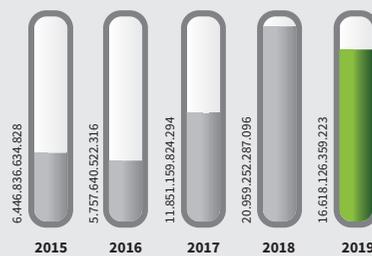
Aset

Assets



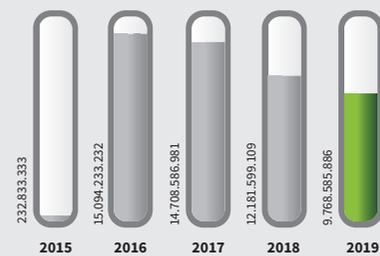
Aset Lancar

Current Assets



Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets



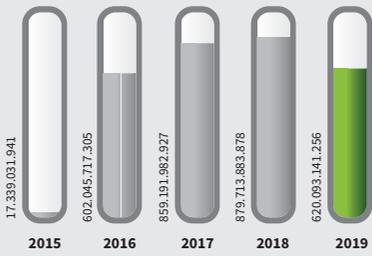
Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
 Profil BPPPKS
 Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

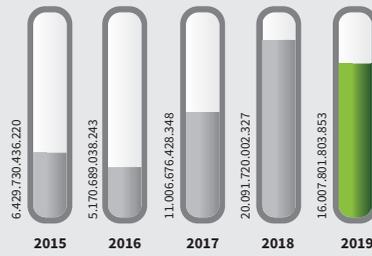
Tata Kelola BPPPKS
 Tanggung Jawab Sosial BPPPKS
 Laporan Keuangan Audited

Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional Tahun 2019 Financial and Operational Data Overview in 2019

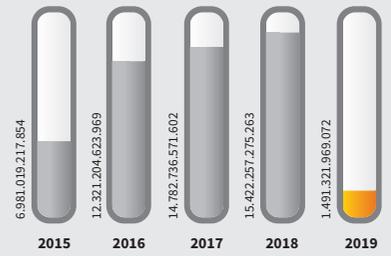
Liabilitas
Liabilities



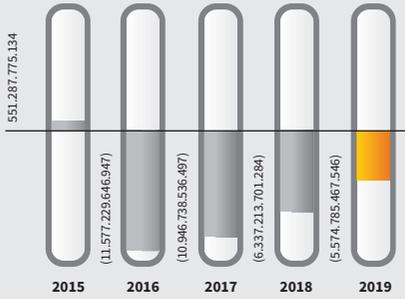
Ekuitas
Equity



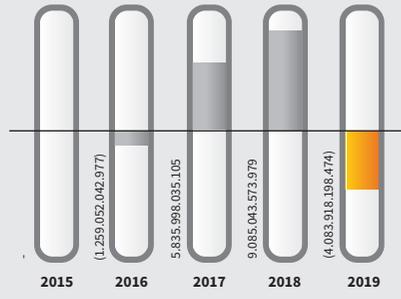
Pendapatan
Income



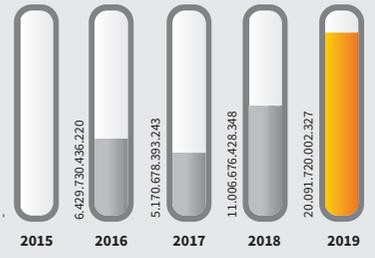
Beban
Expenses



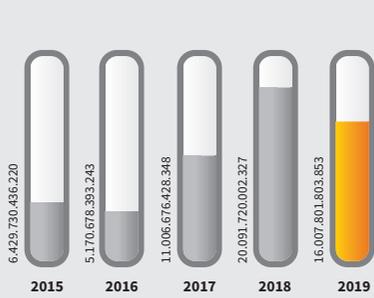
Naiknaik/(penurunan) aset neto tidak terikat
Increase/(decrease) in unrestricted net assets



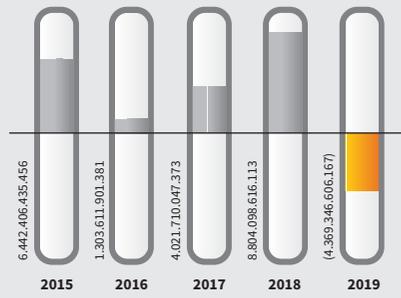
Aset neto tidak terikat awal tahun
Unrestricted net assets at the beginning of the year



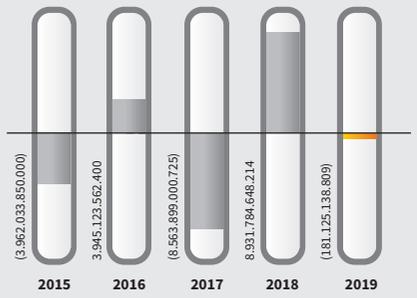
Aset neto tidak terikat akhir tahun
Unrestricted net assets at the end of the year



Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi
Net cash flows (used for)/provided from operating activities



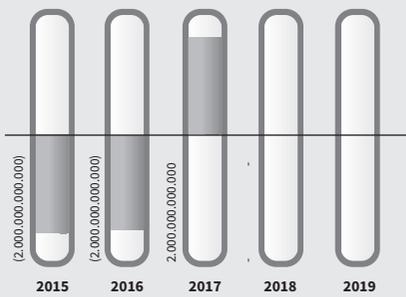
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi
Net cash provided from (used for) investing activities





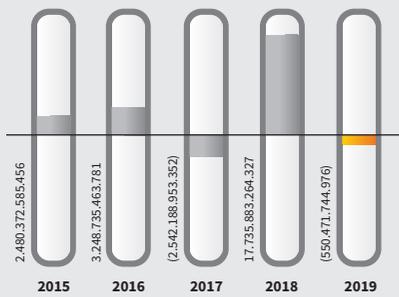
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Net cash flow (used for) financing activities



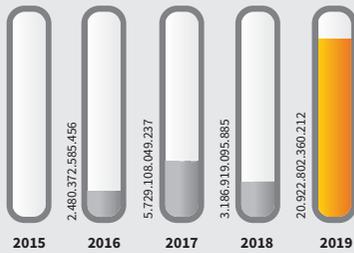
Kenaikan/(penurunan) bersih pada kas dan setara kas

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents



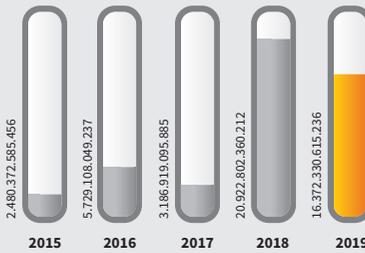
Kas dan setara kas pada awal tahun

Cash and cash equivalents at the beginning of the year



Kas dan Setara Kas pada akhir tahun

Cash and cash equivalents at the end of the year



Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
 Profil BDPKKS
 Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
 Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
 Laporan Keuangan Audited

Peristiwa Penting Tahun 2019 Significant Events in 2019

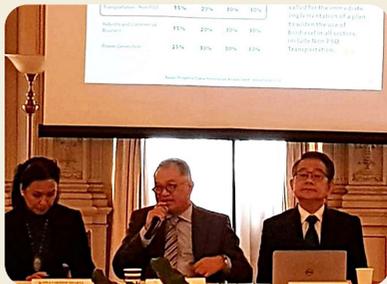
16
JANUARI
JANUARY



BDPKKS diwakili oleh Direktur Penghimpunan Dana Herdrajat Natawijaya memberikan pembekalan kepada para calon Duta Besar dan Konsul Jenderal Republik Indonesia, mengenai peran kelapa sawit berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan dalam pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

OPPFMA, represented by the Director of Funding, Herdrajat Natawijaya, provided training to candidates for the Ambassador and Consul General of the Republic of Indonesia, regarding the role of sustainable palm oil in Indonesia's economic development and in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

16
JANUARI
JANUARY



Direktur Utama BDPKKS Dono Boestami menyampaikan paparan dalam Palm Oil Seminar bertema "*Empowering Palm Oil - An Energy Grand Challenge for Sustainable Growth*" di Kedutaan Besar RI di Washington DC, AS. Paparan disampaikan kepada kalangan pengusaha Amerika Serikat (AS) mengenai upaya pemerintah dalam mendayagunakan kelapa sawit sebagai sumber energi dan kontribusinya bagi pembangunan berkelanjutan.

OPPFMA's President Director, Dono Boestami, talked in the Palm Oil Seminar, with the theme of "Empowering Palm Oil - An Energy Grand Challenge for Sustainable Growth" at the Indonesian Embassy in Washington DC, USA. He presented the government's efforts to utilize palm oil as an energy source and its contribution to sustainable development in front of the United States (US) businessmen.

7-10
FEBRUARI
FEBRUARY



BDPKKS menggelar kegiatan peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi karyawannya mengenai berbagai hal terkait kelapa sawit berkelanjutan. Kegiatan yang diikuti jajaran direksi dan segenap karyawan BDPKKS ini mengusung tema "*Breakthrough to Excellence*", dilangsungkan di Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

OPPFMA provided capacity building for employees related to sustainable palm oil. This activity was attended by OPFFMA's Director's and employees with the theme of "Breakthrough to Excellence" at Belitung Island, Bangka Belitung Islands.

15
FEBRUARI
FEBRUARY



Penandatanganan kesepakatan pendanaan antara koperasi petani sawit dengan BDPKKS dan sejumlah perbankan dalam rangka pendanaan *replanting* sebesar Rp25 juta per hektar bagi petani sawit di Aceh.

Signing of a funding agreement between the palm oil farmer cooperatives, OPFFMA, and several banks for replanting funding of Rp25 million per hectare for smallholders in Aceh.

08
MEI
MAY

BPDPKS menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) dengan IPB yang bertajuk `Potensi Pakistan sebagai Hubungan Pengembangan Bisnis Minyak Sawit Indonesia di Kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah`. FGD dihadiri pembicara kunci Duta Besar RI untuk Pakistan Iwan Suyudhie Amri dan menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi dunia usaha di sektor kelapa sawit.

OPPFMA held a Focus Group Discussion (FGD) with IPB entitled "Pakistan's Potential as a Developing Relationship of Indonesia's Palm Oil Business in South Asia and Middle East Regions". The FGD was attended by keynote speaker, the Indonesian Ambassador to Pakistan, Iwan Suyudhie Amri, and various speakers from academia and business practitioners in the palm oil sector also presented.

22
MEI
MAY

BPDPKS menggelar acara *Stakeholder Gathering* 2019 yang bertema "Berbagi Berkah dan Kebaikan untuk Mewujudkan Sawit Indonesia yang Berkelanjutan". Kegiatan ini dihadiri segenap pemangku kepentingan di sektor sawit dari kalangan pengusaha, peneliti, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, perbankan, perwakilan dari kementerian dan lembaga, serta segenap pemangku kepentingan di industri sawit nasional lainnya.

OPPFMA held a 2019 Stakeholder Gathering under the theme "Sharing Blessings and Kindness to Realize Sustainable Palm Oil in Indonesia". This activity was attended by all stakeholders in the palm oil sector, i.e., entrepreneurs, researchers, academics from various universities, banking industries, representatives from ministries and institutions, as well as all other stakeholders in the national palm oil industry.

10
JUNI
JUNE

Halal Bihalal dan Syukuran 4 Tahun BPDPKS dihadiri oleh Dewan Pengawas dan jajaran Direksi serta segenap karyawan BPDPKS.

Gathering of 4 Years OPPFMA, attended by the Supervisory Board and the Board of Directors, as well as all OPPFMA's employees.

11-13
JULI
JULY

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami menjadi salah satu anggota misi dagang ke Turki untuk mempererat hubungan dagang dan meningkatkan nilai perdagangan Indonesia - Turki yang bertujuan mempromosikan berbagai komoditas, termasuk sawit dan produk turunannya.

OPPFMA's President Director, Dono Boestami, is a member of a trade mission to Turkey to strengthen trade relations and increase trade value between Indonesia and Turkey, with the objective to promote various commodities, including palm oil and its derivative products.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
 Profil BDPKKS
 Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
 Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
 Laporan Keuangan Audited

Peristiwa Penting Tahun 2019 Significant Events in 2019

12-13
JULI
JULY



BDPKKS mengadakan kegiatan Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa yang merupakan salah satu program unggulan BDPKKS. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pengembangan riset kelapa sawit dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di industri sawit serta meningkatkan minat kemampuan, kreatifitas dan inovasi mahasiswa untuk menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.

OPPFMA held a Student Palm Oil Research Competition, which is one of the flagship programs of OPFFMA. This activity is carried out as part of an effort to encourage the development of palm oil research, and improve science and technology in the palm oil industry, as well as increase students' interest in the ability, creativity, and innovation to apply, develop, and disseminate science and technology.

09
AGUSTUS
AUGUST



Peluncuran Sistem Teknologi Informasi yang digunakan untuk verifikasi dalam rangka penyaluran insentif biodiesel oleh BDPKKS. Sistem teknologi informasi terpadu yang bisa diakses secara *online* ini disediakan untuk implementasi penyaluran Biodiesel, serta pencampurannya dengan minyak solar, serta proses verifikasi permintaan pembayaran dana pembiayaan biodiesel

Launching of the Information Technology System for the verification in disbursing biodiesel incentives by OPFFMA. This online integrated information technology system is provided to distribute biodiesel, arrange its mix with diesel oil, as well as verify the process of requesting payment of biodiesel financing.

24
SEPTEMBER
SEPTEMBER



Pengumuman penundaan pungutan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya hingga 1 Januari 2020 oleh Menteri Perekonomian Darmin Nasution. Hal ini sesuai dengan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Umum Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKKS) Pada Menteri Keuangan.

The Coordinating Minister for Economic Affairs, Darmin Nasution, announced the postponement of export levies for palm oil products and their derivatives until 1 January 2020. This is in accordance with the provisions of the Minister of Finance Regulation No. 23/PMK.05/2019 on the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 81/PMK.05/2018 on the Tariff Service of the Public Service Agency of Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) at the Minister of Finance.

02
OKTOBER
OCTOBER



Penyerahan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada 145 petani plasma di Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Peremajaan (*replanting*) pada lahan seluas 322 hektare ini merupakan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Kemitraan Strategis yang digelar bersama oleh BDPKKS, Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Lestari, dan PT BRI Agroniaga Tbk.

Handover of the Small-Scale Palm Oil replanting (PSR) Fund to 145 smallholders at Kenantan Village, Tapung Sub-District, Kampar Regency, Riau. The replanting on 322 hectares area is the implementation of the Strategic Partnership of Palm Oil replanting Program, jointly held by OPFFMA, the Makmur Lestari Village Unit Cooperative (KUD), and PT BRI Agroniaga Tbk.



04
OKTOBER
OCTOBER



Pelantikan Kabul Wijayanto sebagai Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana serta Sunari sebagai Direktur Penghimpunan Dana yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Inauguration of Kabul Wijayanto as the Director of Fund Planning and Management, and Sunari as Director of Funding, conducted by the Minister of Finance, Sri Mulyani.

10
OKTOBER
OCTOBER



Sosialisasi implementasi program perluasan mandatori B20 yang bertema "Biodiesel untuk Bangsa dan Negara" itu menghadirkan sejumlah kalangan dari regulator, BU BBM, BU BBN, konsumen, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat lain yang digelar BDPKKS di Palembang.

Dissemination of the B20 mandatory expansion program with the theme "Biodiesel for the Nation and the State" was attended by various groups, from regulators, BU BBM, BU BBN, consumers, academics, and various other elements of society. The event was held by OPPFMA in Palembang.

10
OKTOBER
OCTOBER



Pelaksanaan Wisuda ke 3 dan Pembukaan Kuliah Angkatan ke 4 Program Beasiswa Pendidikan Diploma 1 Kelapa Sawit BDPKKS.

3rd Graduation and 4th Batch Opening of OPPFMA's Scholarship Program for Young Diploma 1 in Palm Oil.

20
OKTOBER
OCTOBER



BDPKKS Hadirkan Gerai Sawit di Ajang TEI 2019

OPPFMA Held Palm Oil Exhibition at 2019 TEI

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
 Profil BDPKKS
 Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
 Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
 Laporan Keuangan Audited

Peristiwa Penting Tahun 2019 Significant Events in 2019

01
NOVEMBER
NOVEMBER



Pemaparan Direktur Utama BDPKKS tentang penggunaan bahan bakar dari sumber terbarukan pada 15th Indonesian Palm Oil Conference di Nusa Dua, Bali,

OPPFMA's President Director presented about the use of fuel from renewable sources at the 15th Indonesian Palm Oil Conference at Nusa Dua, Bali

06
NOVEMBER
NOVEMBER



Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran dengan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar Periode Januari-Desember 2020 menjadi B30 antara BDPKKS dan perwakilan produsen BBN biodiesel.

Signing of the Biodiesel Fuel Procurement Financing Agreement for Blending with Diesel Fuel into B30 for January up to December 2020 between OPPFMA and representatives of biodiesel biofuel producers.

19
NOVEMBER
NOVEMBER



Talk Show Milenial Bareng Sawit "Ngalam Amazing Race Sawit Hunt 2019" kerjasama BDPKKS dan Majalah Warta Ekonomi.

Millennial Talk Show with Palm Oil "Experiencing 2019 Amazing Race Sawit Hunt in Nature" in collaboration with OPPFMA and Warta Ekonomi Magazine.

20-22
NOVEMBER
NOVEMBER



Lokakarya dan Meeting Gathering 2019 bertemakan "Satukan Langkah Untuk Sawit Indonesia" kerjasama Jaringan Indonesia Muda (JIM) bekerjasama dengan BDPKKS.

2019 Workshop and Gathering Meeting under the theme "Uniting for Indonesia's Palm Oil" by the Young Indonesia Network (JIM) in collaboration with OPPFMA.



28
NOVEMBER
NOVEMBER



Kegiatan *Road Test* penggunaan bahan bakar B30 didukung oleh BDPKKS yang berperan dalam hal penyediaan dana, PT Pertamina (Persero) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) dalam hal penyediaan bahan bakar, serta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebagai penyedia kendaraan uji. Sedangkan Tim Pelaksana Uji adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) LEMIGAS; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Balai Teknologi Bahan Bakar & Rekayasa Disain (BTBRD) dan Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP); serta Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (P3tek KEBTKE) sebagai integrator.

Road Test for the use of B30 fuel, supported by OPPFMA as the fund provider, PT Pertamina (Persero) and the Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) as the fuel suppliers, and the Association of Indonesia Automotive Industries (Gaikindo) as the provider of test vehicles. The Testing Team is the Research and Development Center for Oil and Gas Technology (PPPTMGB) LEMIGAS; Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) through the Center for Fuel Technology & Design Engineering (BTBRD) and the Center for Motor Thermodynamics and Propulsion Technology (BT2MP); and the Research and Development Center for the Technology of Electricity, New Renewable Energy, and Energy Conservation (P3tek KEBTKE) as the integrator.

19
DESEMBER
DECEMBER



Konferensi Pers Akhir Tahun BDPKKS "Menuju Sawit Berkelanjutan"

OPPFMA's Year-End Press Conference "Towards Sustainable Palm Oil"

23
DESEMBER
DECEMBER



Peresmian implementasi program Biodiesel 30 (B30) di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan, oleh Presiden Joko Widodo. Peresmian ini menandai dimulainya penggunaan bahan bakar campuran 70 persen solar dengan 30 persen biodiesel di Indonesia.

Inauguration of the Biodiesel 30 (B30) program at MT Haryono Pertamina's Gas Station, South Jakarta, by President Joko Widodo. This inauguration symbolized the start of the utilization of a mixture of 70 percent diesel fuel with 30 percent biodiesel in Indonesia.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
 Profil BDPKKS
 Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
 Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
 Laporan Keuangan Audited

Testimoni

Testimonial



“Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia menghasilkan *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD) yang merupakan hasil samping *refining* CPO dalam jumlah melimpah. Namun pemanfaatan PFAD di dalam negeri masih sangat terbatas. Kami mengembangkan pemanfaatan PFAD menjadi Sabun/ Lemak Kalsium yang ditujukan sebagai pakan ternak yang bermanfaat untuk mendapatkan suplemen pakan sapi perah berisikan lemak terproteksi (*rumen by-pass*) yang berkualitas baik yang dapat meningkatkan produktivitas susu, kesehatan, dan fertilitas sapi. Penelitian ini dilakukan dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKKS).”

"As the largest palm oil producer in the world, Indonesia produces abundant Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), which is a byproduct of refining CPO. However, the use of PFAD domestically is very limited. We are developing the use of PFAD to be Calcium Soap/Fat for animal feed that is useful to obtain good quality dairy from cow feed supplements containing protected fat (rumen bypass), which can increase cow milk productivity, health, and fertility. The research was carried out with funding from the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA)."

Prof. Dr. Ir. Lienda Aliwarga Handojo, M.Eng.,

Dosen Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung / Peneliti LPPM ITB
 Lecturer in Chemical Engineering, Institut Teknologi Bandung/Researcher of LPPM ITB



“Kami sangat mendukung terlaksananya program ini dan tentu saja dukungan dari pihak perusahaan swasta sebagai mitra petani sangatlah penting. Program ini dapat meningkatkan pengetahuan serta keahlian para petani dalam praktik budidaya kelapa sawit dan memperbaiki kesejahteraan hidup mereka.”

“We support this program, and in addition, the key support from private companies as the smallholders' partners. This program increases the knowledge and expertise of palm oil smallholders in terms of palm oil cultivation, and improves their welfare.”

Catur Sugeng Susanto

Bupati Kabupaten Kampar Riau
 Regent of Kampar Regency, Riau



“Melalui Program Beasiswa BDPKKS bekerjasama dengan Program Diploma I AKPY - Stiper Yogyakarta mendidik Taruna Taruni Sawit menjadi SDM sawit yang handal untuk memperkuat sektor perkebunan sawit di era milenial agar nantinya para alumni AKPY - Stiper bisa mendukung kesuksesan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang ditargetkan 500 ribu hektar. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan kegiatan kebijakan pro rakyat dan juga bentuk perhatian pemerintah terhadap sub sektor perkebunan, Program ini dapat berjalan berkat dukungan BDPKKS”.

"Through OPPFMA's Scholarship Program with the AKPY - Stiper Diploma I Program, Yogyakarta educates Taruna Taruni Sawit to become reliable palm oil human resources to strengthen the palm oil plantation sector in this millennial era. It is expected that the alumini of AKPY - Stiper can support the success of the 500 thousand hectares of Small-Scale Palm Oil replanting Program (PSR). The Small-Scale Palm Oil replanting Program (PSR) is part of the pro-people policy and a form of government's care to the plantation sub-sector. This program is conducted, thanks to OPPFMA's support".

Ir. Sri Gunawan, MS

Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta - Stiper (AKPY - Stiper)
 Director of the Yogyakarta Plantation Community Academy - Stiper (AKPY - Stiper)



“Perusahaan swasta memiliki peran strategis dalam merealisasikan peremajaan yang dananya bersumber dari BDPKKS. Sebagai mitra petani, pihak perusahaan telah melakukan pendampingan dalam proses pengajuan hingga dana peremajaan dicairkan karena peremajaan kebun memerlukan biaya yang besar. Dana hibah dari BDPKKS untuk program ini sangat membantu petani khususnya anggota KUD. Hal ini tak terlepas dari peran perusahaan sebagai mitra usaha strategis.”

“Private companies have a strategic role in actualizing replanting with funds from OPPFMA. As the smallholders' partners, the companies have provided assistance in the submission process up until the disbursement of replanting funds, because plantation replanting requires large amount of money. The funds disbursed by OPPFMA for this program are very helpful for smallholders, especially members of Village Unit Cooperative (KUD). This is inseparable from the company's role as a strategic business partner.”

Sudirman

Ketua KUD Makmur Lestari- Kabupaten Kampar Riau
 Chairman of Makmur Lestari KUD - Kampar Regency, Riau



Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

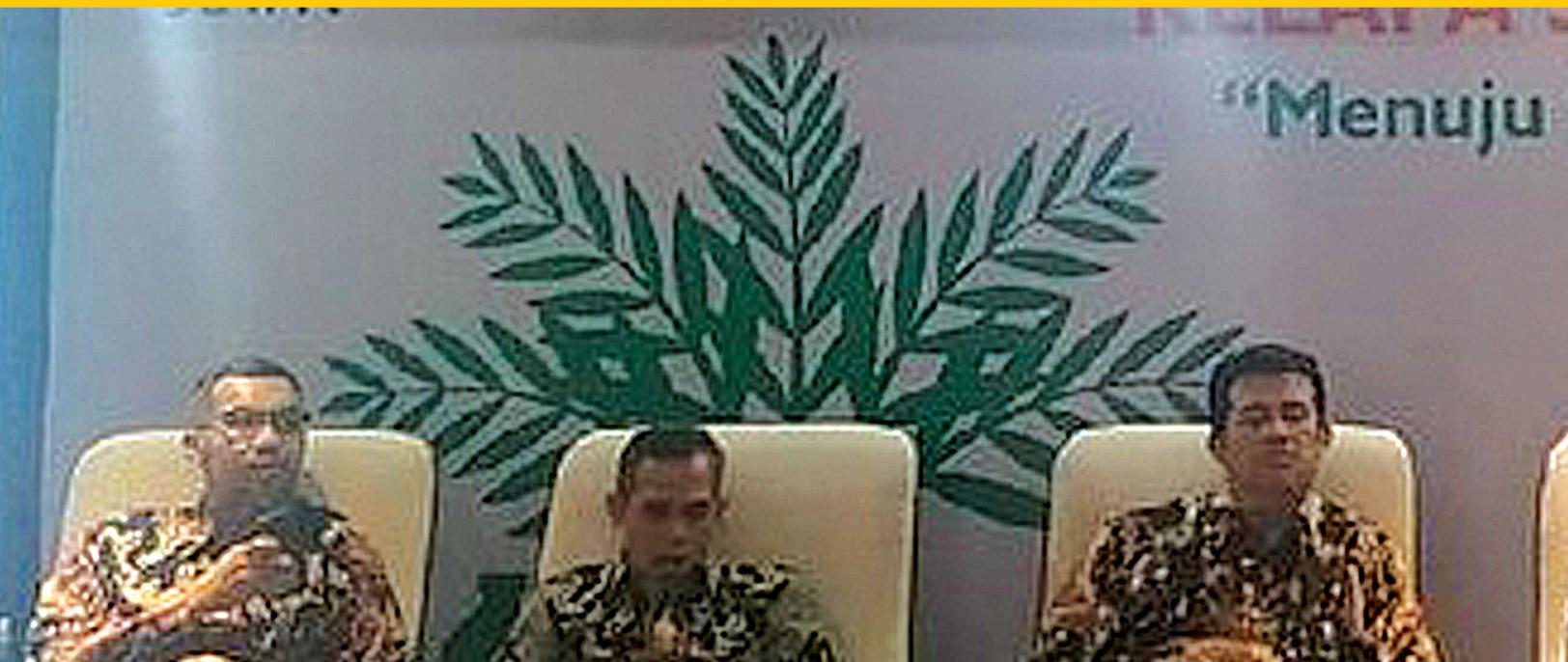
Tata Kelola BDPKKS

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS

Laporan Keuangan Audited

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Report to Regulator and Stakeholders



BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY

OPPFMA'S Governance
OPPFMA'S Social Responsibility
Audited Financial Statements

Background
Report to The Regulators and Stakeholders
OPPFMA'S Profile
Operational & Financial Performance Discussion and Analysis



Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Sambutan Dewan Pengawas Supervisory Board's Report

EVITA H LEGOWO*

KETUA DEWAN PENGAWAS

SUPERVISORY BOARD'S CHAIRMAN



BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas BPDPKS secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi agar terus menjalankan komitmennya untuk selalu meningkatkan kinerja BPDPKS dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam kegiatan sehari-hari.

During 2019, OPPFMA's Supervisory Board proactively supervised and provided input to the Board of Directors. Supervision is carried out directly, including monitoring the follow-up on recommendations from the Supervisory Board to the Board of Directors to carry out its commitment to improving the performance of OPPFMA by upholding the Good Governance principles in daily activities.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS

Laporan Keuangan Audited

Sambutan Dewan Pengawas Supervisory Board's Report

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga BDPKKS mampu melaksanakan kinerja operasional dengan sangat baik selama Tahun Buku 2019. Pada kesempatan kali ini, kami segenap jajaran Dewan Pengawas akan menyampaikan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2019 yang terangkum dalam Laporan Tahunan BDPKKS Tahun Buku 2019. Laporan disampaikan untuk memenuhi pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas BDPKKS secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi agar terus menjalankan komitmennya untuk selalu meningkatkan kinerja BDPKKS dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam kegiatan sehari-hari.

We express our gratitude to God Almighty, for His grace, OPPFMA was able to conduct the operational performance very well during the 2019 Fiscal Year. On this occasion, we, the Supervisory Board, will deliver our supervisory activities during 2019, which are summarized in the OPPFMA Annual Report for 2019 Fiscal Year. This report is submitted to fulfill the supervisory and advisory duties as regulated in Minister of Finance Regulation No. 95/PMK.05/2016 on Supervisory Board of the Public Service Agency.

During 2019, OPPFMA's Supervisory Board proactively supervised and provided input to the Board of Directors. Supervision is carried out directly, including monitoring the follow-up on recommendations from the Supervisory Board to the Board of Directors to carry out its commitment to improving the performance of OPPFMA by upholding the Good Governance principles in daily activities.

Penilaian atas Kinerja Direksi**Performance Assessment of the Board of Directors**

Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada manajemen BDPKKS atas pencapaian kinerja di tahun 2019 yang baik. Hal ini terutama disebabkan karena layanan utama BDPKKS tetap berjalan meskipun tidak ada pendapatan pungutan.

Sampai dengan 31 Desember 2019 BDPKKS mencatat Aset sebesar Rp16,62 triliun, menurun 20,71% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20,97 triliun yang disebabkan oleh pemberlakuan tarif Rp0 atas pungutan ekspor Kelapa Sawit, CPO (*Crude Palm Oil*) dan produk turunannya. Hal serupa juga terjadi dengan Ekuitas sebesar Rp16.03 triliun, menurun 20,33% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20.85 triliun. Adapun Liabilitas sebesar Rp0,62 triliun menurun 29,51% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp0,88 triliun yang disebabkan oleh HIP Biodiesel yang lebih rendah dari HIP Solar sehingga insentif biodiesel yang dibayarkan hanya berupa komponen ongkos angkut dan PPN.

The Supervisory Board expressed appreciation to OPPFMA's management for its good performance in 2019. This is mainly due to several revised targets, such as the revenue collection.

As of 31 December 2019, OPPFMA booked assets of Rp16.62 trillion, decreased by 20.71% compared to 2018, which was Rp20.97 trillion, due to the imposition of Rp0 tariff on export levies of Palm Oil, CPO (Crude Palm Oil), and its derivative products. Similarly, Equity amounted to Rp16.03 trillion, decreased by 20.33% compared to 2018 of Rp20.85 trillion. Meanwhile, Liabilities amounted to Rp0.62 trillion, which decreased by 29.51% compared to 2018, which was Rp0.88 trillion due to lower HIP Biodiesel compared to HIP Solar, thus the biodiesel incentives paid was in the form of transportation cost and VAT.



Adapun capaian kinerja keuangan, BPDPKS telah membukukan penghimpunan dan pengelolaan dana sebesar Rp1,45 triliun yang hanya berasal dari pendapatan atas pengelolaan dana. Pendapatan ini menurun 90,33% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp15,42 triliun.

Dewan Pengawas juga senantiasa mendukung Program Mandatori Biodiesel. Penyaluran dana insentif biodiesel pada tahun 2019 mencapai Rp3,40 triliun untuk volume sebanyak 4,28 juta KL dari penyaluran sebanyak 6,37 juta KL.

Namun demikian untuk mendorong kinerja BPDPKS lebih baik ke depan serta sesuai dengan maksud didirikannya BPDPKS serta harapan *stakeholders*, maka terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian diantaranya:

1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas dana yang telah disalurkan dan hal ini sejalan dengan rekomendasi BPK dan auditor eksternal;
2. Diharapkan indikator keberhasilan BPDPKS sebaiknya diukur sejalan dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan oleh BPDPKS.

In terms of financial performance, OPPFMA recorded funding and fund management of Rp1.45 trillion from the income of fund management. This income declined by 90.33% compared to 2018, which was Rp15.42 trillion.

The Supervisory Board strives to support the Biodiesel Mandatory Program. The distribution of biodiesel incentive funds in 2019 amounted to Rp3.40 trillion for 4.28 million KL, from the total distribution of 6.37 million KL.

However, to encourage OPPFMA's performance to improve in the future, and in accordance with the purpose of OPPFMA's establishment and the expectations of stakeholders, there are several key focuses, including:

1. Monitoring and evaluation of fund disbursed, in compliance with the recommendations of the BPK and the external auditors;
2. OPPFMA's achievement indicators shall be assessed in line with the characteristics of the activities conducted by OPPFMA.

Pandangan Atas Prospek Usaha

View on Business Prospects

Memasuki tahun 2020, industri sawit menghadapi tantangan berat terutama dari anomali harga minyak mentah. Kombinasi jatuhnya harga minyak dan meningkatnya mandatori biodiesel dari B20 menjadi B30 menyebabkan kebutuhan dana untuk insentif biodiesel naik drastis, melebihi pendapatan yang diterima oleh BPDPKS dari pungutan ekspor.

Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan B30 pada 2020, menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sangat serius dan dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap harga dan perdagangan minyak nabati dunia. Kebutuhan dalam negeri 2020 diperkirakan mencapai (8,8) juta ton untuk biodiesel yang akan mempengaruhi *supply-demand global*.

Going forward to 2020, the palm oil industry is facing tough challenges, especially from the crude oil price anomaly. The combination of declining oil prices and the increasing mandatory biodiesel from B20 to B30 caused the funds for biodiesel incentives to increase drastically, exceeding the income received by OPPFMA from export levies.

The government's commitment to implementing B30 in 2020 demonstrates to the world that Indonesia is very serious and its impact will greatly affect price and the global vegetable oil trade. In 2020, domestic demand is estimated to reach 8.8 million tons for biodiesel that will affect the global supply-demand.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS

Laporan Keuangan Audited

Sambutan Dewan Pengawas Supervisory Board's Report

Meskipun kondisi ekonomi dunia tahun 2020 masih belum menentu karena adanya pandemi covid-19, perang dagang USA-China belum berakhir, masih adanya tuntutan *sustainability* di EU, peningkatan penggunaan biofuel di dalam negeri, semakin banyaknya perusahaan yang bersertifikasi ISPO dan terbukanya tujuan-tujuan ekspor baru akan lebih menjamin pasar minyak sawit Indonesia di pasar global, sehingga BDPKKS tetap optimis pada tahun 2020 industri sawit Indonesia tetap memiliki prospek yang baik.

Although the global economic conditions in 2020 are uncertain due to the Covid-19 pandemic, the escalated USA-China trade war, demands for sustainability in the EU, and the increased domestic use of biofuels; the increasing number of ISPO-certified companies, and the new export destinations will guarantee Indonesia's palm oil market in the global market. Therefore, OPPFMA remains optimistic that in 2020, Indonesia's palm oil industry will have good prospects.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola BDPKKS

Outlook of OPPFMA's Governance

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik BDPKKS selalu berupaya untuk dapat menerapkan implementasi *Good Governance* pada setiap lini bisnisnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi dan tanggung jawab) guna mempertahankan eksistensi BDPKKS dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang, Dewan Pengawas menilai BDPKKS telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tata kelola organisasi dapat dilaksanakan secara konsisten.

Organ tata kelola BDPKKS dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola BDPKKS dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*. Pengelolaan BDPKKS senantiasa dilandasi dengan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas senantiasa mendorong komitmen BDPKKS untuk menerapkan tata kelola perusahaan di seluruh tingkatan organisasi. BDPKKS secara bertahap melakukan penyempurnaan atas kelengkapan kebijakan dan prosedur di seluruh organisasi BDPKKS dalam rangka mendukung berjalannya sistem operasional mampu sejalan dengan prinsip *good governance*.

Sistem pengendalian internal BDPKKS dilakukan melalui penerapan kebijakan dan prosedur secara konsisten, baik terkait dengan kegiatan usaha BDPKKS, manajemen risiko, perencanaan strategis yang akurat, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas, serta kebijakan akuntansi yang memadai.

OPPFMA strives to implement Good Governance in every line of its business based on the Good Governance principles (transparency, accountability, fairness, independence, and responsibility) to improve the quality of the good governance in order to maintain OPPFMA's existence in facing the upcoming challenges and business competition. The Supervisory Board assessed that OPPFMA has conducted various efforts to ensure that organizational governance can be carried out consistently.

The organs for OPPFMA's governance are established to ensure that the implementation of OPPFMA's governance shall be done effectively with the clear roles and responsibilities to create a check and balance control mechanism. OPPFMA's management is always performed based on good governance principles in accordance with prevailing regulations. The Supervisory Board always encourages OPPFMA's commitment to implementing integrated corporate governance at all levels of the organization. OPPFMA has gradually refined the policies and procedures within the organization to be more comprehensive, in order to be able to support the operational system in line with the principles of good governance.

OPPFMA applies the internal control system through the implementation of policy and procedures consistently, related to its business activities, risk management, strategic planning, segregation of duties, and delegation of authorities, as well as adequate accounting policy.

Konsep Sistem Pengendalian Internal sejalan dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal dari *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO). Dewan Pengawas senantiasa mengawasi kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit.

Dewan Pengawas menyadari bahwa BDPKS tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usahanya, karena itu kami mendorong peningkatan kemampuan di bidang manajemen risiko agar mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang akan dihadapi. Kami meyakini bahwa dengan tata kelola yang semakin baik, maka BDPKS akan mampu mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.

The concept of an Internal Control System is in line with the Internal Control System framework of the Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO). The Supervisory Board supervises the adequacy and fairness in the preparation of financial statements and risk management, with due regards to the prudent principle, assisted by the Audit Committee.

The Supervisory Board understands that OPPFMA has inherent business risks that may affect its business activities. Therefore, we encourage capacity building in risk management to be able to identify and mitigate the risks that will be faced. We believe that with better governance, OPPFMA will be able to achieve sustainable growth and provide added value to all stakeholders.

Komite di Bawah Dewan Pengawas

Committees Reporting Directly to the Supervisory Board

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Anggota sesuai dengan Keputusan Direktur Utama BDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tentang Pembentukan Komite Audit pada BDPKS. Komite Audit bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal maupun auditor eksternal serta memastikan kebenaran dan keandalan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar dan aturan yang berlaku sehingga Dewan Pengawas senantiasa terupdate dan dapat memberikan arahan yang tepat kepada Direksi. Selain itu, Dewan Pengawas mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas yang bertugas memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Pengawas dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas.

The Supervisory Board is assisted by an Audit Committee consisting of 1 Chairman and 2 Members in conducting its supervisory function, in accordance with the Decree of the President Director of OPPFMA No. KEP-08/DPKS/2016 on the Establishment of an Audit Committee at OPPFMA. The Audit Committee is responsible for assisting the Supervisory Board in ensuring the effectiveness of internal control carried out by internal auditors and external auditors, as well as ensuring the accountability and reliability of financial statements and other financial information, to ensure compliance with prevailing standards and regulations, thereby updating the Supervisory Board to provide appropriate direction to the Board of Directors. In addition, Supervisory Board appointed a Secretary of the Supervisory Board who functions to provide administrative and secretarial support to the Supervisory Board in facilitating the implementation of the Supervisory Board's duties.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Sambutan Dewan Pengawas Supervisory Board's Report

Komposisi Dewan Pengawas

Composition of the Supervisory Board

Selama tahun 2019 komposisi Dewan Pengawas mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang, Sdri. Arlinda dan Sdr. Panggah Susanto serta mengangkat Sdr. Kasan, Sdr. Achmad Sigit Dwiwahjono, Djoko Siswanto berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2019 tanggal 3 Januari 2019 dan Sdr. Kasdi Subagyono berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 605./KMK.05/2019 tanggal 1 Agustus 2019 sebagai Dewan Pengawas yang baru. Sehingga komposisi Dewan Pengawas BPDPKS per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

In 2019, the composition of the Supervisory Board changed. Based on the Decree of the Minister of Finance No. 4/KMK.05/2019 dated 3 January 2019, Mr. Bambang, Mrs. Arlinda, and Mr. Panggah Susanto were dismissed honorably, and Mr. Kasan, Mr. Achmad Sigit Dwiwahjono, and Mr. Djoko Siswanto were appointed as the new Supervisory Board. Based on the Decree of the Minister of Finance No. 605./KMK.05/2019 dated 1 August 2019, Mr. Kasdi Subagyono was appointed as the new Supervisory Board. Therefore, the composition of the Supervisory Board OPPFMA as of 31 December 2019 is as follows:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Representatif Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Profesional Professional	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015
Loso Judijanto	Anggota Member	Profesional Professional	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015
Joko Supriyono	Anggota Member	Profesional/GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Professional/GAPKI (Indonesian Palm Oil Assosiation)	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015
Musdhalifah Machmud	Anggota Member	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Ministry for the Economic Affairs	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2018 Tanggal 6 Juni 2018 Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018
Heru Pambudi	Anggota Member	Kementerian Keuangan Ministry of Finance	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2018 Tanggal 6 Juni 2018 Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Representatif Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Djoko Siswanto	Anggota Member	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ministry of Energy and Mineral Resources	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 692/KMK.05/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 Minister of Finance's Decree No. 692/KMK.05/2018 dated 16 October 2018
Kasan Muhri	Anggota Member	Kementerian Perdagangan Ministry of Trade	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Minister of Finance's Decree No. 4/KMK.05/2019 dated 3 January 2019
Achmad Sigit Dwiwahjono	Anggota Member	Kementerian Perindustrian Ministry of Industry	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Minister of Finance's Decree No. 4/KMK.05/2019 dated 3 January 2019
Kasdi Subagyo	Anggota Member	Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 605/KMK.05/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 Minister of Finance's Decree No. 605/KMK.05/2019 dated 1 August 2019

Setelah berakhirnya tahun buku dan pada saat laporan tahunan ini disusun, telah terjadi perubahan komposisi Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020, dimana Evita H Legowo, Dadan Kusdiana, Indrasari Wisnu Wardhan, Abdul Rochim dan Taufik Mappaenre masing-masing menggantikan Rusman Heriawan, Djoko Siswanto, Kasan Muhri, Achmad Sigit Dwiwahjono dan Loso Judijanto. Sehingga komposisi diakhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

After the end of the 2019 fiscal year, and when this annual report was formulated, there was changes to the composition of OPPFMA's Supervisory Board based on the Minister of Finance Decree No. 499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020, in which Evita H Legowo, Dadan Kusdiana, Indrasari Wisnu Wardhan, Abdul Rochim, and Taufik Mappaenre, replaced Rusman Heriawan, Djoko Siswanto, Kasan Muhri, Achmad Sigit Dwiwahjono, and Loso Judijanto respectively. Therefore, the composition at the end of 2020 is as follows:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Representatif Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Evita H Legowo	Ketua Chairman	Profesional Professional	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 Tanggal 4 November 2020 Minister of Finance's Decree No. 499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020
Musdhalifah Machmud	Anggota Member	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Ministry for the Economic Affairs	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:454/KMK.05/ 2018 Tanggal 6 Juni 2018. Minister of Finance's Decree No. 499/KMK.05/2019 dated 4 November 2020, superseded the Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 Juni 2018.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Sambutan Dewan Pengawas Supervisory Board's Report

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Representatif Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Heru Pambudi	Anggota Member	Kementerian Keuangan Ministry of Finance	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:454/KMK.05/ 2018 Tanggal 6 Juni 2018. Minister of Finance's Decree No. 499/KMK.05/2019 dated 4 November 2020, superseded the Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 Juny 2018.
Kasdi Subagyo	Anggota Member	Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 605/KMK.05/2019 Tanggal 1 Agustus 2019. Minister of Finance's Decree No. 499/KMK.05/2019 dated 4 November 2020, superseded the Minister of Finance's Decree No. 605/KMK.05/2019 dated 1 August 2019.
Dadan Kusdiana	Anggota Member	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ministry of Energy and Mineral Resources	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 Tanggal 4 November 2020 Minister of Finance's Decree No. 499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020
Indrasari Wisnu Wardhana	Anggota Member	Kementerian Perdagangan Ministry of Trade	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 Tanggal 4 November 2020 Minister of Finance's Decree No. 499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020
Abdul Rochim	Anggota Member	Kementerian Perindustrian Ministry of Industry	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 Tanggal 4 November 2020 Minister of Finance's Decree No. 499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020
Taufik Mappaenre	Anggota Member	Profesional Professional	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 Tanggal 4 November 2020 Minister of Finance's Decree No. 499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020
Joko Supriyono	Anggota Member	Profesional/GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Professional/GAPKI (Indonesian Palm Oil Assosiation)	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015. Minister of Finance's Decree No. 499/KMK.05/2019 dated 4 November 2020, superseded the Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015.

Komposisi tersebut telah mempertimbangkan aspek keberagaman dalam proses pengambilan keputusan agar dapat berjalan secara efektif. Disamping itu, secara berkesinambungan Dewan Pengawas terus meningkatkan soliditas internal, melalui peran aktif pengawasan dan penasehatan terhadap pengelolaan BPDPKS untuk meningkatkan pencapaian kinerja BPDPKS di tahun-tahun mendatang.

The composition has considered the diversity aspect to ensure that the decision-making process runs effectively. In addition, the Supervisory Board continuously enhance internal solidity through supervisory and advisory roles on OPPFMA's management to improve OPPFMA's performance achievement in the upcoming years.

Ucapan Terima Kasih

Acknowledgments

Kami memberikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh pegawai yang telah bahu membahu bekerja keras sehingga BPDPKS masih dapat menjaga kesinambungan operasional BPDPKS di tengah situasi bisnis yang penuh tantangan di tahun 2019 ini. Demikian juga kami atas nama Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih kepada segenap pemangku kepentingan, atas dukungan dan kepercayaannya kepada kami.

We express our highest appreciation to the Board of Directors and all employees who have worked very hard, ensuring that OPPFMA can maintain the continuity of its operations in the midst of a challenging business situation in 2019. Likewise, we, on behalf of the Supervisory Board, would like to express our gratitude to all stakeholders for their support and confidence in us.

Jakarta, 15 Desember 2020 15 December 2020
Atas Nama Dewan Pengawas On Behalf of the Supervisory Board
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA)



Evita H Legowo*
Ketua Dewan Pengawas
Supervisory Board's Chairman

* Diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020.
Appointed based on the Minister of Finance's Decree No. 499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Profil Dewan Pengawas

Supervisory Board's Profiles

Selama tahun 2019 komposisi Dewan Pengawas BPDPKS mengalami perubahan, yaitu dengan adanya pengangkatan Sdr. Kasan, Sdr. Achmad Sigit Dwiwahjono, Sdr. Kasdi Subagyono sebagai anggota Dewan Pengawas dan pemberhentian Sdr. Bambang, Sdri. Arlinda dan Sdr. Panggah Susanto sebagai anggota Dewan Pengawas, sehingga susunan Dewan Pengawas BPDPKS per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

In 2019, the composition of OPPFMA's Supervisory Board has changed, i.e. by the appointment of Mr. Kasan, Mr. Achmad Sigit Dwiwahjono, Mr. Kasdi Subagyono, as members of the Supervisory Board, and the dismissal of Mr. Bambang, Mrs. Arlinda, and Mr. Panggah Susanto as members of the Supervisory Board. Therefore, the composition of OPPFMA's Supervisory Board as of 31 December 2019 is as follows:



Rusman Heriawan*

Ketua Chairman

Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, 4 November 1951 (68 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BDPKKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Indonesian Citizen, born in Bogor, 4 November 1951 (68 years), domiciled in Jakarta. Served as Chairman of the Supervisory Board of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015

Memperoleh gelar Diploma Tiga di Akademi Statistik, (AIS) Jakarta (1974), Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1983), meraih gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (PWD) (2002) dan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (2004).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Kepala Badan Pusat Statistik (2006 - 2011), Deputi Bidang Statistik Sosial (2004 - 2006), Direktur Statistik Perdagangan dan Jasa (2001-2004) dan Peneliti Utama, Balitbang Pertanian-Kementerian Pertanian, (2006 s.d. sekarang) Platform Advisor on Indonesia Sustainable Palm Oil, UNDP.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Obtained a Young Diploma at the Statistics Academy, (AIS) Jakarta (1974), Bachelor of Economics from the University of Indonesia (1983), Master of Regional and Rural Planning (PWD) (2002), and a Doctorate's degree from Bogor Agricultural Institute (2004).

During his career, he was trusted to hold various important positions, including: Head of the Statistics Indonesia (2006-2011), Deputy for Social Statistics (2004-2006), Director of Trade and Services Statistics (2001-2004), and Main Researcher, Agriculture Research and Development - Ministry of Agriculture (2006-present), Platform Advisor on Indonesia Sustainable Palm Oil, UNDP.

He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS

Laporan Keuangan Audited

Profil Dewan Pengawas Supervisory Board's Profiles



Loso Judijanto*

Anggota Member

Warga Negara Indonesia, Lahir di Magetan, 19 Januari 1971 (48 tahun), berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Indonesian Citizen, born in Magetan, 19 January 1971 (48 years), domiciled in Bekasi. Served as a Member of the Supervisory Board of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015.

Meraih gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (1994), dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (1995) dan memperoleh gelar Master of Statistics The University of New South Wales, Sydney, Australia (1998).

Berbagai pengalaman profesional beliau sejak tahun 1995 - 2015 yaitu: Peneliti Kebijakan Publik di Center for Policy and Implementation Studies (Oktober 1995 - Juni 1996), Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (Januari 1999 - Desember 2003), Partner and Managing Partner - SDP Corporate Governance Specialists (Januari 2001 - November 2004), Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (November 2004 - Maret 2007), Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Desember 2007 - Mei 2009), Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Mei 2009 - Februari 2011), Komisaris Independen PT Bank Bukopin Tbk (Maret 2009 - Maret 2010) dan Ketua Komite Risk Management Oversight PT Bank Bukopin Tbk, Komisaris PT Telkomsel (Juli 2007 - Mei 2012), Komite Audit PT Indonesia Infrastructure Finance (2012 - 2014), PT Berau Coal Energy Tbk (2010 - 2014), PT Trimegah Securities Tbk (2010 - 2014), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007 - 2009) dan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Oktober 2014 - Agustus 2015). Staf Khusus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Agustus 2015 - Agustus 2016), dan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Agustus 2016 - sekarang). Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Obtained a Bachelor of Science from Bogor Agricultural Institute (1994), and Master of Management from the University of Indonesia (1995), and a Master of Statistics from the University of New South Wales, Sydney, Australia (1998).

His various professional experiences from 1995-2015 cover: Public Policy Researcher at the Center for Policy and Implementation Studies (October 1995 - June 1996), Secretary of the Board of Commissioners of PT Pupuk Iskandar Muda (January 1999 - December 2003), Partner and Managing Partner - SDP Corporate Governance Specialists (January 2001 - November 2004), Special Staff of the Minister of Communication and Information Technology (November 2004 - March 2007), Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (December 2007 - May 2009), Expert Staff of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (May 2009 - February 2011), Independent Commissioner of PT Bank Bukopin Tbk, and Chairman of the Risk Management Oversight Committee of PT Bank Bukopin Tbk (March 2009 - March 2010), Commissioner of PT Telkomsel (July 2007 - May 2012), Audit Committee of PT Indonesia Infrastructure Finance (2012-2014), PT Berau Coal Energy Tbk (2010-2014), PT Trimegah Securities Tbk (2010-2014), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007-2009), and Special Staff of the Coordinating Minister for Economic Affairs (October 2014 - August 2015). Special Staff of the State Minister for National Development Planning/Head of Bappenas (August 2015 - August 2016), and Special Staff of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (August 2016 - present). He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Joko Supriyono

Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, 20 Mei 1962 (57 tahun), berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Indonesian Citizen, born in Nganjuk, 20 May 1962 (57 years), domiciled in Bekasi. Served as a Member of the Supervisory Board of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015.



Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1986).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Asisten Afdeling di PT Perkebunan II, Medan (1986 - 1994), Tenaga Instruktur di PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986-1994). Selama kurun waktu tahun 1995 sampai sekarang menduduki beberapa jabatan di PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai Departemen Head-Human Resources (1995 - 1999), Division Head - Human Resources (2000 - 2002), Area Director - Riau Region (2002 - 2005), Deputy Director - Operation (2005 - 2007), Director - Human Resources (2007 - 2009), Director - Env & Social Responsibility (2009 - 2011), Director in charge of Sustainability and Public Relation, President Director of Sumatera Operation (2011 - 2015), Director in charge of Sustainability and Public Relation, President Commissioner of Sumatera Operation (2015 - sekarang).

Selain itu beliau juga menduduki berbagai jabatan di organisasi profesi antara lain: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau sebagai Ketua (2003-2006), Anggota Komite GAPKI Pusat (2008-2009), Sekretaris Jenderal GAPKI Pusat (2009-2015), Ketua Umum GAPKI Pusat (2015 - sekarang), Ketua Bidang Infrastruktur dan Lahan di Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) (2012 - 2015).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Holds a Bachelor of Mechanical Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1986).

During his career, he was trusted to hold various important positions, including: Afdeling Assistant at PT Perkebunan II, Medan (1986-1994), Instructor at PT Wahana Control Mutu, Jakarta (1986-1994). Since 1995, he held several positions at PT Astra Agro Lestari Tbk as Head of Human Resources (1995-1999), Head of Human Resources (2000-2002), Director of Riau Region (2002-2005), Deputy Director of Operation (2005-2007), Director of Human Resources (2007-2009), Director of Environment & Social Responsibility (2009-2011), Director in charge of Sustainability and Public Relations, President Director of Sumatera Operation (2011-2015), Director in charge of Sustainability and Public Relations, President Commissioner of Sumatera Operation (2015-present).

In addition, he also held various positions in professional organizations: Association of Indonesian Palm Oil Association (IPOA) Riau Branch as Chairman (2003-2006), Member of Central GAPKI Committee (2008-2009), Secretary-General of Central GAPKI (2009-2015), Chairman of Central GAPKI (2015-present), Head of Infrastructure and Land in the Indonesian Palm Oil Board (IPOB) (2012 - 2015).

He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS

Laporan Keuangan Audited

Profil Dewan Pengawas Supervisory Board's Profiles



Mushalifah Machmud

Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, 25 September 1961 (58 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:454/KMK.05/ 2018 Tanggal 6 Juni 2018. Indonesian Citizen, born in Ujung Pandang, 25 September 1961 (58 years), domiciled in Jakarta. Served as a Member of the Supervisory Board of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018.

Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Hutan di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1987, menyelesaikan pendidikan Diploma of Monitoring Indonesian Environment di International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC) di Enschede, Netherland pada 1992, dan melanjutkan pendidikan Magister Studi Pembangunan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2003.

Selain menjabat Anggota Dewan Pengawas BDPKKS, beliau juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Perum BULOG dan sebagai Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Has a Bachelor of Forest Management from Bogor Agricultural Institute (IPB) in 1987, Diploma of Monitoring Indonesian Environment from the International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC) at Enschede, Netherland, in 1992, and Master of Development Studies from Institut Teknologi Bandung (ITB) in 2003.

In addition to serving as a Member of OPPFMA's Supervisory Board, she also serves as the Supervisory Board for Perum BULOG and as Deputy for the Food and Agriculture Coordination at the Coordinating Ministry for the Economic Affairs.

She has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Heru Pambudi

Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Bondowoso pada tanggal 11 Februari 1970 (49 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:454/KMK.05/ 2018 Tanggal 6 Juni 2018. Indonesian Citizen, born in Bondowoso, 11 February 1970 (49 years), domiciled in Jakarta. Served as a Member of the Supervisory Board of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018.



Menempuh pendidikan D III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan dengan pendidikan terakhir yaitu S2 di University Of Newcastle, Upon Tyne pada Tahun 2001

Sebelum menduduki jabatan sekarang sebagai Dewan Pengawas BPDPKS, beliau pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai pada tahun 2015. Sejak Juni 2015- sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea Dan Cukai.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He obtained his Young Diploma at the State College of Accountancy in 1991. Then, he continued his education and obtained a Master from the University of Newcastle, Upon Tyne, in 2001

Prior to his current position as OPPFMA's Supervisory Board, he served as Director of Acceptance and Customs and Excise Regulations in 2015. Since June 2015 until now, he has served as Director-General of Customs and Excise.

He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS

Laporan Keuangan Audited

Profil Dewan Pengawas Supervisory Board's Profiles



Djoko Siswanto*

Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Sumedang, 2 Mei 1963 (56 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 692/KMK.05/2018 Tanggal 16 Oktober 2018.

Indonesian Citizen, born in Sumedang, 2 May 1963 (56 years), domiciled in Jakarta. Served as a Member of the Supervisory Board of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 692/KMK.05/2018 dated 16 October 2018.

Memperoleh gelar Diploma Teknik Mesin Politeknik Universitas Indonesia. Lalu, dia melanjutkan kuliah S1 di teknik Perminyakan ITB (1986-1990). Pada 2000-2001, dia lulus di Edinburgh Business School di Herriot Watt University, Inggris. Selain itu juga mengambil S2 Spesialis manajemen migas di Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy, Dundee University, Inggris. Dan meraih gelar Doktor Teknik perminyakan ITB (2006-2011).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, diantaranya: Direktur Teknik di Dirjen Migas pada Direktorat Teknik (1992), selanjutnya dia alih posisi ke Direktorat Eksplorasi dan Produksi Dirjen Migas (1999). Pada 2002, juga merangkap jabatan fungsional Inspektur Migas Dirjen Migas (2003). Karirnya di BPH Migas, dimulai sejak 2004, diawali menjabat sebagai anggota Pokja Direktorat BBM, BPH Migas. Pada 2008, beralih menjadi Kepala Pokja Tarif, Iuran, Akun Pengaturan dan harga Gas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Direktorat Gas Bumi BPH Migas. Pada 2010, dia juga menjadi Pelaksana Harian Direktur Gas Bumi BPH Migas. Pada periode 2012-2013, dia pun menjabat sebagai Direktur BBM BPH Migas. Kemudian, pada 2013 sampai 2015, menjadi sekretaris BPH Migas. Terakhir, dia menjadi Direktur Gas bumi pada periode 2014-2015. Setelah itu, beliau kembali ke Kementerian ESDM dan menjabat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas pada 2015. Lalu, Djoko pun merapat ke SKK Migas sebagai Deputi Pengendalian Pengadaan sampai akhirnya menjadi Dirjen Migas. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Obtained a Diploma in Mechanical Engineering at the Polytechnic of the University of Indonesia. Then, he obtained a Bachelor of Petroleum Engineering from ITB (1986-1990). In 2000-2001, he graduated from Edinburgh Business School at Herriot Watt University, England. In addition, he also took a Master of Oil and Gas Management from the Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy, Dundee University, England. He earned a Doctorate's degree in Petroleum Engineering from ITB (2006-2011).

During his career, he was trusted to hold various important positions, including: Director of Engineering at the Directorate Engineering of the Directorate General of Oil and Gas (1992), then he transferred to the Directorate of Exploration and Production at the Directorate General of Oil and Gas (1999). In 2002, he also held a concurrent position as Inspector of Oil and Gas, Director General of Oil and Gas (2003). His career at BPH Migas started in 2004. He began as a member of the Working Group for the Directorate of Oil Fuel, BPH Migas. In 2008, he became the Head of Working Group on Tariffs, Fees, Regulating Accounts, and Prices for Household Gas and Small Customers, Directorate of Natural Gas of BPH Migas. In 2010, he became the Acting Director of Natural Gas of BPH Migas. In 2012-2013, he also served as Director of Oil Fuel of BPH Migas. In 2013-2015, he became the Secretary of BPH Migas. Finally, he was the Director of Natural Gas in 2014-2015. After that, he returned to the Ministry of Energy and Mineral Resources and became Director of Upstream Oil and Gas Business Development in 2015. Then, Djoko also joined SKK Migas as Deputy of Procurement Control, until he finally became the Director-General of Oil and Gas. He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Kasan Muhri*

Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Sumedang, 27 Juli 1966 (53 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2019 Tanggal 3 Januari 2019.

Indonesian Citizen, born in Sumedang, 27 July 1966 (53 years), domiciled in Jakarta. Served as a Member of the Supervisory Board of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 4/KMK.05/2019 dated 3 January 2019.



Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1990), memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Indonesia (1998) dan mendapatkan gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor (2012).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting di Kementerian Perdagangan, diantaranya: Wakil Direktur Pusat Data Perdagangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, (2005 - 2007), Deputi Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan (2007 - 2010), Sekretaris Eksekutif - Otoritas Komite Perlindungan Indonesia (KPPI) (2012 - 2014), Direktur Centre untuk Perdagangan Luar Negeri Kebijakan, Perdagangan Kebijakan Analisis dan Badan Pengembangan, Departemen Perdagangan (2010 - 2016), Staf Ahli Menteri Perdagangan untuk Hubungan Internasional (2016), Kepala Analisis Perdagangan dan Badan Pembangunan (TREDA), Kementerian Perdagangan, Republik Indonesia (2017 - Sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Obtained a Bachelor of Agriculture from Bogor Agricultural Institute (1990), Master of Management from the University of Indonesia (1998), and a Doctorate's degree from Bogor Agricultural Institute (2012).

During his career, he was trusted to hold various important positions in the Ministry of Trade, including: Deputy Director of the Trade Data Center, Trade Research and Development Agency, Ministry of Trade (2005-2007), Deputy Director of the Center for Foreign Trade Research and Development, Trade Research and Development Agency, Ministry of Trade (2007-2010), Executive Secretary - Indonesian Trade Safeguards Committee (KPPI) (2012-2014), Director of the Center for Foreign Trade Policy, Trade Policy Analysis and Development Agency, Ministry of Trade (2010-2016), Expert Staff of the Minister of Trade for International Relations (2016), Head of Trade Analysis and Agency Development (TREDA), Ministry of Trade, Republic of Indonesia (2017-Present).

He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS

Laporan Keuangan Audited

Profil Dewan Pengawas Supervisory Board's Profiles



Achmad Sigit Dwiwahjono*

Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, usia 11 Desember 1960 (59 tahun), berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2019 Tanggal 3 Januari 2019.

Indonesian Citizen, born in Malang, 11 December 1960 (59 years), domiciled in Bekasi. Served as a Member of the Supervisory Board of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 4/KMK.05/2019 dated 3 January 2019.

Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia Institut Sepuluh November Surabaya (1985), dan Magister Kebijakan Publik di Saitama University, Jepang (1996).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia (2005-2007), Atase Perindustrian di Tokyo (2007-2011), Direktur Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (2011-2015), Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (2015-2016), Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (2016 - sekarang) dan Plt Direktur Jenderal Industri Agro (2018 - sekarang). Selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik (2019 - sekarang) dan Komisaris PT Semen Tonasa (2016-sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He holds a Bachelor of Chemical Engineering from Sepuluh November Institute of Surabaya (1985), and a Master of Public Policy from Saitama University, Japan (1996).

During his career, he was trusted to hold various important positions, including: Head of Program and Evaluation Section of the Secretariat of the Directorate General of Agro and Chemical Industry (2005-2007), Industrial Attache in Tokyo (2007-2011), Director of Industrial Facilitation Development Region III, Directorate General of Industrial Regional Development (2011-2015), Director General of Access to International Industry Resilience and Development (2015-2016), Director General of Chemical, Textile, and Miscellaneous Industries (2016-present), and Acting Director-General of Agro-Industry (2018-present). In addition, he also serves as Commissioner of PT Petrokimia Gresik (2019-present) and Commissioner of PT Semen Tonasa (2016-present).

He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Kasdi Subagyo

Anggota Member

Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, usia 21 Mei 1964 (55 tahun), Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 605/KMK.05/2019 Tanggal 1 Agustus 2019.

Indonesian citizen, born in Nganjuk, 21 May 1964 (55 years). Served as a Member of the Supervisory Board of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 605/KMK.05/2019 dated 1 August 2019.



Mendapatkan gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Tanah dari Universitas Brawijaya (1988), Magister Ilmu Tanah di Ghent University, Belgia (1991) dan meraih gelar Doktor Geosains (Hidrologi) dari Tsukuba University, Jepang (2003).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, diantaranya: Direktur Balai Penelitian Agroklimate dan Hidrologi Indonesia (IAHRI), Bogor (2005-2007), Direktur Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat (BPTP Jawa Barat), Lembang-Bandung (2007-2009), Direktu (2012-2014), r Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah (BPTP Jawa Tengah), Ungaran-Semarang (2009-2010), Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (ICATAD), Bogor (2010-2012), Sekretaris Eksekutif Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian (2012-2014), Direktur Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian (2014-2019). Sejak Februari 2019 - sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

*) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum BPDPKS Evita H Legowo, Dadan Kusdiana, Indrasari Wisnu Wardhan, Abdul Rochim dan Taufik Mappaenre masing-masing menggantikan Rusman Heriawan, Djoko Siswanto, Kasan Muhri, Achmad Sigit Dwiwahjono dan Loso Judijanto

Obtained a Bachelor of Soil Science from Brawijaya University (1988), Master of Soil Science at Ghent University, Belgium (1991), and Doctor of Geosciences (Hydrology) from Tsukuba University, Japan (2003).

During his career, he was trusted to hold various important positions, including: Director of the Indonesian Center for Agroclimate and Hydrology Research (IAHRI), Bogor (2005-2007), Director of the West Java Agricultural Technology Research Center (BPTP West Java), Lembang-Bandung (2007-2009), Director (2012-2014), Agricultural Technology Research Center in Central Java (BPTP Central Java), Ungaran-Semarang (2009-2010), Director of the Agricultural Technology Center for Research and Development (ICATAD), Bogor (2010-2012), Executive Secretary of the Agricultural Research and Development Agency, Ministry of Agriculture (2012- 2014), Director of Planning Bureau, Sekretariat General, Ministry of Agriculture (2014-2019). Since February 2019, he is the Director-General of Plantation, Ministry of Agriculture.

He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

*) Based on the Minister of Finance Decree No. 499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020 on the Establishment of a Supervisory Board at OPPFMA Public Service Agency, Evita H Legowo, Dadan Kusdiana, Indrasari Wisnu Wardhan, Abdul Rochim, and Taufik Mappaenre, respectively replaced Rusman Heriawan, Djoko Siswanto, Kasan Muhri, Achmad Sigit Dwiwahjono, and Loso Judijanto

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPPPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPPPKS

Tanggung Jawab Sosial BPPPKS

Laporan Keuangan Audited

Laporan Direksi

Board of Directors' Report

EDDY ABDURRACHMAN*

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR



BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY

Sejak dibentuk pada pertengahan 2015 hingga saat ini, BPDPKS telah berhasil melakukan dukungan dana pada berbagai program Pemerintah, antara lain untuk penyaluran dana dukungan program biodiesel, yang dimaksudkan selain untuk mengurangi ketergantungan Indonesia kepada impor minyak solar dan minyak mentah, juga merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk menciptakan stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) di dalam negeri.

Since its establishment in mid-2015, OPPFMA has succeeded in providing financial support for various Government programs, including the support for the biodiesel program, which is intended to reduce Indonesia's dependence on imports of diesel and crude oil. This is also a Government's policy instrument to create stability for Fresh Fruit Bunches (FFB) price domestically.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Laporan Direksi Board of Directors' Report

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dear Distinguished Stakeholders,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kami atas nama Direksi menyampaikan laporan pengelolaan dan pencapaian BPDPKS di tahun kelima berdiri. Hal ini sebagai bukti eksistensi BPDPKS sekaligus kebanggaan atas kepercayaan negara kepada kami dalam mengelola dana perkebunan kelapa sawit yang berperan dalam pengembangan sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini perkenalkan kami melaporkan pengelolaan dan kinerja BPDPKS selama tahun buku 2019 melalui Laporan Tahunan 2019.

With gratitude for the Almighty God, on this occasion, we, on behalf of the Board of Directors, submit a report on OPPFMA's management and achievement in its fifth year after the establishment. This is proof of OPPFMA's existence, as well as pride in the state's trust in us in managing palm oil plantation funds, which play a role in the development of sustainable palm oil as one of Indonesia's strategic commodities. On this good occasion, let us report OPPFMA's management and performance during the 2019 fiscal year in this 2019 Annual Report.

Kinerja BPDPKS OPPFMA Performance

Pada tahun 2019 BPDPKS membukukan pendapatan yang berasal dari penghimpunan dan pengelolaan dana sebesar Rp1,45 triliun, menurun 90,33% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp15,42 triliun yang hanya berasal dari pendapatan atas pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang telah dialokasikan untuk program replanting, pendidikan dan pelatihan petani kelapa sawit, mendanai riset pada sejumlah universitas/lembaga riset, dan telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah dan hak paten serta promosi dan diplomasi sawit, penyaluran dana promosi dan kemitraan. Aset di tahun 2019 sebesar Rp16,63 triliun, menurun 20,71% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20,97 triliun yang disebabkan oleh pemberlakuan tarif Rp0 atas pungutan ekspor Kelapa Sawit, CPO (Crude Palm Oil) dan produk turunannya. Adapun Liabilitas sebesar Rp0,62 triliun menurun 29,51% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp0,88 triliun yang disebabkan oleh HIP Biodiesel yang lebih rendah dari HIP Solar sehingga insentif biodiesel yang dibayarkan hanya berupa komponen ongkos angkut dan PPN. Hal serupa juga terjadi dengan Ekuitas sebesar Rp16,01 triliun, menurun 20,33% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20,09 triliun.

Sejak dibentuk pada pertengahan 2015 hingga saat ini, BPDPKS telah berhasil melakukan dukungan dana pada berbagai program Pemerintah, antara lain untuk penyaluran dana dukungan program biodiesel, yang dimaksudkan selain untuk mengurangi ketergantungan Indonesia kepada impor minyak solar dan minyak mentah, juga merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk menciptakan stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) di dalam negeri.

In 2019, OPPFMA recorded income from funding and fund management of Rp1.45 trillion, decreased by 90.33% compared to 2018, which was Rp15.42 trillion from the income of the management of palm oil plantation funds that had been allocated for the replanting, smallholders' education and training, funding research at various universities/research institutions. The research fund also has produced various scientific publications and patent rights. The palm oil promotion and diplomacy, and promotion and partnership funds. BPDPKS assets in 2019 amounted to Rp16.63 trillions, decreased by 20.71% compared to 2018, which was Rp20.97 trillion due to the imposition of Rp0 tariff on export levies on Palm Oil, CPO (Crude Palm Oil), and its derivative products. Meanwhile, Liabilities amounted to Rp0.62 trillion, decreased by 29.51% compared to 2018, which was Rp0.88 trillion due to due to lower HIP Biodiesel compared to HIP Solar, thus the biodiesel incentives paid was in the form of transportation cost and VAT. Similarly, Equity amounted to Rp16.01 trillion, decreased by 20.33% compared to 2018 of Rp20.09 trillion

Since its establishment in mid-2015, OPPFMA has succeeded in providing financial support for various Government programs, including the support for the biodiesel program, which is intended to reduce Indonesia's dependence on imports of diesel and crude oil. This is also a Government's policy instrument to create stability for Fresh Fruit Bunches (FFB) price domestically.

Dengan kemampuan menyerap kelebihan CPO di pasar domestik, program biodiesel telah mendorong keseimbangan pasar menuju tingkat harga yang lebih baik dibandingkan periode sebelum BPDPKS didirikan. Sejak 2015 sampai saat ini, program biodiesel telah mempertahankan tingkat harga CPO rata-rata di atas USD550/ton. Program yang tidak kalah penting dalam mempertahankan komoditas utama di Indonesia ini adalah program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas kebun swadaya, dan memenuhi permintaan minyak nabati dunia yang diperkirakan akan terus meningkat.

Untuk menyukseskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), BPDPKS turut memberikan dukungan dengan menyalurkan bantuan dana sebanyak Rp25 juta per hektare per petani. Sampai dengan bulan 31 Desember 2019 BPDPKS telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp2,3 triliun dengan luasan lahan sebesar 88.331 Ha dan melibatkan 38.618 pekebun yang tersebar di 21 Propinsi dan 106 Kabupaten di Indonesia. Pencapaian tersebut meningkat drastis, disebabkan adanya penyempurnaan pada proses bisnis dukungan dana peremajaan, antara lain penyederhanaan proses yang semula terdiri dari 14 persyaratan saat ini disimplifikasi menjadi 8 persyaratan. Selain itu, untuk memberi akses yang lebih luas kepada para petani yang membutuhkan dana peremajaan, sejak Juni 2019 BPDPKS telah meluncurkan program Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat *Online* (PSR Online) yang berimplikasi pada terjadinya peningkatan penyaluran dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

BPDPKS juga senantiasa mendukung kemajuan industri sawit nasional khususnya pada sektor penelitian dan pengembangan yang memiliki peran sangat besar dalam memastikan industri sawit Indonesia terus berinovasi dan berkreasi untuk mengimbangi peningkatan permintaan dan tuntutan industri yang berkelanjutan dari pasar dunia. Pada 2019 telah BPDPKS telah menyalurkan dana untuk penelitian dan pengembangan sebesar IDR116,6 miliar yang mencakup aspek bioenergi, budidaya, pangan dan kesehatan, oleokimia dan biomaterial, pasca panen dan pengolahan, sosial ekonomi, bisnis, manajemen, pasar dan tik serta lingkungan.

Sementara itu, untuk penyaluran dana promosi, BPDPKS telah menggunakan dana sebesar Rp74,9 miliar yang digunakan antara lain untuk mendukung upaya Pemerintah RI untuk menghadapi diskriminasi Eropa terhadap sawit dan produk turunannya. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang realisasinya mencapai Rp30,3 miliar. BPDPKS juga aktif dalam dukungan dana guna persiapan program B30 di awal 2020, antara lain melalui dukungan dana untuk keperluan uji coba mesin dan bahan bakar biodiesel termasuk sosialisasi program biodiesel kepada masyarakat.

With the ability to absorb the CPO excess in the domestic market, the biodiesel program has encouraged the market balance towards a better price compared to the period prior to the establishment of OPPFMA. Since 2015, the biodiesel program has maintained an average CPO price level of above USD550/ton. Another flagship program in maintaining the main commodity in Indonesia is the small-scale palm oil replanting program to increase the productivity of independent plantations and meet the world's demand for vegetable oil, which is forecasted to increase.

OPPFMA also provided support by disbursing funds of Rp25 million per hectare per smallholder to ensure the success of the Small-Scale Palm Oil replanting (PSR) Program. As of 31 December 2019, OPPFMA has disbursed PSR funds of Rp2.3 trillion with 88,831 hectares of land and 38,618 smallholders throughout 21 Provinces and 106 Regencies in Indonesia. This achievement has increased drastically, because of the business process improvement in the replanting fund, including process simplification, which originally consisted of 14 requirements, to 8 requirements. In addition, to provide wider access to smallholders who need replanting funds, since June 2019, OPPFMA has launched the Online Small-Scale Palm Oil Replanting (PSR Online) Application, which increased the fund disbursement of Small-Scale Palm Oil replanting (PSR) funds.

OPPFMA always supports the progress of the national palm oil industry, especially in the research and development sector, which has a very big role to ensure that Indonesia's palm oil industry keeps innovating and being creative to balance the increasing demands of the sustainable industry from the world market. In 2019, OPPFMA has disbursed funds of Rp116.6 billion for research and development, covering bioenergy, cultivation, food and health, oleochemicals and biomaterials, post-harvest and processing, socio-economy, business, management, market, ICT, and the environment.

For the promotional fund distribution, OPPFMA spent Rp74.9 billion, which was utilized, among others, to support the effort of the Government of Indonesia to face the European discrimination against palm oil and its derivative products. This number increased compared to 2018, which was Rp30.3 billion. OPPFMA was also active in funding support for the B30 program preparation in early 2020, including providing financial support for the engine testing for biodiesel fuel and disseminating the biodiesel program to the public

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Laporan Direksi Board of Directors' Report

Strategi Usaha

Business Strategy

Tahun 2019, industri sawit mengalami tekanan yang cukup berat, di mana harga *crude palm oil* (CPO) jatuh sampai di bawah harga keekonomiannya. Hal ini tentu sangat berdampak pada harga tandan buah segar di tingkat petani. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk tidak memberlakukan pungutan untuk meringankan beban industri kelapa sawit. Di tengah berbagai kesulitan yang di hadapi di tahun 2019, industri sawit Indonesia tetap berjuang dan mengokohkan kuda-kudanya untuk bertahan serta berkembang. Industri yang menjadi mesin penghasil devisa terbesar Indonesia ini, menghadapi fluktuasi harga yang menurun, produksi yang melimpah dan berbagai tekanan negatif terhadap keberadaan industri kelapa sawit. Seiring dengan perkembangan industri kelapa sawit, muncul permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Produktivitas perkebunan kelapa sawit yang rendah;
2. Biaya produksi yang tinggi
3. Surplus produksi;
4. Hambatan perdagangan di sejumlah kawasan/negara tujuan ekspor;
5. Tekanan kampanye negatif yang makin gencar dan mengancam citra industri sawit;
6. Perubahan profil dan kompetisi pasar minyak nabati dunia.

Untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dana perkebunan kelapa sawit yang dihimpun oleh BPDPKS, dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan:

1. Peremajaan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas melalui pemberian bantuan dana kepada pekebun untuk mengganti tanaman yang sudah tidak produktif dengan tanaman baru menggunakan bibit unggul;
2. Bantuan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yaitu dengan memberikan bantuan kepada pekebun/kelompok pekebun yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Bantuan tersebut dapat berupa benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen, dll. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produksi melalui pemberian bantuan pembangunan jalan kebun, jalan akses ke jalan umum atau pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar dan verifikasi atau penelusuran;

In 2019, the palm oil industry experienced considerable pressure, when the price of crude palm oil (CPO) fell below its economic price. This certainly has an impact on the fresh fruit bunches price for the smallholders. Further, the Government issued a policy not to impose levies to ease the burden on the palm oil industry. Amidst the various difficulties faced in 2019, Indonesia's palm oil industry struggled and strengthened its stance to survive and develop. This industry, which is Indonesia's largest foreign exchange earner, was facing declining price fluctuations, abundant production, and various negative pressures on the existence of the palm oil industry. In line with the development of the palm oil industry, problems raised, which include:

1. Low productivity of palm oil plantations;
2. High production costs;
3. Production surplus;
4. Trade barriers in several export destination regions/countries;
5. More intense negative pressure, which threatened the palm oil industry's image;
6. Changes in the profile and competition of the world vegetable oil market.

To handle the problems mentioned above, the oil palm plantation funds that have been collected by OPPFMA are utilized to carry out the following activities:

1. replanting of palm oil plantations to increase productivity by providing financial assistance to smallholders to replace unproductive plants with new plants using superior seeds;
2. Palm oil plantation facilities and infrastructure assistance, i.e. providing assistance to smallholders/groups of smallholders to increase production, productivity, and quality of palm oil plantations. This assistance can be in the form of seeds, fertilizers, pesticides, post-harvest tools, etc. This activity also has the objective to enhance the competitiveness of production by facilitating the construction of garden roads, access roads to public roads or ports, transportation equipment, agricultural machinery, the establishment of market infrastructure and verification or tracing;



3. Program pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit;
 4. Program penelitian dan pengembangan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dari perkebunan kelapa sawit, pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit, dan peningkatan persepsi positif dari produk kelapa sawit;
 5. Promosi perkebunan melalui yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra nilai produk kelapa sawit, informasi dan memperluas pasar, meningkatkan investasi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan kelapa sawit;
 6. Penciptaan pasar baru untuk menyerap kelebihan *stock* CPO melalui dukungan pemberian insentif pada pada program pencampuran biodiesel.
3. HR Development Program of Palm Oil Plantation;
 4. Research and development programs have the objective to support productivity improvement from palm oil plantations, develop downstream palm oil industries, and enhance positive perceptions of palm oil products;
 5. Promotion of plantations is intended to enhance the image of palm oil products, provide information, and expand markets, increase investment, and develop a marketing center for palm oil plantation commodity;
 6. The creation of new markets to absorb CPO excess by providing incentives for biodiesel blending program.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola

Development of Governance Implementation

Dalam rangka terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, BDPDKS telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tata kelola organisasi dapat dilaksanakan secara konsisten. Praktik GG terus dikembangkan sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implemetasi GG di lingkungan BDPDKS.

Selama tahun 2019, BDPDKS telah melakukan improvement atas beberapa area penting dilakukan dengan meningkatkan kualitas kebijakan dan prosedur kerja, tingkat kepatuhan SDM terhadap prosedur kerja, serta pengawasan yang dilakukan secara berjenjang. Disamping itu, sebagai bentuk komitmen BDPDKS dalam menerapkan tata kelola yang Baik, BDPDKS menyusun kebijakan standar GG yaitu diantaranya adalah *Code of Conduct* sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-628/DPKS/2019 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mulai berlaku dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2019. BDPDKS juga secara bertahap melakukan penyempurnaan atas kelengkapan kebijakan dan prosedur di seluruh organisasi BDPDKS, sehingga strategi BDPDKS dalam pencapaian visi dan misi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Disamping itu, BDPDKS, juga senantiasa berupaya menyampaikan informasi secara tepat waktu, akurat dan lengkap kepada Pemerintah dan *Stakeholders* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara bertahap mengimplementasikan sistem pengawasan internal dan penerapan manajemen risiko mengacu pada standar *best practices*.

In order to continuously improve the quality of good governance principles, OPPFMA has made various efforts to ensure that corporate governance can be implemented consistently. GG practice continues to be developed as a commitment to innovating to improve GG within OPPFMA.

During 2019, OPPFMA has made improvements in several key areas, by enhancing the quality of work policies and procedures, the level of HR compliance with work procedures, and monitoring in stages. In addition, as a form of OPPFMA's commitment to implementing good governance, OPPFMA has formulated GG standard policies, including the Code of Conduct, in accordance with the President Director Decree No. KEP-628/DPKS/2019 on the Code of Conduct within Oil Palm Plantation Fund Management Agency, which came into force and was implemented at the end of the 2019 fiscal year. OPPFMA gradually refines the completeness of policies and procedures within OPPFMA's organization. Thus, OPPFMA's strategy in achieving its vision and mission shall run effectively and efficiently.

In addition, OPPFMA strives to deliver information in a timely, accurate, and comprehensive manner to the Government and Stakeholders in accordance with applicable laws, and gradually implement the internal control system and the risk management implementation according to best practices standards.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS

Laporan Keuangan Audited

Laporan Direksi Board of Directors' Report

Perubahan Komposisi Direksi

Change in Board of Directors' Composition

Selama tahun 2019 jumlah dan komposisi Direksi BDPKKS mengalami perubahan dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian Direksi. Komite Pengarah BDPKKS telah mengangkat Sdr. Sunari menggantikan Sdr. Hendrajat Natawidjaja sebagai Direktur Penghimpunan Dana dan Pengangkatan Sdr. Kabul Wijayanto mengisi jabatan Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana berdasarkan KMK. Selain itu pada Maret 2019, sejak Komite Pengarah BDPKKS memberhentikan Direktur Kemitraan yang semula dijabat oleh Sdr. Tulus Budhianto masih kosong sampai dengan akhir Desember 2019. Sehingga Komposisi Direksi per 31 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tentang Pejabat Pengelola Pada BDPKKS tanggal 19 September 2019 adalah sebagai berikut:

During 2019, the number and composition of OPPFMA's Board of Directors changed with the appointment and dismissal of the Directors. OPPFMA's Steering Committee has appointed Mr. Sunari to replace Mr. Hendrajat Natawidjaja as the Director of Funding, and appointed Mr. Kabul Wijayanto held the position of Director of Fund Planning and Management based on KMK. In addition, in March 2019, OPPFMA's Steering Committee has since dismissed the Director of Partnership, who was originally held by Mr. Tulus Budhianto, and the position is still vacant as of the end of December 2019. Therefore, the composition of the Board of Directors as of 31 December 2019, based on the Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 on the Managing Officers of OPPFMA dated 19 September 2019 is as follows:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Dono Boestami	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019, superseded the Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
Catur Ariyanto Widodo	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372/KMK.01/2016 tanggal 20 Mei 2016 Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019, superseded the Minister of Finance's Decree No. 372/KMK.01/2016 dated 20 May 2016
Kabul Wijayanto	Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana* Director of Fund Planning and Management*	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019
Sunari	Direktur Penghimpunan Dana Director of Funding	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019
Edi Wibowo	Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Disbursement	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019, superseded the Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
-	Direktur Kemitraan* Director of Partnership*	-

* Dijabat oleh Sdr. Tulus Budianto sampai Maret 2019 Position Held by Mr. Tulus Budianto until March 2019

Setelah berakhirnya tahun buku BPDPKS, terjadi perubahan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Badan Layanan Umum BPDPKS dan No. 54/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan pada Badan Layanan Umum BPDPKS, mulai tanggal 2 Maret 2020, Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS masing-masing adalah Eddy Abdurachman dan Zaid Burhan Ibrahim yang menetapkan komposisi Direksi sampai dengan Laporan Tahunan ini disusun, adalah sebagai berikut:

As of the end of OPPFMA's fiscal year, there was a change in the composition of the Board of Directors based on the Minister of Finance's Decree No. 53/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of the President Director of the OPPFMA Public Service Agency and No. 54/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of Position at the OPPFMA Public Service Agency, since 2 March 2020, the President Director and Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management of OPPFMA is Eddy Abdurachman and Zaid Burhan Ibrahim, respectively. Thus, the composition of the Board of Directors as of the compilation of this Annual Report is as follows:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Eddy Abdurachman	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2020 tanggal 2 Maret 2020 Minister of Finance's Decree No. 53/KMK.01/2020 dated 2 March 2020
Zaid Burhan Ibrahim	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.01/2020 tanggal 2 Maret 2020 Minister of Finance's Decree No. 54/KMK.01/2020 dated 2 March 2020
Kabul Wijayanto	Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana* Director of Fund Planning and Management*	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019
Sunari	Direktur Penghimpunan Dana Director of Funding	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019
Edi Wibowo	Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Disbursement	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019, superseded the Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
-	Direktur Kemitraan* Director of Partnership*	-

Atas nama Direksi, kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Dono Boestami, Sdr. Catur Ariyanto Widodo dan Sdr. Tulus Budiato atas dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Direksi BPDPKS dan selamat bergabung kepada jajaran Direksi baru. Kami optimis dengan komposisi yang baru ini akan mampu membawa BPDPKS semakin solidi dan dapat meraih pencapaian dan kinerja yang lebih baik.

On behalf of the Board of Directors, We express our highest appreciation and gratitude to Mr. Dono Boestami, Mr. Catur Ariyanto Widodo, and Mr. Tulus Budiato, for their dedication during their tenure as members of OPPFMA's Board of Directors, and welcomed our new Board of Directors. We are optimistic that this new composition will be able to encourage more solidarity and achieve better achievements and performance of OPPFMA.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Laporan Direksi Board of Directors' Report

Apresiasi Appreciation

Kami mewakili seluruh anggota Direksi, menyampaikan apresiasi sebesar besarnya dan ucapan terima kasih kepada Komite Pengarah selaku pemberi kebijakan atas operasional pelaksanaan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, atas kepercayaan, arahan, dan saran dalam rangka peningkatan kualitas kinerja kami baik di tahun anggaran 2019 maupun untuk tahun-tahun yang akan datang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dewan Pengawas atas arahan dan nasehat yang diberikan sehingga Direksi mampu mengelola dan mencapai target sesuai strategi bisnis yang telah ditetapkan.

We, on behalf of the Board of Directors, express our great appreciation and gratitude to the Steering Committee, as the policy provider for the operations of palm oil plantation fund management, for its trust, direction, and suggestions to improve the quality of our performance, in the 2019 fiscal year and for upcoming years. We also would like to express our gratitude to all levels of the Supervisory Board for the instructions and advice provided so that the Board of Directors was able to manage and achieve targets in accordance with the established business strategy.

Jakarta, 15 Desember 2020 15 December 2020
Atas Nama Direksi On behalf of the Board of Directors
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Oil Palm Plantation Fund Management Agency



Eddy Abdurrachman*

Direktur Utama President Director

*) Diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.01/2020 tanggal 2 Maret 2020 menggantikan Sdr. Dono Boestami
Appointed based on the Minister of Finance's Decree No. 53/KMK.01/2020 dated 2 March 2020, replacing Mr. Dono Boestami

Profil Direksi

Board of Directors' Profiles



Dono Boestami*

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 13 Januari 1963 (56 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Utama BDPKKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017.

Indonesian citizen, born in Surabaya, East Java, 13 January 1963 (56 old years), domiciled in Jakarta. Served as President Director of OPPFMA base on Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019, superseded the Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017.

Meraih gelar Bachelor of Science Civil Engineering (1985) dan Master of Science Project & Construction Management dari Golden Gate University, Amerika Serikat (1989).

Beliau memiliki banyak pengalaman di dunia finansial dan pasar modal. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat antara lain Direktur Investment Banking pada PT Danareksa (Persero) (2001); Direktur Utama PT Citigroup Securities Indonesia (2004); Direktur PT Barclays Capital Securities Indonesia (2006); Direktur Keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2011), dan Direktur Keuangan PT Atlas Resources Tbk (2012). Selain itu, Beliau juga sempat mengenyam pengalaman sebagai anggota Komite Pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) (2008-2011). Jabatan terakhir adalah Direktur PT MRT (2013 - 2017), sebelum diangkat sebagai Direktur Utama BDPKKS.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He obtained a Bachelor of Science in Civil Engineering (1985), and a Master of Science in Project & Construction Management from Golden Gate University, the United States (1989).

He has a lot of experience in the financial world and capital markets. Several important positions that he held include Director of Investment Banking at PT Danareksa (Persero) (2001); President Director of PT Citigroup Securities Indonesia (2004); Director of PT Barclays Capital Securities Indonesia (2006); Director of Finance of PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2011), and Director of Finance of PT Atlas Resources Tbk (2012). In addition, he was a member of the Indonesia Stock Exchange Listing Committee (IDX) (2008-2011). His last position before being appointed as President Director of OPPFMA was the Director of PT MRT (2013 - 2017).

He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS

Laporan Keuangan Audited

Profil Direksi Board of Directors' Profiles



Catur Ariyanto Widodo*

Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Director of Finance, General Affairs, Compliance,
and Risk Management

Warga Negara Indonesia, lahir di Ungaran, Jawa Tengah, 22 Februari 1971 (48 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372/KMK.01/2016 tanggal 20 Mei 2016. Indonesian citizen, born in Ungaran, Central Java, 22 February 1971 (48 years), domiciled in Jakarta. Serves as Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019, superseded the Minister of Finance's Decree No. 372/KMK.01/2016 dated 20 May 2016.

Meraih gelar Diploma Tiga di Sekolah Tinggi Akuntansi (STAN) (1993), Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1999). Pada tahun 2005 menyelesaikan Program Master of International and Development Economic pada The Australian National University (ANU), Australia.

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting di Ditjen Perbendaharaan, yaitu Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Instansi III, Kepala Seksi Analisis Laporan Keuangan, Kabid Pembinaan Perbendaharaan, Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU, Kasubdit PPK BLU II, Kabag Umum Kanwil DJPB Prov. Sulbar dan jabatan terakhir sebagai Kakanwil DJPB Prov. Sulbar sebelum diangkat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKKS.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Obtained a Young Diploma at the State College of Accountancy (STAN) (1993), Bachelor of Economics, University of Indonesia (1999). In 2005, he completed his Master of International and Economic Development Program at the Australian National University (ANU), Australia.

During his pioneering career, he was entrusted with various important positions at the Directorate General of Treasury, i.e. Head of Accounting Development Agency Section III, Head of Financial Report Analysis Section, Head of Treasury Development Division, Head of Sub-Directorate of BLU Performance Development, Head of Sub-Directorate of PPK BLU II, Head of General Office of West Sulawesi DJPB, and his last position as Head of Regional Office of West Sulawesi DJPB, before being appointed as Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management of OPPFMA.

He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Kabul Wijayanto

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana
Director of Fund Planning and Management

Warga Negara Indonesia, lahir di Demak, Jawa Tengah, 25 Maret 1971 (48 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPD PKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019.

Indonesian citizen, born in Demak, Central Java, 25 March 1971 (48 years), domiciled in Jakarta. Served as Director of Fund Planning and Management of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019.



Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro jurusan Administrasi Negara (1995). Selanjutnya meraih gelar Pascasarjana Bidang Manajemen Keuangan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2012).

He completed his undergraduate at Diponegoro University in State Administration (1995). Further, he held a Master of Financial Management from Pembangunan Nasional Veteran University in Jakarta (2012).

Sebelum diangkat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan.

Before he was appointed as the Director of Fund Planning and Management, he served as Head of the Sub-directorate of Local Government Investment/Regional-Owned Enterprises at the Directorate of Investment Management Systems, Ministry of Finance.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Profil Direksi Board of Directors' Profiles



Sunari

Direktur Penghimpunan Dana
Director of Funding

Warga Negara Indonesia, lahir di Indramayu, Jawa Barat, 6 Oktober 1964 (55 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019.

Indonesian Citizen, born in Indramayu, West Java, 6 October 1964 (55 years), domiciled in Jakarta. Served as Director of Funding of OPPFMA based on the Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019.

Meraih gelar Sarjana Teknologi Benih di Institut Pertanian Bogor (IPB) (1988), melanjutkan Pendidikan S2 pada Bidang Ekonomi Pertanian IPB (1993). Menyelesaikan pendidikan S3 pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Universitas Padjadjaran (2005).

Sebelum diangkat sebagai Direktur Penghimpunan Dana, beliau menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Perkebunan dan Hortikultura - Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Obtained a Bachelor of Seed Technology from Bogor Agricultural Institute (IPB) (1988), and continued his Master of Agricultural Economics from IPB (1993). Completed his Doctor of Natural Resources and Environmental Management at Padjadjaran University (2005).

Before being appointed as Director of Funding, he served as Head of the Sub-Directorate of Plantation and Horticulture - Directorate of Food and Agriculture, Ministry of National Development Planning/Bappenas. He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Edi Wibowo

Direktur Penyaluran Dana
Director of Fund Disbursement

Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, Jawa Timur, 1964 Oktober 19673 (52 tahun), berdomisili di Bogor. Menjabat sebagai Direktur Penyaluran Dana BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017. Indonesian citizen, born in Madiun, East Java, 4 October 1967 (52 old years), domiciled in Bogor. Served as Director of of Fund Disbursement of OPPFMA base on Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019, superseded the Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017.



Meraih gelar Sarjana Mekanisasi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1991), mengikuti Profesional Development on Energy - di Chicago- USA 1994 dan 1996, meraih gelar Master Teknik pada Jurusan Teknik Mesin - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (2002).

Sebelum menjadi Direktur Penyaluran Dana di BPDPKS mulai Februari 2017, Edi Wibowo adalah seorang peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas "Lemigas" sejak tahun 1992, dan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Pemanfaatan Energi di Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional sejak 2009. Sejak 2011 ia menjadi Kepala SubDirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi-DJ EBTKE KESDM, Kepala SubDirektorat Pengusahaan dan Pengawasan Bioenergi DJ EBTKE KESDM sejak Juni 2015 dan Kepala SubDirektorat Program Bioenergi DJ EBTKE KESDM sejak Juli 2016. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya

Obtained a Bachelor of Agricultural Mechanization from Bogor Agricultural Institute (1991), attended Professional Development on Energy in Chicago, USA, in 1994 and 1996, held a Master of Mechanical Engineering from the Faculty of Engineering, University of Indonesia (2002).

Prior to being the Director of Fund Disbursement of OPPFMA since February 2017, Edi Wibowo was a researcher at the Research and Development Center of Oil and Gas Technology "Lemigas" since 1992, and Head of the Sub-Division of Facilitation of Energy Utilization Policy at the National Energy Council Secretariat General since 2009. Since 2011, he was the Head of the Sub-Directorate of Bioenergy Engineering and Environmental at DG NREEC, Ministry of Energy and Mineral Resources, Head of the Sub-Directorate of Bioenergy Concession and Supervision of the DG NREEC, Ministry of Energy and Mineral Resources since June 2015, and Head of Sub-Directorate of Bioenergy Program, DG NREEC, MEMR, since July 2016. He has no affiliation with other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Profil Direksi Board of Directors' Profiles

Vacant

Direktur Kemitraan

Director of Partnership

Di jabat oleh Sdr. Tulus Budiando sampai Maret 2019
Held by Mr. Tulus Budiando until March 2019

*) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Badan Layanan Umum BPDPKS dan No. 54/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan pada Badan Layanan Umum BPDPKS, efektif tanggal 2 Maret 2020, Eddy Abdurrachman dan Zaid Burhan Ibrahim masing-masing menggantikan Dono Boestami dan Catur Ariyanto Widodo.

*) Based on the Minister of Finance Decree No. 53/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of the President Director of the OPPFMA Public Service Agency and No. 54/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of Positions at OPPFMA Public Service Agency, effective 2 March 2020, Eddy Abdurrachman and Zaid Burhan Ibrahim replaced Dono Boestami and Catur Ariyanto Widodo respectively.



Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019

Statement of Accountability to 2019 Annual Report



Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 Responsibility for the 2019 Annual Report

Dewan Pengawas dan Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertanggung jawab atas Laporan Tahunan ini, berikut informasi keuangan dan informasi lain yang terkait, yang telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing dibawah ini.

The Supervisory Board and the Board of Directors of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency hold the accountability for this Annual Report, including the financial statements and other relevant information, which have been approved by all members of the Supervisory Board and the Board of Directors by affixing their signatures below.

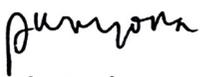
Jakarta, 15 Desember 2020
15 December 2020



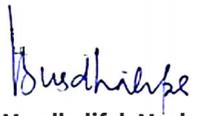
Rusman Heriawan*
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board



Loso Judijanto*
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



Joko Supriyono
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



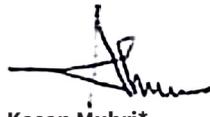
Musdhalifah Machmud
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



Heru Pambudi
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



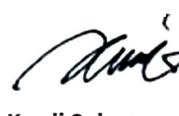
Joko Siswanto*
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



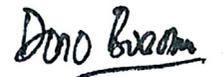
Kasan Muhri*
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



Achmad Sigit Dwiwahjono*
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



Kasdi Subagyono
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board



Dono Boestami**
Direktur Utama
President Director



Catur Ariyanto Widodo**
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan
dan Manajemen Risiko
Director of Finance, General Affairs,
Compliance and Risk Management



Kabul Wijayanto
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana
Director of Fund Planning and Management



Sunari
Direktur Penghimpunan Dana
Director of Funding



Edi Wibowo
Direktur Penyaluran Dana
Director of Fund Disbursement

Vacant
Direktur Kemitraan Director of Partnership

*) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum BPD PKS Evita H Legowo, Dadan Kusdiana, Indrasari Wisnu Wardhan, Abdul Rochim dan Taufik Mappaenre masing-masing menggantikan Rusman Heriawan, Djoko Siswanto, Kasan Muhri, Achmad Sigit Dwiwahjono dan Loso Judijanto.

Based on the Minister of Finance Decree No. 499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020 on the Establishment of a Supervisory Board at OPPFMA Public Service Agency, Evita H Legowo, Dadan Kusdiana, Indrasari Wisnu Wardhan, Abdul Rochim, and Taufik Mappaenre, respectively replaced Rusman Heriawan, Djoko Siswanto, Kasan Muhri, Achmad Sigit Dwiwahjono, and Loso Judijanto

**) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Badan Layanan Umum BPD PKS dan No. 54/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan pada Badan Layanan Umum BPD PKS, efektif tanggal 2 Maret 2020, Eddy Abdurrachman dan Zaid Burhan Ibrahim masing-masing menggantikan Dono Boestami dan Catur Ariyanto Widodo.

Based on the Minister of Finance Decree No. 53/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of the President Director of the OPPFMA Public Service Agency and No. 54/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of Positions at OPPFMA Public Service Agency, effective 2 March 2020, Eddy Abdurrachman and Zaid Burhan Ibrahim replaced Dono Boestami and Catur Ariyanto Widodo respectively

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPPKS
Tanggung Jawab Sosial BDPPKS
Laporan Keuangan Audited

Profil BDPPKS

OPPFMA'S Profile



**BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY**

OPPFMA'S Governance
OPPFMA'S Social Responsibility
Audited Financial Statements

Background
Report to The Regulators and Stakeholders
OPPFMA'S Profile
Operational & Financial Performance Discussion and Analysis



**BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY**

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Identitas BDPKKS

OPPFMA's Profile



**BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY**

OPPFMA'S Governance
OPPFMA'S Social Responsibility
Audited Financial Statements

Background
Report to The Regulators and Stakeholders
OPPFMA'S Profile
Operational & Financial Performance Discussion and Analysis



Nama Name	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Oil Palm Plantation Fund Management Agency
Nama Panggilan Well-known Name	BPDPKS	OPPFMA
Kegiatan Usaha Business Activities	Menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat dan Dana lain yang sah. Dana yang dihimpun meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya dan iuran.	Collecting, administering, managing, storing, and distributing funds to encourage the development of sustainable palm oil plantations. Fund collection originates from the Business Entrepreneurs of Palm Oil Plantations, Financing Institution Funds, Community Funds, and other legitimate Funds. Funds collected include levies on exports of palm oil plantation commodities and/or derivatives thereof and fees.
Kepemilikan Ownership	Pemerintah Republik Indonesia	Government of the Republic of Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Establishment	10 Juni 2015	10 June 2015
Jumlah Pegawai Employees	90 pegawai	90 employees
Alamat Kantor Office Address	Graha Mandiri Lt.5 Jl. Imam Bonjol No.61, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310	Graha Mandiri Lt.5 Jl. Imam Bonjol No.61, Menteng, Central Jakarta, DKI Jakarta 10310
Website	www.bdpd.or.id	www.bdpd.or.id
Info Kontak Contact Info	Telp: (021) 3983 2095 Email: info@bdpd.or.id ; pengaduan@bdpd.or.id Jam Operasional : Senin - Jumat 07.30 - 17.00 WIB	Phone: (021) 3983 2095 Email: info@bdpd.or.id ; pengaduan@bdpd.or.id Operational Hours: Monday-Friday, 7.30 AM - 5 PM, Western Indonesian Time
Media Sosial Social Media	Twitter : bdpd_sawit Instagram : bdpdkelapasawit Facebook : bdpdsawit Youtube : BLU BDPDsawit	Twitter : bdpd_sawit Instagram : bdpdkelapasawit Facebook : bdpdsawit Youtube : BLU BDPDsawit

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Riwayat Singkat BDPKKS

Brief History of OPPFMA

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKKS) merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit. Pada tanggal 10 Juni 2015, BDPKKS ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Penetapan BDPKKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.

The Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) is a working unit of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the form of a Public Service Agency (BLU) to collect, administer, manage, store, and distribute palm oil plantation funds. On 10 June 2015, OPPFMA was established as a government agency that fully implements the BLU financial pattern through the Minister of Finance Decree No. 113/PMK.01/2015 on the OPPFMA Establishment at the Ministry of Finance as a Government Institution Implementing Financial Management of Public Service Agency comprehensively.

Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas BDPKKS dibentuk Komite Pengarah yang terdiri dari 8 (delapan) kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua) dan 7 (tujuh) lainnya sebagai Anggota antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Komite Pengarah bertugas menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan pengelolaan Dana untuk memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana.

Adapun BDPKKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Komite Pengarah dengan memperhatikan program pemerintah.

To provide directive policy for the OPPFMA's duties, a Steering Committee was established, consisting of eight (8) ministries, i.e. the Coordinating Ministry for Economic Affairs (Chairman) with seven (7) other members, including the Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of State-Owned Enterprises, and Ministry of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency.

The Steering Committee has the duty to formulate policy in collecting and utilizing Fund, including the Fund management policy to provide added value sustainably, as well as to supervise the implementation of such policies of the Fund collection and utilization.

OPPFMA has the duty to manage the Palm Oil Plantation Fund based on the policies established by the Steering Committee with due regard to the government's programs.

BPDPKS memiliki program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang bertujuan mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, *replanting*, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.

Landasan hukum pendirian BPDPKS adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU);
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 jo. PP No. 74 Tahun 2012 tanggal tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 jo. Perpres 24 Tahun 2016 jo. Perpres 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Dana dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
9. Peraturan Menteri Keuangan No 113 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015 tentang Penetapan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)MK No. 650 Tahun 2015 tentang Penetapan BPDPKS sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
11. PMK No. 136 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan BLU BPDPKS.

OPPFMA has a sustainable palm oil development program with the objective to encourage research and development and business promotion, improve industrial development infrastructure, biodiesel development, replanting, increase the number of business partners and the amount of export distribution, as well as educate the community on palm oil plantations.

The legal basis for OPPFMA's establishment is as follows:

1. Law Number 17 of 2003 dated 5 April 2003 on the State Finance;
2. Law Number 1 of 2004 dated 1 January 2004 on the State Treasury;
3. Minister of Finance Regulation No. 92/PMK.05/2011 on the Business and Budget Plan and Budget Execution for Public Service Agency (BLU);
4. Government Regulation No. 23 of 2005 jo. Government Regulation No. 74 of 2012 dated On the Management of Public Service Agency (BLU) Financial
5. The Director-General of Treasury Regulation No. PER-20/PB/2012 on the Technical Guidelines for Formulation of Business and Budget Plan for Public Service Agency's Work Units;
6. Law Number 39 of 2014 dated 17 October 2014 on Plantations;
7. Government Regulation Number 24 of 2015 dated 25 May 2015 on Plantations Funding;
8. Presidential Regulation Number 61 of 2015 dated 25 May 2015 jo. Presidential Regulation No. 24 of 2016 jo. Presidential Regulation No. 66 of 2018 on Funding and Utilization of Oil Palm Plantations Funds;
9. Minister of Finance Regulation Number 113 of 2015 on the Organization and Work Procedure of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA);
10. Minister of Finance Decree No. 650/KMK.05/2015 on the Establishment of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency at the Ministry of Finance as a Government Agency Implementing the Financial Management of the Public Service Agency (BLU).
11. Minister of Finance Regulation No. 136 of 2019 on the Service Tariff of OPPFMA BLU.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Riwayat Singkat BDPKKS Brief History of OPPFMA

Pendapatan BDPKKS dicatat dalam APBN melalui prosedur pengesahan pada akhir periode pelaporan, sehingga pendapatan BDPKKS diakui sebagai pendapatan negara pada saat pengesahan pendapatan tersebut.

OPPFMA's revenue is recorded in the State Budget through a ratification procedure at the end of the reporting period. Thus, OPPFMA's revenue is recognized as state revenue at the time the revenue is ratified.

Jejak Langkah BDPKKS OPPFMA's Milestones

Ketergantungan terhadap BBM impor membuat neraca perdagangan migas defisit
Dependence on imported fuels resulted in oil and gas trade balance deficit

Harga CPO menurun secara signifikan akibat kemerosotan harga minyak mentah dan kelebihan pasokan CPO di pasar domestik. Petani sawit terkena dampak penurunan harga CPO. Program biodiesel tidak berjalan.

CPO prices decreased significantly due to the decline in crude oil prices and CPO excess supply in the domestic market. Palm oil farmers were affected by the CPO price decline. The biodiesel program did not work.

2014

JANUARY
2015

AUGUST
2015

BDPKKS menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dan launching biodiesel B-15. BDPKKS menyalurkan dana subsidi untuk pertama kalinya ke Pertamina. Penetapan denda Rp6000/ liter atas dana subsidi yang wajib dicampur. Tender PSO pertama melalui pembiayaan BDPD sebesar 1,8 juta kilo liter. Harga kelapa sawit meningkat.

OPPFMA signed a Memorandum of Understanding (MoU) of sustainable palm oil development and launching of B-15 biodiesel. OPPFMA disbursed subsidized funds for the first time to Pertamina. Set a fine of Rp6,000/liter for the subsidized funds that must be mixed. First PSO tender through Plantation Fund Management Agency (BPDP) of 1.8 million kiloliters. Palm oil's price increased.

2015-
2018

Pemerintah berupaya mengurangi impor bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM) melalui penetapan mandatory biodiesel pertama (B-1 hingga B-15), peluncuran *Call Center* 14036 untuk informasi mengenai biodiesel B20. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

The Government made various efforts to reduce imports of fossil fuels or oil fuel (BBM) by establishing the first mandatory biodiesel (B-1 up to B-15), launching 14036 Call Center for information on B20 biodiesel. Presidential Regulation Number 66 of 2018 dated 15 August 2018 on the Amendment to Presidential Regulation Number 61 of 2015 on the Funding and Utilization of Oil Palm Plantations Funds.



Sementara untuk pendapatan yang digunakan untuk biaya operasional BDPKKS akan masuk ke realisasi APBN pada saat yang sama dengan pengesahan pendapatan. BDPKKS hanya melaporkan pendapatan tersebut ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan.

The revenue used for OPPFMA's operational costs will be recorded in the State Budget realization at the same time as the revenue ratification. OPPFMA reports the revenue to the Directorate General of Treasury and the Financial Planning Bureau of the Ministry of Finance.

Semua pemangku kepentingan berupaya menjaga stabilitas harga CPO. Kemenko Perekonomian memanggil seluruh pemangku kepentingan di industri Sawit (Kementerian Keuangan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian) dan pelaku industri (pengusaha, perkebunan, biodiesel, otomotif dan petani).

All stakeholders performed efforts to maintain the stability of CPO prices. The Coordinating Ministry for Economic Affairs summoned all stakeholders in the Palm Oil industry (Ministry of Finance, MEMR, Trade, Industry, Agriculture) and industry actors (entrepreneurs, plantations, biodiesel, automotive, and farmers).

Finalisasi regulasi pembentukan BDPKKS Draft regulasi diuji Pemerintah. Finalized the regulation on OPPFMA's establishment, the regulations' draft was tested by the Government.

FEBRUARY 2015

APRIL 2015

JULY 2015

JUNE 2015

MAY 2015

Operasi BDPKKS mulai bejalan. OPPFMA started operating.

BDPKKS resmi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) non struktural OPPFMA officially became a non-structural Public Service Agency (BLU).

Pemerintah menerbitkan BDPKKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

The Government issued OPPFMA in the form of Government Regulations (PP) and Presidential Regulations (Perpres). Presidential Regulation Number 24 of 2016 dated 15 March 2016 on the Amendment to Presidential Regulation Number 61 of 2015 on the Funding and Utilization of Oil Palm Plantations Funds.

2019

Penerapan Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Online secara menyeluruh. Launching Implementasi Program Biodiesel 30 (B30).

Implementation of Palm Oil Replanting (PSR) as a comprehensive online application. Launching of Biodiesel 30 (B30) Program.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Visi Misi dan Tujuan BDPKKS

Vision, Mission, and Objectives of OPPFMA

Visi dan Misi

Vision and Mission

Pengertian visi didefinisikan sebagai suatu gambaran yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Vision is defined as a description that states the ideals or passions of an organization or company to be achieved in the future. Meanwhile, mission is a general effort that will be carried out to realize the vision.

Visi

Vision

Menjadi pengelola dana yang terpercaya dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia

To be a trusted fund manager in the development of sustainable palm oil as one of Indonesia's national strategic commodities for the welfare of the Indonesian

Misi

Mission

Menjalankan kebijakan Pemerintah dalam program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna, secara profesional dan akuntabel.

Implementing government policies in sustainable palm oil development programs by collecting, developing, and disbursing palm oil funds in a professional and accountable manner.

Adapun misi BDPKKS tersebut diterapkan untuk kepentingan:

- Pengembangan sumber daya manusia;
- Penelitian dan pengembangan;
- Promosi;
- Peremajaan;
- Sarana dan prasarana;
- Pemenuhan kebutuhan pangan;
- Hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit;
- Penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

OPPFMA's mission shall be implemented for:

- Human resources development;
- Research and development;
- Promotion;
- Replanting;
- Facilities and infrastructure;
- Fulfillment of food security;
- Downstream of palm oil plantation industry;
- Provision and utilization of biofuels.



Tujuan BDPKKS BDPKKS Objectives

Sebagai Badan Layanan Umum, BDPKKS menghimpun dana dari masyarakat sawit, selanjutnya mengembalikan dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat sawit dalam bentuk layanan berupa program-program untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, antara lain:

As a Public Service Agency, OPPFMA collects funds from the palm oil community, then returns the funding to the palm oil community in the form of services and programs to encourage the development of sustainable palm oil plantations, including:

Tujuan strategis pada RSB 2020 -2024 :
Strategic objective of 2020-2024 RSB:

01

Terjaminnya keberlanjutan dana perkebunan kelapa sawit
Guaranteed sustainability of palm oil plantation fund

02

Terbentuknya stabilisasi harga CPO
Stabilized CPO price

03

Terciptanya peningkatan kesejahteraan bagi pekebun rakyat
Improvement of smallholders' welfare

04

Terciptanya iklim investasi yang positif pada industri sektor hilir
Creation of positive climate of investment for upstream industry

05

Meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kinerja BDPKKS
Enhanced stakeholders' trust to OPPFMA's performance

Maksud pembentukan BDPKKS menghimpun, mengadminstrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat dan Dana lain yang sah. Dana yang dihimpun meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya dan iuran. Selanjutnya dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:

OPPFMA is established to collect, administer, manage, store, and distribute funds in order to encourage the development of sustainable palm oil plantations. Fund collection originates from the Business Entrepreneurs of Palm Oil Plantations, Financing Institution Funds, Community Funds, and other legitimate Funds. Funds collected include levies on exports of palm oil plantation commodities and/or derivatives thereof and fees. The funds collected will be utilized for:

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Visi Misi dan Tujuan BDPKKS Vision, Mission, and Objectives of OPPFMA

- | | | |
|----------|---|---|
| A | <p>▶ Pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme kemandirian dan berdaya saing serta untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.</p> | <p>Development of human resources for palm oil plantations, with the objective to increase knowledge, skills, professionalism, independence, and competitiveness, and to enhance technical, managerial, and entrepreneurial capabilities.</p> |
| B | <p>▶ Penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, dimaksudkan untuk (1) pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit; (2) kebutuhan pangan; (3) hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit; (5) penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.</p> | <p>Research and development of palm oil plantations, with the objective to (1) fulfill the palm oil plantations; (2) fulfill food security; (3) conduct downstreaming of the palm oil plantation industry; (5) provide and utilize biodiesel biofuel.</p> |
| C | <p>▶ Promosi Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk meningkatkan (1) citra nilai produk Kelapa Sawit (2) informasi pasar kelapa sawit, (3) memperluas pasar kelapa sawit, (4) meningkatkan investasi perkebunan kelapa sawit dan atau (5) menumbuh kembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan kelapa sawit;</p> | <p>Promotion of Palm Oil Plantations, with the objective to improve (1) value of Palm Oil products (2) information on the palm oil market, (3) expansion of palm oil market, (4) investment in palm oil plantations, and/or (5) development of marketing of the palm oil plantation commodity;</p> |
| D | <p>▶ Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit serta menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan</p> | <p>Palm Oil Plantation Replanting, with the objective to increase the productivity of palm oil plantations, and to maintain the area of palm oil plantations to be utilized optimally; and</p> |
| E | <p>▶ Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Sarana dan prasarana terdiri atas benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar dan verifikasi atau penelusuran teknis.</p> | <p>Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure, to increase production, productivity, and quality of palm oil plantation products. Facilities and infrastructure, consisting of seeds, fertilizers, pesticides, post-harvest and product processing equipment, roads in the plantation and access roads to public roads and/or ports, means of transportation, agricultural machinery, the establishment of market infrastructure and verification or technical surveillance.</p> |



Tugas, Fungsi dan Strategi BPDPKS Duties, Function, and Strategy of OPPFMA



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

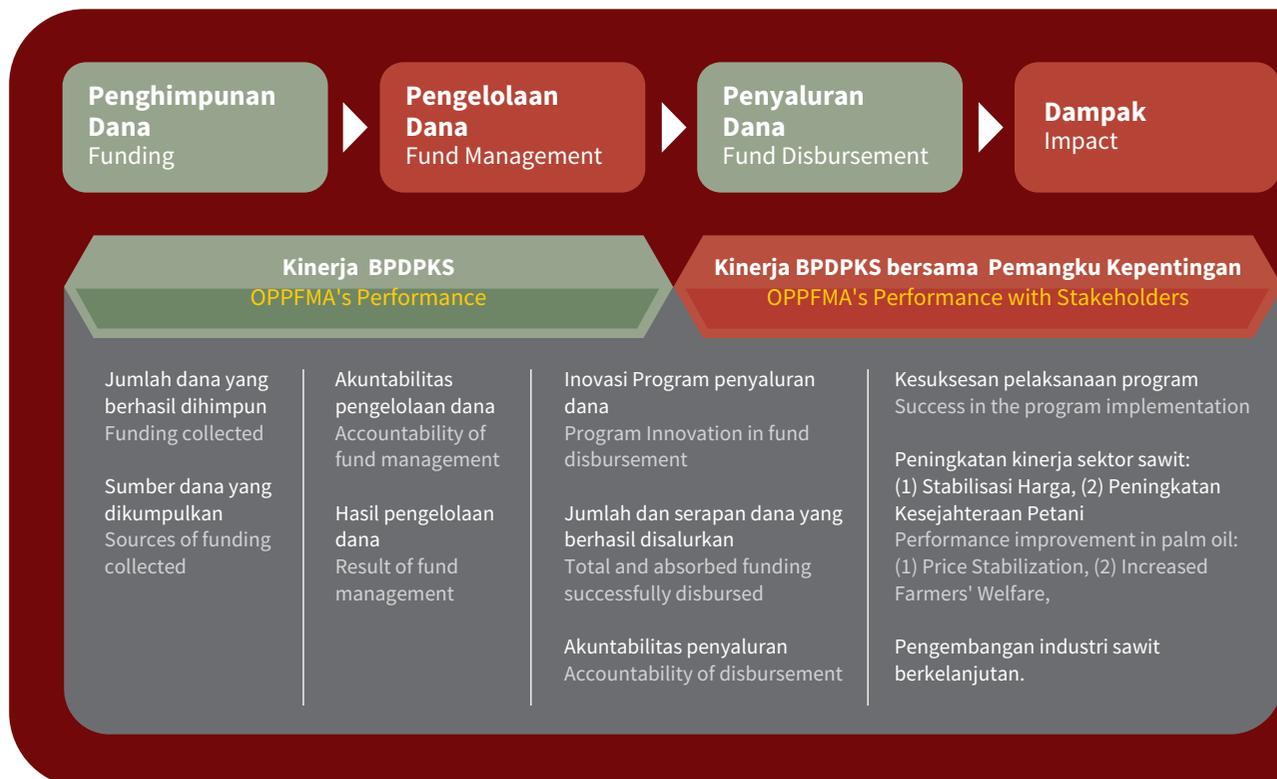
Tugas, Fungsi dan Strategi BDPKKS Duties, Function, and Strategy of OPPFMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tugas BDPKKS adalah mengumpulkan pungutan dan iuran dari Kelapa sawit atau turunannya dan menyalurkannya sesuai fungsi - fungsi sebagai berikut:

- Melakukan pengelolaan DPKS untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional;
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelapa sawit;
- Mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit;
- Meningkatkan optimasi penggunaan hasil perkebunan kelapa sawit untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
- Meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dunia.

Based on the Minister of Finance Regulation No. 113/PMK.01/2015 on the Organization and Work Procedure of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency, OPPFMA has the duty to collect fees and levies from palm oil or its derivatives and distribute them accordingly to the following functions:

- Managing the Oil Palm Plantation Fund (DPKS) to ensure the sustainability of the sustainable palm oil program as a national strategic commodity;
- Enhancing human resource capacity in the palm oil sector;
- Encouraging the development of the downstream palm oil industry;
- Optimizing the use of palm oil plantation products for industrial raw materials, renewable energy, and exports;
- Increasing and maintaining the stability of palm oil plantation business revenues by optimizing prices amidst fluctuations in world palm oil commodity prices.



Strategi BPDPKS

OPPFMA's Strategy

Sebagai dampak berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri sawit, harga CPO mengalami penurunan terus menerus dan akibatnya berdampak pada kesejahteraan Petani. Untuk memperbaiki kondisi ini dan meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, beberapa upaya strategis dilakukan antara lain:

As a result of the various challenges faced by the palm oil industry, the CPO price has decreased continuously, and consequently, impact the smallholders' welfare. Several strategic efforts were conducted to improve this condition and the performance of Indonesia's palm oil sector, including:

Perbaiki Kesejahteraan Petani Improvement of Smallholders' Welfare

- **Program Peremajaan Sawit Rakyat**
Small-Scale Palm Oil Replanting Program
- **Riset Sektor Hulu**
Upstream Research
Penyempurnaan data sawit Indonesia, peningkatan kualitas benih dan inovasi teknologi perkebunan
Improving Indonesia's palm oil data, seed quality, and plantation technology innovation
- **Sarana dan Prasarana**
Facilities and Infrastructure
Efisiensi biaya produksi dan transportasi
Efficiency of production and transportation costs
- **Pelatihan Petani dan SDM Industri Sawit**
Smallholders and HR Training in the Palm Oil Industry
Dalam rangka peningkatan produktivitas dan penggunaan teknis perkebunan sawit yang ramah lingkungan
Enhancing productivity and technical use of environmentally friendly palm oil plantations

Stabilisasi Harga CPO CPO Price Stabilization

- **Dukungan Pendanaan Biodiesel**
Biodiesel Funding Support
Dalam rangka meningkatkan daya serap pasar & pengendalian overstock produk sawit
Increasing market absorption & controlling overstock of palm oil products
- **Promosi dan Advokasi Sawit Positif**
Positive Palm Oil Promotion and Advocacy
Mempertahankan dan memperluas Pasar Domestik dan Luar Negeri
Maintaining and expanding Domestic and International Markets
- **Riset Pasar dan Produk**
Market and Product Research
Dalam rangka menyusun kebijakan terkait penguatan pasar sawit, stabilitas harga dan pengembangan produk turunan dengan nilai tambah tinggi
Formulating policies related to strengthening the palm oil market, price stability, and the development of derivative products with high added value

Memperkuat Industri Hilir Strengthening Downstream Industry

- **Riset dan Pengembangan Program Konversi Sawit Menjadi Bio-Hydrocarbon Fuel**
Research and Development Program for Converting Palm Oil into Bio-Hydrocarbon Fuel
Dukungan Riset untuk pembuatan katalis, Insentif untuk produsen bio-hydrocarbon fuel
Research to find catalyst, Incentive for producers of bio-hydrocarbon fuel
- **Dukungan Pada Program Hilirisasi lainnya**
Support in Other Downstream Programs
Dukungan Riset, Insentif untuk Industri oleokimia
Research Support, Incentive for the Oleochemicals Industry



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

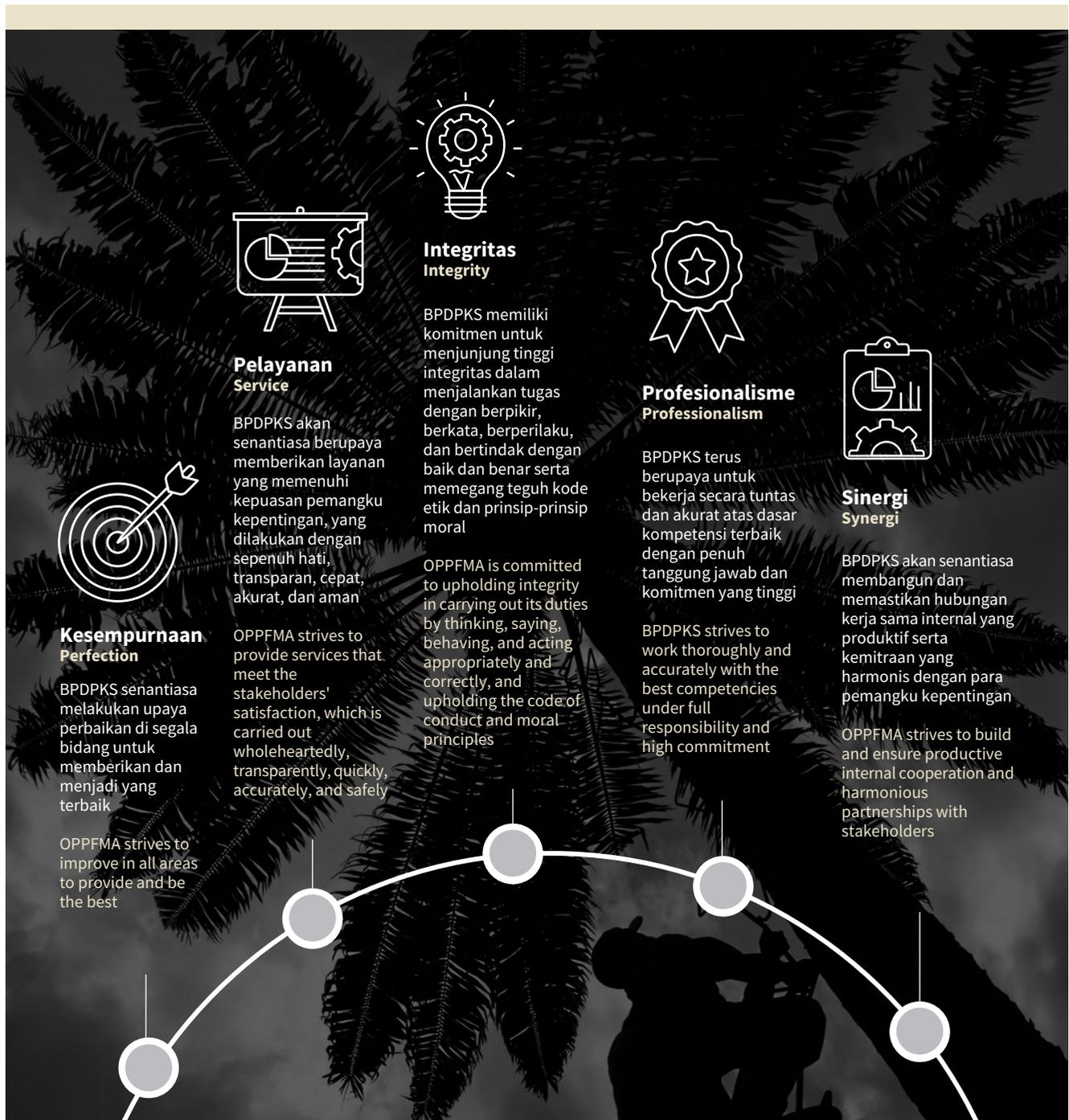
Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Budaya Kerja BDPKKS

Work Culture of OPPFMA

BDPKKS memiliki nilai-nilai inti yang menjadi budayanya yang selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu:

OPPFMA has core values as its work culture, which are in line with the Ministry of Finance's values:





Makna Logo BPDPKS Logo Meaning of OPPFMA

Logo itu merupakan paduan dari huruf B (HIJAU dan MERAH), P (ORANYE), D (COKLAT) dan P (ORANYE) = BPDP.

The logo is a combination of B (GREEN and RED), P (ORANGE), D (CHOCOLATE), and P (ORANGE) = BPDP.



Masing-masing warna mempunyai makna yaitu:

Each color has a meaning:

 <p>Warna HIJAU : Kelestarian, <i>Sustainability</i>, Ramah Lingkungan</p>	<p>GREEN : Preservation, Sustainability, Environmental-Friendly</p>
 <p>Warna MERAH : Energi, Pemberdaya/<i>Enabler</i></p>	<p>RED : Energy, Enabler</p>
 <p>Warna ORANYE : Bisnis, Profesionalisme</p>	<p>ORANGE : Business, Professionalism</p>
 <p>Warna COKLAT : Lahan, Rakyat, Petani</p>	<p>CHOCOLATE : Land, People, Farmers</p>

Semua berada didasar / latar belakang warna putih = transparansi, akuntabilitas

All the symbols have white background, i.e. transparency, accountability

Tulisan sawit =
dana dan pemberdayaan dari dan untuk sawit

The 'SAWIT' writing
means funds and empowerment from and for palm oil

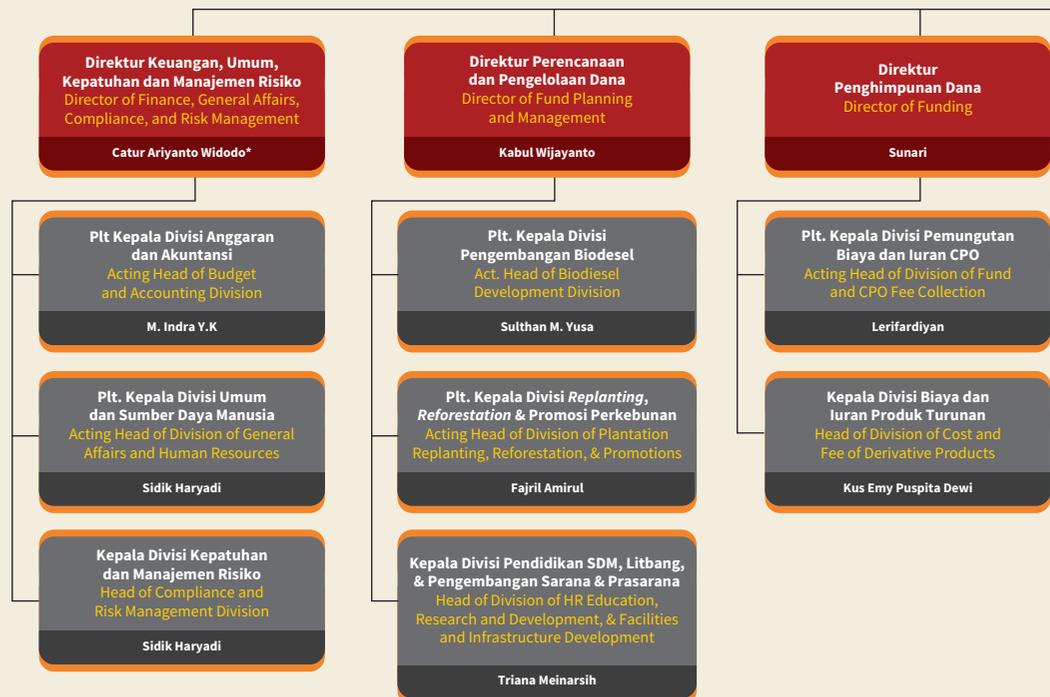
Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Struktur Organisasi BPDPKS Organizational Structure of OPPFMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015, BPDPKS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut, struktur organisasi BPDPKS terdiri dari:

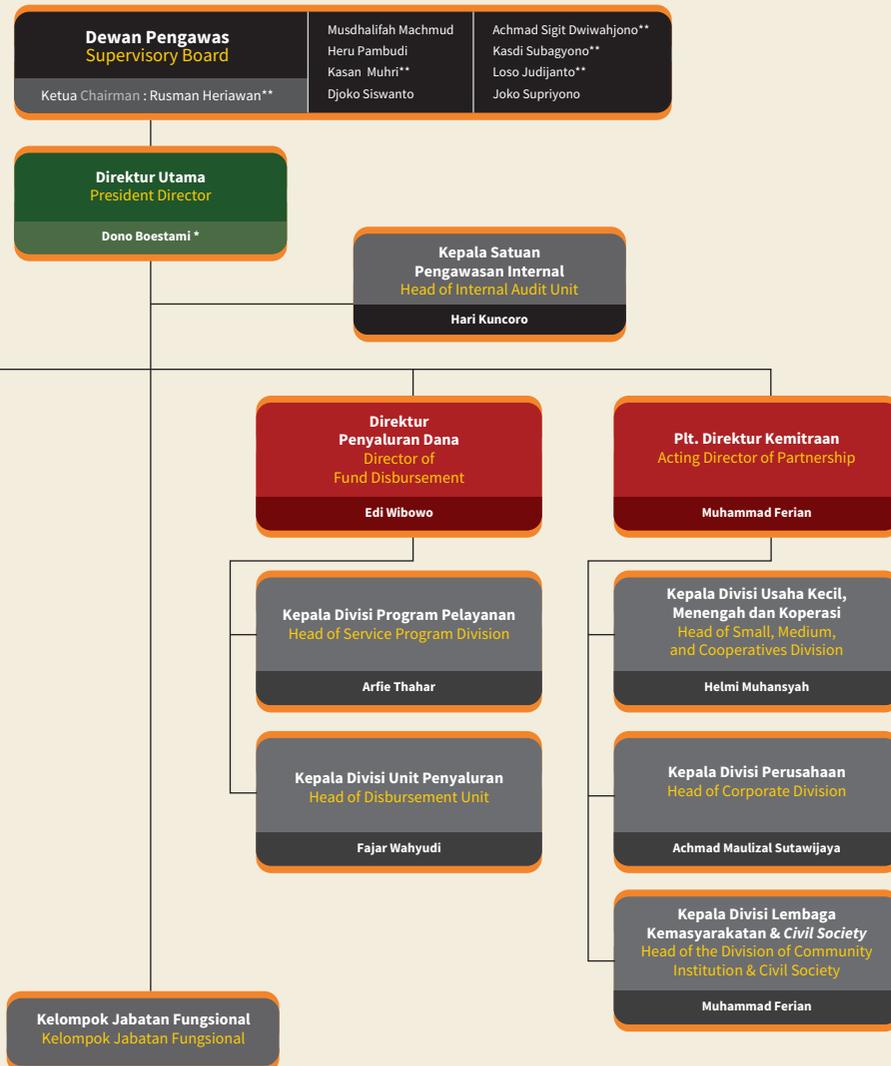
Based on the Minister of Finance Regulation No. 113/PMK.01/2015 on the Organization and Work Procedure of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency, OPPFMA is under and directly responsible to the Minister of Finance through the Directorate General of Treasury. Based on the Minister of Finance Regulation, the OPPFMA's organizational structure consists of:





1. Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
2. Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana;
3. Direktorat Penghimpunan Dana;
4. Direktorat Penyaluran Dana;
5. Direktorat Kemitraan;
6. Satuan Pemeriksa Internal; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Directorate of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management;
2. Directorate of Fund Planning and Management;
3. Directorate of Funding;
4. Directorate of Fund Disbursement;
5. Directorate of Partnership;
6. Internal Audit Unit; and
7. Group of Functional Officers.



*) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Badan Layanan Umum BDPDKS dan No. 54/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan pada Badan Layanan Umum BDPDKS, efektif tanggal 2 Maret 2020, Eddy Abdurrachman dan Zaid Burhan Ibrahim masing-masing menggantikan Dono Boestami dan Catur Ariyanto Widodo Based on the Minister of Finance Decree No. 53/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of the President Director of the OPPFMA Public Service Agency and No. 54/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of Positions at OPPFMA Public Service Agency, effective 2 March 2020, Eddy Abdurrachman and Zaid Burhan Ibrahim replaced Dono Boestami and Catur Ariyanto Widodo respectively

**) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum BDPDKS Evita H Legowo, Dadan Kusdiana, Indrasari Wisnu Wardhan, Abdul Rochim dan Taufik Mappaenre masing-masing menggantikan Rusman Heriawan, Djoko Siswanto, Kasan Muhri, Achmad Sigit Dwiwahjono dan Loso Judijanto Based on the Minister of Finance Decree No. 499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020 on the Establishment of a Supervisory Board at OPPFMA Public Service Agency, Evita H Legowo, Dadan Kusdiana, Indrasari Wisnu Wardhan, Abdul Rochim, and Taufik Mappaenre, respectively replaced Rusman Heriawan, Djoko Siswanto, Kasan Muhri, Achmad Sigit Dwiwahjono, and Loso Judijanto

Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS

Laporan Keuangan Audited

Pejabat Struktural BDPKKS

Structural Officials OPPFMA



M. Indra Y.K

Plt. Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi
Act. Head of Budget and Accounting Division



Sidik Haryadi

Plt. Kepala Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia
Act. Head of Division of General Affairs and Human Resources



Sidik Haryadi

Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Head of Compliance and Risk Management Division



Sulthan M. Yusa

Plt. Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel
Act. Head of Biodiesel Development Division



Fajril Amirul

Plt. Kepala Divisi *Replanting*, *Reforestation* dan Promosi Perkebunan
Act. Head of Division of Plantation Replanting, Reforestation, and Promotions



Triana Meinarsih

Kepala Divisi Pendidikan SDM, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Head of HR Education, Research and Development, and Facility and Infrastructure Development Division



Lerifardiyan

Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO
Head of CPO Duties and Contributions Division



Kus Emy Puspita Dewi

Kepala Divisi Biaya dan Iuran Produk Turunan
Head of Derivative Product Duties and Contributions Division



Arfie Thahar
Kepala Divisi Program
Pelayanan
Head of Service Program
Division



Fajar Wahyudi
Kepala Divisi
Unit Penyaluran
Head of Distribution
Unit Division



Helmi Muhansyah
Kepala Divisi Usaha Kecil,
Menengah dan Koperasi
Head of Small and Medium
Entrepreneurs and
Cooperatives Division



**Achmad Maulizal
Sutawijaya**
Kepala Divisi Perusahaan
Head of Corporate Division



Muhammad Ferian
Kepala Divisi Lembaga
Kemasyarakatan &
Civil Society
Head of Community
Institutions and Civil Society
Division



Hari Kuncoro
Kepala Satuan
Pengawasan Internal
Head of Internal
Control Unit

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Sumber Daya Manusia

Human Resources





Dalam menjalankan usaha yang terus berkembang, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aset utama yang perlu dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan metode yang efektif. BPDPKS menerapkan metode pendekatan *Human Capital Management* dalam melakukan pengelolaan SDM, metode ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang dimiliki BPDPKS sehingga mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi tuntutan pertumbuhan perusahaan.

Human Resources (HR) are the main asset that shall be managed and developed effectively to continue to run a developing business. OPPFMA implements the Human Capital Management approach in managing its HR. This method focuses on enhancing the quality of the human resources employed by OPPFMA to increase the capacity of human resources in facing the demands of corporate growth.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

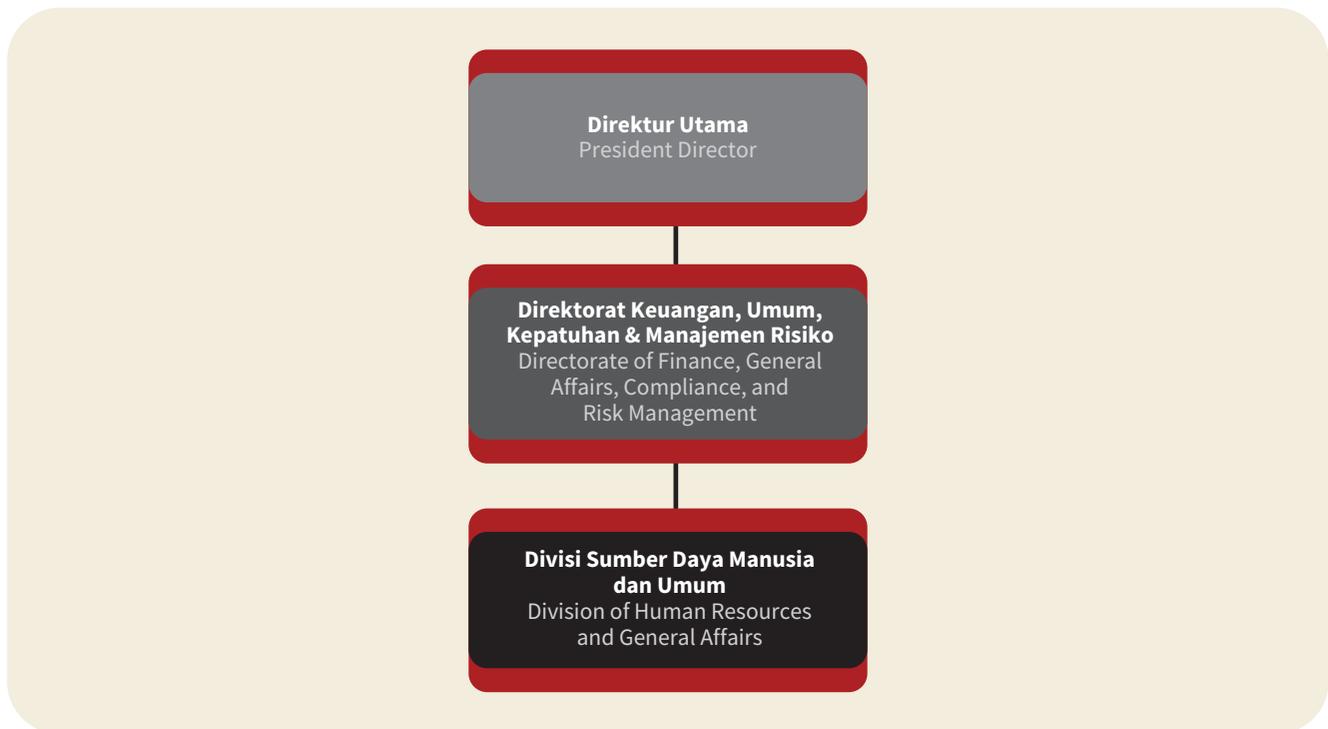
Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Sumber Daya Manusia Human Resources

Struktur Pengelola SDM HR Management Structure

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015, pengelolaan fungsi SDM BDPKKS dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia & Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Struktur Pengelola SDM BDPKKS tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Based on the Minister of Finance Regulation No. 113/PMK.01/2015, the HR management function in the OPPFMA is carried out by the Human Resources & General Affairs Division, which is directly responsible to the Directorate of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management. OPPFMA's HR Management Structure is as follows:



Komposisi Pegawai Employees Composition

Pada tahun 2019, pegawai BDPKKS berjumlah 95 pegawai yang terdiri pegawai tetap dan pegawai kontrak magang, hal mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 94 pegawai. Kenaikan jumlah pegawai sebanyak 1 pegawai disebabkan antara lain tambahan pegawai magang sebanyak 4 orang sedangkan pegawai yang keluar dari BDPKKS berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang telah pensiun dan 2 orang mengajukan resign. Adapun distribusi pegawai berdasarkan status, level jabatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia adalah sebagai berikut:

In 2019, OPPFMA has 95 employees, consisting of permanent employees and contract employees. The number increased compared to 2018, which was 94 employees. There was 1 increase in the number of employees because there were 4 additional intern employees of OPPFMA, and 3 employees who left, consisting of 1 retired employee and 2 employees who resigned. The employee distribution by status, position, gender, education, and age is as follows:

A

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition Based on Employee Status

Status	2019	2018	2017	2016	2015
Pegawai Tetap Permanent Employee	90	93	92	85	47
Pegawai Kontrak Magang Intern Contract Employees	5	1	1	0	0
Jumlah Total	95	94	93	85	47

B

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan
Employee Composition by Position

Pada tahun 2019, komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan didominasi oleh jenjang Staf yang mencapai 77 pegawai atau 85% dari total seluruh pegawai BDPKKS.

In 2019, employee composition by position level is dominated by the Staff, of 77 employees or 85% of the total employee in OPPFMA.

Status	2019	2018	2017	2016	2015
Direksi Board of Directors	5	5	6	4	6
Kepala Divisi Head of Division	8	14	11	13	8
Staf Staff	77	74	75	68	33
Jumlah Total	90	93	92	85	47

C

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Employee Composition Based on Age

Pada tahun 2019, komposisi pegawai BDPKKS berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia produktif < 30 tahun sebanyak 33% dan usia 31-40 tahun sebanyak 38%. Berikut rincian jumlah pegawai berdasarkan usia dalam 5 tahun terakhir:

In 2019, OPPFMA's employee composition by age was dominated by the productive age group of < 30 years old (33%), and 31-40 years old (38%). The following is the details of the employees by age within the last 5 years:

Sumber Daya Manusia Human Resources

Usia Age	2019	2018	2017	2016	2015
≤ 30	30	31	38	29	16
31 - 40	35	36	31	31	12
41 - 50	12	12	13	14	13
51 - 60	11	12	10	11	6
> 60	2	2			
Jumlah Total	90	93	92	86	47

D

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Employees Composition by Gender

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai BDPKKS didominasi oleh pegawai pria yaitu sebanyak 64% dan pegawai wanita sebanyak 36% dengan rinciannya sebagai berikut:

Based on gender, OPPFMA's employee composition is dominated by male, i.e. 64%, and female, 36%, under the following details:

Jenis Kelamin Gender	2019	2018	2017	2016	2015
Laki-laki Male	58	59	57	54	47
Perempuan Female	32	34	35	31	0
Jumlah Total	90	93	92	85	47

E

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Education Level

Di tahun 2019, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas berada pada jenjang pendidikan Sarjana yang mencapai 62% dan jenjang Pasca Sarjana mencapai 26%.

In 2019, the employees' education majority comes from Undergraduate level of 62% and Postgraduate of 26%

Pendidikan Education	2019	2018	2017	2016	2015
S3 Doctorate's Degree (S3)	1	1	1	2	1
S2 Master's Degree (S2)	23	24	23	20	14
S1 Bachelor's Degree (S1)	56	58	54	47	27
D3 Young Diploma (D3)	5	5	6	9	5
D2 Young Diploma (D2)	1	1	1	0	-
D1 Young Diploma (D1)	1	1	2	2	-
SMA Senior High School	3	3	5	5	-
Jumlah Total	90	93	92	85	47

Kesempatan yang Sama kepada Pegawai

Equal Opportunities for Employees

BPDPKS senantiasa berkomitmen untuk menjunjung kesetaraan dalam menyeleksi sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pelamar untuk menjadi calon pegawai yang profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender atau kondisi fisik mulai dari penerimaan pegawai, melaksanakan tugasnya secara profesional, dan memperoleh kompensasi. BPDPKS menjamin tidak terjadinya diskriminasi sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja *excellence*. Dengan demikian BPDPKS berupaya melakukan proses pengelolaan SDM berdasarkan faktor kemampuan (*competency*) dan kinerja (*performance*) yang sejalan dengan aspek *fairness*.

OPPFMA is committed to upholding equality in selecting human resources, by providing equal opportunities to applicants to be professional employee candidates, regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition, starting from the hiring of employees, performing their duties professionally, and obtaining compensation. OPPFMA guarantees no discrimination. Thus, fair and honest treatment is created to encourage employees in line with their respective potential, abilities, experience, and skills, to achieve performance excellence. Therefore, OPPFMA strives to manage HR based on competency and performance, in line with the fairness aspect.

Proses Rekrutmen yang Berkualitas

Quality Recruitment Process

Proses rekrutmen ditujukan untuk mendapatkan pegawai yang terbaik dan kompeten sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BPDPKS. BPDPKS berusaha menempatkan orang yang tepat pada fungsi yang tepat, sehingga tercipta sumber daya manusia berkualitas yang akan terus tumbuh dalam jangka waktu yang panjang. Kebijakan terkait proses rekrutmen diatur dalam Standar Operasional Prosedur Nomor SOP-28/DPKS.1.2/2019 bulan September 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan Pegawai.

The recruitment process has the objective to obtain the best and competent employees, in accordance with OPPFMA's Business and Budget Plan. OPPFMA strives to place the right people in the right functions, to create quality human resources that will continue to grow long-term. Policies related to the recruitment process are regulated in Standard Operating Procedure No. SOP-28/DPKS.1.2/2019 in September 2019 on the Standard Operating Procedures for Employee Recruitment, Selection, and Placement.

Sumber Daya Manusia Human Resources

Perekrutan BDPKKS dilakukan bersifat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme yang dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. BDPKKS membuka kesempatan yang sama bagi semua kandidat tanpa membedakan suku, agama, ras maupun *gender* selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Adapun proses rekrutmen sebagai berikut:

- Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja
- Pembentukan panitia seleksi
- Penunjukan / bekerja sama dengan pihak ketiga penyelenggara rekrutmen
- Pengumuman di surat kabar nasional dan website kantor
- Verifikasi / seleksi administrasi
- Ter tertulis *assessment*
- Tes wawancara oleh Direksi
- Pengumuman kelulusan
- Penetapan

Selama tahun 2019, BDPKKS telah melakukan perekrutan sebanyak 4 orang, yang menduduki posisi sebagai Tenaga Administrasi yang bersifat kontraktual.

OPPFMA's recruitment is conducted transparently, upholds professionalism, and based on the employees' needs analysis. OPPFMA provides equal opportunities for all candidates regardless of ethnicity, religion, race, or gender, as long as they meet the predetermined requirements.

The recruitment process is as follows:

- Formulation of employee requirements based on workload analysis
- Establishment of the selection committee
- Appointment/cooperation with third parties who will conduct the recruitment
- Announcement in national newspapers and websites
- Verification/administrative selections
- Written assessment
- Interview by the Board of Directors
- Announcement of personnel recruited
- Determination

In 2019, OPPFMA recruited 4 people, who held positions as contractual Administrative Personnel.

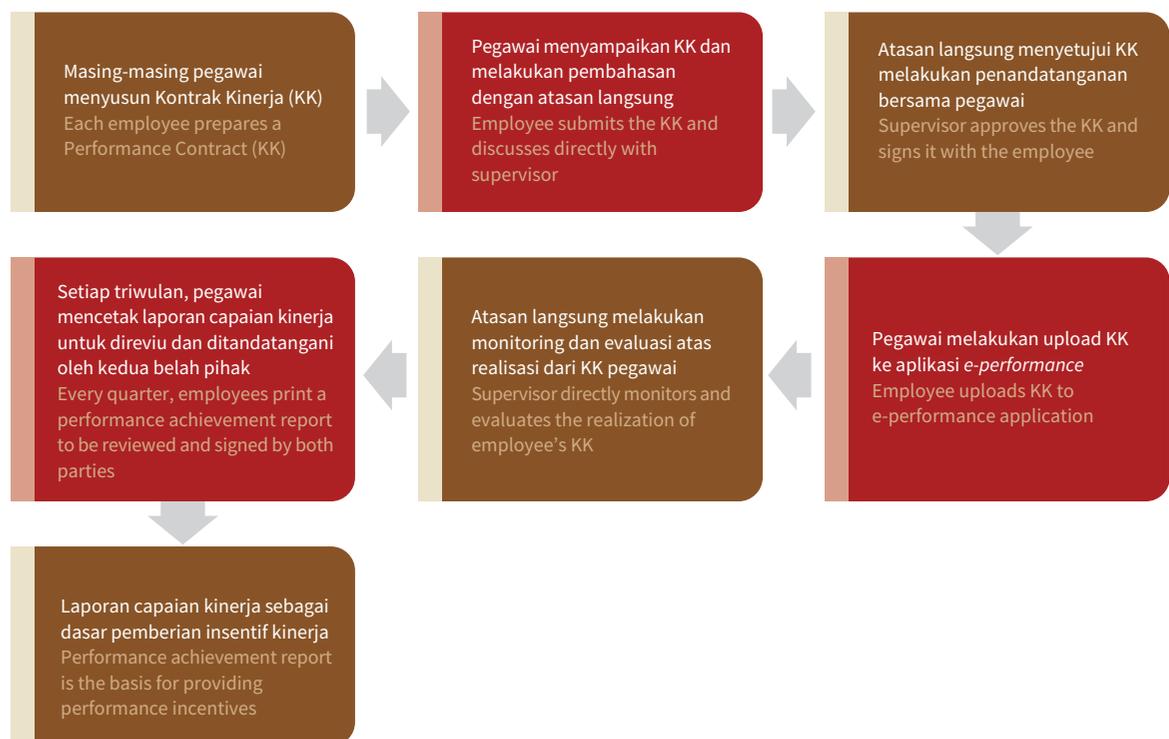




Sistem Manajemen Kinerja BDPKKS OPPFMA's Performance Management System

BDPKKS melakukan penilaian atas pencapaian yang telah diberikan terhadap para pegawai untuk mengevaluasi produktivitas kinerja mereka. Sebagai dasar pengukuran pencapaian kinerja pegawai dalam mencapai tujuan BDPKKS secara efektif dan efisien, BDPKKS telah menetapkan Sistem Manajemen Kinerja dengan menggunakan aplikasi E-Performance. Pengukuran kinerja di BDPKKS dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan. Sistem penilaian yang dibangun mampu menjadi pembeda antara pegawai berkinerja tinggi dengan pegawai berkinerja rendah. Penilaian kinerja mengukur pencapaian pekerja terhadap target individu yang merupakan turunan dari sasaran/target BDPKKS. Target individu pekerja ditetapkan dan disepakati bersama atasan di awal tahun, sebagai turunan dari target/sasaran atasannya dan sejalan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) Direktorat. Kebijakan mengenai Penilaian Kinerja Pegawai ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-608/DPKS/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Sistem Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tahapan Penilaian Kinerja Pegawai BDPKKS adalah sebagai berikut:

OPPFMA assesses the achievement provided to the employees to evaluate their performance productivity. As a basis for the assessment of employees' performance achievement in achieving OPPFMA's targets effectively and efficiently, OPPFMA has established a Performance Management System using the E-Performance application. In OPPFMA, the performance is assessed based on the principles of objectivity and fairness. The established assessment system is able to differentiate between high-performing employees and low-performing employees. Performance assessment measures employee achievement against individual targets, which are derived from OPPFMA's targets. Individual employee targets are set and agreed upon with the supervisor at the beginning of the year, as a derivative of the target/goal of the supervisor, and in line with the Directorate's Key Performance Indicator (KPI). Policies regarding Employee Performance Assessment are stipulated in the President Director's Decree No. KEP-608/DPKS/2019 dated 31 December 2019 on the Performance Management Systems within the Oil Palm Plantation Fund Management Agency. OPPFMA's Employees Performance Assessment stages are as follows:



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Sumber Daya Manusia Human Resources

Hasil penilaian menjadi dasar pertimbangan untuk pemberian *reward* dan pengembangan karir pegawai seperti promosi, rotasi, peningkatan remunerasi dan sebagainya, juga menjadi dasar pemberian *punishment* seperti surat peringatan, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi sampai pemutusan hubungan kerja.

The assessment result becomes the basis for consideration in providing rewards and employee career development, such as promotions, rotations, increased remuneration, etc. The result also becomes the basis for imposing punishments, such as warning letters, promotions postponement, demotions, transfers, up to termination of employment.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Competency Training and Development

BDPKKS telah memiliki program pengembangan kompetensi yang terencana, sistematis dan terfokus sesuai perkembangan bisnis BDPKKS. Salah satu program pengembangan kompetensi utama yang telah dilaksanakan secara konsisten adalah Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mendukung proses pemeliharaan dan peningkatan kualitas SDM. Setiap pegawai BDPKKS dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan kebutuhan posisi jabatannya.

OPPFMA has a well-planned, systematic, and focused competency development program in accordance with OPPFMA's business development. One of the main competency development programs that have been implemented consistently is the Education and Training Program (Diklat) which supports the process of maintaining and enhancing the human resources' quality. Every OPPFMA's employee shall have good competence according to the needs of his/her position.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja, BDPKKS memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh baik di dalam maupun luar negeri antara lain berupa pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), seminar dan sejenisnya sesuai dengan tupoksi yang ada pada masing-masing unit (Direktorat dan Divisi)

OPPFMA provides opportunities for every employee who meets the requirements to participate in education/training, organized both domestically and abroad, including education and training (diklat), technical guidance (bimtek), seminars, etc., in accordance with the existing job description in each unit (Directorate and Division) to improve work abilities and skills.

Selama tahun 2019, BDPKKS telah melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai, sebagai berikut:

During 2019, OPPFMA has conducted training and competency development for employees, as follows:

No	Kegiatan Activity	Tanggal Date	Tempat Place	Nomor ST ST Number	Peserta Participant
TRIWULAN I QUARTER I					
1	Simulasi Penggunaan IT IT Utilization Simulation	15 Januari 2019 15 January 2019	Jakarta	ST-9/DPKS.3/2019	Hendar Sudrajat
2	Penggunaan <i>Software Governance Risk Management and Compliance</i> (GRC) Governance Risk Management and Compliance (GRC) Software Utilization	21 - 22 Januari 2019 21-22 January 2019	Jakarta	ST-DPKS.1/2019	Aldi Bahana Prasetya Gelly Susantry Julia Rahmi Mina Hidayah
3	FGD LEMIGAS "Kajian Kelayakan Tanki FAME" LEMIGAS' FGD "FAME Tank Feasibility Study"	24 - 25 Januari 2019 24-25 January 2019	Jakarta	ST-12/DPKS/2019	Fitriyah

No	Kegiatan Activity	Tanggal Date	Tempat Place	Nomor ST ST Number	Peserta Participant
4	<i>Hand On Bloomberg Terminal</i>	20 Februari 2019 20 February 2019	Jakarta	ST-31/DPKS/2019	Fajril Amirul Rahmat Dwi Septian Aulia Rinaldy
5	Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan SDM HR Management and Development Training	25 - 27 Februari 2019 25-27 February 2019	Jakarta	ST-17/DPKS.1/2019	Wahyu Hidayat Pratama Moh. Anang Iswanto Jane C Waroka
TRIWULAN II QUARTER II					
6	Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan Treasury Budget Education and Training Center	18 April 2019	Bogor	ST-64/DPKS.3/2019	Lilik Sugiyono Dwi Anggraeni
7	Pelatihan Wakil Manajer Investasi Investment Manager Representative Training	22 - 30 April 2019	Jakarta	ST-26/DPKS.3/2019	Cahya Wisnu Ardi M.Indra Yudha K Prasetyo Luhur Handoko Husni Firmansyah Rhesa Adriansyah Rhesa Adriansyah Andi Dwi Novianti Luthfi Edy Sucipto Zulkifly
8	BIMTEK Aplikasi PSR Online Tahap I Online PSR Application Phase I Technical Guidance	23 - 25 April 2019	Jakarta	ST-64/DPKS.3/2019	Hendar Sudrajat Lerifardiyan Dwi Nuswantara Hosea Reno Valentino Sarah Isnania Cendana
TRIWULAN III QUARTER III					
9	Bimtek Aplikasi Exit Permit V 2.0 Exit Permit Application V 2.0 Technical Guidance	12 - 14 Juli 2019 12-14 July 2019	Yogyakarta	ST-40/DPKS.1/2019	Sukri Linda Sitanandra Refiyana Octavia Anwar Sadat
10	<i>International Seminar and Congress of Indonesian Soil Science Society</i>	4 - 7 Agustus 2019 4-7 August 2019	Bandung	ST-147/DPKS.5/2019	Wardoyo Akbar Alfianto Riezca Kartika Dara Yulitta Amy Ardhani

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Sumber Daya Manusia Human Resources

No	Kegiatan Activity	Tanggal Date	Tempat Place	Nomor ST ST Number	Peserta Participant
11	Pembekalan Materi Perkebunan, Sedsilu Angkatan - 64 Provision of Plantation Materials, Sedsilu Batch - 64	12 - 14 Agustus 2019	Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah Pangkalan Bun, Central Kalimantan	ST-151/DPKS.5/2019	Meliana Meling
12	FGD Pemahaman Karhutla FGD of Forest and Land Fires	19 September 2019	Jakarta	ST-206/DPKS.5/2019	Deri Ridhanif Kumiadi Perdana Putra Wawan Hardiwinata
TRIWULAN IV QUARTER IV					
13	Training Standar Akuntansi Pemerintah oleh PWC Government Accounting Standards Training by PWC	1 - 12 November 2019	Jakarta	ST-71/DPKS.1/2019	Iman Khafid Baehaqi Tb.Oka Prawira Akbar Dewantoro Aurora Rizkika
14	Pelatihan <i>Financial Statement Analysis</i> Financial Statement Analysis Training	4 - 5 Desember 2019 4 - 5 December 2019	Jakarta	ST-45/DPKS.2/2019	Rizda Wulan Suciwati
15	Pelatihan <i>Risk Management</i> Risk Management Training	17 - 19 Desember 2019 17 - 19 December 2019	Jakarta	ST-44/DPKS.2/2019	Osye Meiriana Soraya Josef Tri Suryana



Program Kesejahteraan Pegawai

Employees' Welfare Program

BPDPKS berupaya untuk memenuhi kesejahteraan pegawai melalui beberapa aspek antara lain :

1. Gaji
2. Tunjangan
3. Bonus
4. Jaminan kesehatan

OPPFMA strives to fulfill employee welfare through several aspects, including:

1. Salary
2. Allowances
3. Bonus
4. Health insurance

Program Pensiun

Retirement Program

BPDPKS memiliki program pensiun dengan mengikutsertakan pegawainya yang memasuki masa pensiun dengan diikutkan pelatihan persiapan pensiun. Pelatihan tersebut dapat diusulkan oleh pegawai yang bersangkutan sebagai bekal setelah tidak bekerja di BPDPKS. Selama tahun 2019, terdapat 2 pegawai BPDPKS yang memasuki masa pensiun dan telah diikutsertakan pelatihan persiapan pensiun.

OPPFMA has a retirement program by ensuring its employee to participate in their retirement period by attending pension preparation program. This training can be proposed by the employee concerned as a provision after finishing their work at OPPFMA. In 2019, there were 2 OPPFMA's employees who entered into pension period and they have attended the pension preparation training.

Tingkat Perpindahan (Turnover) Pegawai

Employee Turnover Rate

Tingkat perpindahan pegawai yang keluar dari BPDPKS dengan berbagai sebab antara lain pengunduran diri secara sukarela, kinerja di bawah target, pelanggaran disiplin, dan pensiun serta mutasi/pindah tugas. Berikut adalah tabel *turnover* BPDPKS selama tahun 2019:

The turnover rate in BPDPKS is influenced by various reasons, including voluntary resignation, underperformance, disciplinary violations, and retirement, as well as mutation. The following is the OPPFMA's turnover during 2019:

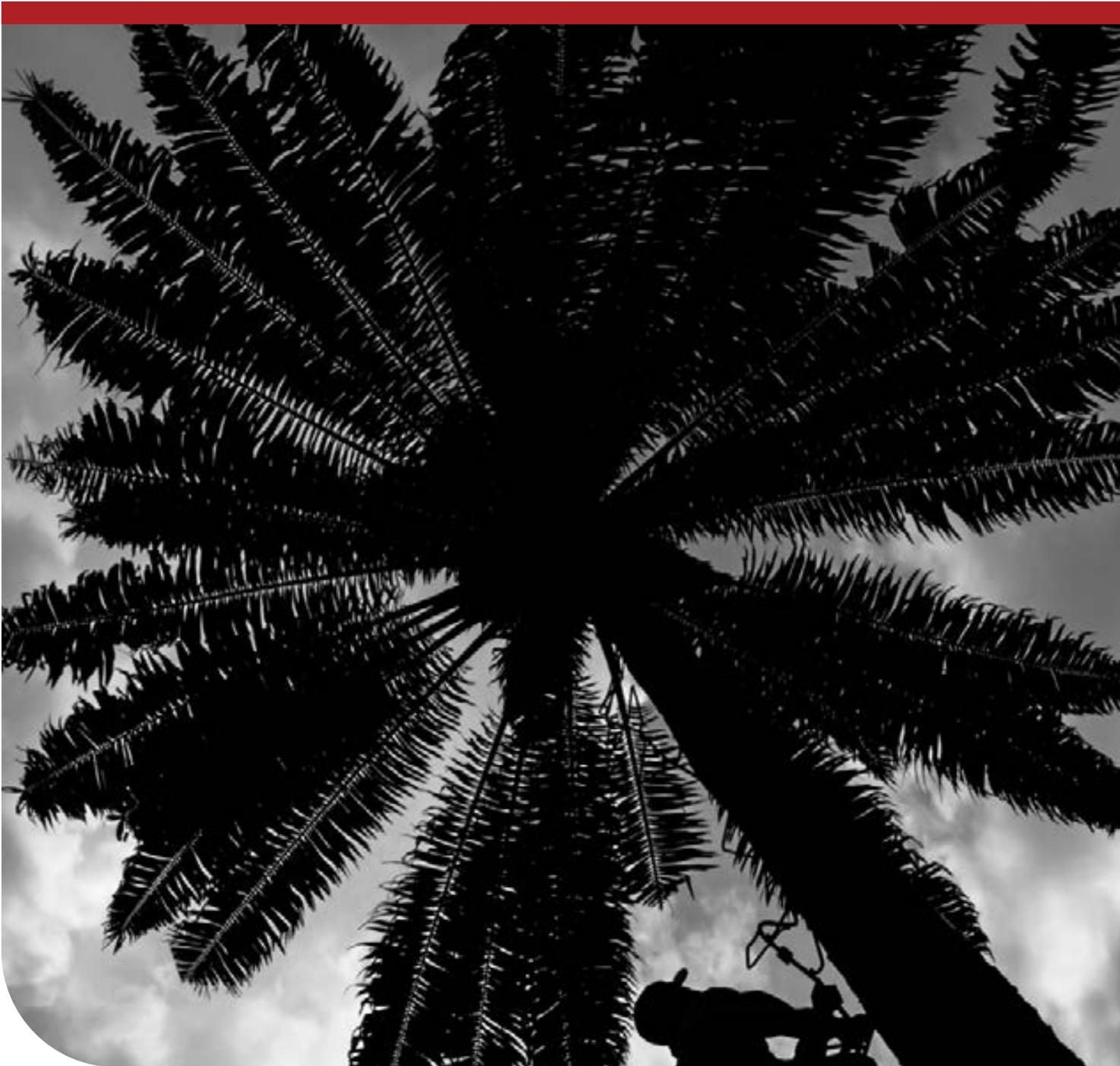
Jumlah Perputaran Pegawai Employee Turnover		2019	2018
Atas permintaan sendiri	Resigned	2	4
Kinerja di bawah target	Underperformed	-	-
Pindah tugas / mutasi	Mutation	-	4
Pelanggaran disiplin	Disciplinary violations	-	-
Pensiun	Pension	2	-
Sebab lain	Others	-	1

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite Audit, Divisi Perusahaan, Satuan Pemeriksa Internal dan Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

Education and / or Training of the Supervisory Board, Directors, Audit Committee,
Corporate Division, Internal Audit Unit and Compliance & Risk Management Division



Pelatihan Dewan Pengawas Tahun 2019

Supervisory Board's Training in 2019

Selama tahun 2019 Dewan Pengawas telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop antara lain:

During 2019, the Supervisory Board attended training/seminar /workshop:

No	Kegiatan Activity	Tanggal Date	Tempat Place	Penyelenggara Organizer
1	Pembekalan materi dan kunjungan ke perkebunan kelapa sawit calon perwakilan perdagangan di luar negeri Refreshment and visitation to palm oil plantations for potential trade representatives abroad	14-16 Juli 2019 14-16 July 2019	Pekanbaru-Riau	Kementerian Perdagangan Ministry of Trade
2	Simposium tentang <i>Sustainable Management of Oil Palm Plantation</i> Sustainable Management of Oil Palm Plantation Symposium	5 - 7 Agustus 2019 5 - 7 August 2019	Bandung-Jabar	Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Soil Science Society of Indonesia (HITI)
3	Sosialisasi atas perubahan Proses Bisnis <i>e-Billing Levy</i> BDPDKS Dissemination of changes in the OPPFMA's e-Billing Levy Business Process	8 - 9 Agustus 2019 8 - 9 August 2019	Pekanbaru-Riau	Dirjen Bea Cukai Directorate General of Customs and Excises
4	Sosialisasi atas perubahan Proses Bisnis <i>e-Billing Levy</i> BDPDKS Dissemination of changes in the OPPFMA's e-Billing Levy Business Process	14 - 16 Agustus 2019 14 - 16 August 2019	Medan-Sumatera Utara	Dirjen Bea Cukai Directorate General of Customs and Excises
5	<i>16th China-ASEAN Expo (CAEXPO) and the China-ASEAN Business and Investment Summit</i> 16th China-ASEAN Expo (CAEXPO) and the China-ASEAN Business and Investment Summit	19 - 23 September 2019	Nanning, Guangxi, RRT	China-ASEAN Expo
6	<i>15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2020 Price Outlook "Palm Oil Industry: Managing Market, Enhancing Competitiveness"</i>	30 Oktober- 2 November 2019 30 October- 2 November 2019	Denpasar Bali	GAPKI
7	<i>Globoil Premier International Conference & Exhibition Globoil</i>	24 - 28 September 2019	India	tefla's
8	<i>CPOPC Palm Oil Supply and Demand Outlook Conference (POSDOC) and Indonesia Malaysia CED Forum (IMCEOF)</i>	21-23 Oktober 2019 21-23 October 2019	Selangor, Malaysia	Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)
9	<i>The United Nations Framework Convention On Climate Change (COP-25 UNFCCC)</i>	2-13 Desember 2019 2-13 December 2019	Madrid, Spanyol	United Nations System Standing Committee on Nutrition

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Kepala Divisi Perusahaan, Unit Audit Internal dan Unit/Divisi Manajemen Risiko
Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Company's Head of Division, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit

Pelatihan Komite Audit Tahun 2019

Audit Committee's Training in 2019

Selama tahun 2019 Komite Audit belum mengikuti pelatihan/seminar/workshop.

In 2019, the Audit Committee has not attended any training/seminars/workshops.

Pelatihan Direksi Tahun 2019

Board of Directors' Training in 2019

Selama tahun 2019 Direksi belum mengikuti pelatihan/seminar/workshop.

In 2019, the Board of Directors has not attended any training/seminars/workshops.

Pelatihan Divisi Perusahaan Tahun 2019

Training of the Corporate Division in 2019

Selama tahun 2019 Kepala Divisi Perusahaan belum mengikuti pelatihan/seminar/workshop.

In 2019, the Head of Division has not attended any training/seminars/workshops.

Pelatihan Satuan Pemeriksa Internal Tahun 2019

Internal Audit Unit's Training in 2019

Selama tahun 2019 Unit Satuan Pemeriksa Internal telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop antara lain:

During 2019, the Internal Audit Unit attended training/seminar/workshop:

No	Pelatihan yang diikuti Training Attended	Tanggal Date	Tempat Place	Penyelenggara Organizer
1	Pelatihan Wakil Manajer Investasi (WMI) Program Modular Deputy Investment Manager (WMI) Training Modular Program	22 - 30 April 2019 22 - 30 April 2019	Jakarta	TICMI
2	Konferensi Nasional Internal Auditor Internal Auditor National Conference	23-26 Juli 2019 23-26 Juli 2019	Solo	IIA Indonesia
3	Seminar Nasional Audit di Era Digital: Implementasi Data Analytics National Audit in the Digital Era Seminar: Data Analytics Implementation	24 September 2019 24 September 2019	Jakarta	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Inspectorate General of the Ministry of Finance
4	<i>Risk Based Internal Auditor</i>	14 - 15 Oktober 2019 14 - 15 Oktober 2019	Bandung	CRMS Indonesia
5	Training Standar Akuntansi Pemerintah Government Accounting Standards Training	27 - 28 Oktober 2019 27 - 28 Oktober 2019	Jakarta	KAP PWC



Pelatihan Divisi Manajemen Risiko Tahun 2019

Training of the Risk Management Unit in 2019

Selama tahun 2019 Unit/Divisi Manajemen Risiko telah mengikuti pengembangan kompetensi antara lain :

In 2019, the Risk Management Unit has attended competency development:

No	Pelatihan yang diikuti Training Attended	Tanggal Date	Tempat Place	Penyelenggara Organizer
1	<i>Governance, Risk & Compliance (GRC) and Three Lines of Defense (TLD) & Strategic Trend in Indonesia Banking</i>	7 Februari 2019 7 February 2019	Jakarta	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Risk Management Certification Body (BSMR)
2	<i>Risk Based Internal Audit</i>	14 - 15 Oktober 2019 14 - 15 October 2019	Bandung	CRMS Indonesia
3	Bimtek Mitigasi Resiko & Strategi Menghadapi Audit Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah serta Antisipasi Pemutusan Kontrak di Akhir Anggaran Technical Guidance for Risk Mitigation & Strategy to Handle Audit of the Government's Procurement of Goods/Services and Anticipating Contract Termination at the End of the Budget	23 - 24 Oktober 2019 23 - 24 October 2019	Jakarta	Lembaga Kajian dan Pelatihan Sinergi Indonesia (LKPS) Institute for the Indonesian Synergy Study and Training (LKPS)



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Lembaga Profesi Penunjang BDPKKS Supporting Institutions

Lembaga Profesi BDPKKS adalah sebagai berikut :

OPPFMA's Supporting Institutions are as follows:

Keterangan Description

Profesi Penunjang Supporting Professionals

Akuntan Publik Public Accountant

PWC

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015
00844/2.1025/AU.1/11/0230-3/1/V/2020

PT PWC

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Business License Number: KEP-241/KM.1/2015
00844/2.1025/AU.1/11/0230-3/1/V/2020

Auditor Pemerintah Government's Auditor

Kantor Pusat

WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav 29 - 31,
Jakarta 12920 - Indonesia
Telp: +62 21 50992901/31192901
Fax: 62 21 52905555/52905050
Website: www.pwc.com.id

Head Office

WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav 29 - 31, Jakarta
12920 - Indonesia
Phone: +62 21 50992901/31192901
Fax: 62 21 52905555/52905050
Website: www.pwc.com.id

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Jalan Jendral Gatot Subroto No. Kav 31
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10210

**The Audit Board of the Republic of
Indonesia (BPK) | Jalan Jendral Gatot
Subroto No. Kav 31 Central Jakarta, Special
Capital Region of Jakarta, 10210**





Audit Eksternal BPDPKS

External Audit

Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi BPDPKS yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) di Indonesia dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

External audits are carried out by independent parties who have met the requirements to ensure that OPPFMA's accounting are recorded in accordance with the provisions of the Statement of Indonesia Financial Accounting Standards (PSAK), and the reports contained the financial position and results of operations fairly and do not violate any prevailing regulations.

Laporan keuangan BPDPKS tahun 2018 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, & Rekan (PwC Indonesia) dan telah diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tanggal 25 Maret 2019. Adapun Laporan Keuangan tahun 2019 juga masih diaudit oleh KAP yang sama dan telah diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tanggal 8 Mei 2020.

Uraian lebih detail tentang Akuntan Eksternal, dapat dilihat pada uraian di Bab Tata Kelola BPDPKS.

The 2018 OPPFMA's financial statements have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, & Rekan (PwC Indonesia), and have the Unqualified Opinion dated 25 March 2019. The 2019 Financial Statements is also audited by the same KAP, and has the Unqualified Opinion on 8 May 2020.

A more detailed elaboration of the External Accountants can be referred to in the OPPFMA's Corporate Governance Chapter.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2019

Area and Palm Oil Production in Indonesia, 2019



Aceh

Luas Lahan Land Area : **500.118 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
1.081.822 ton

Sumatera Utara North Sumatra

Luas Lahan Land Area : **1.601.901 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
6.163.771 ton

Sumatera Barat West Sumatra

Luas Lahan Land Area : **384.477 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
1.298.038 ton

Riau

Luas Lahan Land Area : **2.808.668 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
9.127.612 ton

Kepulauan Riau Riau Island

Luas Lahan Land Area : **8.012 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
31.067 ton

Jambi

Luas Lahan Land Area : **1.070.723 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
2.891.336 ton

Sumatera Selatan South Sumatra

Luas Lahan Land Area : **1.178.104 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
4.075.634 ton

Kep. Bangka Belitung

Luas Lahan Land Area : **229.559 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
958.013 ton

Bengkulu

Luas Lahan Land Area : **314.493 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
1.073.531 ton

Lampung

Luas Lahan Land Area : **203.674 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
508.772 ton

Jawa Barat West Java

Luas Lahan Land Area : **16.003 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
49.446 ton

Banten

Luas Lahan Land Area : **19.949 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
41.261 ton

Kalimantan Barat West Kalimantan

Luas Lahan Land Area : **1.864.635 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
3.316.363 ton

Kalimantan Tengah Central Kalimantan

Luas Lahan Land Area : **1.675.753 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
7.748.444 ton

Kalimantan Selatan South Kalimantan

Luas Lahan Land Area : **552.569 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
1.556.612 ton

Kalimantan Timur East Kalimantan

Luas Lahan Land Area : **1.461.168 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
4.044.753 ton



Kalimantan Utara North Kalimantan

Luas Lahan Land Area : **159.379 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
327.809 ton

Gorontalo

Luas Lahan Land Area : **10.390 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
10.680 ton

Sulawesi Tengah Central Sulawesi

Luas Lahan Land Area : **139.050 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
412.134 ton

Sulawesi Barat West Sulawesi

Luas Lahan Land Area : **173.855 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
414.921 ton

Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi

Luas Lahan Land Area : **76.639 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
114.001 ton

Sulawesi Selatan South Sulawesi

Luas Lahan Land Area : **50.565 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
113.565 ton

Papua

Luas Lahan Land Area : **160.927 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
370.771 ton

Papua Barat West Papua

Luas Lahan Land Area : **52.432 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
105.422 ton

Maluku

Luas Lahan Land Area : **11.376 Ha**
Jumlah Produksi Total Production :
25.344 ton

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPPPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPPPKS
Tanggung Jawab Sosial BPPPKS
Laporan Keuangan Audited

Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2019

Area and Palm Oil Production in Indonesia, 2019

Propinsi Province	Perkebunan Rakyat Smallholder		Perkebunan Negara Government Estate		Perkebunan Swasta Private Estate		Jumlah Total	
	Luas (Ha) Areal (Ha)	Produksi (Ton) Production (Ton)	Luas (Ha) Areal (Ha)	Produksi (Ton) Production (Ton)	Luas (Ha) Areal (Ha)	Produksi (Ton) Production (Ton)	Luas (Ha) Areal (Ha)	Produksi (Ton) Production (Ton)
Aceh	238.238	440.103	49.226	118.793	212.654	522.926	500.118	1.081.822
Sumatera Utara North Sumatra	723.798	2.539.764	312.253	1.329.205	565.850	2.294.802	1.601.901	6.163.771
Sumatera Barat West Sumatra	221.669	567.930	8.561	41.842	154.247	688.266	384.477	1.298.038
Riau	1.815.010	5.145.213	71.403	305.663	922.255	3.676.736	2.808.668	9.127.612
Kepulauan Riau Riau Island	1.277	1.682	-	-	6.735	29.385	8.012	31.067
Jambi	682.175	1.578.869	20.414	97.244	368.134	1.215.223	1.070.723	2.891.336
Sumatera Selatan South Sumatra	667.483	2.507.039	32.370	94.492	478.251	1.474.103	1.178.104	4.075.634
Kep. Bangka Belitung	71.410	143.854	-	-	158.149	814.159	229.559	958.013
Bengkulu	208.626	738.377	846	1.808	105.021	333.346	314.493	1.073.531
Lampung	109.356	189.840	12.178	44.541	82.140	274.391	203.674	508.772
WILAYAH SUMATERA SUMATRA AREA	4.739.042	13.852.671	507.251	2.033.588	3.053.436	11.323.337	8.299.729	27.209.596
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat West Java	319	3.893	12.090	43.943	3.594	5.118	16.003	49.446
Banten	7.589	3.893	9.796	34.435	2.564	2.933	19.949	41.261
Jawa Tengah Central Java	-	-	-	-	-	-	-	-
D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur East Java	-	-	-	-	-	-	-	-
WILAYAH JAWA JAVA AREA	7.908	4.278	21.886	78.378	6.158	8.051	35.952	90.707
Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
WILAYAH NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA AREA	-	-	-	-	-	-	-	-



Propinsi Province	Perkebunan Rakyat Smallholder		Perkebunan Negara Government Estate		Perkebunan Swasta Private Estate		Jumlah Total	
	Luas (Ha) Areal (Ha)	Produksi (Ton) Production (Ton)	Luas (Ha) Areal (Ha)	Produksi (Ton) Production (Ton)	Luas (Ha) Areal (Ha)	Produksi (Ton) Production (Ton)	Luas (Ha) Areal (Ha)	Produksi (Ton) Production (Ton)
Kalimantan Barat West Kalimantan	441.831	782.221	31.880	74.736	1.390.924	2.459.406	1.864.635	3.316.363
Kalimantan Tengah Central Kalimantan	170.248	279.220	-	-	1.505.505	7.469.224	1.675.753	7.748.444
Kalimantan Selatan South Kalimantan	105.593	246.252	7.532	14.601	439.444	1.295.759	552.569	1.556.612
Kalimantan Timur East Kalimantan	288.193	508.685	23.769	35.316	1.149.206	3.500.752	1.461.168	4.044.753
Kalimantan Utara North Kalimantan	37.358	85.394	-	-	122.021	242.415	159.379	327.809
WILAYAH KALIMANTAN KALIMANTAN AREA	1.043.223	1.901.772	63.181	124.653	4.607.100	14.967.556	5.713.504	16.993.981
Sulawesi Utara North Sulawesi	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	5.190	1.375	-	-	5.200	9.305	10.390	10.680
Sulawesi Tengah Central Sulawesi	54.013	130.362	-	-	85.037	281.772	139.050	412.134
Sulawesi Selatan South Sulawesi	32.232	98.119	17.659	14.674	674	772	50.565	113.565
Sulawesi Barat West Sulawesi	113.675	200.000	-	-	60.180	214.921	173.855	414.921
Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	6.891	3.184	1.340	1.079	68.408	109.738	76.639	114.001
WILAYAH SULAWESI SULAWESI AREA	212.001	433.040	18.999	15.753	219.499	616.508	450.499	1.065.301
Maluku	893	92	-	-	10.483	25.252	11.376	25.344
Maluku Utara North Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua	14.909	8.725	15.725	54.379	130.293	307.667	160.927	370.771
Papua Barat West Papua	17.765	22.949	-	-	34.667	82.473	52.432	105.422
WILAYAH MALUKU & PAPUA MALUKU & PAPUA AREA	33.567	31.766	15.725	54.379	175.443	415.392	224.735	501.537
INDONESIA	6.035.742	16.223.527	627.042	2.306.751	8.061.636	27.330.844	14.724.420	45.861.121

Sumber Data / Source: Direktorat Jenderal Perkebunan Directorate General of Estate Crops

Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2019
 Area and Palm Oil Production in Indonesia, 2019

Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2019
 Area and Palm Oil Production in Indonesia, 2019



Provinsi
Province

19

Total Kelas Pelatihan
Total Training Class

107



Total SDM yang dilatih
Total Participants Trained

3.300

Total Mahasiswa Penerima Beasiswa
Total College Students as Recipient of the Scholarship

1.950

Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2019
 Area and Palm Oil Production in Indonesia, 2019

Peta Sebaran Pendanaan Penelitian dan Pengembangan Sawit (2015-2019)
 Map of Palm Oil Research and Development Fund Distribution (2015-2019)



OPPFMA'S Governance
OPPFMA'S Social Responsibility
Audited Financial Statements

Background
Report to The Regulators and Stakeholders
OPPFMA'S Profile
Operational & Financial Performance Discussion and Analysis



Patent

40

Publication

158

Books

5

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan **Operational & Financial Performance Discussion and Analysis**





Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri sawit Indonesia. Implementasi RED II oleh EU yang menghapuskan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, perbedaan tarif impor produk minyak sawit Indonesia ke India, kemarau yang berkepanjangan, perang dagang USA dan China dan harga CPO yang terus menurun merupakan tantangan utama yang dihadapi industri sawit hampir sepanjang tahun 2019.

2019 was a year full of challenges for the Indonesian palm oil industry. The RED II implementation by the EU eliminates the use of palm oil as a raw material for biodiesel. The palm industry oil also faced various challenges in 2019, i.e. differences in import tariffs for Indonesian palm oil products to India, prolonged drought, the USA and China trade wars, and the declining CPO prices.



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Operational and Financial Performance Discussion and Analysis



Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, dan Pulau Kalimantan 8,05%.

Spatially, the Indonesia economy structure in 2019 was dominated by provinces in Java and Sumatra Islands. Java Island had the largest contribution to Gross Domestic Product of 59.00%, followed by Sumatra Island of 21.32%, and Kalimantan Island of 8.05%.

Tinjauan Ekonomi Nasional

National Economic Review

Pertumbuhan Ekonomi

Economic Growth

Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15 833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US\$4 174,9.

Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 tumbuh 4,97% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,97%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74% (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, dan Pulau Kalimantan 8,05%.

Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019 No. 17/02/Th. XXIV, 5 Februari 2020

In 2019, Indonesia's economy as assessed by Gross Domestic Product (GDP) based on current prices reached Rp15,833.9 trillion with GDP per capita of Rp59.1 million or USD4,174.9 million.

Indonesian economy in 2019 grew 5.02%, higher than the achievement in 2018, which was 5.17%. In terms of production, the highest growth was achieved by Other Services of 10.55%. In terms of expenditures, the highest growth was achieved by Consumption Expenditures of Non-Profit Institutions Serving Household (PK-LNPRT) at 10.62%.

Indonesia's economy in Quarter IV-2019 compared to Quarter IV-2018 grew 4.97% (y-on-y). In terms of production, economic growth is affected by all business fields, and the highest growth was from the Other Services Business Field, which grew by 10.78%. In terms of expenditures, highest growth was achieved by Household Consumption Expenditures (PK-RT) at 4.97%.

Indonesia's economy in Quarter IV-2019 compared to Quarter III-2019 experienced a contraction of 1.74% (q-to-q). In terms of production, this is due to seasonal effects on the Agriculture, Forestry, and Fisheries Business, which decreased by 20.52%. The expenditure contracted by 2.55% due to the component of Exports of Goods and Services.

Spatially, the Indonesia economy structure in 2019 was dominated by provinces in Java and Sumatra Islands. Java Island had the largest contribution to Gross Domestic Product of 59.00%, followed by Sumatra Island of 21.32%, and Kalimantan Island of 8.05%.

Press Release: Statistics Indonesia Publication of Indonesia's Economic Growth Quarter IV-2019 No. 17/02/Th. XXIV, 5 February 2020

Analisis Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan Operational and Financial Performance Discussion and Analysis

Inflasi

Inflation

Pada Desember 2019 terjadi inflasi sebesar 0,34% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 139,07. Dari 82 kota IHK, 72 kota mengalami inflasi dan 10 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Batam sebesar 1,28% dengan IHK sebesar 139,73 dan terendah terjadi di Watampone sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 135,06. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,88% dengan IHK sebesar 138,34 dan terendah terjadi di Bukittinggi dan Singkawang masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 133,58 dan 137,78.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,78%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,29%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,09%; kelompok sandang sebesar 0,05%; kelompok kesehatan sebesar 0,29%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,58%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,05%.

Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi No.01/01/Th. XXIII, 02 Januari 2020

In December 2019, there was inflation of 0.34% for the Consumer Price Index (CPI), which amounted to 139.07. Out of 82 cities' CPI, 72 experienced inflations, and 10 cities experienced deflations. The highest inflation is in Batam of 1.28% with CPI of 139.73, and the lowest inflation is in Watampone of 0.01% with CPI of 135.06. The highest deflation is in Manado at 1.88% with CPI of 138.34, and the lowest deflation is in Bukittinggi and Singkawang at 0.01% with CPI of 133.58 and 137.78 respectively.

Inflation occurred due to price increases as indicated by increases in most of the indexes for the expenditure group: foodstuffs group by 0.78%; processed food, beverages, cigarettes, and tobacco group by 0.29%; housing, water, electricity, gas, and fuel group of 0.09%; clothing group of 0.05%; health group of 0.29%; and the transportation, communication, and financial services group of 0.58%. Meanwhile, the expenditure group that experienced a decrease in the index was the education, recreation, and sports group by 0.05%.

Press Release: Statistics Indonesia Publication of Developments in the Consumer Price Index/Inflation No.01/01/Th. XXIII, 2 January 2020

Sekilas Industri Crude Palm Oil (CPO)

Overview of the Crude Palm Oil (CPO) Industry

Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri sawit Indonesia. Implementasi RED II oleh EU yang menghapuskan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, perbedaan tarif impor produk minyak sawit Indonesia ke India, kemarau yang berkepanjangan, perang dagang USA dan China dan harga CPO yang terus menurun merupakan tantangan utama yang dihadapi industri sawit hamper sepanjang tahun 2019.

Perang dagang USA dan China menyebabkan ekspor kedelai USA ke China terkendala sehingga petani USA yang biasanya memasok dalam jumlah besar ke China harus mencari pasar baru yang menyebabkan harga oilseed dan juga minyak nabati tertekan.

2019 was a year full of challenges for the Indonesian palm oil industry. The RED II implementation by the EU eliminates the use of palm oil as a raw material for biodiesel. The palm industry oil also faced various challenges in 2019, i.e. differences in import tariffs for Indonesian palm oil products to India, prolonged drought, the USA and China trade wars, and the declining CPO prices.

The trade war between the USA and China hindered USA soybean exports to China. Thus, the US farmers who usually supply large quantities to China had to find new markets, which caused the price of oilseed and vegetable oil to be repressed.

Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri sawit Indonesia. Implementasi RED II oleh EU yang menghapuskan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, perbedaan tarif impor produk minyak sawit Indonesia ke India, kemarau yang berkepanjangan, perang dagang USA dan China dan harga CPO yang terus menurun merupakan tantangan utama yang dihadapi industri sawit hamper sepanjang tahun 2019.

2019 was a year full of challenges for the Indonesian palm oil industry. The RED II implementation by the EU eliminates the use of palm oil as a raw material for biodiesel. The palm industry oil also faced various challenges in 2019, i.e. differences in import tariffs for Indonesian palm oil products to India, prolonged drought, the USA and China trade wars, and the declining CPO prices.

Ada hal yang menarik pada tahun 2019, tepatnya pada 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidato kenegaraannya bahwa Indonesia akan lebih banyak mengkonsumsi minyak sawit untuk keperluan dalam negeri, terutama untuk biofuel. Dampaknya, harga CPO rata-rata KPBN terus melonjak menjadi USD 483, 497, 582, dan 651 per ton pada September-Desember 2019.

Produksi minyak sawit 2019 mencapai 51,8 juta ton CPO atau sekitar 9% lebih tinggi dari produksi tahun 2018 sementara konsumsi domestik naik 24% menjadi 16,7 juta ton dengan rincian konsumsi biodiesel naik 49%, pangan naik 14% dan oleokimia naik 9%. Volume ekspor produk sawit tahun 2019 sebesar 35,7 juta ton naik 4% dari ekspor 2018. Nilai ekspor produk minyak sawit termasuk oleokimia dan biodiesel 2019 diperkirakan mencapai USD 19 miliar.

Nilai ekspor ini sekitar 17% lebih rendah dari ekspor produk minyak sawit tahun 2018 yang nilainya sebesar USD 23 miliar. Destinasi utama ekspor produk minyak sawit tahun 2019 selain oleokimia dan biodiesel Indonesia adalah China (6 juta ton), India (4,8 juta ton), EU (4,6 juta ton). Khusus untuk produk oleokimia dan biodiesel, ekspor terbesar adalah ke China (825 ribu ton) diikuti oleh EU (513 ribu ton).

Interestingly, on 16 August 2019, President Jokowi said in his state of the nation address, that Indonesia will consume more palm oil for domestic needs, especially for biofuel. As a result, the KPBN average CPO price increased to USD 483/ton, USD497/ton, USD582/ton, and USD651/ton in September-December 2019.

In 2019, palm oil production reached 51.8 million tonnes of CPO, or 9% higher than production in 2018. Meanwhile, domestic consumption increased to 24% or 16.7 million tonnes, consisting of 49% increase in biodiesel consumption, 14% increase in foodstuffs, and 9% increase in oleochemicals. The export volume of palm oil products in 2019 was 35.7 million tonnes, which increased by 4% from 2018 exports. In 2019, the export value of palm oil products including oleochemicals and biodiesel is estimated at USD19 billion.

This export value is approximately 17% lower than the 2018 export value of palm oil products, which was USD23 billion. The main export destinations for palm oil products in 2019 in addition to oleochemicals biodiesel in Indonesia are China (6 million tons), India (4.8 million tons), and the EU (4.6 million tons). Specifically for oleochemicals biodiesel, the main export was to China (825 million tons), and followed by the EU (513 thousand tons).

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan Operational and Financial Performance Discussion and Analysis



Ekspor minyak sawit ke Afrika yang naik 11% pada 2019 dari 2,6 juta ton pada 2018 menjadi 2,9 juta ton dan menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun memberikan sinyal positif bagi untuk pasar produk minyak sawit Indonesia tahun 2019 yang penuh tantangan ditutup dengan harga yang melonjak di atas USD 800/ton CIF Rotterdam dan penyamaan tarif impor minyak sawit Indonesia di India.

Situasi finansial yang baik ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pekebun terutama untuk membiayai pemulihan tanaman dan infrastruktur yang mungkin pemeliharaannya tertinggal ketika harga rendah. Akhir tahun 2019 mulai dipersiapkan pelaksanaan implementasi B30 yang membuat cemas importer terkait dengan kemungkinan akan turunnya ketersediaan minyak sawit Indonesia untuk ekspor.

Siaran Pers Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI): Refleksi Industri Kelapa Sawit 2019 dan Prospek 2020, 03 Februari 2020

Palm oil exports to Africa improved by 11% in 2019, from 2.6 million tonnes in 2018 to 2.9 million tonnes in 2019. This shows an increasing trend from year to year, which provides a positive sign for Indonesia's palm oil product market in 2019, which is full of challenges, with the price of CIF Rotterdam soaring above USD 800/ton, and equalization of import tariffs for Indonesian palm oil in India.

This financial situation shall be utilized as best as possible by smallholders, especially to finance the recovery of crops and infrastructure that may have been unmaintained when the prices were low. At the end of 2019, the preparation for the B30 has begun, which makes importers anxious about the possible decline in the availability of Indonesian palm oil for export.

Press Release of Indonesian Palm Oil Association (IPOA): Reflections on the 2019 Palm Oil Industry and 2020 Prospects, 3 February 2020

Dampak Penerbitan dan Perubahan Regulasi terhadap Kinerja BDPKKS Impact of Issuance and Regulatory Amendment on OPPFMA's Performance

BDPKKS terus berkomitmen dalam menjalankan setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh regulator. Selama tahun 2019, terdapat penerbitan baru dan perubahan peraturan sebagaimana dalam tabel berikut:

OPPFMA strives to be committed to complying with any legislation issued by the regulators. During 2019, there were issuance and amendment to the regulations as per the following table:



Tabel Penerbitan Baru dan Perubahan Peraturan di Tahun 2019
Table of Issuance and Amendment to the Regulations in 2019

No	Nama Peraturan Regulation		Dampak terhadap BDPKKS yang Signifikan Significant impact on OPPFMA	
1	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Minister of Finance Regulation No. 136/PMK.05/2019 dated 30 September 2019 on the Third Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 81/PMK.05/2018 on Tariff of Service of Public Service Agency of OPPFMA at the Ministry of Finance.	Penurunan penerimaan pendapatan BDPKKS selama tahun 2019 karena tarif pungutan atas ekspor Kelapa Sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan Produk Turunannya adalah Rp0.	The decline in OPPFMA's revenue during 2019 was due to the levy tariff on exports of Palm Oil, Crude Palm Oil (CPO), and its derivative products, i.e. Rp0.
2	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan Produk Turunannya	Minister of Finance Regulation No. 22/PMK.04/2019 dated 1 March 2019 on the Export Provisions for Palm Oil, Crude Palm Oil (CPO), and Its Derivative Products	Perubahan sistem pungutan Ekspor Kelapa Sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan Produk Turunannya	Changes in the Export levy system for Palm Oil, Crude Palm Oil (CPO), and Its Derivative Products
3	Peraturan Menteri Pertanian nomor 7 tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit	Minister of Agriculture Regulation No. 7 of 2019 on Human Resource Development, Research and Development, Replanting, as well as Infrastructure and Facilities of Palm Oil Plantations.	Pelaksanaan program penelitian & pengembangan dan program pengembangan sumber daya manusia yang telah berjalan di BDPKKS perlu menyesuaikan dengan ketentuan baru ini.	The research & development programs and human resource development programs that have been conducted at OPPFMA shall be adjusted to this new provision.

Kontribusi BPDPKS kepada Negara

BPDPKS Contribution to the State

Kontribusi pada Industri Sawit Kelapa Sawit

Contribution to the Palm Oil Industry

Kontribusi utama BPDPKS dalam industri kelapa sawit tercermin pada kegiatan operasional yaitu menjaga kestabilan harga, memperkuat industri hilir dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

OPPFMA's main contribution in the palm oil industry is reflected in its operational activities, i.e. maintaining price stability, strengthening downstream industries, and establishing sustainable palm oil commodities.

Pada tahun 2019, BPDPKS telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan kontribusi dalam dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. *Replanting*/Peremajaan Sawit Rakyat dengan luas mencapai 90.493 Ha, Penerapan Aplikasi PSR online pada bulan Juni 2019 memberikan dampak yang cukup signifikan terkait dengan percepatan penyaluran dana PSR;
2. Pelaksanaan program mandatori biodiesel (B20) dengan total penyaluran mencapai 6,37 juta KL biodiesel;
3. *Launching* program Biodiesel B30 telah dilaksanakan tanggal 23 Desember 2019 di SPBU Pertamina MT Haryono di Jakarta oleh Bapak Presiden Republik Indonesia;
4. Pelaksanaan uji B30 Non-Otomotif (Alsintan, alat angkutan laut, PT KAI, serta alat berat pertambangan), serta Alutsista yang pendanaan risetnya didanai oleh BPDPKS;
5. Menyelenggarakan Program Grant Riset Sawit 2019 Tingkat Nasional untuk semua kalangan masyarakat;
6. Menyelenggarakan Program Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa 2019;
7. Menyelenggarakan Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2019 dengan tema Mahakarya Inovasi Sawit Nasional - *Fostering Innovation for Sustainability* di Jakarta tanggal 1-2 Agustus 2019;

In 2019, OPPFMA has carried out activities to increase its contribution to the palm oil industry in Indonesia. Those activities include:

1. Small-Scale Palm Oil Replantation/Replanting with an area of 90,493 hectares, online PSR application implementation in June 2019, which provided significant impact to the acceleration of the PSR fund disbursement;
2. Mandatory biodiesel (B20) program with a total distribution of 6.37 million KL of biodiesel;
3. Launched the B30 Biodiesel program on 23 December 2019 at SPBU Pertamina MT Haryono (gas station) in Jakarta by the President of the Republic of Indonesia;
4. Non-Automotive B30 test (Alsintan, sea transportation equipment, PT KAI, and heavy mining equipment), as well as Alutsista whose research is funded by OPPFMA;
5. 2019 Palm Oil Research Grant Program for all community;
6. 2019 College Student Palm Oil Research Competition;
7. 2019 Indonesian Palm Oil Research Sensitivity (PERISAI) with the theme of National Palm Oil Innovation Masterpiece - *Fostering Innovation for Sustainability* in Jakarta on 1-2 August 2019;

8. Pemberian Bantuan Beasiswa kepada anak petani dengan jumlah peserta mencapai 987 orang di tahun 2019;
9. Pelaksanaan Seminar Sawit *Palm Oil Forum* di Amerika Serikat sebagai tindak lanjut rekomendasi diplomasi atas pengenaan AD/CVD Biodiesel di USA;
10. Dukungan kegiatan Penyusunan *Roadmap* Kelapa Sawit sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kementerian Pertanian;
11. Produksi film Dokumenter Sawit sebagai tindak lanjut kegiatan ROPC 2018;
12. Dukungan dan partisipasi pada *Joint Mission* CPOPC ke Brussel sebagai tindak lanjut rekomendasi diplomasi atas adopsi ketentuan *Delegated Act* ILUC dalam RED II oleh Komisi Eropa;
13. Dukungan pelaksanaan Diklat Sesparlu dan Sesdilu Kemenlu sebagai tindak lanjut rekomendasi penguatan kapasitas perwakilan luar negeri tentang isu sawit;
14. Pelaksanaan *Palm Oil Stakeholder Forum* di PEOC Pakistan, *Palm Oil Business Forum* pada India-ASEAN Summit 2019, dan Forum Bisnis dan Pameran pada GlobOil India 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi perluasan dan mempertahankan pasar sawit di Asia Selatan;
15. Dukungan Internasional *Journal of Oil Palm* 2019 sebagai tindak lanjut *International Journal of Oil Palm* 2018 dalam rangka penyediaan data ilmiah tentang sawit yang diakui secara Internasional;
16. Pelaksanaan Seminar *Sustainable Peat Land and Palm Oil Toward Achievement of UN SDGs* di Oslo Norwegia sebagai tindak lanjut pertemuan *Stakeholder* sawit di Norwegia;
17. Promosi Pemanfaatan limbah batang sawit untuk menjadi kayu melalui pameran *Innovation Day* di Saarland dan Sosialisasi di Berlin Jerman sebagai rekomendasi dari Balitbang Kementerian KLHK dan Kemenko Perekonomian;
18. Dukungan kegiatan sosialisasi dan roadtest B-30 serta kampanye biodiesel kepada Media dalam rangka peningkatan pemahaman penggunaan biodiesel dari sawit sesuai rekomendasi dari Kementerian ESDM;
19. Dukungan pendanaan jasa konsultan hukum dalam rangka advokasi atas hambatan Perdagangan sawit di Luar Negeri (kasus RED II EU, CVD Biodiesel EU, dan *Anti Dumping* dan CVD Amerika Serikat) sebagai rekomendasi dari Komite Pengarah;
8. Scholarship assistance to farmers' children with a total of 987 participants in 2019;
9. Palm Oil Forum Seminar in the United States as a follow-up on diplomacy recommendations on the imposition of AD/CVD Biodiesel in the USA;
10. Support for Palm Oil Roadmap Preparation activities as a follow-up on the recommendations from the Ministry of Agriculture;
11. Palm Oil Documentary films production as a follow-up on 2018 ROPC activities;
12. Support and participation in the CPOPC Joint Mission to Brussels as a follow-up on the diplomacy recommendations on the adoption of the ILUC Delegated Act provisions in RED II by the European Commission;
13. Support for the Sesparlu and Sesdilu Training of the Ministry of Foreign Affairs as a follow-up on the recommendation to strengthen the capacity of foreign representatives on the issue of palm oil;
14. Palm Oil Stakeholder Forum at PEOC Pakistan, the Palm Oil Business Forum at the India-ASEAN Summit 2019, and the Business Forum and Exhibition at the 2019 GlobOil India as a follow-up on the recommendations to expand and maintain the palm oil market in South Asia;
15. Support for the International Journal of Palm Oil 2019 as a follow-up on the 2018 International Journal of Palm Oil to provide internationally recognized scientific data on palm oil;
16. Sustainable Peat Land and Palm Oil Toward Achievement Seminar of UN SDGs in Oslo, Norway, as a follow-up on the palm oil Stakeholders' meeting in Norway;
17. Promotion of the utilization of palm oil waste to wood, through the Innovation Day exhibition in Saarland and Socialization in Berlin, Germany, as a recommendation from the Research and Development Agency of the Ministry of Environment and Forestry and the Coordinating Ministry for the Economic Affairs;
18. Support for the B-30 road test and socialization activities, as well as the biodiesel campaign to the media to enhance the understanding of the biodiesel use from palm oil, in line with the recommendation from the Ministry of Energy and Mineral Resources;
19. Financial support for legal consulting services in the framework to advocate for barriers to palm oil trading Abroad (EU RED II, EU Biodiesel CVD, and United States' Anti-Dumping and CVD cases) as a recommendation from the Steering Committee;

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Kontribusi BDPKKS kepada Negara BDPKKS Contribution to the State

- | | |
|---|--|
| <p>20. Pelaksanaan pameran sawit pada China Asean Expo di Nanning pada September 2019 dan pameran sawit pada 2nd China International Import Expo pada November 2019 dalam rangka mempertahankan dan memperluas pasar sawit di China sesuai rekomendasi Kementerian Perdagangan;</p> <p>21. Pelaksanaan rangkaian kegiatan kampanye #SawitBaik dalam rangka meningkatkan persepsi positif masyarakat dalam negeri terhadap sawit sesuai usulan rekomendasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>22. Menyelenggarakan <i>Talk Show</i> Milenial Bareng Sawit di Jakarta, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang, dan Bali.</p> | <p>20. The palm oil exhibition at the China Asean Expo at Nanning in September 2019 and the 2nd China International Import Expo palm oil exhibition in November 2019 to maintain and expand the palm oil market in China as recommended by the Ministry of Trade;</p> <p>21. Implementation of a series of #SawitBaik campaign activities to increase the positive perception of the domestic community towards palm oil, in line with the recommendations of the Ministry of Communication and Information Technology;</p> <p>22. Organized Millennial Talk Show with Palm Oil in Jakarta, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang, and Bali.</p> |
|---|--|

Kontribusi dalam Pembayaran Pajak Contribution to Tax Payment

Terkait dengan hasil kinerja keuangan, BDPKKS memenuhi kewajiban melalui pembayaran pajak. BDPKKS berperan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak-pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi, PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan, dan PPh pasal 22 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Setoran pajak BDPKKS pada tahun 2019 adalah sebesar Rp355.303.459.610 menurun sebesar 36,38% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp558.504.297.871.

With regard to financial performance results, OPPFMA fulfills its obligations by paying taxes. OPPFMA has a role in deducting, depositing, and reporting taxes, such as Income Tax (PPh) Article 21 on income received by individual taxpayers, Article 23 Income Tax on income received by corporate taxpayers, Income Tax Article 22, and Value Added Tax. (PPN).

In 2019, OPPFMA paid taxes amounted to Rp355,303,459,610, decreased by 36.38% compared to 2018, which was Rp558,504,297,871.

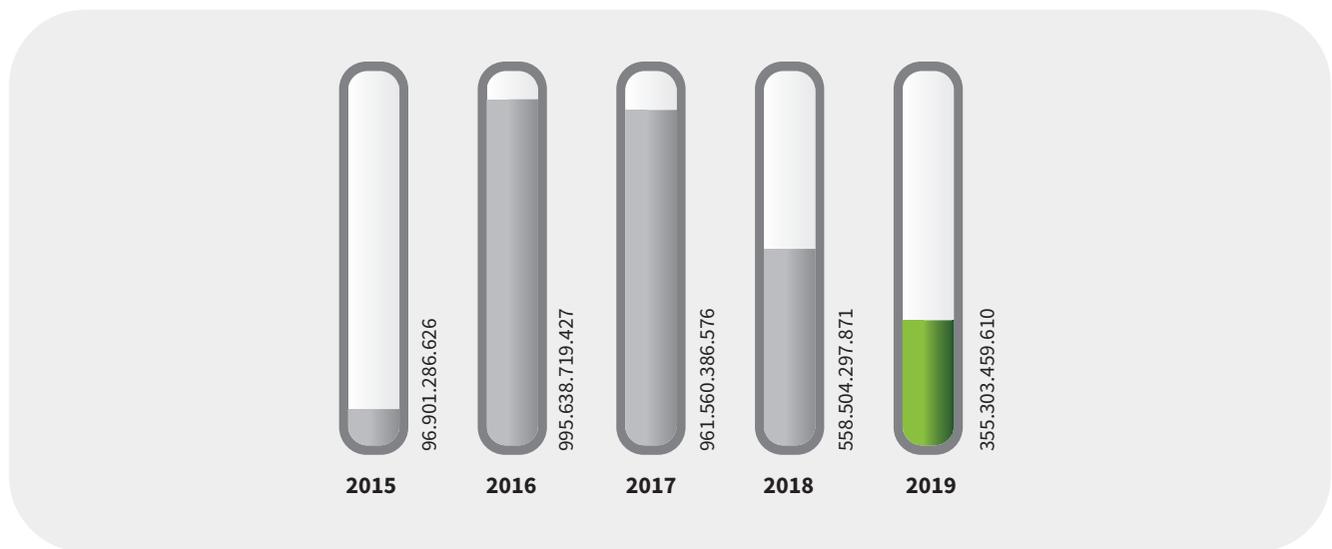
Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2015-2019 (Rp)
Table: Tax Payment in 2015-2019 (Rp)

Jenis Pajak Type of Tax		2015	2016	2017	2018	2019
PPh Pasal 21	PPh Article 21	1.828.666.044	4.315.651.785	5.193.661.022	5.945.583.364	7.450.139.636
PPh Pasal 22	PPh Article 22	27.212.910	168.223.734	68.017.729	79.781.048	41.653.807.424
PPh Pasal 23	PPh Article 23	1.839.824.262	3.695.142.799	3.367.148.124	2.964.179.645	3.442.568.975
PPh Pasal 4	PPh Article 4	-	995.235.480	796.438.218	874.421.856	908.490.240
PPN	VAT	93.205.583.410	986.464.465.629	952.135.121.484	548.640.331.958	301.848.453.335
Jumlah	Total	96.901.286.626	995.638.719.427	961.560.386.576	558.504.297.871	355.303.459.610



Setoran Pajak BPDPKS pada tahun 2019 adalah Rp355.303.459.610.
In 2019, OPPFMA paid taxes amounted to Rp355,303,459,610.

Grafik Pembayaran Pajak Tahun 2015-2019 (Rp)
 Graph: Tax Payment in 2015-2019 (Rp)



BPDPKS tidak pernah terlambat dalam penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan dan Bulanan), serta tidak pernah terlambat dalam penyampaian dokumen wajib yang harus dilaporkan kepada regulator.

OPPFMA always submits tax liability documents (Annual and Monthly SPT) on time. OPPFMA also submits mandatory documents to the regulators promptly.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPPPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPPPKS
Tanggung Jawab Sosial BPPPKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional

Operational Performance Analysis



Analisis Pencapaian Kinerja Utama

Key Performance Achievement Analysis

Berikut adalah pencapaian Indeks Kinerja Utama BDPKKS selama Tahun 2019:

The following are the achievements of the OPPFMA's Key Performance Index during 2019:

Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama BDPKKS Tahun 2019
Table: OPPFMA's Key Performance Indicators Achievement in 2019

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Strategic Objectives/Key Performance Indicator		Target				Realisasi Realization			
		Q1	Q2/Smt I H1	Q3/ up to Q3	Q4/ Y-19	Q1	Q2/Smt I H1	Q3/ up to Q3	Q4/ Y-19
1 Terwujudnya dana kelapa sawit yang sustainable Realization of a sustainable palm oil fund									
Persentase pendapatan dana yang sesuai RBA	Percentage of fund income in line with RBA	-	-	25%	50%	-	-	-	N/A
Deviasi target harga CPO	Deviated CPO prices	15%	15%	15%	15%	(5,53%)	(9,65%)	(6,75%)	19,12%
2 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi High service user satisfaction									
Indeks kepuasan pengguna layanan	Service user satisfaction index	-	-	-	3,22	-	-	-	3,60
3 Perencanaan kebijakan yang berkualitas Quality policy planning									
Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan strategis	Timeliness of strategic policy completion	-	-	100%	-	-	-	100%	-
Persentase penyelesaian Standar Operasional Prosedur	Percentage of completion of Standard Operating Procedures	-	-	-	100%	-	-	-	110%
4 Penyelenggaraan penghimpunan dana yang optimal Optimal funding									
Persentase imbal hasil dana kelolaan	Return on managed funds ratio	7% pa	7% pa	7% pa	7% pa	7,70%	7,61%	7,56%	7,54%
5 Penyelenggaraan penyaluran dana untuk petani dan pengembangan SDM Sawit Fund disbursement for palm oil's smallholders and HR development									
Persentase penyelesaian program replanting	Percentage of replanting program completion	5%	25%	50%	100%	7,6%	12,48%	38,16%	100%
Persentase penyelesaian pengembangan SDM Sawit	Percentage of completion of HR development in Palm Oil	5%	30%	60%	100%	12%	36%	60%	100%
Persentase penyelesaian program pemenuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit	Percentage of completion of palm oil plantation facilities and infrastructure	-	-	50%	100%	-	-	N/A	N/A

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Strategic Objectives/Key Performance Indicator		Target				Realisasi Realization			
		Q1	Q2/Smt I H1	Q3/ up to Q3	Q4/ Y-19	Q1	Q2/Smt I H1	Q3/ up to Q3	Q4/ Y-19
6	Penyelenggaraan penyaluran dana untuk biodiesel dan pengembangan produk Fund disbursement for biodiesel and product development								
Jumlah riset yang dikelola	Number of managed researches	25	25	35	57	73	58	62	63
Persentase volume biodiesel yang disubsidi	Percentage of subsidized biodiesel volume	15%	30%	50%	85%	24,53%	49%	72%	103%
7	Penyelenggaraan penyaluran dana untuk promosi dan kemitraan Fund disbursement for promotion and partnership								
Persentase persepsi positif dari media massa terhadap sawit Indonesia	Percentage of positive perceptions from the mass media towards Indonesia's palm oil	-	40%	-	45%	-	57,48%	61,91%	65,38%
Persentase tindak lanjut program kemitraan	Percentage of follow-up on the partnership program	-	50%	-	60%	-	50%	50%	65%
8	Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel Accountability of fund management								
Opini laporan keuangan	Financial statement opinion	4	-	-	4	4	-	-	4
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti	Percentage of follow-up on the recommendations of BPK and APIP's audits	-	-	-	89%	10%	40%	71%	95%
9	SDM yang kompetitif Competitive HR								
Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi	Percentage of Competency Development Fulfillment	-	25%	25%	50%	-	37%	48%	59,72%
10	Organisasi yang kondusif Conducive organization								
Persentase kematangan penerapan manajemen risiko	Percentage of maturity in the risk management	-	-	-	75%	-	-	-	80%
Nilai Kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> (SFO)	Value of the quality of Strategy Focused Organization (SFO) performance management	-	-	-	70	-	-	-	-
11	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern Management of optimal and modern facilities and ICT								
Persentase modernisasi pengelolaan BLU	Percentage of BLU management modernization	-	100%	-	100%	-	130%	130%	120%



Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Strategic Objectives/Key Performance Indicator	Target				Realisasi Realization			
	Q1	Q2/Smt I H1	Q3/ up to Q3	Q4/ Y-19	Q1	Q2/Smt I H1	Q3/ up to Q3	Q4/ Y-19
12 Pengelolaan anggaran yang optimal Optimal budget management								
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran internal Satker BDPD Sawit sebagaimana baseline	95%	95%	95%	95%	99,42%	99,08%	95,70%	93,91%

Status capaian IKU adalah sebagai berikut:
KPI's achievement status is as follows:

100% ≤ X ≤ 120% (memenuhi ekspektasi) (met expectation)	80% ≤ X ≤ 100% (belum memenuhi ekspektasi) (yet to meet expectation)	X ≤ 80% (tidak memenuhi ekspektasi) (did not meet expectation)	(belum dapat diukur/ realisasi bulanan) (cannot be measured/ realized monthly)
---	--	--	---

Terwujudnya Dana Kelapa Sawit yang Sustainable Realization of a Sustainable Palm Oil Fund

Persentase Pendapatan Dana yang Sesuai RBA Percentage of Fund Income in Line with RBA

Tabel Persentase Pendapatan Dana yang Sesuai RBA
Table: Percentage of Fund Income in Line with RBA

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	Pol/KP
Target	-	-	50%	100%	
Realisasi Realization	-	-	-	-	Max/TLK
Capaian Achieved	N/A	N/A	N/A	N/A	

Dana pendapatan BDPDKS terdiri dari Pendapatan Pungutan Dana Kelapa Sawit, Pendapatan atas Pengelolaan Dana dan Pendapatan lain-lain.

OPPFMA's income originates from Income from Fund Collection of Oil Palm Plantation, Income from Fund Management, and Other Income.

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Realisasi Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.453.273.213.689 yang terdiri dari Pendapatan Pungutan sebesar Rp(42.394.103.543), Pendapatan Pengelolaan Dana sebesar Rp1.494.585.115.931 dan Pendapatan lain-lain yang berasal dari pengembalian belanja tahun lalu dan denda sebesar Rp1.082.201.301.

In 2019, the Income amounted to Rp1,453,273,213,689, consisting of Fund Collection of Rp (42,394,103,543), Income from Fund Management of Rp1,494,585,115,931, and Other Income from restitution of last year's expenditures and fines of Rp1,082,201,301.

Tabel Pendapatan BPDP Sawit Tahun 2019

Table: Plantation Fund Management Agency (PFMA) Income in 2019

Tahun 2019 2019	Pendapatan Pungutan Dana Sawit Income from Fund Collection of Oil Palm Plantation	Pendapatan atas Pengelolaan Dana Income from Fund Management	Pendapatan Lain-lain Other Income	Total Pendapatan Total Income
Januari January	0	137.325.080.129	8.547.353	137.333.627.482
Februari February	0	124.767.825.206	246.177.066	125.014.002.273
Maret March	0	137.660.850.394	122.581	137.660.972.975
April	0	132.753.596.759	117.108.281	132.968.765.040
Mei May	0	134.599.610.446	143.994.419	134.653.044.865
Juni June	(27.295.170.884)	128.796.952.299	50.086.624	101.602.826.943
Juli July	(4.700.205.197)	133.325.004.313	32.492.162	128.872.205.165
Agustus August	(65.639.228)	120.547.928.833	6.496.581	120.482.289.605
September	(43.449.703)	116.695.635.037	204.626.503	116.856.811.837
Oktober October	(71.012.707)	112.658.300.777	250.110.563	112.837.398.633
November	(3.054.598.924)	107.785.565.096	6.988.370	104.737.954.542
Desember December	(7.164.026.900)	107.668.766.642	15.450.796	100.520.190.538
Total	(42.394.103.543)	1.494.585.115.931	1.082.201.301	1.453.273.213.689

Pada tahun 2019 Terdapat perbedaan produk hukum antara PMK No. 136/PMK.05/2019 yang diundangkan pada tanggal 30 September 2019 tentang perubahan ketiga atas PMK No 81/PMK.05/2019 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/10/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya, yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2019 terkait spesifikasi teknis yang digunakan untuk menentukan jenis kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya.

In 2019, there are differences in legal provisions between PMK No. 136/PMK.05/2019, which was promulgated on 30 September 2019 on the Third Amendment to the PMK No. 81/PMK.05/2019 on the Tariff of Service for the Oil Palm Plantation Fund Management Agency Public Service Agency in the Ministry of Finance, and the Minister of Trade Regulation No. 54/M-DAG/PER/7/2015 on the Verification or Technical Survey of Exports of Palm Oil, Crude Palm Oil (CPO), and Its Derivative Products, as amended by the Minister of Trade Regulation No. 90/M-DAG/PER/10/2015 on the Verification or Technical Survey of Exports of Palm Oil, Crude Palm Oil (CPO), and Its Derivative Products, which have been revoked by Minister of Trade Regulation No. 17 of 2019 on the technical specifications used to determine the type of palm oil, Crude Palm Oil (CPO), and its derivative products.



Dengan diundangkannya Peraturan tersebut, maka sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, besar tarif pungutan atas ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya adalah Rp0.

With the promulgation of this Regulation, from 1 October 2019 until 31 December 2019, the amount of levy on exports of Palm Oil, Crude Palm Oil (CPO), and its derivative products is Rp0.

Deviasi Target Harga CPO Deviated CPO Prices

Tabel Deviasi Harga CPO
Table: Deviated CPO Price

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	PoI/KP
Target	+/-15%	+/-15%	+/-15%	+/-15%	
Realisasi Realization	(5,53%)	(9,65%)	(6,75%)	19,12%	Max/TLK
Capaian Achieved	110%	110%	110%	100%	

Realisasi rata-rata harga CPO di Triwulan IV sampai dengan November 2019 sebesar 679/MT, sedangkan target rata-rata harga CPO di Triwulan IV 2019 sebesar \$570/MT. Sehingga terjadi deviasi harga sebesar 19,12% dari target yang ditetapkan, atau telah diluar direntang +/-15%.

The average CPO price in Quarter IV up to November 2019 was \$679/MT, while the average CPO price target in Quarter IV 2019 was \$570/MT. Therefore, there was 19.12% deviation to the predetermined target, or exceeding the +/-15% range.

Harga CPO mulai mengalami tren kenaikan sejak Bulan Agustus 2019 dan Triwulan IV sampai dengan Bulan Desember 2019 harga CPO rata-rata sebesar \$679/MT atau telah mengalami kenaikan sebesar 21,7% jika dibandingkan periode Triwulan III tahun 2019 dengan harga CPO rata-rata \$532/MT. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan stok dan produksi CPO yang menurun sedangkan permintaan minyak sawit meningkat baik untuk dalam negeri (Meningkatnya penyerapan CPO dalam bentuk energi) maupun permintaan luar negeri (ekspor CPO dan Turunannya meningkat) sejak triwulan III 2019. Selain itu, data statistik menunjukkan harga minyak sawit bergerak mengikuti kenaikan harga minyak kedelai di pasar Rotterdam.

CPO prices began to increase since August 2019. In Quarter IV up to December 2019, the average CPO price was \$679/MT or increased by 21.7% compared to Quarter III 2019, with an average CPO price of \$532/MT. This was due to a decrease in CPO stock and production, while the demand for palm oil increased both domestically (increased CPO absorption in the form of energy) and abroad (increased CPO exports and derivatives) since Quarter III 2019. In addition, statistical data showed that the palm oil price moved in line with the increase in the soybean oil price of the Rotterdam market.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Harga Rata-rata CPO CIF Rotterdam (USD\$/MT) Average Palm Oil Crude CIF Rotterdam (USD\$/MT)



Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi High Service User Satisfaction

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Service User Satisfaction Index

Tabel Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Table: Service User Satisfaction Index

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	PoI/KP
Target	-	-	-	3,32	
Realisasi Realization	-	-	-	3,6	Max/TLK
Capaian Achieved	N/A	N/A	N/A	108,43%	

Indeks kepuasan pengguna layanan diukur secara tahunan dan dilaksanakan pada Triwulan IV setiap tahunnya. Pengukuran berdasarkan *Customer Satisfaction Index* (CSI) yang diperoleh dari hasil survei kepuasan atas layanan dari BPDPKS kepada stakeholder yang mewakili unsur pemerintah (K/L), asosiasi sawit, akademisi, perusahaan, petani, dan pihak lain yang merupakan mitra kerja dan *stakeholder* yang berhubungan langsung dengan BPDPKS. Survei dilakukan dengan mekanisme melakukan kontak langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim BPDPKS dan konsultan.

The service user satisfaction index is measured annually and conducted in the fourth quarter every year. Customer Satisfaction Index (CSI) is measured based on the results of the service satisfaction survey from OPPFMA to stakeholders who represent the Ministries/Institutions (K/L), palm oil associations, academics, companies, farmers, and other parties who are the related working partners and stakeholders in OPPFMA. The survey was conducted directly, by method of asking questions prepared by the OPPFMA's team and consultants.



Pada tahun 2019 indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 3,60 (Skala 4) tercapai 108,43% dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 3,32 (Skala 4). Hal ini menunjukkan tercapainya target kepuasan pelayanan *stakeholder* pada tahun 2019.

In 2019, the service user satisfaction index was 3.60 (out of 4.0) or 108.43% compared to the 2019 target of 3.32 (out of 4.0). This reflects the target achievement of service satisfaction of the stakeholders in 2019.

Perencanaan Kebijakan yang Berkualitas Quality Policy Planning

Persentase Penyelesaian Kebijakan Strategis Percentage of Strategic Policy Completion

Tabel Persentase Kebijakan Strategis
Table: Strategic Policy Percentage

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	Po/KP
Target	-	-	100%	-	
Realisasi Realization	-	-	100%	-	Max/TLK
Capaian Achieved	N/A	N/A	100%	-	



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan strategis diukur secara tahunan (pada triwulan III). Kebijakan strategis yang dimaksud ialah penyelesaian dokumen Rencana Bisnis Tahunan (RBT). Rencana Strategis BPDPKS tahun 2020-2024 telah ditetapkan oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas dan telah disampaikan kepada Komite Pengarah.

RBT tahun 2021 akan menjadi bahan untuk penyusunan RBA TA 2021. Dokumen Rencana Bisnis Tahunan TA 2021 telah disusun dengan memperhatikan kebijakan komite pengarah dan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Direktorat teknis terkait. Dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Direksi.

KPI on the timeliness for strategic policy completion is assessed annually (in the third quarter). The strategic policy means the completion of the Annual Business Plan (RBT) document. The 2020-2024 OPPFMA Strategic Plan has been determined by the Board of Directors and Chairman of the Supervisory Board, and has been submitted to the Steering Committee.

2021 RBT will be the material for the preparation of the RBA for the 2021 Fiscal Year. The Annual Business Plan for 2021 FY has been prepared with due regards to the policies of the Steering Committee, and the results of coordination meetings with related technical Directorates. This document has been formulated by the Board of Directors.

Persentase Penyelesaian Standar Operasional Prosedur

Percentage of Completion of Standard Operating Procedures

Tabel Persentase Standar Operasional Prosedur

Table: Standard Operating Procedures

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	PoI/KP
Target	-	-	-	100%	
Realisasi Realization	-	-	-	110%	Max/TLK
Capaian Achieved	N/A	N/A	N/A	110%	

IKU penyelesaian SOP merupakan IKU baru pada tahun 2019. IKU persentase penyelesaian Standar Operasional Prosedur diukur secara tahunan (pada triwulan IV). Penyelesaian SOP ini menjadi sangat penting mengingat disamping karena sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dan adanya temuan dari tim pembinaan kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, juga karena terdapat beberapa kebijakan baru yang diberlakukan untuk BPDPKS sehingga diperlukan juga adanya update SOP.

Sampai dengan saat ini, telah dilakukan pengesahan atas SOP BPDPKS oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebanyak 71 SOP. SOP yang disahkan sebagian besar berupa SOP dari pelaksanaan tugas yang bersifat *supporting* sehingga perlu didorong untuk penyelesaian SOP untuk tugas-tugas yang bersifat inti (*core business*). Telah dilakukan penyelesaian SOP dari hasil pemeriksaan dan/atau pembinaan seperti SOP terkait dengan investasi dan SOP perjalanan dinas.

SOP completion is a new KPI in 2019. KPI for Completion of Standard Operating Procedures is assessed annually (in the fourth quarter). SOP completion is very important, taking into account the SOP as the basis for the duties implementation and the existence of audit findings from the Training Team of the Head Office of the Directorate General of Treasury. In addition, several new policies have been implemented, thereby OPPFMA shall update the relevant SOPs.

To date, 71 OPPFMA's SOPs have been ratified by the Secretariat-General of the Ministry of Finance. Most of the ratified SOPs are SOPs to support the duties implementation. Thus, it is necessary to encourage the completion of SOPs for the core business. SOPs from audit and/or training, such as SOP related to investment and business trip have been completed.



Penyelenggaraan Penghimpunan Dana yang Optimal Optimal Funding

Persentase Imbal Hasil Dana Kelolaan Return on Managed Funds Ratio

Tabel Persentase Imbal Hasil Dana Kelolaan
Table: Return on Managed Funds

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	PoI/KP
Target	6,75% pa	6,75% pa	6,75% pa	6,75% pa	
Realisasi Realization	7,70% pa	7,61% pa	7,56% pa	7,54% pa	Max/TLK
Capaian Achieved	110,00%	109,43%	108,00%	108,00%	

Imbal hasil dana kelolaan merupakan bagian dari kegiatan pengembangan dana sawit yang berkelanjutan meliputi pengelolaan kas dan investasi yang dilakukan BDPKKS.

Target tingkat imbal hasil atau ROI dari hasil pengelolaan dana sesuai RBA tahun 2019 adalah lebih besar dari 6,75% p.a sedangkan pencapaian *annualized weighted average* ROI sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 7,54% p.a dari total dana kelolaan pada posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp16,344 Triliun dengan pencapaian 108% dari target.

Jika dilihat dari tren semester 2 tahun 2019, tingkat pendapatan dari bunga deposito terus menurun. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga BI sebesar 50 bps sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Oktober 2019. Sementara itu, pada akhir tahun 2019 The Fed juga diprediksi mengalami penurunan tingkat suku bunga menjadi 1,75-2,00% p.a. Penurunan tingkat suku bunga tersebut berdampak pada tingkat suku bunga deposito khususnya *special rate*.

Dari sisi pendapatan BDPK Sawit dari hasil pengelolaan dana sampai dengan 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1,492 Triliun atau lebih besar 43% bila dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp445 Miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan rata-rata dana kelolaan yaitu Rp19,802 Triliun dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp15,610 Triliun.

Income from managed funds is a part of the sustainable development of palm oil funds, including cash and investment management made by OPPFMA.

The target of Return on Investment (ROI) from the RBA fund management in 2019 is greater than 6.75% p.a. Meanwhile, the ROI annualized weighted average up to 31 December 2019 is 7.54% p.a. of the total managed funds as of 31 December 2019, which amounted to Rp16,344 Trillion or 108% of the target.

Considering the trend in the second half of 2019, the income from deposit interest continues to decline. This was due to a decline in BI interest rate by 50 bps from August 2019 until October 2019. At the end of 2019, the Fed is also forecasted to experience a decline in the interest rate to 1.75-2.00% p.a. The decline in interest rates impacted deposit interest rates, especially the special rate.

In terms of OPPFMA's income, the income from fund management as of 31 December 2019 amounted to Rp1,492 trillion or 43% higher than the same period in the previous year of Rp445 billion. This was due to an increase in the managed funds of Rp19.802 trillion compared to the previous year, i.e. Rp15.610 trillion.

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Investasi Jangka Panjang (BDPKKS melaksanakan pembelian SUN pada tanggal 27 Desember 2019) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Posisi portofolio investasi jangka Panjang saat ini diisi oleh SUN seri FR0063 (tenor 15 Mei 2023) dan FR0065 (tenor 15 Mei 2033);
2. Settlement value kedua SUN tersebut di level Rp98,2 (FR0063) dan Rp92,5 (FR0065).

SUN seri FR0065 total unit 100 Miliar ditutup menguat pada level 92,766 atau naik 0,29% dari harga pembelian sebesar 92,50. *Accrued interest* sejak 27 - 31 Dec 2019 sebesar Rp127.400.000 (Rp891.800.000 - Rp764.400.000).

SUN seri FR0063 total unit 100 Miliar ditutup menguat pada level 98,204 atau naik 0,004% dari harga pembelian sebesar 98,20. *Accrued interest* sejak 27 - 31 Desember 2019 sebesar Rp108.200.000 (Rp757.200.000 - Rp649.000.000). Untuk sementara Investasi pada SUN belum dimasukkan dalam perhitungan IKU Imbal Hasil.

Long-term Investment (OPPFMA purchased SUN on 27 December 2019) as follows:

1. The current long-term investment portfolio is filled by FR0063 SUN (Government's Obligation) (tenor on 15 May 2023) and FR0065 (tenor on 15 May 2033);
2. The settlement value for those two types of SUN is Rp98.2 (FR0063) and Rp92.5 (FR0065).

FR0065 SUN amounted to 100 billion units, which closed higher at 92.766 or increased by 0.29% from the purchase price of 92.50. *Accrued interest* since 27-31 Dec 2019 amounted to Rp127,400,000 (Rp891,800,000 - Rp764,400,000).

FR0063 SUN amounted to 100 billion units, which closed higher at 98.204 or increased by 0.004% from the purchase price of 98.20. *Accrued interest* since 27-31 December 2019 amounted to Rp108,200,000 (Rp757,200,000 - Rp649,000,000). However, investment in SUN is yet to be included in the Return KPI.

Penyelenggaraan Penyaluran Dana untuk Petani dan Pengembangan SDM Sawit Fund Disbursement for Palm Oil's Smallholders and HR Development

Persentase Penyelesaian Program Replanting

Percentage of Replanting Program Completion

Persentase Penyelesaian Program Replanting

Percentage of Replanting Program Completion

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	PoI/KP
Target	5%	25%	50%	100%	
Realisasi Realization	7,6%	12,48%	75,14%	100%	Max/TLK
Capaian Achieved	120%	49,92%	120%	100%	

Sesuai dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2016 (perubahan Perpres Nomor 61 Tahun 2015), penyaluran dana replanting (peremajaan) kebun kelapa sawit merupakan bagian dari program sawit berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit dan luasan lahan sawit yang diremajakan.

In accordance with Presidential Decree No. 24 of 2016 (Amendment to the Presidential Decree No. 61 of 2015), the distribution of replanting funds for palm oil plantations is part of the sustainable palm oil program with the objective to increase the productivity of palm oil plantations and the rejuvenated area of palm oil.

Total penyaluran dana peremajaan sawit rakyat tahun 2019 sebesar Rp2.262 Miliar dengan lahan seluas 90.493 Ha. Realisasi Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang terdiri dari Penyaluran Dana PSR dan Dukungannya adalah sebesar 2.309 Miliar.

Jumlah rekomendasi teknis (rekomtek) yang masuk dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian ke BPDPKS sampai dengan triwulan IV tahun 2019 yaitu sebanyak 485 rekomtek. Dari jumlah tersebut, yang telah disalurkan ke petani sebanyak 485 rekomtek (capaian realisasi sebesar 100%). Saat ini penyaluran Dana PSR dapat terkontrol dan diawasi dengan penggunaan Aplikasi PSR Online. Penerapan Aplikasi PSR online pada bulan Juni 2019 memberikan dampak yang cukup signifikan terkait dengan percepatan penyaluran dana PSR, sehingga terjadi peningkatan penyaluran dana sebesar 722% pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

The total fund disbursement for small-scale palm oil Replanting in 2019 amounted to Rp2,262 Billion, covering 90,493 Ha. The Palm Oil Plantation Replanting Program, which consists of PSR Fund Disbursement and its Support amounted to Rp2,309 billion.

There were 485 recommendations (rekomtek) from the Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture, to OPPFMA, up to the fourth quarter of 2019. Of the 485 recommendations, all of them have been distributed to smallholders. (realization of 100%). Currently, the PSR Funds disbursement can be controlled and supervised by using the PSR Online Application. The PSR online application is implemented in June 2019, and had a significant impact on the acceleration of PSR fund disbursement, resulting in an increase of fund disbursement by 722% in 2019 compared to 2018.

Tabel Beban Penyaluran Peremajaan (Rp)
Table: Replanting Expenses Distribution (Rp)

Tahun 2019 2019	Penyaluran dana replanting Replanting fund disbursement	Perjalanan dinas Business trip	Bahan pendukung penyaluran dana replanting Supporting materials for replanting fund disbursement	Jasa profesional Professional fee	Total Penyaluran Program Replanting Total Replanting Program Distribution
Januari January	57.142.841.800	179.929.283	-	-	57.322.771.083
Februari February	165.246.535.000	116.303.398	-	-	165.362.838.398
Maret March	(168.385.885.000)	212.040.943	-	-	(168.173.844.057)
April	-	272.235.541	-	473.000.000	745.235.541
Mei May	(5.955.000)	1.005.103.259	108.438.000	480.216.000	1.587.802.259
Juni June	317.329.537.500	28.710.000	-	1.800.000	317.360.047.500
Juli July	793.956.906.688	327.525.500	-	9.000.000	794.293.432.188
Agustus August	46.347.463.427	329.477.473	-	-	46.676.940.900
September	408.322.252.385	328.104.429	-	-	408.650.356.814
Oktober October	254.096.280.000	179.925.977	-	-	246.734.530.977
November	360.342.792.500	948.670.644	16.797.440	-	361.308.260.584
Desember December	298.712.735.977	464.562.144	-	-	299.177.298.121
Total	2.525.563.830.277	3.928.026.447	125.235.440	964.016.000	2.531.045.670.308

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Sesuai dengan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BPDP Sawit Tahun 2019 dan memperhatikan arahan Komite Pengarah terkait perubahan alokasi anggaran, alokasi dana untuk program subsidi peremajaan/*replanting* pada DIPA tahun 2019 adalah sebesar Rp2,36 Triliun dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- Penyaluran dana bantuan peremajaan Kebun Kelapa Sawit sebesar Rp2,14 Triliun;
- Dana dukungan dalam rangka penyaluran dana bantuan peremajaan sebesar Rp220 Miliar.

In accordance with the 2019 OPPFMA's Revised Detailed Budget Allocation and taking into account the Steering Committee's directives regarding changes in the budget allocation, the fund allotted for the replanting subsidy program at DIPA in 2019 amounted to Rp2.36 trillion, with details of the fund ceiling as follows:

- The distribution of funds for palm oil plantation Replanting of Rp2.14 trillion;
- The distribution of supporting funds to assist the Replanting of Rp220 billion.

Persentase Penyelesaian Pengembangan SDM Sawit Percentage of Completion of HR Development in Palm Oil

Tabel Persentase Penyelesaian Pengembangan SDM Sawit
Table: Percentage of Completion of HR Development in Palm Oil

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	Pol/KP
Target	10%	30%	60%	100%	
Realisasi Realization	60%	60%	60%	100%	Max/TLK
Capaian Achieved	120%	120%	100%	100%	

Total Program Pengembangan SDM yang dikelola adalah 30, dengan rincian pembobotan program pendidikan diberi index 3, (3 x jumlah kegiatan yang dikelola); Jumlah kegiatan yang dikelola adalah:

- 1 angkatan Program Pendidikan D1 - 2019 sebanyak 299 mahasiswa di AKPY;
- 6 angkatan Program Pendidikan D3 (2017 - 2019) yaitu sebanyak 298 mahasiswa di LPP (3 angkatan), sebanyak 180 mahasiswa di CWE (2 angkatan), sebanyak 90 mahasiswa Kampar (1 angkatan); dan
- 3 angkatan Program Pendidikan D4 sebanyak 30 mahasiswa di LPP, sebanyak 30 mahasiswa di CWE dan sebanyak 60 mahasiswa di STIPAP.

Telah diselesaikan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan kelengkapan regulasi terkait Juklak/Pedoman Umum pengembangan SDM dan Perdirut SDM. Total penyaluran bulan Desember adalah Rp4.699.820.705.

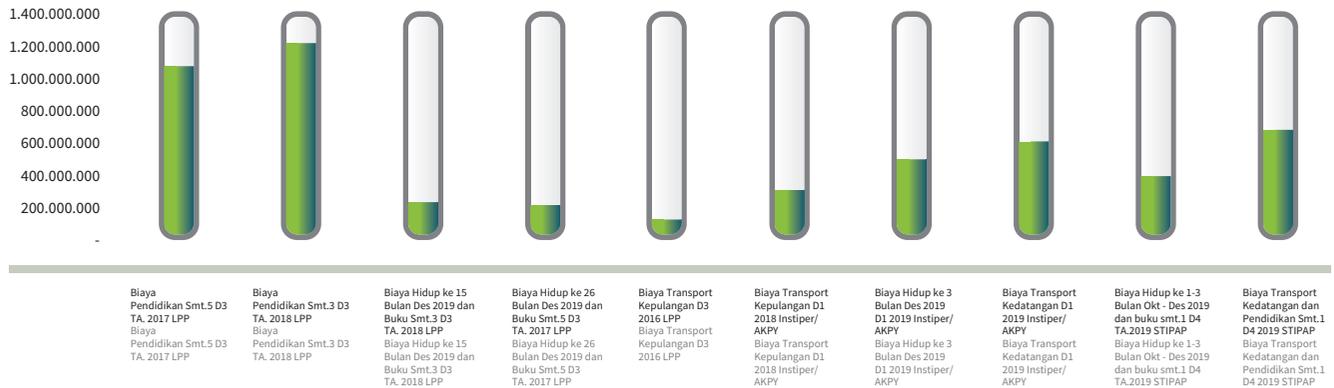
There are 30 HR Development Program managed, with details of the education programs weigh 3 times of the index (3 times of the managed activities); The number of activities managed are:

- 1 Young Diploma (D1) Education Program in 2019 of 299 AKPY college students;
- 6 batches of Young Diploma (D3) Education Program (2017-2019) for 298 LPP students (3 batches), 180 CWE students (2 batches), and 90 Kampar students (1 batch); and
- 3 batches of Young Diploma (D4) Education Program for 30 LPP students, 30 CWE students, and 60 STIPAP students.

The audit findings of the Inspectorate General of the Ministry of Finance have been resolved, and the completeness of regulations related to the General Guidelines for HR development and HR Regulation. Total disbursements in December amounted to Rp4,699,820,705.

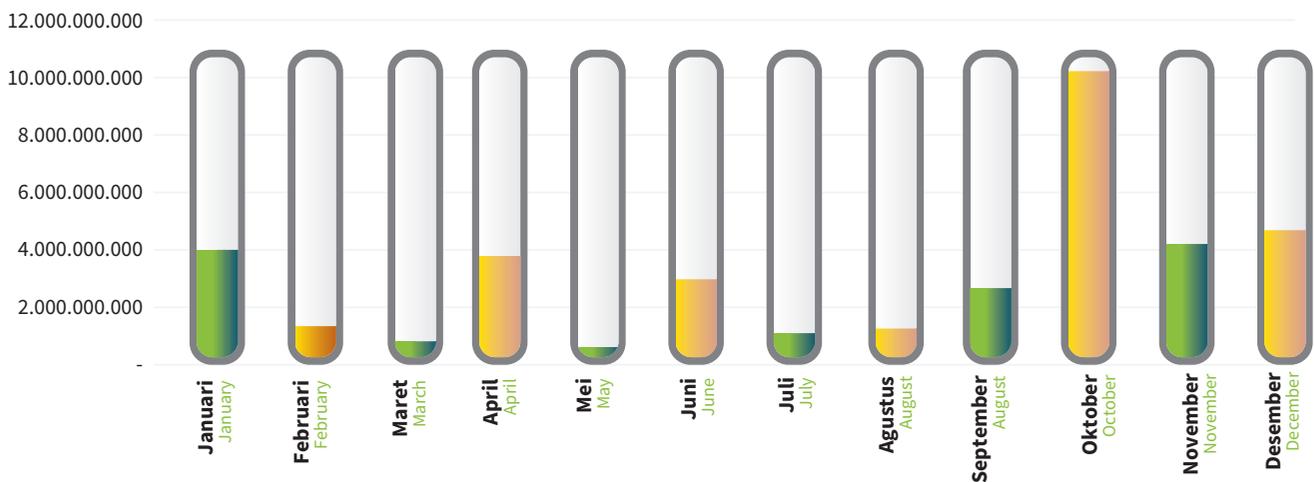


Rekapitulasi Penyaluran Dana Pengembangan SDM Tahun 2019
Recapitulation of Human Resources Development of 2019 Development Fund Disbursement



Realisasi Penyaluran Januari - Desember adalah sebesar Rp36.576.950.182.
Realization of January-December Disbursement amounted to Rp36,576,950,182.

Rekapitulasi Penyaluran Program Pengembangan SDM Januari - Oktober 2019
Recapitulation of HR Development Program Disbursement January - October 2019

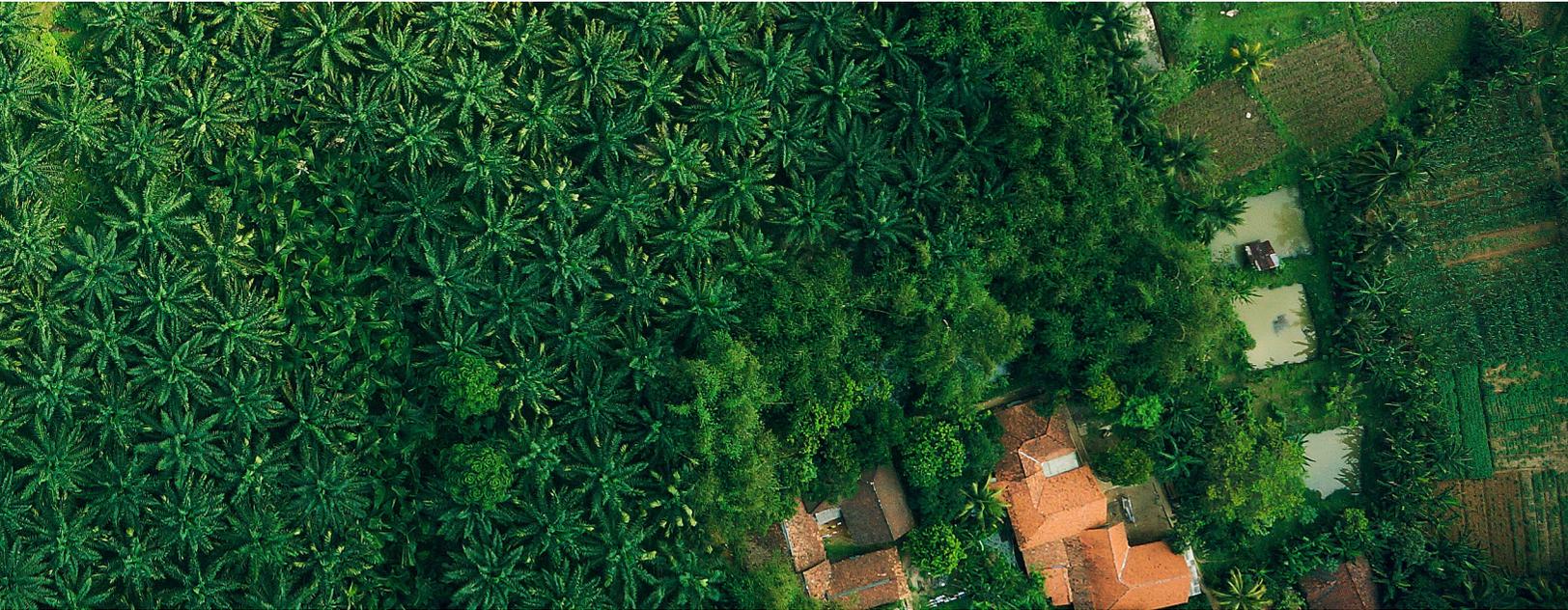


Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPPPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPPPKS
Tanggung Jawab Sosial BPPPKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis



Mapping Pendanaan Pengembangan SDM Tahun 2019 (Pelatihan Masyarakat Umum dan Beasiswa)
HR Development Funding Mapping in 2019 (General Public Training and Scholarships)



Provinsi / Province	Total Kelas Pelatihan / Total Training Class	Total SDM yang dilatih / Total HR trained	Total Mahasiswa Penerima Beasiswa / Total Scholarship Recipients
19	107	3.300	1.950

Tabel Beban Pengembangan SDM Sawit
Table: Palm Oil HR Development Expenses

Tahun 2019 2019	Penyaluran dana pengembangan SDM Sawit Disbursement of Palm Oil HR development fund	Perjalanan Dinas Penyaluran Dana pengembangan SDM Sawit Fund disbursement for Business Trip of Palm Oil HR development	Dukungan Penyaluran Dana Dukungan pengembangan SDM Sawit Fund Disbursement for Palm Oil HR development support	Total Penyaluran Dana Program Pengembangan SDM Sawit Total Fund Disbursement for Palm Oil HR Development Program
Januari January	1.073.520.000	5.684.000	-	1.079.204.000
Februari February	3.870.263.340	41.257.678	-	3.911.521.018
Maret March	775.910.000	15.788.500	-	791.698.500
April	4.527.660.000	10.028.000	-	4.537.688.000
Mei May	(432.413.233)	43.455.250	-	(388.957.983)
Juni June	2.936.560.000	2.940.000	5.000.000	2.944.500.000
Juli July	912.560.000	158.714.164	-	1.071.274.164
Agustus August	509.560.000	35.162.306	-	544.722.306
September	1.887.882.746	58.092.953	-	1.945.975.699
Oktober October	1.449.660.000	20.398.000	-	1.620.058.000
November	13.646.679.770	20.801.200	-	13.667.480.970
Desember December	5.377.040.405	6.590.000	24.000.000	5.407.630.405
Total	36.534.883.028	418.912.051	29.000.000	36.982.795.079

Alokasi dana untuk pengembangan SDM sawit tahun 2019 adalah sebesar Rp214 Miliar dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- Pelatihan Petani dan Masyarakat Sawit sebesar Rp16,8 Miliar;
- Beasiswa Pendidikan Sawit sebesar Rp35,6 Miliar;
- Dukungan dana pengembangan SDM sawit sebesar Rp9,6 Miliar.

The fund allotted for palm oil HR development in 2019 amounted to Rp214 billion, with details of the fund's ceiling as follows:

- Palm Oil Community and Smallholders Training of Rp16.8 billion;
- Palm Oil Education Scholarship of Rp35.6 billion;
- Supporting fund for palm oil HR development of Rp9.6 billion.

Persentase Penyelesaian Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Percentage of Completion of Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure

Tabel Persentase Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Table: Percentage of Completion of Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	Pol/KP
Target	-	-	50%	100%	
Realisasi Realization	-	-	-	-	Max/TLK
Capaian Achieved	N/A	N/A	N/A	100%	

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Peraturan Direktur Utama dan SOP Penyaluran dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (SPPKS) yang menjadi dasar penyaluran dana masih menunggu penetapan dari Direktur Utama.

Keluarnya Peraturan Menteri Pertanian No 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, mengharuskan Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun peraturan teknis pemberian dana Sarana dan Prasarana.

Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 274/Kpts/OT.050/11/2019 Tanggal 21 November 2019 Tentang Pedoman Pemberian Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Yang Menggunakan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Saat ini draft Final Peraturan Direktur Utama Tentang Penyaluran Dana Sarana Prasarana sudah disusun sambil berkoordinasi tentang kesiapan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melakukan sosialisasi dan mengeluarkan Rekomendasi Terknis Penyaluran Dana Sarana Prasarana. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Ditjenbun:

President Director's Regulation and SOP of Fund Disbursement for Facilities and Infrastructure of Palm Oil Plantation (SPPKS) as the basis for fund disbursement are still waiting for approval from President Director.

The issuance of the Minister of Agriculture Regulation No.7 of 2019 on Human Resource Development, Research and Development, Replanting, and Facilities and Infrastructure for Palm Oil Plantations, requires the Directorate General of Plantations to compile technical regulations for fund disbursement of Facilities and Infrastructure.

Director-General of Plantations Decree No. 274/Kpts/OT.050/11/2019 has been issued on 21 November 2019 on the Guidelines for Provisions of Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure Using Funds from the Oil Palm Plantation Fund Management Agency.

Currently, the final draft of the President Director's Regulation on the Fund Disbursement of Facilities and Infrastructure has been in coordination with the Directorate General of Plantation, to socialize and issue a Technical Recommendation for the Fund Disbursement of Facilities and Infrastructure. Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure Needs, based on the Detailed Budget (RAB) submitted by the Directorate General of Plantations:

Pengembangan Kelapa Sawit Perkebun (2500 Ha) Palm Oil Plantation Development (2500 Ha)	Insentifikasi (8000 Ha) Incentive (8000 Ha)	Peningkatan Jalan Kebun (6000 Ha) Garden Road Improvement (6000 Ha)	Sertifikasi ISPO ISPO Certification
Benih Seed	Pupuk Fertilizer	Peningkatan Jalan Produksi Production Road Improvement	10 Paket 10 Packages
Pupuk Fertilizer	Pestisida Pesticide	Peningkatan Jalan Koleksi Collection Road Improvement	
Pestisida Pesticide		Pemeliharaan <i>Main Drain</i> Main Drain Maintenance	
		Membuat Jembatan Bridge Construction	

Alokasi dana untuk penyaluran dana sarana prasarana tahun 2019 adalah sebesar Rp214 Miliar dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- Penyaluran dana sarana prasarana sebesar Rp194,4 Miliar;
- Dana Pendukung sarana prasarana sebesar Rp19,6 Miliar.

The fund allotted for fund disbursement of facilities and infrastructure in 2019 amounted to Rp214 billion, with details of the fund's ceiling as follows:

- Fund disbursement of facilities and infrastructure amounted to Rp194.4 billion;
- Supporting fund for facilities and infrastructure of Rp19.6 billion.



Tabel Beban Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2019
Table: Expenses of Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure in 2019

Tahun 2019 2019	Penyaluran dana Sarpras Fund disbursement of Facilities and Infrastructure	Perjalanan Dinas Penyaluran Dana Sarpras Business Trip for Fund Disbursement of Facilities and Infrastructure	Dukungan Penyaluran Dana Dukungan Supporting Fund for Fund Disbursement	Jasa Profesional Services Professional	Total Penyaluran Dana Program Pengembangan SDM Sawit Total Fund Disbursement for Palm Oil HR Development Program
Januari January	-	-	-	-	-
Februari February	-	-	-	-	-
Maret March	-	-	-	-	-
April	-	43.000.000	-	-	43.000.000
Mei May	-	33.590.000	-	-	33.590.000
Juni June	-	37.800.000	-	-	37.800.000
Juli July	-	121.050.000	-	-	121.050.000
Agustus August	-	216.576.973	18.232.500	-	234.809.473
September	-	9.702.000	-	-	9.702.000
Oktober October	-	19.063.807	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember December	-	-	-	-	-
Total	-	480.782.780	18.232.500	-	479.951.473

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Penyelenggaraan Penyaluran Dana dan Pengembangan Produk Fund Disbursement and Product Development

Jumlah Riset yang Dikelola

Number of Managed Researches

Tabel Jumlah Riset yang Dikelola

Table: Number of Managed Research

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	PoI/KP
Target	25	25	35	57	
Realisasi Realization	73	58	62	63	Max/TLK
Capaian Achieved	120%	120%	120%	110%	

Total penelitian dan pengembangan yang dikelola sampai bulan November 2019 adalah sebanyak 63 penelitian, yaitu:

- 12 penelitian lanjutan dari riset tahun 2015 dan 2016 (kelompok K18-1);
- 39 Penelitian lanjutan dari riset tahun 2018 (kelompok K18-2);
- 12 Riset inisiatif dari Kementerian anggota Komite Pengarah yaitu:
 - 1 Riset Inisiatif Kemenperin dengan LPPM IPB (Seafast) tentang mitigasi 3MCPDE dan GE;
 - 4 Inisiatif Kemenko Bidang Perekonomian kerjasama dengan:
 - P3HH Kementerian LHK tentang pemanfaatan limbah sawit untuk produk perikanan;
 - PT RPN tentang Kajian *Position paper* Indonesia terhadap kebijakan ILUC/RED II EU;
 - LPEM UI tentang Kajian Dampak Bea Keluar dan Pungutan Ekspor Sawit;
 - Fakultas Kehutanan IPB tentang Sejarah, Asal Usul Status Lahan Sawit di Sumsel.

The total research and development managed until November 2019 are 63 studies:

- 12 follow-up studies from research in 2015 and 2016 (K18-1 group);
- 39 follow-up studies from research in 2018 and 2016 (K18-2 group);
- 12 initiatives from the Ministries of the Steering Committee:
 - 1 Initiative from the Ministry of Industry with LPPM IPB (Seafast) on 3MCPDE and GE mitigation;
 - 4 Initiatives from the Coordinating Ministry for Economic Affairs in collaboration with:
 - P3HH of the Ministry of Environment and Forestry regarding the utilization of palm oil waste for timber products;
 - PT RPN, on the Study of Indonesia's Position on the EU ILUC/RED II policy;
 - LPEM UI on the Impact of Export Duties and Palm Export Levies;
 - IPB's Faculty of Forestry on History, the Origin of Palm Oil Land Status in South Sumatra.

3. 7 Riset Inisiatif Kementerian ESDM kerjasama dengan:

- a) LEMIGAS tentang pengujian Produk hasil *Co-Processing* untuk *Green Fuels*;
- b) LEMIGAS, Pusyantek BPPT dan BT2MP BPPT tentang Uji Jalan B30, Spesifikasi bahan bakar dan kinerja kendaraan dan handling&storage Biodiesel (3 Kajian);
- c) P3TKEBTKE tentang Peta Jalan Biofuels berbasis Sawit;
- d) LEMIGAS tentang Pemanfaatan Bahan Bakar B30 non Kendaraan;
- e) LPIK ITB tentang Operasi *Co-Processing* Produksi Bahan Bakar Nabati.

3. 7 Initiatives from the Ministry of Energy and Mineral Resources in collaboration with:

- a) LEMIGAS on the testing of *Co-Processing* Products for *Green Fuels*;
- b) LEMIGAS, Pusyantek BPPT, and BT2MP BPPT on the B30 Road Testing, Fuel specifications and vehicle performance and Biodiesel handling & storage (3 Research);
- c) P3TKEBTKE on the Palm Oil Based Biofuels Road Map;
- d) LEMIGAS on the B30 Utilization for Non-Vehicle Fuels;
- e) LPIK ITB on Bio-Fuel Production *Co-Processing* Operations.

Tabel Penyaluran Dana Program Riset Tahun 2019 (Rp)
Table: Fund Disbursement for Research Program in 2019 (Rp)

Tahun 2019 2019	Penyaluran Dana Riset Research Fund Disbursement	Honorarium Komite Riset Research Committee Honorary	Perjalanan Dinas Business trip	Bahan Pendukung Penyaluran Dana Riset Supporting Materials for Research Fund Disbursement	Jasa Profesional Professional Fee	Total Penyaluran Dana Program Riset Total Research Fund Disbursement
Januari January	353.938.280	-	40.604.639	-	-	394.542.919
Februari February	1.698.187.700	-	61.951.950	-	-	1.760.139.650
Maret March	9.946.872.064	-	537.641.850	-	4.000.000	10.488.513.914
April	20.613.983.677	-	577.009.000	6.549.000	145.915.000	21.343.456.677
Mei May	14.237.812.575	276.750.000	212.589.892	-	53.000.000	14.780.152.467
Juni June	6.049.274.592	-	2.490.000	-	-	6.051.764.592
Juli July	5.126.791.413	-	482.585.844	43.065.000	342.500.000	5.994.942.257
Agustus August	1.480.881.142	-	303.800.000	-	414.759.000	2.199.440.142
September	15.442.949.405	-	649.661.633	311.630.000	453.144.500	16.857.385.538
Oktober October	4.760.111.497	140.700.000	59.366.000	-	2.000.000	4.962.177.497
November	17.719.140.750	41.500.000	17.468.600	96.888.000	192.720.000	18.067.717.350
Desember December	19.408.676.733	82.193.650	43.094.350	-	36.200.000	19.570.164.733
Total	116.768.325.478	581.950.000	3.058.558.108	458.132.000	1.644.238.500	122.511.204.086

Sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BPDP Sawit Tahun 2019, alokasi anggaran untuk penyaluran dana riset tahun 2019 adalah sebesar Rp214 Miliar dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- Penyaluran dana riset sebesar Rp209,3 Miliar;
- Dukungan dana riset sebesar Rp4,7 Miliar.

In accordance with the 2019 OPPFMA Detailed Budget Allocation (POK), the fund allotted for research in 2019 is Rp214 billion, with details of the fund's ceiling as follows:

- Research fund disbursement of Rp209.3 billion;
- Research funding support of Rp4.7 billion.

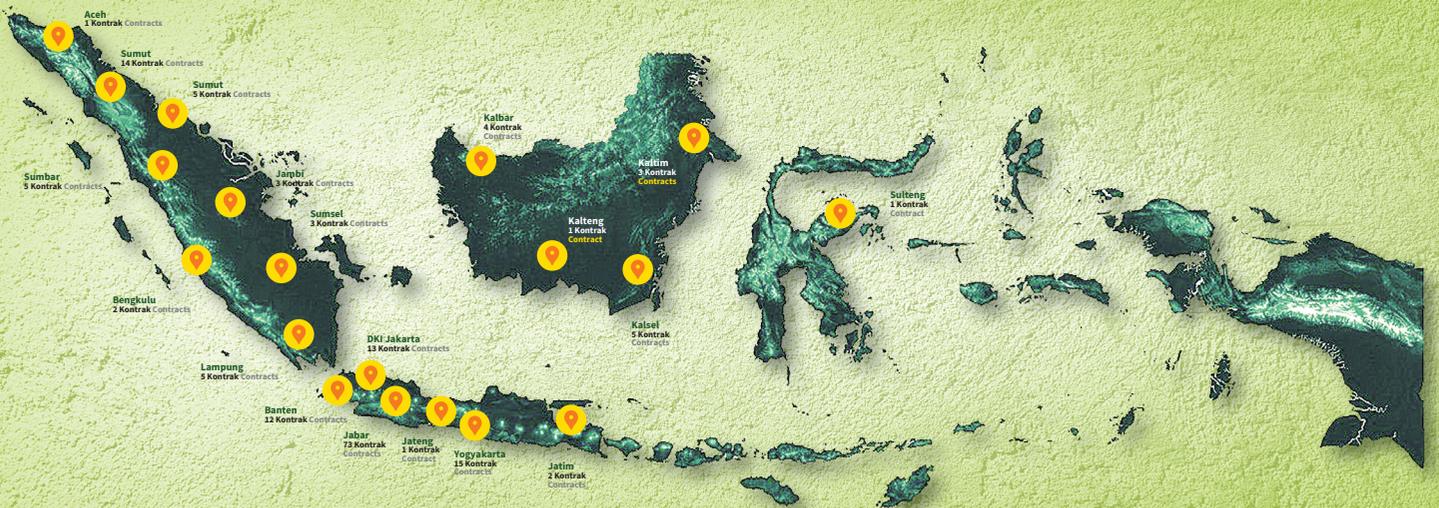
Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPPPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPPPKS
Tanggung Jawab Sosial BPPPKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Peta Sebaran Pendanaan Litbang Sawit (2015-2019)
Peta Sebaran Pendanaan Litbang Sawit (2015-2019)



Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Research and Development Activities



Persentase Volume Biodiesel yang Disubsidi

Percentage of Subsidized Biodiesel Volume

Tabel Persentase Volume Biodiesel yang Disalurkan dalam Skema Pembiayaan BDPKKS
Table: Percentage of Biodiesel Volume Distributed in the OPPFMA's Financing Scheme

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	PoI/KP
Target	15%	30%	50%	85%	
Realisasi Realization	25%	49%	75%	103%	Max/TLK
Capaian Achieved	120%	120%	120%	120%	

Pelaksanaan uji terap B30 di 8 (delapan) titik serah yang dianggap dapat mewakili model penyaluran (moda transportasi dan jarak tempuh) untuk mengetahui spesifikasi Biodiesel dan B30 yang disalurkan.

Terdapat potensi gap antara produksi biodiesel pada BU BBN dengan kebutuhan biodiesel pada BU BBM per bulannya di tahun 2020 sesuai dengan alokasi dan titik serah yang telah ditentukan.

Diperlukan perhitungan kembali terkait jumlah pendanaan penggunaan Floating Storage Balikpapan dan Shore Terminal milik PT WINA di Balikpapan untuk masing-masing pihak (BU BBN, Pertamina dan BDPKKS).

B30 test was conducted at eight (8) delivery points, which are considered to represent the distribution model (mode of transportation and distance traveled) to determine the specifications for distributed Biodiesel and B30.

There is a potential gap between biodiesel production at BU BBN and the need for biodiesel at BU BBM per month in 2020 in accordance with the predetermined allocation and delivery point.

It is necessary to recalculate the funding for the use of Floating Storage at Balikpapan and Shore Terminal owned by PT WINA in Balikpapan for each party (BU BBN, Pertamina, and OPPFMA).



Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Realisasi Volume Penyaluran Biodiesel di tahun 2019 mencapai 6.374.646.862 Liter. Realization of Biodiesel Distribution Volume in 2019 reached 6,374,646,862 Liters

Tabel Penyaluran Dana Program Riset Tahun 2019 (Rp)

Table: Expenses for Biodiesel Price Variance Payment in 2019 (Rp)

Tahun 2019 2019	Beban Pembayaran Selisih Harga Biodiesel (Rp) Expenses of Biodiesel Price Variance Payment (Rp)				Total Penyaluran Dana Biodiesel Total Biodiesel Fund Disbursement
	Selisih harga biodiesel Biodiesel Price Variance	Bahan pendukung Supporting material	Perjalanan Dinas Business trip	Jasa Profesional Professional fee	
Januari January	390.341.600	-	94.350.000	7.351.615.134	7.836.306.734
Februari February	7.358.481.874	-	196.917.155	6.895.203.558	14.450.602.587
Maret March	45.143.865.135	-	150.696.200	6.929.226.222	52.223.787.557
April	102.911.786.120	19.800.000	72.948.000	6.328.329.723	109.332.863.843
Mei May	320.990.934.726	64.944.000	76.740.600	7.380.087.706	328.512.707.032
Juni June	495.341.645.226	-	74.913.000	7.425.546.497	502.842.104.723
Juli July	382.356.985.559	-	78.519.500	6.931.407.429	389.366.912.488
Agustus August	405.045.772.682	-	113.828.000	7.545.009.995	412.704.610.677
September	367.259.751.345	-	84.169.370	2.837.585.780	370.181.506.495
Oktober October	475.204.447.781	-	18.676.000	8.928.621.179	484.151.744.960
November	310.162.722.611	-	64.757.000	9.028.825.080	319.256.304.691
Desember December	395.115.480.872	-	133.079.600	15.245.113.563	410.493.674.036
Total	3.307.270.195.531	84.744.000	1.171.614.425	92.826.571.865	3.401.353.125.823

Alokasi dana untuk pembayaran selisih harga biodiesel tahun 2019 adalah sebesar Rp7,495 Triliun. dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- Penyaluran dana pembayaran selisih harga biodiesel sebesar Rp7,395 Triliun;
- Dukungan dana penyaluran biodiesel sebesar Rp99 Miliar.

The fund allocation for the biodiesel price variance payment in 2019 is Rp7,495 trillion, with details of the fund's ceiling as follows:

- The payment of biodiesel price variance is Rp7.395 trillion;
- Biodiesel fund disbursement of Rp99 billion.

Tabel Penyaluran Dana Program Riset Tahun 2019 (Rp)
Realization of Biodiesel Distribution and Fund in 2019 (Rp)

Tahun 2019 2019	Volume Realisasi Penyaluran Biodiesel* (Liter) Realized Biodiesel Distribution Volume* (Liter)	Volume yang Dibayarkan (Liter) Volume Paid (Liter)	Pembayaran selisih HIP Biodiesel dengan HIP Solar *** (Rupiah) Payment of Difference between HIP Biodiesel and HIP Solar *** (Rupiah)
Januari January	534.727.077	0	0
Februari February	515.540.078	0	5.556.855.810
Maret March	534.993.641	4.892.653	948.993.004
April	476.760.709	103.713.013	42.430.072.125
Mei May	525.832.659	124.594.146	60.822.547.966
Juni June	459.570.587	88.986.979	81.104.913.576
Juli July	538.910.365	296.239.290	283.901.700.372
Agustus August	561.337.554	636.697.790	576.458.082.076
September	505.285.085	950.564.661	610.192.794.375
Oktober October	563.160.517	579.979.305	431.831.500.616
November	560.440.000	568.639.798	423.777.235.583
Desember December	598.088.490	928.399.510	552.473.103.127
Total	6.374.646.862	4.282.707.145	3.069.497.798.630

Keterangan:

- *) Volume penyaluran Biodiesel dari BU BBN ke BU BBM berdasarkan penagihan dan rekapitulasi laporan BU BBN kepada DJEBTKE.
 **) Hanya pembayaran sisa Ongkos Angkut sehingga tidak ada volume pembayarannya, agar tidak terjadi double counting.
 ***) Realisasi pembayaran selisih HIP Biodiesel dengan HIP Solar kepada BU BBN, termasuk Ongkos Angkut dan PPN
 ****) Volume penyaluran berdasarkan sistem aplikasi <https://program-biodiesel.bpdpr.or.id/>

Remark:

- *) The volume of distributed Biodiesel from BU BBN to BU BBM is based on the billing and recapitulation of the BU BBN report to DJEBTKE.
 **) Only the remaining payment of Transportation Costs, there is no volume of payments to avoid double counting.
 ***) Realization of payment of the difference between HIP Biodiesel and HIP Solar to BU BBN, including Transportation Costs and Income Tax
 ****) Distribution volume is based on the application system <https://program-biodiesel.bpdpr.or.id/>

Besaran HIP Biodiesel exclude Ongkos Angkut periode Januari - Desember 2019, yang lebih kecil dari HIP Minyak Solar sehingga BPDPKS hanya melakukan pembayaran dengan besaran sebagai berikut bulan Januari 2019 dengan Ongkos Angkut (> Rp 13,81/Liter), dan bulan Juni 2019 dengan Ongkos Angkut (> Rp 362,52 /Liter). Selisih HIP (Exclude OA dan Ppn) untuk bulan November, Desember 2019 dan Januari 2020 masing-masing sebesar 563,72 Rp/Liter, 1540,21 Rp/Liter dan 2086,81 Rp/Liter.

Telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 199 K/20/MEM/2019 tentang Penetapan BU BBM dan BU BBN Jenis Biodiesel serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran BBM Jenis minyak Solar periode Januari-Desember 20120. Total alokasi Biodiesel tahun 2020 sebesar 9.590.131 kL yang dilakukan oleh 18 BU BBM dan BU BBN.

The amount of the Biodiesel HIP excludes the Transportation Costs in January-December 2019, which is smaller than the Diesel Oil HIP. Thus, OPPFMA only paid the following amounts in January 2019 with Transportation Costs (> Rp13.81/Liter), and in June 2019 with Transportation Costs (> Rp362.52/Liter). The HIP difference (excluding Transportation Costs and Income Tax) for November, December 2019, and January 2020 is Rp563.72/Liter, Rp1,540.21/Liter, and Rp2086.81/Liter respectively.

The Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 199 K/20/MEM/2019 has been issued on the Determination of Biodiesel BU BBM and BU BBN as well as the Volume Allocation for the Mixing of Diesel for January-December 2020. The Biodiesel total allocation in 2020 is 9,590,131 kL, conducted by 18 BU BBM and BU BBN.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Titik serah penyaluran Biodiesel dari BU BBN kepada BU BBM juga telah ditetapkan melalui surat Dirjen Migas Nomor 9636/12/DJM.0/2019 Tanggal 5 November 2019, yaitu sebanyak 28 Titik Serah di PT. Pertamina dan 33 Titik Serah BU BBN lainnya. BPDPKS telah melakukan perjanjian kerja sama dengan BU BBN untuk periode pengadaan BBN Jenis Biodiesel Januari s.d. Desember 2020. Kontrak antar BU BBM dan BU BBN sedang dalam proses penyelesaian.

BPDPKS telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk Pengembangan *Biofuel* yaitu Uji jalan B30 yang dikoordinir oleh Balitbang ESDM dan kajian *Co-Processing* untuk pembuatan *Green Fuel*. Saat ini pelaksanaan uji jalan B30 telah selesai dan hasil pekerjaannya telah diserahkan kepada Dirjen EBTKE. Terkait Kajian *Co-Processing* untuk pembuatan Green Fuel ada dua kajian yaitu "Pengujian Produk hasil *co-processing* untuk Produksi *Green-Fuels*" oleh PPPTMGB Lemigas dan "Inovasi Lanjut Katalis dan Teknologi Merah-Putih" oleh LPIK ITB.

Pelaksanaan uji B30 Non-Otomotif (Alsintan, alat angkutan laut, PT KAI, serta alat berat pertambangan), serta Alutsista yang pendanaan risetnya didanai oleh BPDPKS sebagian sudah selesai dan ada yang dalam tahap pelaksanaan oleh PPPTMGB "Lemigas". Uji terap B-30 telah selesai, saat ini dalam tahap *monitoring* dan evaluasi hasil uji dan penyusunan laporan. *Launching* B30 telah dilaksanakan tanggal 23 Desember 2019 di salah satu SPBU Pertamina MT Haryono di Jakarta oleh Bapak Presiden RI.

The delivery point for the Biodiesel distribution from BU BBN to BU BBM has been set forth in the Directorate General of Oil and Gas Letter No. 9636/12/DJM.0/2019 dated 5 November 2019, of 28 Delivery Points at PT Pertamina and 33 other BBN BU Delivery Points. OPPFMA has entered into a cooperation agreement with BU BBN for the procurement of Biodiesel BBN from January until December 2020. The contract between BU BBM and BU BBN is in the process of being finalized.

OPPFMA has coordinated with related parties for Biofuel Development, i.e. B30 Road Testing coordinated by the MEMR Research and Development and a Co-Processing study for Green Fuel production. Currently, the B30 road testing is completed and the results have been handed over to the Director-General of New Renewable Energy and Energy Conservation. In terms of the Co-Processing Study for the Green Fuel production, there are two studies, "Testing of co-processing products for Green-Fuels Production" by PPPTMGB Lemigas and "Advanced Innovation of Red-White Catalysts and Technology" by LPIK ITB.

Non-Automotive B30 test (Alsintan, sea transportation equipment, PT KAI, and heavy mining equipment), as well as Alutsista whose research is funded by OPPFMA, has been completed partially and is in the process of implementation by PPPTMGB "Lemigas". The B-30 test has been completed, currently in the monitoring and evaluation stage of test results and reports preparation. The B30 has been launched on 23 December 2019 at one of Pertamina's gas stations at MT Haryono in Jakarta by the President of the Republic of Indonesia.

Penyelenggaraan Penyaluran Dana untuk Promosi dan Kemitraan Fund Disbursement for Promotion and Partnership

Persentase Persepsi Positif dari Media Massa terhadap Sawit Indonesia

Percentage of Positive Perceptions from the Mass Media towards Indonesia's Palm Oil

Tabel Persentase Persepsi Positif dari Media Massa tentang Sawit

Table: Percentage of Positive Perceptions from Mass Media about Palm Oil

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	Pol/KP
Target	-	40%	-	45%	
Realisasi Realization	-	57,48%	61,91%	68,85%	AVG
Capaian Achieved	N/A	143,7%	N/A	153%	

BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY



Sasaran penyaluran dana promosi dan kemitraan perkebunan kelapa sawit adalah untuk menjalin kemitraan, pelaksanaan diplomasi & advokasi sawit, dan hubungan kelembagaan dengan mitra strategis. Penyaluran dana perkebunan kelapa sawit salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan citra nilai produk sawit. Pengukuran kinerja melalui perhitungan persentase net sentiment (positif - negatif) dari data sentiment masyarakat pada media massa di dalam negeri.

Ukuran sentiment media massa diperoleh dari data media monitoring yang dilakukan secara real time oleh BPDPKS. Target capaian peningkatan persepsi positif tentang sawit di media massa dalam negeri untuk Triwulan IV tahun 2019 adalah sebesar 45%.

Capaian persepsi positif media tentang sawit di media massa periode triwulan IV tahun 2019 adalah sebesar 68,85%. Capaian ini berdasarkan data sentimen pemberitaan dari media monitoring periode Oktober s.d. Desember 2019. Adapun data persentase sentimen media periode triwulan IV tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

The target of fund disbursement of palm oil plantation promotion and partnership is to establish partnerships, carry out palm oil diplomacy & advocacy, and conduct institutional relationships with strategic partners. One of the objectives of disbursing funds of palm oil plantations is to improve the value of palm oil products. Performance is assessed by calculating the percentage of net sentiment (positive minus negative) from public sentiment data in the domestic mass media.

The mass media sentiment is measured from media monitoring data carried out in real-time by OPPFMA. The target for increasing positive perceptions about palm oil in the domestic mass media for the fourth quarter of 2019 is 45%.

The positive media perceptions about palm oil in the mass media for the fourth quarter of 2019 was 68.85%. This achievement is based on news sentiment data from the monitoring media in October until December 2019. The data on the media sentiment percentage for the fourth quarter of 2019 are as follows:

Bulan Month	Data Sentimen Media Triwulan IV 2019		Data Sentimen Media Triwulan IV 2019		Rata-rata Net Sentimen Rata-rata Net Sentimen
	Σ Positif Positive	Σ Netral	Σ Negatif Negative	Net Sentimen [(+) - (-)] Net Sentimen [(+) - (-)]	
Oktober October	2910%	2917%	1077%	1833%	59.13%
November	2756%	2739%	753%	2003%	66.77%
Desember December	3178%	2744%	678%	2500%	80.65%
Rata-rata TW IV Rata-rata TW IV	-	-	-	-	68.85%

Memperhatikan arahan Komite Pengarah terkait alokasi anggaran, alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan promosi tahun 2019 adalah sebesar Rp74,9 Miliar dengan rincian sebagai berikut:

- Koordinasi Kegiatan Promosi sebesar Rp1,2 Miliar;
- Pembahasan Proposal Kegiatan Promosi sebesar Rp 337 Juta;
- Dukungan Pendanaan Pomosi kepada Mitra Strategis sebesar Rp 45,1 Miliar;
- Pembuatan Media Promosi dan Publikasi melalui Media sebesar Rp 10,1 Miliar;
- Keikutsertaan dalam Event Promosi sebesar Rp13,3 Miliar;
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Promosi sebesar Rp4,7 Miliar.

Taking into account the direction of the Steering Committee regarding budget allocations, the fund allotted for 2019 promotion was Rp74.9 billion, under the following details:

- Coordination of Promotional Activities of Rp1.2 billion;
- Discussion on Proposals for Promotional Activities of Rp337 Million;
- Promotions Funding Support to Strategic Partners of Rp45.1 Billion;
- Making of Media for Promotion and Publication of Rp10.1 billion;
- Participation in the Promotional Events of Rp13.3 Billion;
- Monitoring and Evaluation of Promotional Activities of Rp4.7 billion.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Tabel Penyaluran Dana kegiatan Promosi Tahun 2019 (Rp)
Table: Fund Disbursement for Promotional activities in 2019 (Rp)

Tahun 2019 2019	Beban Promosi Promotion Expenses				Total Penyaluran Dana Promosi Professional fee
	Event Sawit Palm Oil Event	Perjalanan Dinas Business Trip	Bahan pendukung promosi sawit Supporting materials for palm oil promotion	Jasa Profesional Professional fee	
Januari January	-	18.260.000	-	-	18.260.000
Februari February	-	-	-	-	-
Maret March	1.909.939.600	631.392.877	105.952.000	-	2.647.284.477
April	-	125.997.359	90.952.400	-	216.949.759
Mei May	1.373.647.000	10.197.894	48.400.000	-	1.432.244.894
Juni June	190.000.000	366.913.268	-	-	556.913.268
Juli July	792.540.000	146.216.782	-	-	938.756.782
Agustus August	973.400.000	68.783.000	46.200.000	-	1.088.383.000
September	2.154.850.000	701.456.342	123.337.500	1.700.000	2.981.343.842
Oktober October	1.847.500.000	1.638.910.685	165.980.000	28.000.000	3.680.390.685
November	3.162.585.200	588.634.614	1.010.449.000	484.904.950	5.246.573.764
Desember December	6.772.292.860	1.261.678.662	895.472.350	893.709.300	9.823.153.172
Total	19.176.754.660	5.558.441.483	2.486.743.250	1.408.314.250	28.630.253.643



Berikut realisasi kegiatan promosi selama tahun 2019:

1. Dukungan Pendanaan kegiatan FGD Counter Publikasi WHO oleh MAKSI tanggal 25-26 Januari 2019 di Yogyakarta;
2. Dukungan Pendanaan kegiatan FGD Sawit Berkelanjutan tahun 2019 Series 1 oleh RPN tanggal 31 Januari 2019 di Bogor;
3. Dukungan *Sponsorship* Seminar Menjawab Kebutuhan Gizi dan Pesoaan Kesehatan oleh Media Sawit Indonesia tanggal 12 Februari 2019 di Jakarta;
4. Dukungan *Sponsorship* kegiatan Seminar Teknis dan Pameran "Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Peinsip Ketenagakerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit", oleh Media Perkebunan tanggal 13-15 Februari 2019 di Palembang;
5. Dukungan *Sponsorship* kegiatan Seminar Andalas Forum "Membangun Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Tengah Isu Lingkungan Global" oleh GAPKI tanggal 21-22 Februari 2019 di Batam;
6. Dukungan Pendanaan kegiatan Seminar Nasional Kelapa Sawit oleh Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah tanggal 21 Februari 2019 di Jakarta;
7. Dukungan *Sponsorship* kegiatan International Biomass Expo oleh APCASI tanggal 25 Februari - 2 Maret 2019 di Jepang;
8. Dukungan Pendanaan kegiatan Seminar Nasional dalam rangkaian kegiatan *Chemical Engineering Special Event* oleh HIMATEKIM Politeknik LPP Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 2019 di Yogyakarta;
9. Dukungan Pendanaan kegiatan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia oleh APKASINDO tanggal 27-28 Februari 2019 di Jakarta;
10. Partisipasi dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Sinergi Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2019 di Serang;
11. Dukungan Pendanaan kegiatan *3rd International Conference and Expo on ISPO (ICE-ISPO) 2019* oleh Media Perkebunan pada tanggal 27-28 Maret 2019 di Jakarta;
12. Dukungan *sponsorship Chemurgy Innovation Summit 2019* oleh ITB tanggal 6 April 2019 di Bandung;
13. Dukungan pendanaan Kuliah Umum oleh MAKSI tanggal 10 April 2019 di Bogor;
14. Dukungan Pembiayaan 2 Mahasiswa Institut Teknologi Bandung dalam Kegiatan *International Conference in Industrial Engineering and Application (ICIEA)* tanggal 12-15 April 2019 ke Tokyo Jepang;
15. Dukungan pendanaan Seminar Nasional oleh ILCAN tanggal 25 April 2019 di Bogor;
16. Dukungan *sponsorship International Labour on Palm Oil Conference (ILO POC) 2019* oleh Media Perkebunan tanggal 26 April 2019 di Jakarta;

The promotional activities during 2019 as follows:

1. Funding for WHO Publication Counter FGD activities by MAKSI on 25-26 January 2019 in Yogyakarta;
2. Funding for Sustainable Palm Oil FGD activities in 2019 Series 1 by RPN on 31 January 2019 in Bogor;
3. Sponsorship to Respond to Nutritional and Health Issues Seminar by Indonesian Palm Oil Media on 12 February 2019 in Jakarta;
4. Sponsorship for Technical Seminar and Exhibition activities "Replanting of Palm Oil Plantations, Employment Principles in Palm Oil Plantations", by Plantation Media on 13-15 February 2019 in Palembang;
5. Sponsorship for the Andalas Forum Seminar "Building a Sustainable Palm Oil Industry Amidst Global Environmental Issues" by GAPKI on 21-22 February 2019 in Batam;
6. Support for the National Palm Oil Seminar by the Government Strategy and Development Study on 21 February 2019 in Jakarta;
7. Sponsorship support for the International Biomass Expo activities by APCASI on 25 February - 2 March 2019 in Japan;
8. Funding Support for National Seminar activities in a series of Chemical Engineering Special Event by HIMATEKIM LPP Polytechnic Yogyakarta on 27 February 2019 in Yogyakarta;
9. Funding for the activities of the National Meeting of Indonesian Palm Oil Smallholders by APKASINDO on 27-28 February 2019 in Jakarta;
10. Participation in the Government Program Synergy Activities for People's Welfare which was held on 15 March 2019 in Serang;
11. Funding for the 3rd International Conference and Expo on ISPO (ICE-ISPO) 2019 by Plantation Media on 27-28 March 2019 in Jakarta;
12. Sponsorship for the 2019 Chemurgy Innovation Summit by ITB on 6 April 2019 in Bandung;
13. Funding for the Public Lecture by MAKSI on 10 April 2019 in Bogor;
14. Financing Support for 2 Students of Institut Teknologi Bandung in the International Conference in Industrial Engineering and Application (ICIEA) on 12-15 April 2019 to Tokyo, Japan;
15. Funding for the National Seminar by ILCAN on 25 April 2019 in Bogor;
16. Sponsorship from the International Labor on Palm Oil Conference (ILO POC) 2019 by Media Perkebunan on 26 April 2019 in Jakarta;

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

17. Dukungan Pembiayaan Mengikuti Acara ILO-POC 2019 di Jakarta Anggota Aspekpir Indonesia tanggal 26 April 2019;
18. Dukungan pembiayaan Delegasi RI kegiatan *Roundtable on Sustainable Palm Oil "Creating Shared Value Through Sustainable Palm Oil Value Chain"* ke Beijing tanggal 29-30 April 2019;
19. Dukungan Fasilitas biaya perjalanan anggota delegasi RI dari Setkom ISPO bersama *Agency for Natural Resources and Energy, Min. of Economy, Trade and Industry (METI)* Jepang di Tokyo tanggal 26-28 Mei 2019;
20. Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Uji Jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 Pada Kendaraan Mesin Diesel oleh P3TEK Kementerian ESDM bulan Mei s.d. Oktober 2019;
21. Dukungan pembiayaan perjalanan dinas Ketua Harian Aprobi sebagai pembicara pada Acara *National Oil Palm Growers Congress* di Colombia tanggal 5-7 Juni 2019 dan *Indonesian Market Update: Palm Oil Industry*, 10-12 Juni 2019 di Lima Peru;
22. Dukungan Pendanaan kepada Cendekia Mulia Komunikasi atas penyelenggaraan acara JIRE tanggal 28 Juni 2019 di Malang;
23. Dukungan pembiayaan perjalanan dinas kehadiran delegasi RI pada kegiatan *The 2nd Palm Biodiesel Conference 2019* di Bangkok tanggal 1-2 Juli 2019;
24. Dukungan Pembiayaan Kegiatan APKASI Otonomi Expo pada tanggal 3-5 Juli 2019 di Jakarta;
25. Dukungan *Sponsorship* FGD Ragam Pengguna Produk Oleochemical oleh APOLIN tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta;
26. Dukungan *Sponsorship* Seminar Nasional oleh Media Perkebunan tanggal 10-11 Juli di Jakarta;
27. Dukungan *Sponsorship Workshop GreenBiofuel* oleh BPPT tanggal 16 Juli 2019 di Jakarta;
28. Dukungan *Sponsorship* Kegiatan IPOS Forum oleh GAPKI Cabang Medan tanggal 25-26 Juli 2019 di Medan;
29. Dukungan Pendanaan Partisipasi Festival Indonesia Moscow 2019 kepada GIMNI tanggal 1-4 Agustus di Moskow Rusia;
30. Dukungan *Sponsorship International Seminar and Congress of Indonesian Soil Science Society (ISCO-ISS 2019)* oleh HITI tanggal 5-7 Agustus 2019 di Bandung;
31. Dukungan *Sponsorship* kegiatan Seminar oleh CORE Indonesia tanggal 6-8 Agustus 2019 di Jakarta;
32. Dukungan *Sponsorship International Conference Biomass* oleh SBRC tanggal 19-20 Agustus di Bogor;
33. Dukungan *Sponsorship* ICREE oleh IPB tanggal 22 Agustus 2019 di Bogor;
34. Dukungan *Sponsorship* Penyerahan Sertifikat ISPO dan *Conference Auditor ISPO 2019* oleh Medbun tanggal 27-28 Agustus 2019 di Jakarta;
17. Financial Support to Participate in the 2019 ILO-POC Event in Jakarta Aspekpir Indonesia Members on 26 April 2019;
18. Financial support for the Indonesian Delegation on the Roundtable on Sustainable Palm Oil "Creating Shared Value Through Sustainable Palm Oil Value Chain" to Beijing on 29-30 April 2019;
19. Financial support for business travel costs for members of the Indonesian delegation from the ISPO Secretariat with the Agency for Natural Resources and Energy, Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) Japan in Tokyo, 26-28 May 2019;
20. Financial Support for the B30 Fuel Use Road Testing on Diesel Engine Vehicles by the P3TEK of the Ministry of Energy and Mineral Resources from May until October 2019;
21. Financial support for business travel costs for the Chief Executive of Aprobi as a speaker at the National Oil Palm Growers Congress in Colombia on 5-7 June 2019 and the Indonesian Market Update: Palm Oil Industry, 10-12 June 2019 in Lima, Peru;
22. Financial Support to Cendekia Mulia Komunikasi for the organization of the JIRE event on 28 June 2019 in Malang;
23. Financial support for business travel costs for the delegation of the Republic of Indonesia at the 2nd Palm Biodiesel Conference 2019 in Bangkok on 1-2 July 2019;
24. Financial Support for the APKASI Otonomi Expo on 3-5 July 2019 in Jakarta;
25. FGD Sponsorship for Various Oleochemical Product Users by APOLIN on 3 July 2019 in Jakarta;
26. National Seminar Sponsorship by Plantation Media on 10-11 July in Jakarta;
27. Funding for the GreenBiofuel Workshop by BPPT on 16 July 2019 in Jakarta;
28. Funding for IPOS Forum Activities by Medan Branch GAPKI on 25-26 July 2019 in Medan;
29. Financial Support for the Participation in the 2019 Moscow Indonesia Festival to GIMNI on 1-4 August in Moscow Russia;
30. Sponsorship for the International Seminar and Congress of Indonesian Soil Science Society (ISCO-ISS 2019) by HITI on 5-7 August 2019 in Bandung;
31. Sponsorship for Seminar by CORE Indonesia on 6-8 August 2019 in Jakarta;
32. Sponsorship for International Conference Biomass by SBRC on 19-20 August in Bogor;
33. Sponsorship for ICREE by IPB on 22 August 2019 in Bogor;
34. Sponsorship for the Handover of ISPO Certificates and the 2019 ISPO Auditor Conference by Medbun on 27-28 August 2019 in Jakarta;

35. FGD Penyusunan Platform Kampanye Positif Sawit Indonesia kerja sama dengan GAPKI tanggal 29 Agustus di Jakarta;
36. Dukungan *Sponsorship* Kegiatan *Green Generation Day* oleh GG Indonesia tanggal 30 Agustus di Balikpapan;
37. Dukungan Pendanaan kepada Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya kegiatan Sosialisasi "Mitos Dan Fakta Industri Kelapa Sawit Di Indonesia" tanggal 3 September 2019 di Malang;
38. Dukungan Pendanaan kepada Universitas Sriwijaya kegiatan Seminar Lahan Sub Optimal (LSO) tanggal 4-5 September 2019 di Palembang;
39. Dukungan *Sponsorship* kepada IDI Cabang Kabupaten Bogor kegiatan Seminar Kapita Selektiva IV tanggal 14-15 September 2019 di Bogor;
40. Dukungan *Sponsorship* kepada Kementerian Perdagangan kegiatan CAEXPO tanggal 20-23 September 2019 di Nanning RRT;
41. Dukungan Pendanaan kepada IGA untuk penyelenggaraan kegiatan di bulan Oktober 2019 di Jakarta;
42. Dukungan Pendanaan Pertemuan Ilmiah Tahunan XIII kepada PERDOKI tanggal 6-8 di Bali;
43. Dukungan Pendanaan kepada ITB kegiatan STKSR tanggal 7 - 9 Oktober 2019 di Kupang;
44. Dukungan *Sponsorship* kepada PEI kegiatan Seminar tentang Entomologi tanggal 8 Oktober 2019 di Bali;
45. Dukungan *Sponsorship* kepada Kementerian Perdagangan kegiatan TEI tanggal 16-20 Oktober 2019 di ICE BSD;
46. Dukungan *Sponsorship* kepada APROBI pada keikutsertaan kegiatan TEI tanggal 16-20 Oktober 2019 di ICE BSD;
47. Dukungan *Sponsorship* kepada GAPKI kegiatan IPOC tanggal 30 Oktober-1 November 2019 di Bali;
48. Dukungan Fasilitas Petani anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit dalam Kegiatan IPOC 2019 tanggal 30 Oktober-1 November 2019 di Bali;
49. Dukungan *Sponsorship* kepada METI kegiatan Indo EBTKE Connex 2019 tanggal 6-8 November 2019 di Jakarta;
50. Dukungan Pendanaan kepada JIM kegiatan Lokakarya Sawit untuk Negeri tanggal 20-22 November 2019 di Bogor;
51. Dukungan Pendanaan kepada SBRC kegiatan Pencetakan Buku SBRC (3 buku);
52. Dukungan Pendanaan kepada Core Indonesia kegiatan Indonesia Beyond tanggal 6-8 Agustus dan 20 November 2019 di Jakarta;
53. Dukungan Pendanaan kepada Aprobi dalam rangka acara SIF pada kegiatan COP 25 di Madrid Spanyol tanggal 9-10 Desember 2019;
35. FGD Formulation of the Indonesian Palm Oil Positive Campaign Platform in collaboration with GAPKI on 29 August in Jakarta;
36. Sponsorship for Green Generation Day by GG Indonesia on 30 August in Balikpapan;
37. Financial Support to the Faculty of Administration Brawijaya University for the Dissemination of "Myths and Facts of the Palm Oil Industry in Indonesia" on 3 September 2019 in Malang;
38. Financial Support for Sriwijaya University for the Sub Optimal Land (LSO) Seminar on 4-5 September 2019 in Palembang;
39. Sponsorship to IDI Bogor Branch for the Kapita Selektiva IV Seminar on 14-15 September 2019 in Bogor;
40. Sponsorship to the Ministry of Trade at CAEXPO on 20-23 September 2019 in Nanning, PRC;
41. Financial Support to IGA for the organization of activities in October 2019 in Jakarta;
42. Financial Support for the XIII Annual Scientific Meeting to PERDOKI on 6-8 in Bali;
43. Financial Support to ITB for STKSR activities on 7-9 October 2019 in Kupang;
44. Sponsorship to PEI for an Entomology Seminar on 8 October 2019 in Bali;
45. Sponsorship to the Ministry of Trade at TEI on 16-20 October 2019 at ICE BSD;
46. Sponsorship to APROBI for TEI on 16-20 October 2019 at ICE BSD;
47. Sponsorship to GAPKI for IPOC on 30 October-1 November 2019 in Bali;
48. Facilities for the members of the Association of Palm Oil Farmers in the 2019 IPOC on 30 October-1 November 2019 in Bali;
49. Sponsorship for METI at Indo EBTKE Connex 2019 on 6-8 November 2019 in Jakarta;
50. Financial Support for JIM for the Palm Oil for the Country Workshop on 20-22 November 2019 in Bogor;
51. Financial Support for SBRC's Book Printing (3 books);
52. Financial Support to Core Indonesia for Indonesia Beyond on 6-8 August and 20 November 2019 in Jakarta;
53. Financial Support to Aprobi for SIF at COP 25 in Madrid, Spain, on 9-10 December 2019;

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

- | | |
|---|--|
| <p>54. Dukungan Pendanaan <i>Sponsorship</i> kepada PT. CMK dalam rangka kegiatan COP 25 di Madrid Spanyol tanggal 3-12 Desember 2019;</p> <p>55. Dukungan Pendanaan <i>Sponsorship</i> kepada WIC dalam rangka kegiatan Annual Bazaar WIC di Jakarta tanggal 11-12 Desember 2019;</p> <p>56. Dukungan pembiayaan delegasi Kemenko pada kegiatan COP 25 di Madrid Spanyol tanggal 2-8 Desember 2019;</p> <p>57. Dukungan pembiayaan delegasi APROBI dalam rangka acara SIF pada kegiatan COP 25 di Madrid Spanyol tanggal 7-13 Desember 2019.</p> | <p>54. Sponsorship to PT CMK for COP 25 in Madrid Spain on 3-12 December 2019;</p> <p>55. Sponsorship to WIC for the WIC Annual Bazaar in Jakarta on 11-12 December 2019;</p> <p>56. Financial support to the delegation of the Coordinating Ministry for Economic Affairs for COP 25 in Madrid, Spain, on 2-8 December 2019;</p> <p>57. Financial support to APROBI delegation for SIF at COP 25 in Madrid, Spain, on 7-13 December 2019.</p> |
|---|--|

Persentase Tindak Lanjut Program Kemitraan Percentage of Follow-up on Partnership Program

Tabel Persentase Tindak Lanjut Kegiatan Kemitraan
Table: Follow-up on Partnership Program

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	PoI/KP
Target	-	50%	-	60%	
Realisasi Realization	-	50%	-	65%	Max/TLK
Capaian Achieved	N/A	100%	N/A	108,33%	

Pengukuran IKU ini berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kemitraan yang ditindaklanjuti BDPKKS. Bentuk tindaklanjut dapat berupa kegiatan promosi sawit, kegiatan diplomasi dan advokasi sawit, pelaksanaan kajian/survei, usulan atau konsep kebijakan/regulasi terkait sawit, dan lain-lain.

Adapun rekomendasi dapat berasal dari Kementerian/Lembaga, Asosiasi Sawit, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi Sawit, Perusahaan Sawit, serta Lembaga Masyarakat dan Civil Society yang berkenaan aspek promosi sawit yaitu: Peningkatan Citra Produk Sawit, Penyediaan Informasi Pasar Sawit, Perluasan Pasar Ekspor Sawit, Peningkatan Investasi Perkebunan Sawit, dan Menumbuhkembangkan Pusat Pemasaran Komoditas Perkebunan Sawit.

Pada tahun 2019, target jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 20 rekomendasi. Untuk triwulan IV, target capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Kegiatan Kemitraan adalah sebesar 60% atau 12 kegiatan. Realisasi Tindak Lanjut Kegiatan Kemitraan periode s.d Desember tahun 2019 adalah sebanyak 13 Kegiatan atau sebesar 65%. Adapun tindak lanjut kegiatan sebagai berikut:

The CPI is assessed based on the number of recommendations resulting from partnership activities that are followed-up by OPPFMA. Follow-up may be in the form of palm oil promotion activities, palm oil diplomacy and advocacy activities, studies/surveys, proposals or concepts of policies/regulations related to palm oil, etc.

The recommendations may originate from Ministries/Institutions, Palm Oil Associations, Small and Medium Enterprises (SMEs), and Palm Oil Cooperatives, Palm Oil Companies, as well as Social Institutions and Civil Societies, regarding palm oil promotion: Improving the Image of Palm Oil Products, Providing Information on the Palm Oil Market, Expanding the Palm Export Market, Increasing Investment in Palm Oil Plantations, and Developing the Marketing Center for Palm Oil Plantation Commodities.

In 2019, the recommendations to be followed-up was targeted at 20 recommendations. In the fourth quarter, the target of the KPI of Follow-up on Partnership Activities was 60% or 12 activities. The realization of the Follow-up on Partnership Activities up to December 2019 was 13 Activities or 65%. The follow-up activities are as follows:

1. Pelaksanaan Seminar Sawit *Palm Oil Forum* di Amerika Serikat sebagai tindak lanjut rekomendasi diplomasi atas pengenaan AD/CVD Biodiesel di USA;
 2. Dukungan kegiatan Penyusunan *Road Map* Kelapa Sawit sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kementerian Pertanian;
 3. Produksi film Dokumenter Sawit sebagai tindak lanjut kegiatan ROPC 2018;
 4. Dukungan dan partisipasi pada *Joint Mission* CPOPC ke Brussel sebagai tindak lanjut rekomendasi diplomasi atas adopsi ketentuan *Delegated Act* ILUC dalam RED II oleh Komisi Eropa;
 5. Dukungan pelaksanaan Diklat Sespargu dan Sesdilu Kemenlu sebagai tindak lanjut rekomendasi penguatan kapasitas perwakilan luar negeri tentang isu sawit;
 6. Pelaksanaan *Palm Oil Stakeholder Forum* di PEOC Pakistan, *Palm Oil Business Forum* pada India-ASEAN Summit 2019, dan Forum Bisnis dan Pameran pada GlobOil India 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi perluasan dan mempertahankan pasar sawit di Asia Selatan;
 7. Dukungan Internasional *Journal of Oil Palm* 2019 sebagai tindak lanjut *International Journal of Oil Palm* 2018 dalam rangka penyediaan data ilmiah tentang sawit yang diakui secara internasional;
 8. Pelaksanaan Seminar *Sustainable Peat Land and Palm Oil Toward Achievement of UN SDGs* di Oslo Norwegia sebagai tindak lanjut pertemuan *stakeholder* sawit di Norwegia;
 9. Promosi Pemanfaatan limbah batang sawit untuk menjadi kayu melalui pameran *Innovation Day* di Saarland dan Sosialisasi di Berlin Jerman sebagai rekomendasi dari Balitbang Kementerian KLHK dan Kemenko Perekonomian;
 10. Dukungan kegiatan sosialisasi dan *l., B-30* serta kampanye biodiesel kepada Netizen dalam rangka peningkatan pemahaman penggunaan Biodiesel dari sawit sesuai rekomendasi dari Kementerian ESDM;
 11. Dukungan pendanaan jasa konsultan hukum dalam rangka advokasi atas hambatan Perdagangan sawit di Luar Negeri (kasus RED II EU, CVD Biodiesel EU, dan Anti Dumping dan CVD Amerika Serikat) sebagai rekomendasi dari Komite Pengarah;
1. Palm Oil Forum Seminar in the United States as a follow-up on diplomacy recommendations on the imposition of AD/CVD Biodiesel in the USA;
 2. Support for Palm Oil Roadmap Preparation activities as a follow-up on the recommendations from the Ministry of Agriculture;
 3. Palm Oil Documentary films production as a follow-up on 2018 ROPC activities;
 4. Support and participation in the CPOPC Joint Mission to Brussels as a follow-up on the diplomacy recommendations on the adoption of the ILUC Delegated Act provisions in RED II by the European Commission;
 5. Support for the Sespargu and Sesdilu Training of the Ministry of Foreign Affairs as a follow-up on the recommendation to strengthen the capacity of foreign representatives on the issue of palm oil;
 6. Palm Oil Stakeholder Forum at PEOC Pakistan, the Palm Oil Business Forum at the India-ASEAN Summit 2019, and the Business Forum and Exhibition at the 2019 GlobOil India as a follow-up on the recommendations to expand and maintain the palm oil market in South Asia;
 7. Support for the International Journal of Palm Oil 2019 as a follow-up on the 2018 International Journal of Palm Oil to provide internationally-recognized scientific data on palm oil;
 8. Sustainable Peat Land and Palm Oil Toward Achievement Seminar of UN SDGs in Oslo, Norway, as a follow-up on the palm oil stakeholders' meeting in Norway;
 9. Promotion of the utilization of palm oil waste to wood, through the Innovation Day exhibition in Saarland and Socialization in Berlin, Germany, as a recommendation from the Research and Development Agency of the Ministry of Environment and Forestry and the Coordinating Ministry for the Economic Affairs;
 10. Support for the B-30 roadtest and socialization activities, as well as the biodiesel campaign to the Media to enhance the understanding of the Biodiesel use from palm oil, in line with the recommendation from the Ministry of Energy and Mineral Resources;
 11. Financial support for legal consulting services in the framework to advocate for barriers to palm oil trading Abroad (EU RED II, EU Biodiesel CVD, and United States' Anti-Dumping and CVD cases) as a recommendation from the Steering Committee;

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

- | | |
|---|---|
| <p>12. Pelaksanaan pameran sawit pada China Asean Expo di Nanning pada September 2019 dan pameran sawit pada 2nd China International Import Expo pada November 2019 dalam rangka mempertahankan dan memperluas pasar sawit di China sesuai rekomendasi Kementerian Perdagangan;</p> <p>13. Pelaksanaan rangkaian kegiatan kampanye #SawitBaik dalam rangka meningkatkan persepsi positif masyarakat dalam negeri terhadap sawit sesuai usulan rekomendasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p> | <p>12. The palm oil exhibition at the China Asean Expo at Nanning in September 2019 and the 2nd China International Import Expo palm oil exhibition in November 2019 to maintain and expand the palm oil market in China as recommended by the Ministry of Trade;</p> <p>13. Implementation of a series of #SawitBaik campaign activities to increase the positive perception of the domestic community towards palm oil, in line with the recommendations of the Ministry of Communication and Information Technology.</p> |
|---|---|

Tabel Penyaluran Dana Kemitraan BDPKKS Tahun 2019 (Rp)

Table: 2019 OPPFMA's Partnership Fund Disbursement (Rp)

Tahun 2019 2019	Realisasi Realization Kemitraan Partnership	Total Penyaluran Dana Kemitraan Total Partnership Fund Disbursement
Januari January	0	0
Februari February	772.898.959	772.898.959
Maret March	4.266.516.952	5.039.415.911
April	793.474.046	5.832.889.957
Mei May	3.188.019.326	9.020.909.283
Juni June	2.014.444.713	11.035.353.996
Juli July	2.165.273.853	13.200.627.849
Agustus August	2.266.991.431	15.467.619.280
September	3.185.994.213	18.653.613.493
Oktober October	1.246.049.967	19.899.663.460
November	3.622.764.664	23.522.428.124
Desember December	14.589.341.026	38.111.769.150
Total	38.111.769.150	

Berikut realisasi kegiatan Kemitraan dan Promosi pada tahun 2019:

1. Sosialisasi Biodiesel bagi Netizen di Denpasar, Bali;
2. FGD Penyusunan Posisi Pemerintah Dalam Rangka Gugatan RED II ke WTO Kerja Sama dengan Kemendag;
3. Kampanye Sawit Bagi Milenial Tahap V di Makassar;
4. Dukungan Pendanaan Indespo 2019 media Sawit Indonesia;
5. Dukungan Pendanaan kegiatan *International Conference on Sustainable Biomass* di Lampung;
6. Kampanye Sawit Bagi Milenial Tahap VI di Denpasar;
7. Partisipasi peserta pada IPOC 2019 di Bali;

The Partnership and Promotion activities in 2019 are as follows:

1. Biodiesel dissemination for the community in Denpasar, Bali;
2. FGD on Formulating the Government's Position for the Lawsuit by RED II to WTO, in Cooperation with the Ministry of Trade;
3. Palm Oil Campaign for Millennial Phase V in Makassar;
4. Financial Support for 2019 Indespo by Indonesian Palm Oil media;
5. Financial Support for International Conference on Sustainable Biomass in Lampung;
6. Palm Oil Campaign for Millennial Phase VI in Denpasar;
7. Participants' participation at the 2019 IPOC in Bali;



8. Partisipasi Delegasi dan Dukungan Pendanaan Pameran Sawit pada *2nd China International Import Expo*;
 9. Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada Peserta Diklat Sesparlu Angkatan Ke-63 Kemenlu;
 10. Dukungan Pendanaan Delegasi pada 2nd MMOPC CPOPC dan PIPOC di Malaysia;
 11. Dukungan Pendanaan Kegiatan Indonesia Biodiesel Leader Forum kerja sama dengan APROBI;
 12. Rapat konsultasi pemerintah RI dalam rangka gugatan RED II dan *Delegated Act* Iluc 2019;
 13. Dukungan Pendanaan Kegiatan *Talkshow* Sawipreneur kerja sama dengan PASPI;
 14. *Placement* artikel positif sawit di *Harian Kompas*;
 15. Kampanye Sawit Bagi Milenial Tahap VII di Malang;
 16. Rapat Finalisasi penyusunan Annual Report BPDPKS Tahun 2018;
 17. Dukungan pendanaan forum diskusi Biodiesel B-100 kerja sama dengan DMSI tanggal 17 Desember 2019;
 18. Konferensi Pers BPDPKS tanggal 20 Desember 2019;
 19. Dukungan Pendanaan Jasa Konsultan Hukum dalam rangka pendampingan penyelidikan Anti Subsidi produk Biodiesel Indonesia oleh di Uni Eropa;
 20. Dukungan Pendanaan Jasa Konsultan Hukum dalam rangka gugatan pengenaan *Anti Dumping Duty* dan *Countervailing Duty* produk Biodiesel Indonesia oleh Amerika Serikat;
 21. Dukungan Pendanaan Pembiayaan Jasa Konsultan Hukum dalam rangka gugatan regulasi RED II di WTO;
 22. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan BPDPKS Tahun 2019.
8. Participation in Delegation and Financial Support for Palm Oil Exhibition at the 2nd China International Import Expo;
 9. Palm Oil Briefing for Participants of the 63rd Batch of Sesparlu Training and Education at the Ministry of Foreign Affairs;
 10. Financial Support for Delegation at the 2nd MMOPC CPOPC and PIPOC in Malaysia;
 11. Financial Support for Indonesia Biodiesel Leader Forum in collaboration with APROBI;
 12. Consultation meeting of the Government of Republic of Indonesia for the RED II lawsuit and the 2019 Iluc Delegated Act;
 13. Financial Support for Sawipreneur Talkshow in collaboration with PASPI;
 14. Positive articles on palm oil at Kompas newspaper;
 15. Palm Oil Campaign for Millennial Phase VII in Denpasar;
 16. Finalization Meeting of the OPPFMA's 2018 Annual Report preparation;
 17. Financial support for the Biodiesel B-100 discussion forum in collaboration with DMSI on 17 December 2019;
 18. OPPFMA's Press Conference on 20 December 2019;
 19. Financial Support for Legal Consultant Services to assist the investigation of Anti-Subsidies for Indonesian Biodiesel Products by the European Union;
 20. Legal Consultant Service Financial Support for the lawsuit against the imposition of Anti Dumping Duty and Countervailing Duty for Indonesian Biodiesel products by the United States;
 21. Legal Consultant Service Financial Support for the lawsuit on RED II regulations at the WTO;
 22. 2019 OPPFMA's Service User Satisfaction Survey.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana yang Akuntabel Accountability of Fund Management

Opini Laporan Keuangan Financial Statement Opinion

Tabel Opini Laporan Keuangan
Table: Financial Statement Opinion

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	PoI/KP
Target	4	-	-	4	
Realisasi Realization	4	-	-	4	Max/TLK
Capaian Achieved	120	N/A	N/A	120	

IKU opini laporan keuangan diukur setiap tahun. Opini atas laporan keuangan adalah opini yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan BDPKKS yang mencerminkan laporan keuangan BDPKKS.

Opini yang menjadi target adalah wajar tanpa pengecualian. Hasil opini diharapkan dapat diberikan oleh KAP setiap triwulan I setelah selesai periode pelaporan keuangan.

KPI of the financial statement opinion is assessed annually. The opinions on financial statements are provided by the Public Accounting Firm on OPPFMA's Financial Statements that reflect the OPPFMA's financial statements.

The targeted opinion is an unqualified opinion. The opinion is provided by KAP (Public Accounting Firm) every first quarter after the completion of the financial statements period.

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP Yang Telah Ditindaklanjuti Percentage of Follow-up on the Recommendations of BPK and APIP's audits

Tabel Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP Yang Telah Ditindaklanjuti
Table: Follow-up on the Recommendations of BPK and APIP's audits

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	PoI/KP
Target	-	-	-	89%	
Realisasi Realization	10%	59%	71%	95%	
Capaian Capaian	10%	59%	71%	95%	

1. Temuan 3.1.12. pengembalian atas tunjangan PPH Psl.21 periode Juli 2015 - Juli 2016 yang terlanjur ditanggung dan dibayarkan kepada pejabat pengelola, dewas dan pegawai belum selesai dan BPK meminta adanya pembahasan lebih lanjut mengenai remunerasi BLU dengan melibatkan PPK BLU. Terhadap temuan ini, BPK meminta PPK BLU untuk membuat regulasi yang berlaku secara menyeluruh dan menjadi pedoman semua BLU yang ada.

Temuan dianggap selesai:

Temuan 3.2.1. Atas temuan tersebut, Komite Pengarah telah menyusun Rencana Strategis Pembangunan Industri Sawit Nasional Tahun 2019 - 2024 dan telah ditetapkan oleh Ketua Sekretariat Komite Pengarah. Dokumen tersebut telah disampaikan BPDPKS ke BPK-RI pada tanggal 14 November 2019 dengan surat bernomor S-581/DPKS/2019. sebenarnya temuan telah ditindaklanjuti, namun BPK meminta agar renstra tersebut dilengkapi a) Monev atas pencapaian target penggunaan vol CPO dalam program biodiesel; b) nilai insentif biodiesel; c) penetapan alokasi non biodiesel belum dilengkapi peraturan penunjang; d) belum ditemukan indikator kinerja dan pentahapan target; e) alokasi dana tiap program (non biodiesel) tidak didukung dengan program K/L.

Sebelumnya dinyatakan selesai muncul kembali dalam proses:

1. Temuan 3.2.4. Direktur Utama agar mengupayakan pengembalian atas kelebihan pembayaran insentif biodiesel kepada BUBBN sebesar Rp102.844.533.000. Terhadap temuan tersebut, BPDPKS telah menyampaikan surat kepada BPK RI pada tgl.28 Oktober 2019 dengan nomor S-556/DPKS/2019 meminta bahwa rekomendasi Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti sebagaimana penjelasan yang pernah disampaikan kepada BPK melalui surat Dirut BPDPKS Nomor S-404/DPKS/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
2. Temuan 3.2.6. BPDPKS untuk menyusun kajian besaran konversi CPO menjadi biodiesel. (USD 125 ' USD 100). Terhadap temuan ini, telah disampaikan kajiannya dalam bentuk power poin, namun BPK meminta dalam bentuk narasi seperti kajian konversi berat jenis biodiesel.

1. Finding 3.1.12. on the refund of Income Tax Article 21 for July 2015 up to July 2016, which was already covered and paid to managing officials, supervisory board, and employees, has not been completed. BPK asked for a further discussion regarding BLU remuneration by involving PPK BLU. Regarding this finding, BPK instructed PPK BLU to compile regulations that apply comprehensively and become guidelines for all BLUs.

Findings that have been considered complete:

Finding 3.2.1. Based on this finding, the Steering Committee has compiled a Strategic Plan for the 2019-2024 National Palm Oil Industry Development and has been set forth by the Chairman of the Steering Committee Secretariat. The document was submitted by OPPFMA to the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) on 14 November 2019 under Letter No. S-581/DPKS/2019. The finding has been followed-up. However, BPK requested that the strategic plan is equipped with a) Monitoring and evaluation of the target of CPO volume usage in the biodiesel program; b) biodiesel incentive value; c) the stipulation of the non-biodiesel allocation that has yet to be equipped with supporting regulations; d) no performance indicator and target phasing; e) the allocation of funds for each non-biodiesel program is not supported by the K/L program.

Previously considered complete and reappeared:

1. Finding 3.2.4. President Director shall seek repayment of the excess payment of biodiesel incentives to BUBBN of Rp102,844,533,000. Regarding this finding, OPPFMA has submitted a letter to BPK RI on 28 October 2019 under Letter No. S-556/DPKS/2019, requesting that the recommendation of the Audit Findings Shall Not be Followed-up, as the explanation submitted to BPK through the OPPFMA's President Director's Letter No. S-404/DPKS/2019 dated 14 August 2019.
2. Finding 3.2.6. OPPFMA shall prepare a study on the conversion of CPO to biodiesel. (USD125 ' USD100). For this finding, the study has been submitted in power points, but BPK requested it in the form of a narrative, similar to the study of biodiesel density conversion.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

SDM yang Kompetitif Competitive HR

Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Percentage of Competency Development Fulfillment

Tabel Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi
Table: Competency Development Fulfillment

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	Pol/KP
Target	-	25%	-	50%	
Realisasi Realization	-	37%	-	59,72%	Max/TLK
Capaian Achieved	-	120%	-	119,44%	

IKU Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi mengukur upaya BDPKKS dalam meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan syarat kompetensi jabatan (SKJ) nya.

Pegawai akan diikutkan dalam program pengembangan SDM berupa diklat, bimtek, seminar dan sejenisnya sesuai dengan tupoksi yang ada pada masing-masing unit (Direktorat dan Divisi). Sampai dengan triwulan IV 2019, terdapat 43 pegawai yang mengikuti program pengembangan SDM dari jumlah pegawai sebanyak 72 orang.

KPI of the competency development fulfillment assesses OPPFMA's efforts in enhancing employee competency in accordance with the job competency requirements (SKJ).

Employees will be included in the HR development program in the form of education and training, technical guidance, seminars, etc., in accordance with the main duties and functions in each unit (Directorate and Division). As of the fourth quarter of 2019, 43 employees participated in the HR development program out of a total of 72 employees.

Organisasi yang Kondusif

Conducive Organization

Persentase Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Percentage of Maturity in the Risk Management

Tabel Persentase Kematangan Penerapan Manajemen Risiko
Table: Maturity in the Risk Management

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	Pol/KP
Target	-	-	-	75%	
Realisasi Realization	-	-	-	80%	Max/TLK
Capaian Achieved	N/A	N/A	N/A	106,66%	

Realiasi kematangan penerapan manajemen risiko di BDPKKS pada tahapan risiko dikelola (risk managed) dengan aktivitas penanganan risiko masuk dalam kategori jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko tinggi.

The maturity of the risk management implementation at OPPFMA is considered at the stage of risk managed, with risk management activities that are included in the mitigation percentage carried out and the success of reducing high-risk level.

Pada saat ini, penilaian kematangan masih dilakukan sendiri (*self assessment*). Adanya perubahan formulir profil dan pelaporan Pemantauan Risiko sesuai dengan KMK 577/KMK.01/2019.

Currently, the maturity assessment is carried out by the self-assessment method. There is a change in the Risk Monitoring profile and reporting form in accordance with KMK 577/KMK.01/2019.

Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis *Strategy Focused Organization* (SFO)

Value of the Quality of Strategy Focused Organization (SFO) Performance Management

Tabel Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis *Strategy Focused Organization* (SFO)
Table: Quality of Strategy Focused Organization (SFO) Performance Management

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	Pol/KP
Target	-	-	-	75	
Realisasi Realization	-	-	-	-	Max/TLK
Capaian Achieved	-	-	-	N/A	

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO diukur secara tahunan dan dilakukan penilaian oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Penilaian dilakukan atas pengelolaan kinerja BDPDKS yang didasarkan pada prinsip-prinsip SFO, di antara nya:

- Menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan
- Menerjemahkan strategi kepada kerangka operasional
- Menyelaraskan organisasi kepada strategi
- Menjadikan strategi sebagai tugas setiap pegawai
- Menjadi strategi sebagai proses yang berkelanjutan
- Target nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO pada tahun 2019 sebesar 70

The Quality Value of SFO-Based Performance Management is assessed annually by the Head Office of the Directorate General of Treasury.

OPPFMA's performance management is assessed based on the SFO principles, including:

- Encouraging changes through leadership
- Translating strategy into an operational framework
- Aligning the organization to its strategy
- Ensuring the strategy as the duty of every employee
- Ensuring sustainable strategy
- The target value for the quality of SFO-based performance management in 2019 is 70

Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal dan Modern

Management of Optimal and Modern Facilities and ICT

Persentase Modernisasi Pengelolaan BLU

Percentage of BLU Management Modernization

Tabel Persentase Modernisasi Pengelolaan BLU

Table: BLU Management Modernization

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	Pol/KP
Target	-	100%	-	100%	
Realisasi Realization	-	130%	-	120%	Max/TLK
Capaian Achieved	N/A	120%	N/A	120%	

Capaian Kelengkapan Tahapan Achievement of Phase Completion

Uraian Description	Target	Capaian Achieved	Keterangan Description
Pengisian BIOS lengkap	Complete BIOS filling	15% ✓	Ditunjuk petugas khusus Special officers are appointed
Website rutin dan up-to-date	Regular website and up-to-date	10% ✓	Website www.bpdp.or.id Website at www.bpdp.or.id
Webservice rutin transfer data ke BIOS	The web service routinely transfers data to the BIOS	10% ✓	-
Dashboard tersedia tiap saat (dicek tiap bulan), dengan pemberian akses kepada Direktorat PPKBLU	Dashboard is available at any time (checked monthly), granting access to the PPKBLU Directorate	15% ✓	-
Proses bisnis keuangan dan layanan berbasis IT telah berjalan serta database penerima beasiswa dan bantuan riset telah dikelola dengan tertib dan tersedia setiap saat	IT-based financial business processes and services have been running. The database of scholarship recipients and research assistance has been managed appropriately and is available at any time	25% ✓	Adanya SOP dan aplikasi terkait dengan tata cara pembayaran The existence of SOPs and applications related to payment procedures
Penerapan Office Automation atau aplikasi pemrosesan pekerjaan yang setara	Office Automation or equivalent job processing applications	15% ✓	Penggunaan aplikasi e-office idempiere dan notifikasi pembayaran via SMS Use of the idempiere e-office application and payment notifications via SMS
Penggunaan aplikasi lainnya lingkup Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan (misalnya: Aplikasi HRS)	The use of other applications within the Ministry of Finance is carried out in an orderly manner and in accordance with regulations (e.g. HRS application)	10% ✓	Aplikasi E-performance, PBNOpen, email kemenkeu, HRIS Kemenkeu E-performance applications, PBNOpen, email of the Ministry of Finance, HRIS of the Ministry of Finance
		100%	

Capaian Tambahan Additional Achievements

BLU BDPDKS terbukti dapat memanfaatkan Sistem Informasi dan Teknologi untuk mendukung pelaksanaan move penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, sesuai dengan rekomendasi BPK atas pelaksanaan pengelolaan dana replanting.	OPPFMA BLU is proven to be able to utilize Information System and Technology to support the monitoring and evaluation of the use of palm oil plantation funds, in accordance with BPK's recommendations for the replanting fund management.	15% ✓	Aplikasi idempiere, PSR Online, dashboard biodiesel, dan E-billing levy Idempiere, PSR Online, biodiesel dashboard, and E-billing levy applications
BLU BDPDKS terbukti dapat memanfaatkan Sistem Informasi dan Teknologi untuk memastikan arus dana perkebunan kelapa sawit yang disalurkan sesuai dengan peruntukan telah diterima di rekening end-user, mengontrol posisi penggunaan dana pada end-user, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban BLU terkait dana yang tersalur tersebut telah terlaksana sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.	OPPFMA BLU is proven to be able to utilize Information System and Technology to ensure that the cash flow of palm oil plantation funds has been channeled according to the allocation, accepted by the end-user account. The ICT system also controls the use of funds at the end-user, and ensures that BLU's rights and obligations related to the funds disbursed have been implemented in accordance with the provisions in the legislation.	15% ✓	

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Pengelolaan Anggaran yang Optimal Optimal Budget Management

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Internal Satuan Kerja BPDP Sawit sebagaimana Baseline

Percentage of Quality of Baseline Internal Budget Implementation for OPPFMA's Task Force

Tabel Persentase Pelaksanaan Anggaran Internal Satuan Kerja BPDP Sawit sebagaimana Baseline

Table: Baseline Internal Budget Implementation for OPPFMA's Task Force

Uraian Description	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d Q3 Q3/ up to Q3	Q4/Y-19	Pol/KP
Target	95%	95%	95%	95%	
Realisasi Realization	99,42%	99,08%	95,70%	93,91%	Max/TLK
Capaian Achieved	104,65%	104,29%	100,73%	98,85%	

Anggaran internal BDPKKS ditetapkan sebesar 1,25% dari pagu total DIPA yaitu sebesar Rp135.000.000.000.

OPPFMA's internal budget is set at 1.25% of the total DIPA ceiling, i.e. Rp135,000,000,000.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2019, realisasi capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran internal sebesar 93,91% dengan rincian sebagai berikut:

As of the fourth quarter of 2019, the KPI achievements in the internal budget implementation was 93.91% with the following details:

Tabel Realisasi Capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran internal

Table: KPI Achievement on the percentage of quality of internal budget implementation

No.	Indikator Indicator	Nilai Capaian Value
1	Penyerapan anggaran neto Net budget absorption	9,44%
2	Konsistensi Consistency	9,85%
3	Revisi DIPA DIPA Revision	10%
4	Penyelesaian Tagihan Bill Settlement	20%
5	Pengelolaan UP UP Management	10%
6	Kesalahan SPM SPM Error	14,63%
7	Retur SP2D Return of SP2D	13%
8	Penyampaian LPJ LPJ Reporting	7%
	Total	93,91%



Analisis Operasi Per Aktivitas Usaha Operational Analysis by Business Activity

Berdasarkan Peraturan Presiden No.61 Tahun 2015 Pasal 20, kegiatan operasional BDPKKS mencakup enam aktivitas yaitu melakukan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan dana, pengelolaan dana, penyaluran penggunaan dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Pelaksanaan kegiatan operasional BDPKKS tersebut di bawah tanggung jawab lima Direktorat yang berkoordinasi dengan Direktur Utama. Keenam aktivitas tersebut dilaksanakan secara maksimal oleh BDPKKS untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit nasional terutama sebagai upaya meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

Based on Presidential Regulation No. 61 of 2015 Article 20, OPPFMA's operations include six activities, i.e. planning and budgeting, funding, fund management, fund utilization and disbursement, administration and accountability, and monitoring. OPPFMA's operations are the responsibility of the five Directorates, in coordination with the President Director. These six activities are carried out optimally by OPPFMA to support the national palm oil industry development, specifically as an effort to increase prices, strengthen downstream industries, and establish sustainable palm oil commodities.



Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Kegiatan Operasional BDPKKS OPPFMA's Operations

1

Perencanaan dan Penganggaran Planning and Budgeting

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses awal yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi tentang gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu. Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan oleh BDPKKS tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Tahunan (RBT) Tahun 2020;
2. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2020;
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2020

Planning and budgeting is an initial process based on certain facts and assumptions about the description of activities that will be carried out to achieve specific objectives. In 2019, OPPFMA has carried out the planning and budgeting activities as follows:

1. Preparation of the 2020 Annual Business Plan (RBT);
2. Preparation of the 2020 Business and Budget Plan (RBA);
3. Preparation of the 2020 Ministries/Government Agencies Budget Work Program (RKA-K/L).

2

Penghimpunan Dana Funding

Sumber penghimpunan dana yang dilakukan BDPKKS terdiri dari Pelaku usaha perkebunan sawit dan turunannya, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah. Pelaku usaha perkebunan sawit dikenakan pungutan atas ekspor hasil perkebunan kelapa sawit dan iuran. Besarnya iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan BDPKKS dengan pelaku usaha. Iuran diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu dan hanya dikenakan untuk perusahaan perkebunan sawit bukan pekebun. Dana lembaga pembiayaan berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Dana masyarakat berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat. Dana yang diperoleh dari sumber lain yang sah berupa hibah, bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya, dan/atau hasil pengelolaan Dana.

OPPFMA collects funds sourced from the palm oil plantation business entrepreneurs and their derivatives, funds from financial institutions, community funds, and/or other legitimate funds. Palm oil plantation entrepreneurs are subject to levies on the export of palm oil plantation products and their fees. The fee is determined based on OPPFMA's agreement with the business entrepreneur. The fee is applied periodically or from time to time, and is only charged to palm oil plantation companies, not to smallholders. Funds from financial institutions are in the form of financing from banks and/or non-bank financial institutions. Community funds originate from individuals, associations, and/or non-binding community institutions. Funds from other legitimate sources are in the form of grants, non-binding assistance from other parties, and/or proceeds from Fund management.

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana BPDPKS di bawah tanggung jawab Direktorat Penghimpunan Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran *Cruded Palm Oil* dan Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan. Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran *Cruded Palm Oil* mempunyai tugas memungut dan menghimpun Dana berupa biaya ekspor *Cruded Palm Oil* dan iuran berkala dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan mempunyai tugas memungut dan menghimpun Dana berupa biaya dari ekspor produk turunan kelapa sawit dan iuran berkala dari pelaku usaha industri berbahan baku kelapa sawit.

The OPPFMA's funding activity is the responsibility of the Directorate of Funding, which is carried out by the Crude Palm Oil Levies and Fee Collection Division, and the Derivative Product Fee and Cost Collection Division. The Crude Palm Oil Levies and Fee Collection Division has the task to collect and accumulate funds in the form of export fees for Crude Palm Oil and regular fees from palm oil plantation business entrepreneurs. The Derivative Product Fee and Cost Collection Division has the task to collect and accumulate funds in the form of export fees of palm oil derivative products and regular fees from business entrepreneurs in the industry with palm oil as its raw material.

3

Pengelolaan Dana Fund Management

Pengelolaan atas dana yang dihimpun digunakan untuk aktivitas pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BPDPKS dalam rangka pengembangan perkebunan sawit dan pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. BPDPKS menetapkan prioritas penggunaan dana untuk masing-masing kegiatan tersebut dengan memperhatikan program Pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

The funding that has been collected is managed and utilized for the human resource development activities for palm oil plantations, research and development of palm oil plantations, promotion of palm oil plantations, Replanting of palm oil plantations, and palm oil plantation facilities and infrastructure. This activity is carried out by OPPFMA to develop palm oil plantations and fulfill palm oil plantation products for food security, downstream the palm oil plantation industry, as well as provide and utilize biodiesel biofuel. OPPFMA determines priorities for the use of funds for each of these activities by taking into account the Government's programs and the Steering Committee's policies.

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana BPDPKS di bawah tanggung jawab Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Pengembangan Biodiesel, Divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan; dan Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana. Divisi Pengembangan Biodiesel mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data terkait pengembangan biodiesel.

Divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengdolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data terkait peremajaan perkebunan, reforestation, dan promosi perkebunan.

Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pengalokasian Dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data terkait pendidikan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

OPPFMA's fund management is under the responsibility of the Directorate of Fund Planning and Management, which is carried out by the Biodiesel Development Division, Replanting, Reforestation and Plantation Promotion Division; and the Division of Human Resources Education, Research and Development, and Facilities and Infrastructure Development. Biodiesel Development Division has the task to carry out the plans for allocating funds, managing funding cooperation, preparing plans for Fund disbursement, as well as research and data management related to biodiesel development.

Replanting, Reforestation, and Plantation Promotion Division has the task to implement the plans for allocating funds, managing funding cooperation, preparing plans for Fund disbursement, as well as research and data management related to replanting, reforestation, and plantation promotion.

Division of Human Resources Education, Research and Development, and Facilities and Infrastructure Development has the duty to allocate the Fund, manage the funding cooperation, plan the fund distribution, as well as research and data management related to human resource education, research and development, and facilities and infrastructure development.

4

Penyaluran dan Penggunaan Dana

Fund Utilization and Disbursement

Penyaluran dan penggunaan dana merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana pengelolaan dana yang diuraikan di atas. Penggunaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.

Fund utilization and disbursement activities are carried out in accordance with the fund management described above. The fund utilization to develop human resources for palm oil plantations is carried out to enhance the knowledge, skills, professionalism, independence, and competitiveness; and improve technical, managerial, and entrepreneurial skills.

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan fasilitasi. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

Penggunaan dana untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan lembaga riset yang fokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan.

Penggunaan dana untuk promosi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi perkebunan sawit sebagai produk yang mempunyai nilai strategis. Pelaksanaan promosi tersebut dapat meningkatkan citra nilai produk, informasi pasar, memperluas pasar, meningkatkan investasi, menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan sawit. Penggunaan dana untuk peremajaan perkebunan sawit dilaksanakan sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman perkebunan sawit maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penggunaan dana untuk sarana dan prasarana perkebunan sawit dilakukan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain benih; pupuk; pestisida; alat pasca panen dan pengolahan hasil; jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; alat transportasi; mesin pertanian; pembentukan infrastruktur pasar; dan verifikasi atau penelusuran teknis.

Human resource development is carried out through counseling, education, training, and facilitation assistance. Human resource development is conducted by formal and non-formal educational institutions.

The fund utilization for research and development of palm oil plantations is carried out to enhance knowledge about breeding, cultivation, post-harvest and products processing, industry, markets, the chain of plantation products value from upstream to downstream, and business development potential. This activity is carried out by establishing and strengthening research institutions that focus on technology, the industrial sector, product innovation, financing schemes, market knowledge, and environmental adoption.

The fund utilization for promotion is carried out to increase knowledge of the significance of palm oil plantations as a product with strategic value. The promotion can improve the image of product value and market information, expand the markets, increase investment, and develop marketing centers for palm oil plantation commodities. The fund utilization for palm oil plantation Replanting is carried out as an effort to increase the productivity of palm oil plantations and to maintain the area of palm oil plantations to be used optimally.

The fund utilization for palm oil plantation facilities and infrastructure is carried out to increase production, productivity, and quality of plantation products. Facilities and infrastructure consist of seeds, fertilizers, pesticides, post-harvest and product processing equipment, roads in the plantation and access roads to public roads and/or ports, means of transportation, agricultural machinery, the establishment of market infrastructure, and verification or technical surveillance.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Pelaksanaan kegiatan penyaluran dan penggunaan dana BDPKKS di bawah tanggung jawab Direktorat Penyaluran Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Program Pelayanan dan Divisi Unit Penyaluran. Divisi Program Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penyaluran Dana, penilaian dan verifikasi terhadap proposal permohonan Dana, pengembangan Dana, penetapan usulan calon penerima Dana. Divisi Unit Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi penyaluran Dana, menjalankan fungsi kustodian atas Dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan penyimpanan Dana, dan laporan realisasi penyaluran Dana.

The fund utilization and disbursement of OPPFMA are under the responsibility of the Directorate of Fund Disbursement, which is carried out by the Service Program Division and the Disbursement Division. The Service Program Division has the task to prepare the plan to disburse the Fund, assess, and verify the proposal of Fund application, develop Fund, and determine the Fund beneficiaries. The Disbursement Division has the task to disburse the Funds for financing development, monitor and evaluate the Fund disbursement, carry out custodial functions for Funds, including recording, monitoring, and reporting Funds deposit, and report the Fund disbursement realization.

5

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Administration and Accountability

Penatausahaan dan pertanggungjawaban senantiasa dilaksanakan oleh setiap pimpinan BDPKKS dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan BDPKKS serta dengan instansi lain di luar BDPKKS sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, berkoordinasi dengan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Selain itu, setiap pimpinan juga wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Administration and accountability are carried out by all OPPFMA's manager by applying the coordination, integration, and synchronization principles, within and between the organizational units within the OPPFMA, as well as with other agencies outside OPPFMA in accordance with their respective duties. Each leader of an organizational unit is responsible for leading, coordinating with each subordinate, and providing guidance and instructions for the subordinate duties. In addition, each leader shall comply with the instructions and be responsible to their respective superiors and submit periodic reports on time.

Pertanggungjawaban diwujudkan dengan kegiatan penyampaian laporan kepada atasan yang tembusannya wajib disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Laporan tersebut diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut sebagai petunjuk kepada bawahan. Para Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama yang selanjutnya akan memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan penatausahaan.

Accountability is actualized by submitting reports to superiors, with the copy submitted to the head of another organizational unit with a working relationship. The report is processed and used as material to compile further reports as guidance to subordinates. The Directors and Head of the Internal Audit Unit submit reports to the President Director, who will then instruct the relevant officials to carry out administration.

6

Pengawasan Supervision

BPDPKS melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban pungutan atas ekspor komoditas perkebunan sawit. Hasil pungutan tersebut disampaikan oleh BPDPKS kepada Menteri Keuangan yang disertai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa denda jika kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas perkebunan sawit tidak dipenuhi. Besarnya denda yang dibayarkan sesuai tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan menggunakan mata uang Rupiah. BPDPKS juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menunjuk *surveyor* dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis dalam pelaksanaan pembayaran pungutan tersebut agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam bentuk laporan *surveyor*.

OPPFMA supervises the mandatory levies on the export of palm oil plantation commodities. The levies collection is conveyed by OPPFMA to the Minister of Finance, with recommendations for the imposition of administrative sanctions in the form of fines if the obligation of levies on exports of palm oil plantation commodities is not fulfilled. The amount of the fine paid is in accordance with the rate set by the Minister of Finance and uses the Rupiah currency. OPPFMA coordinates with the Ministry of Trade to appoint surveyors to carry out verification or technical surveillance to implement the payment of these levies to ensure that they are in accordance with the provisions of laws and regulations. The verification results carried out by the surveyor as referred to in the above paragraph are contained in the surveyor report.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPPPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPPPKS
Tanggung Jawab Sosial BPPPKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Keuangan

Financial Performance Analysis





Laporan Posisi Keuangan Financial Position Statement

Posisi keuangan BDPDKS tahun 2019 terdiri dari Aset sebesar Rp16.627.894.945.109, Liabilitas sebesar Rp620.007.801.803.853 dan Ekuitas sebesar Rp16.007.801.803.853.

In 2019, OPPFMA's financial position consisted of Assets amounted to Rp16,627,894,945,109, Liabilities amounted to Rp620,007,801,803,853, and Equity amounted to Rp16,007,801,803,853.

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2019 (Rp)
Table: Financial Position in 2019 (Rp)

ASET
ASSETS

RP16.627.894.945.109

LIABILITAS
LIABILITIES

RP620.007.801.803.853

EKUITAS
EQUITY

RP16.007.801.803.853

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

Aset Assets

Jumlah Aset BDPKKS tahun 2019 adalah sebesar Rp16.627.894.945.109 menurun 20,71% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20.971.433.886.205. Penurunan tersebut terutama disebabkan selama tahun 2019 tarif pungutan ekspor Kelapa Sawit, CPO (*Crude Palm Oil*) dan produk turunannya adalah Rp0 sesuai dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

In 2019, total OPPFMA's Assets amounted to Rp16,627,894,945,109, decreased by 20.71% compared to 2018, which was Rp20,971,433,886,205. The decline was mainly due to the fact that during 2019 the export levy tariffs on Palm Oil, CPO (Crude Palm Oil), and its derivative products amounted to Rp0, in accordance with the promulgation of the Minister of Finance Regulation No. 152/PMK.05/2018 and Minister of Finance Regulation No. 136/PMK.05/2019 on the Service Tariff of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency Public Service Agency.

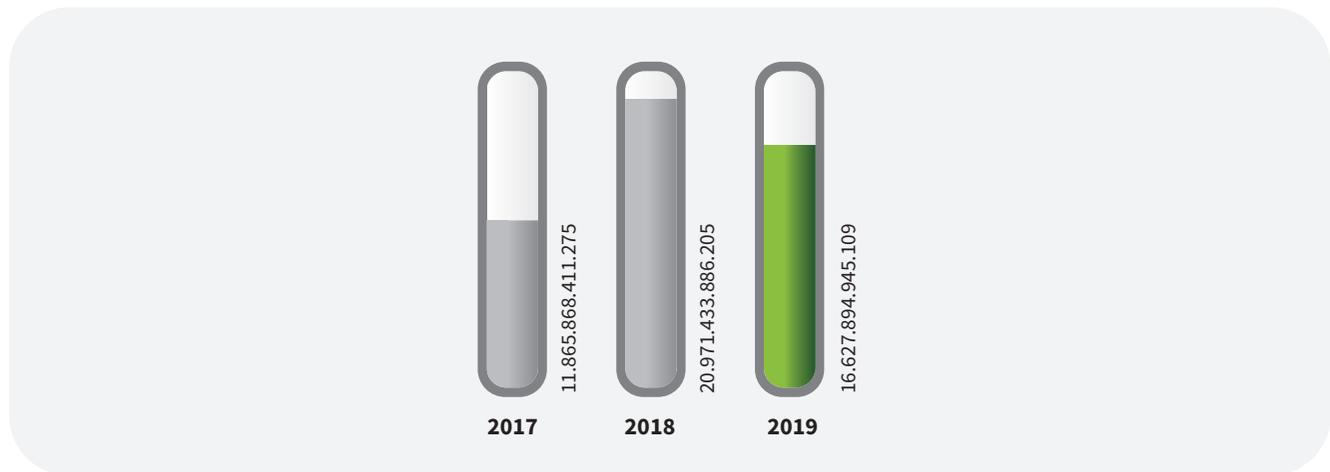
Tabel Aset Tahun 2017-2019 (Rp)

Table: 2017-2019 Assets (Rp)

Uraian Description		2017	2018	2019	Perubahan (%) Difference (%)
Aset	Assets	11.865.868.411.275	20.971.433.886.205	16.627.894.945.109	(20,71)
Aset Lancar	Current Assets	11.851.159.824.294	20.959.252.287.096	16.618.126.359.223	(20,71)
Kas dan setara kas	Cash and Cash Equivalents	3.186.919.095.885	20.922.802.360.212	16.372.330.615.236	(21,75)
Investasi jangka pendek	Short-term investment	8.643.092.784.654	-	190.245.300.000	-
Piutang	Receivables	17.398.545.399	32.075.041.641	51.151.156.701	59,47
Aset Lancar lainnya	Other Current Assets	3.749.398.356	4.374.885.243	4.399.287.286	0,56
Aset Tidak Lancar	Non-Current Assets	14.708.586.981	12.181.599.109	9.768.585.886	(19,81)
Aset tetap - bersih	Fixed assets - net	12.929.303.608	11.130.486.041	8.867.872.033	(20,33)
Aset tidak lancar lainnya	Other non-current assets	1.779.283.373	1.051.113.068	900.713.853	(14,31)

Grafik Aset Tahun 2017-2019 (Rp)

Graph: 2017-2019 Assets (Rp)

**Aset Lancar****Current Assets**

Aset lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang dan Aset Lancar Lainnya. Jumlah Aset Lancar BDPKS pada tahun 2019 adalah sebesar Rp16.627.894.945.109 menurun 20,71% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20.959.252.287.096. Penurunan tersebut terutama disebabkan selama tahun 2019 tarif pungutan ekspor Kelapa Sawit, CPO (*Crude Palm Oil*) dan produk turunannya adalah Rp0.

Kas dan setara kas tahun 2019 sebesar Rp16.372.330.615.236 menurun 21,75% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20.922.802.360.212. Penurunan tersebut terutama disebabkan selama tahun 2019 tarif pungutan ekspor Kelapa Sawit, CPO (*Crude Palm Oil*) dan produk turunannya adalah Rp0. Piutang tahun 2019 sebesar Rp51.151.156.701 meningkat 59,47% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp32.075.041.641. Peningkatan tersebut terutama disebabkan penerimaan piutang yang berasal dari Deposito dan SUN (Surat Utang Negara).

Aset lancar lainnya tahun 2019 Rp4.399.287.286 meningkat 0,56% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp4.374.885.243.

Current assets consist of Cash and cash equivalents, Short-term investments, Receivables, and Other current assets. In 2019, OPPFMA's Current Assets amounted to Rp16,627,894,945,109, decreased by 20.71% compared to 2018, which was Rp20,959,252,287,096. The decline during 2019 was due to the levy tariff on exports of Palm Oil, Crude Palm Oil (CPO), and its derivative products of Rp0.

In 2019, cash and cash equivalents amounted to Rp16,372,330,615,236, decreased by 21.75% compared to 2018, which was Rp20,922,802,360,212. The decline during 2019 was due to the levy tariff on exports of Palm Oil, Crude Palm Oil (CPO), and its derivative products of Rp0. Receivables in 2019 amounted to Rp51,151,156,701, increased by 59.47% compared to 2018, which was Rp32,075,041,641 million. This increase was mainly due to receivables from Deposits and Government Securities (SUN).

In 2019, other current assets amounted to Rp4,399,287,286, increased by 0.56% compared to 2018, which was Rp4,374,885,243.

Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Aset tidak lancar terdiri dari Aset tetap dan Aset tidak lancar lainnya. Jumlah Aset tidak lancar pada tahun 2019 adalah sebesar Rp9.768.585.886 menurun 19,81% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp12.181.599.109. Penurunan tersebut terutama disebabkan depresiasi aset tetap selama tahun 2019. Aset tetap tahun 2019 sebesar Rp8.867.872.033 menurun 20,33% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp11.130.486.041. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap selama tahun 2019.

Aset tidak lancar lainnya BDPDKS tahun 2019 sebesar Rp900.713.853 menurun 14,31% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.051.113.068. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh amortisasi selama tahun 2019.

Non-current assets consist of Fixed assets and Other non-current assets. In 2019, Non-current Assets amounted to Rp9,768,585,886, decreased by 19.81% compared to 2018, which was Rp12,181,599,109. This decrease was mainly due to the depreciation of fixed assets during 2019. Fixed assets in 2019 amounted to Rp8,867,872,033, decreased by 20.33% compared to 2018, which was Rp11,130,486,041. This decrease was mainly due to the depreciation of fixed assets during 2019.

In 2019, OPPFMA's other non-current assets amounted to Rp900,713,853, decreased by 14.31% compared to 2018, which was Rp1,051,113,068. This decrease was mainly due to the amortization during 2019.

Liabilitas

Liabilities

Jumlah Liabilitas tahun 2019 sebesar Rp620.093.141.256 menurun 29,51% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp879.713.883.878. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya peremajaan kebun kelapa sawit.

In 2019, the Liabilities amounted to Rp620,093,141,256, decreased by 29.51% compared to 2018, which was Rp879,713,883,878. The decline was mainly due to lower costs for palm oil plantation Replanting.

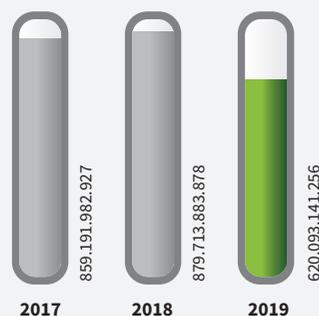
Tabel Liabilitas Tahun 2017-2019 (Rp)

Table: 2017-2019 Liabilities (Rp)

Uraian Description	2017	2018	2019	Perubahan (%) Difference (%)
Liabilitas Liabilities	859.191.982.927	879.713.883.878	620.093.141.256	(29,51)

Grafik Liabilitas Tahun 2017-2019 (Rp)

Graph: 2017-2019 Liabilities (Rp)



Ekuitas

Equity

Ekuitas tahun 2019 sebesar Rp16.007.801.803.853 menurun 20,33% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20.091.720.002.327. Penurunan tersebut terutama disebabkan selama tahun 2019 tarif pungutan ekspor Kelapa Sawit, CPO (*Crude Palm Oil*) dan produk turunannya adalah Rp0 sesuai dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

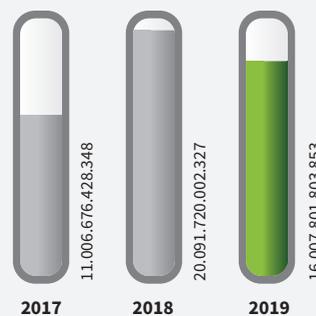
In 2019, Equity amounted to Rp16,007,801,803,853, decreased by 20.33% compared to 2018, which was Rp20,091,720,002,327. The decline was mainly due to the fact that during 2019 the export levy tariffs on Palm Oil, CPO (*Crude Palm Oil*), and its derivative products amounted to Rp0, in accordance with the promulgation of the Minister of Finance Regulation No. 152/PMK.05/2018 and Minister of Finance Regulation No. 136/PMK.05/2019 on the Service Tariff of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency Public Service Agency.

Tabel Ekuitas Tahun 2017-2019 (Rp)

Table: 2017-2019 Equity (Rp)

Uraian Description	2017	2018	2019	Perubahan (%) Difference (%)
Ekuitas Equity	11.006.676.428.348	20.091.720.002.327	16.007.801.803.853	(29,51)

Grafik Ekuitas Tahun 2017-2019 (Rp)
Graph: 2017-2019 Equity (Rp)



Laporan Aktivitas

Statement of Activity

Tahun 2019 BDPKPS Penurunan Aset Neto Tidak Terikat sebesar Rp(4.083.918.198.474) menurun 144,95% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp9.085.043.573.979. Penurunan tersebut terutama disebabkan selama tahun 2019 tarif pungutan ekspor Kelapa Sawit, CPO (*Crude Palm Oil*) dan produk turunannya adalah Rp0 sesuai dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

In 2019, OPPFMA's Unrestricted Net Assets amounted to Rp(4,083,918,198,474), decreased by 144.95% compared to 2018 of Rp9,085,043,573,979. The decline was mainly due to the fact that during 2019 the export levy tariffs on Palm Oil, CPO (*Crude Palm Oil*), and its derivative products amounted to Rp0, in accordance with the promulgation of the Minister of Finance Regulation No. 152/PMK.05/2018 and Minister of Finance Regulation No. 136/PMK.05/2019 on the Service Tariff of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency Public Service Agency.

Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

Tabel Laporan Aktivitas Tahun 2017-2019 (Rp)

Table: Statement of Activity in 2017-2019 (Rp)

Uraian Description		2017	2018	2019	Perubahan (%) Difference (%)
Pendapatan	Income	14.782.736.571.602	15.422.257.275.263	1.491.321.969.072	(90,33)
Beban	Expenses	(10.946.738.536.497)	6.337.213.701.284	(5.574.785.467.546)	(12,03)
Kenaikan (penurunan) aset neto tidak terikat	Increase (decrease) in unrestricted net assets	5.835.998.035.105	9.085.043.573.979	(4.083.918.198.474)	(144,95)
Aset neto tidak terikat awal tahun	Unrestricted net assets at the beginning of the year	5.170.678.393.243	11.006.676.428.348	20.091.720.002.327	82,54
Aset neto tidak terikat akhir tahun	Unrestricted net assets at the end of the year	11.006.676.428.348	20.091.720.002.327	16.007.801.803.853	(20,33)

Pendapatan

Income

Pendapatan BDPKKS berasal dari (Pengembalian)/Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit, Pendapatan atas pengelolaan dana dan Pendapatan lainnya.

Pada tahun 2019 BDPKKS membukukan pendapatan sebesar Rp1.491.321.969.072 menurun 90,33% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp15.422.257.275.263. Penurunan tersebut terutama disebabkan selama tahun 2019 penerimaan BDPKKS hanya berasal dari pengelolaan dana, namun disisi lain pendapatan atas pungutan ekspor Kelapa Sawit, CPO (*Crude Palm Oil*) dan produk turunannya adalah Rp0 sesuai dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

OPPFMA's income originates from (Restitution)/Income from fund collection of oil palm plantation, Income from fund management, and Other income.

In 2019, OPFMA recorded income of Rp1,491,321,969,072, decreased by 90.33% compared to 2018, which was Rp15,422,257,275,263. The decline was mainly due to the fact that during 2019, OPFMA's income source was only from fund management. On the other hand, the export levy tariffs on Palm Oil, CPO (Crude Palm Oil), and its derivative products amounted to Rp0, in accordance with the promulgation of the Minister of Finance Regulation No. 152/PMK.05/2018 and Minister of Finance Regulation No. 136/PMK.05/2019 on the Service Tariff of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency Public Service Agency.

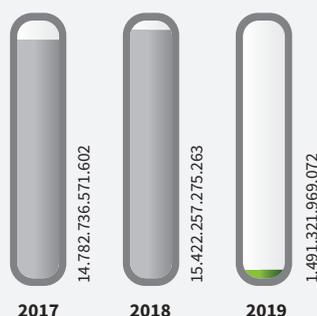
Tabel Pendapatan Tahun 2017-2019 (Rp)

Table: 2017-2019 Income (Rp)

Uraian Description		2017	2018	2019	Perubahan (%) Difference (%)
Pendapatan Operasional Jasa Layanan	Service Operating Income				
(Pengembalian) /Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit	(Restitution)/Income from fund collection of oil palm plantation	14.277.241.158.165	14.367.402.955.848	(4.594.369.072)	(100,03)
Pendapatan atas pengelolaan dana	Income from fund management	505.120.147.304	1.047.535.154.334	1.494.484.215.931	42,70
Pendapatan lainnya	Other income	375.266.133	7.319.165.081	1.431.122.213	(80,45)
Jumlah Pendapatan	Total Income	14.782.736.571.602	15.422.257.275.263	1.491.321.969.072	(90,33)

Grafik Pendapatan Tahun 2017-2019 (Rp)

Table: 2017-2019 Income (Rp)



Beban Usaha

Operating Expenses

Beban usaha BDPKS tahun 2019 sebesar Rp(5.574.785.467.546) menurun 12,03% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp(6.337.213.701.284). Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan pembayaran selisih harga biodiesel karena selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar sebagai dasar pembayaran insentif biodiesel yang relatif rendah.

In 2019, OPPFMA's Expenses amounted to Rp(5,574,785,467,546), decreased by 12.03% compared to 2018, which was Rp(6,337,213,701,284). The decline was mainly due to a decrease in the payment for biodiesel price differences because of the difference between the market price index (HIP) for biodiesel and HIP for diesel as the basis for the relatively low incentive biodiesel payments.

Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

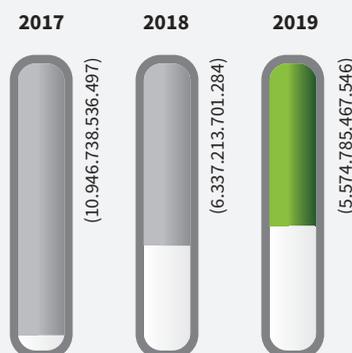
Tabel Beban Usaha Tahun 2017-2019 (Rp)

Table: Operating Expenses in 2017-2019 (Rp)

Uraian Description		2017	2018	2019	Perubahan (%) Difference (%)
Pembayaran selisih harga biodiesel	Biodiesel price variance payment	(10.566.772.566.846)	(4.824.581.966.232)	(3.425.344.132.267)	29,00
Penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	Palm oil plantation replanting fund	(78.296.222.696)	(1.141.435.770.389)	(1.811.013.142.808)	58,66
Jasa surveyor	Surveyor fee	(121.484.745.241)	(130.776.470.674)	(26.570.763.234)	(79,68)
Dana riset	Research fund	(37.270.833.248)	(61.660.689.209)	(122.511.204.086)	98,69
Promosi kelapa sawit	Palm Oil Promotion	(40.042.947.942)	(56.565.155.693)	(66.742.022.793)	17,99
Pengembangan SDM kelapa sawit	Palm Oil HR Development	(29.059.005.432)	(29.239.304.402)	(37.143.619.079)	27,03
Perencanaan dana pengelolaan dana	Fund planning and management	1.979.392.788	(2.290.041.744)	(3.016.927.828)	31,74
Sarana dan prasarana	Facilities and infrastructure	348.830.956	(873.877.039)	(480.782.780)	(44,98)
Beban penyaluran dana	Fund disbursement expenses	(10.875.254.545.149)	(6.247.423.275.382)	(5.492.822.594.875)	(12,08)
Gaji dan tunjangan	Salaries and allowances	(40.503.522.066)	(43.503.008.279)	(49.506.062.472)	13,80
Sewa	Rent	(14.759.656.405)	(15.874.460.153)	(12.274.704.364)	(22,68)
Jasa profesional	Professional fee	(5.267.968.799)	(14.465.665.095)	6.689.259.480	(146,24)
Perlengkapan kantor	Office supplies	(5.306.086.348)	(6.271.857.738)	(5.737.078.017)	(8,53)
Lainnya	Others	(5.646.757.730)	(9.675.434.637)	(7.755.768.248)	(19,84)
Beban dukungan layanan manajemen	Management service support expenses	(71.483.991.348)	(89.790.425.902)	(81.962.872.671)	(8,72)
Jumlah Beban	Total Expenses	(10.946.738.536.497)	(6.337.213.701.284)	(5.574.785.467.546)	(12,03)

Grafik Beban Tahun 2017-2019 (Rp)

Table: 2017-2019 Expenses (Rp)



Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

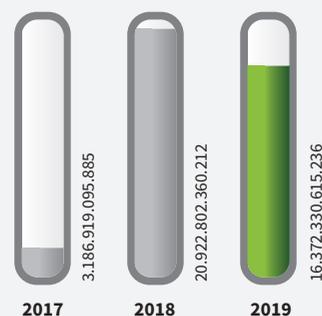
Jumlah Kas dan setara kas BDPDKS tahun 2019 adalah sebesar Rp16.372.330.615.236 menurun 21,75% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20.922.802.360.212.

In 2019, OPPFMA's cash and cash equivalents amounted to Rp16,372,330,615,236, decreased by 21.75% compared to 2018, which was Rp20,922,802,360,212.

Tabel Arus Kas Tahun 2017-2019 (Rp)
Table: Cash Flows 2017-2019 (Rp)

Uraian Description		2017	2018	2019	Perubahan (%) Difference (%)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	Net cash flows provided from operating activities	4.021.710.047.373	8.804.098.616.113	(4.369.346.606.167)	(149,63)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	Net cash provided from (used for) investing activities	(8.563.899.000.725)	8.931.784.648.214	(181.125.138.809)	(102,03)
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	Net cash flow (used for) financing activities	(2.000.000.000.000)	-	-	-
(Penurunan)/ Kenaikan bersih pada kas dan setara kas	Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents	(2.542.188.853.352)	17.735.883.264.327	(4.550.471.744.976)	(125,66)
Kas dan setara kas pada awal tahun	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	5.729.108.049.237	3.186.919.095.885	20.922.802.360.212	556,52
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	Cash and cash equivalents at the end of the year	3.186.919.095.885	20.922.802.360.212	16.372.330.615.236	(21,75)

Grafik Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2017-2019 (Rp)
Table: Cash and Cash Equivalents in 2017-2019 (Rp)



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Manajemen Struktur Modal

Capital Structure Management



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BDPKS merupakan badan pengelola dana yang menggunakan bentuk Badan Layanan Umum yang bersifat fleksibel dan tidak bergantung pada APBN sebagai sumber pendanaan.

In carrying out its duties and functions, OPPFMA is a fund management body as a flexible Public Service Agency and does not depend on the State Budget as its source of funds.

Struktur Modal

Capital Structure

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BDPKS merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BDPKS merupakan badan pengelola dana yang menggunakan bentuk Badan Layanan Umum yang bersifat fleksibel dan tidak bergantung pada APBN sebagai sumber pendanaan. Fleksibilitas penggunaan dana tersebut mengizinkan BDPKS memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh kebutuhan pendanaan dari sektor lain disamping komoditas sawit.

Sehingga BDPKS tidak memiliki struktur modal sebagaimana pada Tata Kelola Perusahaan, yaitu rincian struktur modal yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas, kebijakan manajemen atas struktur modal, dan dasar pemilihan struktur modal.

In accordance with the Minister of Finance Regulation No. 113/PMK.01/2015 on the Organization and Work Procedure of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency, OPPFMA is a non-echelon organizational unit within the Ministry of Finance, which is under and directly responsible to the Minister of Finance, through the Director-General of Treasury. In carrying out its duties and functions, OPPFMA is a fund management body as a flexible Public Service Agency and does not depend on the State Budget as its source of funds. The flexibility in using these funds allows OPPFMA to have the authority to manage their own finances without having to be influenced by funding needs from other sectors other than the palm oil commodity itself.

Therefore, OPPFMA has no capital structure as in Corporate Governance, i.e. the breakdown of the capital structure consisting of interest/sukuk and equity-based debt, management policies on capital structure, and the basis for choosing the capital structure.

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2019, dan Proyeksi 2020 Comparison between 2019 Target and Realization, and 2020 Projection

Pendapatan BDPKKS tahun 2019 sebesar Rp491.321.969.072 atau tercapai 13,57% dari target RBA 2019 sebesar Rp10.992.000.000.000. Selanjutnya sesuai dengan target RBA 2020, jumlah pendapatan diproyeksikan sebesar Rp7.381.000.000.000.

Beban BDPKKS tahun 2019 sebesar Rp(5.574.785.467.546) atau tercapai 50,57% dari target RBA 2019 sebesar Rp(10.992.000.000.000). Selanjutnya sesuai dengan target RBA 2020, jumlah beban diproyeksikan sebesar Rp(6.364.000.000.000).

In 2019, OPPFMA's income amounted to Rp491,321,969,072, or 13.57% of the 2019 RBA target of Rp10,992,000,000,000. Further, in line with 2020 RBA target, the total income is projected at Rp7,381,000,000,000.

In 2019, OPPFMA's expenses amounted to Rp(5,574,785,467,546), or 50.57% of the 2019 RBA target of Rp(10,992,000,000,000). Further, in line with 2020 RBA target, the total expenses is projected at Rp(6,364,000,000,000).

Tabel Target dan Realisasi Aktivitas Tahun 2019 (Rp)
Table: 2019 Activities Target and Realization (Rp)

	Tahun 2019 2019			Proyeksi RBA 2020 Projection RBA 2020
	RBA	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement (%)	
Pendapatan Income	10.992.000.000.000	1.491.321.969.072	13,57	7.381.000.000.000
Beban Usaha Operating Expenses	(10.992.000.000.000)	(5.574.785.467.546)	50,57	(6.364.000.000.000)

Asumsi Proyeksi Tahun 2020

2020 Projection Assumptions

Proyeksi RBA pada tahun 2020 ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp16.550 miliar.
2. Rata-rata harga CPO bulanan CIF Rotterdam tahun 2020 di level USD483-833/MT, Harga referensi Kementerian Perdagangan di level USD505-840/MT dan Rata-rata harga CPO yang diterbitkan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nasional (KPBN) sebesar Rp8,301/kg.
3. Volume ekspor 2020 turun ke level 31,92 juta MT dan tahun 2021 naik ke level 38,63 juta MT.
4. Pengelolaan dana dalam bentuk investasi diproyeksikan memberikan yield sebesar 7% atau sebesar Rp400 miliar.
5. Volume penyaluran biodiesel tahun 2020 sebesar 8,85 juta KL (turun dari target 9,59 juta kiloliter sebagai dampak penurunan konsumsi BBM dalam negeri akibat pandemi COVID-19. Asumsi mengikuti realisasi rata-rata bulanan volume penyaluran semester I tahun 2020). untuk tahun 2021 volume penyaluran naik 5% yaitu dari 9,59 juta KL menjadi 10,06 juta KL.
6. MOPS tahun 2020-2021 sebesar USD31,81-49,18/bbl dan biaya konversi CPO menjadi USD80/MT (mulai bulan Juni 2020) sehingga selisih HIP biodieselsolar tahun 2020 Rp2.845-Rp6.502/liter dan tahun 2021 Rp3.325-4.010/liter.

In 2020, the RBA is projected based on the following assumptions:

1. The balance at the beginning of 2020 is Rp16,550 billion.
2. The average monthly CPO price for CIF Rotterdam in 2020 is forecasted at USD483/MT up to USD833/MT. The reference price of the Ministry of Trade is USD505/MT up to USD840/MT. The average CPO price issued by PT Kharisma Pemasaran Bersama Nasional (KPBN) is Rp8,301/kg.
3. The export volume in 2020 is projected to decrease to 31.92 million MT, and in 2021, it will increase to 38.63 million MT.
4. Fund management in the form of investment is projected to provide a yield of 7% or Rp400 billion.
5. The volume of biodiesel distribution in 2020 is 8.85 million KL (decreased from the 9.59 million kiloliters target as a result of the reduction in domestic oil fuel consumption due to the COVID-19 pandemic. The assumption is adjusted to the realization of the average monthly distribution volume in the first semester of 2020). In 2021, the volume of distribution will increase by 5%, from 9.59 million KL to 10.06 million KL.
6. In 2020-2021, MOPS is projected at USD31.81/bbl up to USD49.18/bbl. The conversion cost of CPO is USD80/MT (starting in June 2020). Thus, the difference in HIP biodiesel solar in 2020 amounted to Rp2,845/liter up to Rp6,502/liter. Further, in 2021, the difference will be approximately Rp3,325/liter up to Rp4,010/liter.

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2019, dan Proyeksi 2020 Comparison between 2019 Target and Realization, and 2020 Projection

7. Kebijakan Komite Pengarah mengenai alokasi penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam risalah rapat Komite Pengarah Nomor TAN.03.01/248B/D.II.M.EKON/05/2020 tanggal 1 Mei 2020 perihal Penyampaian Hasil Rapat Komite Pengarah BDPKKS tanggal 1 Mei 2020:

7. The Steering Committee policy regarding the allocation of the use of funds as stated in the minutes of the Steering Committee meeting No. TAN.03.01/248B/D.II.M.EKON/05/2020 dated 1 May 2020 on the Delivery of the Meeting Results of the OPPFMA's Steering Committee dated 1 May 2020:

No	Uraian Description	Alokasi Allocation (%)	
1	Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit	Palm Oil Plantation Replanting	20 s.d 30 20 up to 30
2	Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit	HR Development of Palm Oil Plantation	1 s.d 2
3	Riset Perkebunan Kelapa Sawit	Palm Oil Plantation Research	1 s.d 2
4	Promosi Perkebunan Kelapa Sawit	Promotion of Palm Oil Plantation	1 s.d 2
5	Sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	Palm Oil Plantation facilities and infrastructure	1 s.d 2
6	Insentif Biodiesel	Biodiesel Incentives	70 s.d 80
7	Imbalan manajemen (operasional)	Management fees (operational)	2 s.d 2,5

8. Target luasan lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2020 ditetapkan seluas 180.000 ha dengan besaran bantuan dana Rp30 juta/ha, naik dari sebelumnya sebesar Rp25 juta/ha. Kenaikan tersebut dilakukan dalam rangka untuk meringankan beban petani kelapa sawit sebagai dampak pandemic COVID-19. Dengan mempertimbangkan beberapa perubahan pada semester dua antara lain kenaikan besarnya bantuan, penyederhanaan persyaratan, penggunaan jasa surveyor untuk mempercepat proses penetapan rekomendasi teknis pekebun yang berhak menerima bantuan PSR, dan juga mempertimbangkan realisasi sampai dengan saat ini yang baru seluas 30.126 ha, PSR dialokasikan naik menjadi sebesar Rp4,02 triliun. Alokasi akan dinaikkan menjadi sekitar Rp5,6 triliun (180.000 ha x Rp30 juta + biaya operasional untuk Ditjen Perkebunan dan jasa surveyor), apabila dana yang disediakan sudah tidak mencukupi.

9. Dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran dana/belanja tahun 2020 yang belum mencapai 50% sampai dengan saat ini dan adanya pandemic COVID-19, alokasi penggunaan dana selain untuk PSR dan insentif biodiesel tidak dilakukan perubahan, yaitu:

8. The target area for Small-Scale Palm Oil Replanting (PSR) in 2020 is set forth at 180,000 ha, with a grant of Rp30 million/ha, increased from the previous Rp25 million/ha. The increase has the objective to ease the burden on palm oil farmers as a result of the COVID-19 pandemic. Taking into account several changes in the second semester, including an increase in the amount of assistance, simplification of requirements, the use of surveyor services to accelerate the process of determining technical recommendations for smallholders who are entitled to receive PSR assistance, as well as the realization to date of allocated 30,126 ha, PSR allocation increased to Rp4.02 trillion. The allocation will be increased to approximately Rp5.6 trillion (180,000 ha x Rp30 million + operational costs for the Directorate General of Plantation and surveyor services), if the funds provided previously are insufficient.

9. With due regard to the realization of the distribution of funds/expenditure in 2020, which has not reached 50% to date and the COVID-19 pandemic, the fund is utilized for PSR and biodiesel incentives, which did not change:



- 1) program sarana prasarana perkebunan kelapa sawit sebesar Rp200 miliar;
- 2) program riset perkebunan kelapa sawit sebesar Rp124 miliar dengan rata-rata pembiayaan sebesar Rp2.300.000.000/riset;
- 3) program pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit sebesar Rp94 miliar, terdiri atas program beasiswa diploma 1 s.d. 4 dan pelatihan petani;
- 4) program promosi dan kemitraan sebesar Rp100 miliar;
- 5) dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan dana sebesar Rp6 miliar. Dana tersebut digunakan sebagai dana pendukung dan biaya pengembangan sistem pungutan ekspor (*ebilling levy*);
- 6) dana yang disediakan untuk pengelolaan dana sebesar Rp6 miliar. Dan tersebut dialokasikan untuk jasa manajer investasi, bank kustodian, dan langganan layanan data serta platform penempatan dan divestasi dana kelolaan;
- 7) dana dukungan manajemen yang digunakan untuk operasionalisasi BDPKKS sebesar Rp122 miliar.

Alokasi tersebut akan disesuaikan mengikuti kebijakan komite pengarah apabila dana yang disediakan sudah tidak mencukupi.

10. Meskipun asumsi volume ekspor naik pada tahun 2021, untuk target penerimaan menggunakan asumsi pendapatan dan belanja tahun 2021 berdasarkan target PNBPN dan pagu indikatif tahun 2021 sesuai Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-674/SJ/2020 tentang Pagu Indikatif Kementerian Keuangan TA 2021.

Sumber: Rencana Bisnis dan Anggaran Revisi 2020 badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

- 1) palm oil plantation facilities and infrastructure program of Rp200 billion;
- 2) palm oil plantation research program of Rp124 billion, with average financing of Rp2,300,000,000/research;
- 3) palm oil plantation human resource development program of Rp94 billion, consisting of scholarship for Young Bachelor (Diploma 1 up to 4) and farmers' training;
- 4) promotion and partnership programs of Rp100 billion;
- 5) funds provided to finance fundraising activities of Rp6 billion. The funds are used as supporting funds and costs to develop e-billing export levy system;
- 6) funds provided for fund management amounted to Rp6 billion. The fund is allocated for investment management services, custodian banks, and data service subscriptions, as well as a managed fund placement and divestment platform;
- 7) management support funds used for OPPFMA's operations amounted to Rp122 billion.

The allocation will be adjusted according to the Steering Committee's policy if the funds provided are insufficient.

10. Although the assumption of export volume will increase in 2021, the income target uses the assumption of income and expenditure based on the Non-Tax State Revenue (PNBPN) target and the indicative ceiling in accordance with the Office Memo of the Secretariat General of the Ministry of Finance No. ND-674/SJ/2020 on the Indicative Ceiling of the Ministry of Finance for the 2021 Fiscal Year.

Source: 2020 Revised Business and Budget Plan of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Pihak Afiliasi

Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliates

Sampai dengan 31 Desember 2019, BDPKKS tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

As of 31 December 2019, OPPFMA has not conducted transactions with conflict of interest and/or with affiliates.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Fact and Information After the Accounting Reporting Date

a. Perubahan Komposisi Dewan Direksi pada BDPKKS

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Badan Layanan Umum BDPKKS dan No. 54/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan pada Badan Layanan Umum BDPKKS, mulai tanggal 2 Maret 2020, Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKKS masing-masing adalah Eddy Abdurachman dan Zaid Burhan Ibrahim.

a. Changes in the Composition of OPPFMA's Board of Directors

Based on the Minister of Finance Decree No. 53/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of the President Director of the OPPFMA Public Service Agency and No. 54/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of Position at the OPPFMA Public Service Agency, since 2 March 2020, the President Director and Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management of OPPFMA is Eddy Abdurachman and Zaid Burhan Ibrahim, respectively.



b. Dampak Coronavirus 2019 Pandemic ("Pandemi COVID-19")

Sejak awal 2020, Pandemi COVID-19 telah merebak di beberapa negara. Pada bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia. Selanjutnya pandemi ini telah mempengaruhi kinerja dan kegiatan ekonomi dari BDPKKS dengan intensitas tertentu.

Dampak keseluruhan dari keuangan BDPKKS tidak dapat diestimasi secara andal pada tanggal laporan keuangan ini. Manajemen akan memonitor dengan intensif perkembangan dari Pandemi COVID-19 ini, dan secara berkelanjutan akan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja, posisi keuangan dan hasil operasi dari BDPKKS.

Manajemen mengantisipasi dampak keuangan dari Pandemi COVID-19 melalui:

- Mengevaluasi kembali Rencana Anggaran dan Biaya untuk tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-45/MK.5/2020 terkait dengan Langkah Strategis Badan Layanan Umum dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19.
- Menjaga kecukupan kas dan setara kas BDPKKS agar dapat membiayai beban penyaluran dana BDPKKS melalui pengajuan penyesuaian tarif pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya kepada Menteri Keuangan sesuai keputusan Komite Pengarah.
- Pengajuan penetapan *capping* atas pembayaran selisih harga biodiesel terkait kenaikan selisih kurang harga biodiesel kepada Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral sesuai keputusan Komite Pengarah.
- Menyusun Standar Pelayanan Minimum baru untuk menyesuaikan penerapan *work-from-home*(WFH).

b. Impact of the Coronavirus 2019 (COVID-19) Pandemic

Since early 2020, the COVID-19 pandemic has spread throughout several countries. In March 2020, the Government of Indonesia officially announced confirmed cases of COVID-19 in Indonesia. Further, this pandemic has affected the performance and economic activities of OPPFMA under certain intensity.

The financial impact on OPPFMA cannot be estimated reliably on the date of these financial statements. Management will intensively monitor the development of the COVID-19 Pandemic, and will continuously evaluate its impact on the performance, financial position, and operation results of OPPFMA.

Management has anticipated the financial impact of the COVID-19 Pandemic by:

- Reevaluating the 2020 Business Budget Plan. This is in accordance with the Circular Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-45/MK.5/2020 on the Strategic Steps of the Public Service Agency to Handle the COVID-19 Pandemic Impact.
- Maintaining sufficient OPPFMA's cash and cash equivalents to be able to finance the OPPFMA's disbursement liabilities by submitting levy adjustment on exports of palm oil products and their derivatives to the Minister of Finance, in accordance with the Steering Committee's decision.
- Submitting capping on the payment of biodiesel price difference to the increase in the difference in low biodiesel price to the Minister of Energy and Mineral Resources, in accordance with the decision of the Steering Committee.
- Formulating a new Minimum Service Standard to adjust to the *work-from-home* (WFH) implementation.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Prospek dan Strategi Usaha

Business Prospect and Strategy



**BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY**



Prospek Usaha Business Prospect

Prospek Perekonomian Economical Prospect

Prospek pemulihan ekonomi dunia di 2020 mulai terlihat dan mendukung berlanjutnya penurunan ketidakpastian pasar keuangan global.

Perbaikan ekonomi global terutama didukung oleh perkiraan pertumbuhan di sejumlah negara berkembang yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Beberapa indikator dini global terkait indeks manufaktur, indeks pemesanan ekspor, indeks produksi, dan indeks keyakinan membaik dalam dua bulan terakhir 2019, didorong stimulus kebijakan yang ditempuh di banyak negara serta optimisme pasca kesepakatan phase 1 trade deal AS-Tiongkok. Perkembangan tersebut positif mendukung pertumbuhan ekonomi negara maju seperti AS, Jepang, dan Eropa, sejalan dengan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh otoritas di masing-masing negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga berpotensi lebih tinggi, termasuk di Tiongkok, India, dan Brazil, meskipun masih terdapat sejumlah permasalahan domestik di negara tersebut yang sedang diatasi otoritas negara yang bersangkutan. Secara keseluruhan, optimisme perbaikan ekonomi global berdampak pada menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan mendorong peningkatan aliran modal asing ke negara berkembang. Prospek pemulihan global tersebut memperkuat momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing, meskipun risiko geopolitik perlu terus dicermati.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan ditopang perbaikan ekspor dan konsumsi rumah tangga yang tetap baik.

Perbaikan ekspor didorong kenaikan permintaan mitra dagang dan harga beberapa komoditas ekspor utama. Produk ekspor seperti ekspor batubara, kendaraan bermotor, besi dan baja, serta biji logam dan sisa logam mencatat pertumbuhan positif pada triwulan IV 2019.

In 2020, the global economy is forecasted to recover, supported by the declining uncertainty in the global financial market

The improvement in the global economy shall be supported by growth estimates in several developing countries that will be higher than previously estimated. Several global early indicators related to the manufacturing index, export order index, production index, and confidence index improved in the last two months of 2019, driven by policy stimulus in many countries and optimism after the US-China phase 1 trade deal agreement. These developments support the economic growth of developed countries, such as the US, Japan, and Europe, in line with the policy measures taken by the authorities in each of these countries. The economic growth of developing countries is potentially higher, including in China, India, and Brazil. Nevertheless, several domestic problems in such countries are being addressed by the relevant country's authorities. Overall, optimism about the global economic improvement has declined the uncertainty on global financial markets and has encouraged an increase in foreign capital flows to developing countries. The prospect of global recovery strengthens the momentum to improve domestic economic growth and foreign capital inflows, although geopolitical risks shall be closely monitored.

Indonesia's economic growth remains resilient, sustained by improving exports and household consumption.

The improvement in exports was encouraged by rising demand from trading partners and prices of several key export commodities. Export products such as coal, motor vehicle, iron and steel, metal ore, and metal scraps grew positively in the fourth quarter of 2019.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Prospek dan Strategi Usaha Business Prospect and Strategy

Secara spasial, ekspor biji nikel dari Sulawesi dan ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat juga meningkat. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga, ditopang oleh keyakinan konsumen yang mulai meningkat dan faktor musiman jelang akhir tahun. Sementara itu, investasi terus membaik, termasuk secara spasial didorong oleh investasi terkait hilirisasi nikel di Sulawesi. Beberapa indikasi kenaikan investasi tercermin pada peningkatan Purchasing Manager Index Manufaktur dan indikator dini lain terkait ekspor dan penjualan domestik. Peningkatan investasi diperkirakan berlanjut didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha sejalan dengan kebijakan Pemerintah termasuk implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 dapat mencapai sekitar 5,1% dan meningkat dalam kisaran 5,1-5,5% pada tahun 2020.

Spatially, nickel ore exports from Sulawesi and copper exports from West Nusa Tenggara also increased. Household consumption was maintained, supported by rising consumer confidence and seasonal factors towards the end of the year. Meanwhile, investment also improved, which was spatially encouraged by the nickel downstream investment in Sulawesi. The increase of investment is reflected in several indicators, i.e. the Manufacturing Purchasing Manager Index, and other early indicators related to exports and domestic sales. The increase in investment is predicted to continue, supported by infrastructure development and improved business confidence because of increased exports and ease of climate business, in line with Government policies, including the Omnibus Bill on Job Creation. With these developments, in 2019, the overall economic growth achieved approximately 5.1%, and will increase in the range of 5.1-5.5% in 2020.

Nilai tukar Rupiah terus menguat didukung kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang membaik.

Pada 22 Januari 2020, Rupiah menguat 1,74% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Desember 2019. Perkembangan ini melanjutkan penguatan pada 2019 yang tercatat 3,58% (ptp) atau 0,76% secara rerata. Penguatan Rupiah didorong pasokan valas dari para eksportir serta aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda. Struktur pasar valas juga semakin kuat yang ditandai dengan meningkatnya volume transaksi dan kuotasi yang lebih efisien, serta makin berkembangnya pasar DNDF yang kemudian mendukung peningkatan efisiensi pasar valas. Bank Indonesia memandang bahwa penguatan nilai tukar Rupiah sejalan dengan kondisi fundamental, semakin baiknya mekanisme pasar dan keyakinan para pelaku pasar terhadap kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Secara keseluruhan, penguatan nilai tukar Rupiah memberikan dampak positif terhadap momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah tetap stabil sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar yang terjaga. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar valas.

The Rupiah exchange rate strengthens, supported by the improving performance of Indonesia's Balance of Payments.

As of 22 January 2020, Rupiah has strengthened 1.74% (ptp) compared to the end of December 2019. This development showed further strengthening in 2019, which was recorded at 3.58% (ptp) or 0.76% on average. The Rupiah strengthening was encouraged by the supply of foreign exchange from exporters as well as inflows of foreign capital, in line with the maintained economic prospects of Indonesia, the attractiveness of the domestic financial market, and the uncertainty of the global financial market that started to ease. The forex market structure also becomes stronger, signified by the increase in transaction volume and more efficient quotations, as well as the growing development of the DNDF market, which supports the increased efficiency in the foreign exchange market. Bank Indonesia considers that the strengthening of the Rupiah exchange rate is in line with fundamental conditions, improving market mechanisms, and confidence of market players, in terms of the policies adopted by Bank Indonesia and the Government. Generally, the strengthening of the Rupiah exchange rate had a positive impact on economic growth momentum and macroeconomic stability. Onwards, Bank Indonesia considers the Rupiah exchange rate to remain stable in accordance with its fundamentals and maintained market mechanisms. Bank Indonesia strives to accelerate financial market deepening, both in the money market and the foreign exchange market to support the effectiveness of exchange rate policy and strengthen domestic financing.

Inflasi 2019 tetap rendah dan terkendali sehingga mendukung stabilitas perekonomian.

Inflasi IHK 2019 tercatat 2,72% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi 2018 sebesar 3,13% dan berada dalam kisaran sasarannya sebesar 3,5%±1%. Perkembangan ini menunjukkan inflasi selama lima tahun terakhir konsisten berada dalam kisaran sasarannya. Inflasi yang terus menurun dan terkendali dalam sasaran dipengaruhi beberapa perbaikan struktural seperti peran ekspektasi inflasi yang makin besar dan terjangkau kepada sasaran inflasi, pengaruh nilai tukar, dan harga impor yang menurun, serta dampak rambatan kenaikan inflasi *volatile food* dan inflasi administered prices kepada inflasi inti yang berkurang. Tekanan inflasi *volatile food* juga berkurang dipengaruhi sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) sehingga dapat mengurangi tekanan gejolak harga pangan saat terjadi kenaikan permintaan dan/atau penurunan pasokan. Sementara itu, inflasi *administered prices* tercatat rendah sejalan minimalnya kebijakan terkait tarif dan harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah. Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga sehingga inflasi IHK 2020 tetap terjaga dalam kisaran sasarannya sebesar 3,0±1%.

Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Januari 2020

Inflation in 2019 remained low and under control, thereby supporting economic stability.

In 2019, CPI inflation was recorded at 2.72% (yoy), decreased compared to 2018 inflation of 3.13%, and within the target range of 3.5%±1%. This development demonstrated that inflation over the past five years has consistently been within the target range. The declining and controlled inflation is influenced by various structural improvements, such as the role of growing inflation expectations and anchored to the inflation target, the effect of the exchange rate, and declining import prices, as well as the spatial impact of rising volatile food inflation, and reduced administered prices inflation on core inflation. Pressure for volatile food inflation also eased due to the synergy of Bank Indonesia and Government policies in the Central and Local Inflation Control Teams (TPIP and TPID) to reduce pressure from volatile food prices when there is any increase in demand and/or decrease in supply. Meanwhile, administered prices inflation was recorded at a low level in line with the minimum amount of policies related to tariffs and prices for goods and services regulated by the Government. Onwards, Bank Indonesia remains committed to maintaining price stability to ensure that 2020 CPI inflation will be within the targeted range of 3.0±1%.

Source: Bank Indonesia Monetary Policy Review, January 2020

Prospek Industri Crude Palm Oil (CPO)

Crude Palm Oil (CPO) Industry Prospect

Memasuki tahun 2020, industri sawit Indonesia dikaruniai dengan kondisi iklim yang membaik dan harga yang cukup tinggi. Menurut BMKG, iklim tahun 2020 akan normal dan lebih baik daripada iklim 2019, musim kemarau diperkirakan akan dimulai pada bulan April-Mei.

Entering into 2020, Indonesia's palm oil industry is gifted with improved climatic conditions and fairly high prices. According to BMKG, the 2020 climate will be normal and better than the 2019 climate, the dry season is expected to start in April-May.

Prospek dan Strategi Usaha Business Prospect and Strategy

Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan B30 pada 2020, menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sangat serius dan dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap perdagangan minyak nabati dunia dan perdagangan minyak di dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri 2020 diperkirakan mencapai 8,3 juta ton untuk biodiesel yang mungkin akan berpengaruh pada ketersediaan produk minyak sawit untuk ekspor.

Meskipun kondisi ekonomi dunia tahun 2020 masih belum menentu; situasi politik di Timur Tengah masih panas, perang dagang USA-China belum berakhir, masih adanya tuntutan sustainability di EU, peningkatan penggunaan biofuel di dalam negeri, semakin banyaknya perusahaan yang bersertifikasi ISPO dan terbukanya tujuan-tujuan ekspor baru akan lebih menjamin pasar minyak sawit Indonesia di pasar global, sehingga GAPKI tetap optimis pada tahun 2020 industri sawit Indonesia tetap memiliki prospek yang baik.

Memperhatikan tantangan-tantangan peluang pasar ekspor maupun domestik dalam negeri serta adanya iklim usaha yang lebih berpihak kepada peningkatan investasi, maka program kerja seluruh *stakeholder* sawit tahun 2020 perlu difokuskan pada:

1. Peningkatan produktivitas baik melalui perbaikan teknik produksi maupun *replanting*.
2. Mendorong percepatan implementasi *sustainability*/ISPO.
3. Mendorong pengembangan ekspor terutama di negara tujuan ekspor baru dan penanganan berbagai hambatan perdagangan di pasar global.
4. Meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap minyak sawit dan produk turunannya serta memperluas dan mengembangkan kampanye positif sawit yang efektif, baik di dalam negeri maupun di berbagai negara tujuan ekspor utama.

Dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2020 serta dukungan pemerintah yang sangat besar terhadap industri sawit maka GAPKI optimis tahun 2020 industri sawit akan lebih baik dari tahun 2019.

The government's commitment to implementing B30 in 2020 demonstrates to the world that Indonesia is very serious and its impact will greatly affect the global vegetable oil trade and domestic oil trade. In 2020, domestic demand is estimated to reach 8.3 million tons for biodiesel, which might affect the availability of palm oil products for export.

Even though the world economic conditions in 2020 are still uncertain; due to the political situation in the Middle East, the escalated USA-China trade war, demands for sustainability in the EU, increased domestic use of biofuels; the increasing number of ISPO-certified companies, and the new export destinations will guarantee Indonesia's palm oil market in the global market. Therefore, GAPKI remains optimistic that in 2020, Indonesia's palm oil industry will have good prospects.

With due regards to the challenges of domestic and export market opportunities, as well as a business climate that is more favorable to the increased investment, the work program of all palm oil's stakeholders in 2020 shall be focused on:

1. Increased productivity through improved production and replanting techniques.
2. Encouraging the acceleration of *sustainability*/ISPO implementation.
3. Encouraging export development, especially in new export destination countries, and handling various trade barriers in the global market.
4. Enhancing Indonesian people's love of palm oil and its derivative products, and expanding and developing effective palm oil positive campaign, both domestically and in various major export destination countries.

Taking into account the various opportunities and challenges to be faced in 2020, as well as the enormous government's support for the palm oil industry, GAPKI is optimistic that in 2020, the palm oil industry will be better than in 2019.

Statistik Minyak Sawit Indonesia Tahun 2019 (1.000 ton)
 Indonesia's Palm Oil Statistics in 2019 (1,000 tons)

Tahun	Produksi Production			Konsumsi dalam Negeri Domestic Consumption	Ekspor Export			Stok Stock
	Total	CPO	PKO		Total	CPO	PKO	
2018	47.388	43.108	4.280	13.491	34.707	6.561	28.145	3.261
2019	51.828	47.18	4.648	16.673	36.175	7.065	29.11	4.597

*) Produk olahan termasuk oleokimia dan biodiesel processed products include oleochemicals and biodiesel

Sumber: Siaran Pers Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) : Refleksi Industri Kelapa Sawit 2019 dan Prospek 2020, 03 Februari 2020

Source: Press Release of Indonesian Palm Oil Association (IPOA): Reflections on the 2019 Palm Oil Industry and 2020 Prospects, 3 February 2020

Strategi Usaha

Business Strategy

BPDPKS melakukan analisis kondisi internal dan eksternal sebagai upaya mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) dalam 5 tahun ke depan yang difokuskan pada aspek layanan, keuangan, SDM dan organisasi, serta sarana dan prasarana. Hasil analisis lingkungan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis, faktor internal yang mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan BPDPKS adalah:

OPPFMA performed the internal and external analysis to identify opportunities and challenges to be faced in implementing the Oil Palm Plantation Fund (DPKS) management in the next 5 years, which focuses on aspects of services, finance, human resources, organization, as well as facilities and infrastructure. The results of the environmental analysis are described as follows:

a. Internal Environment Analysis

Based on the analysis, the internal factors that influence the achievement of the vision, mission, and objectives of OPFMA are:

KEKUATAN STRENGTH

Aspek Layanan

1. Ekspertir merupakan *stakeholders* tetap dalam perspektif penerimaan sepanjang tarif pungutan ekspor diberlakukan
2. Program sawit untuk energi menjadi layanan unggulan untuk membuka pasar kelapa sawit dalam negeri di tengah peningkatan jumlah stok
3. Program layanan untuk meningkatkan ekonomi nasional melalui peningkatan kesejahteraan pekebun sawit swadaya merupakan program strategis nasional
4. Program layanan didukung oleh *stakeholders* baik dari pelaku industri sawit, pekebun, dan pemerintah

Services Aspect

- 1) Exporters are permanent *stakeholders* in terms of income as long as export levies are implemented
- 2) The palm oil program for energy has become service excellence to open the domestic palm oil market amidst increasing stocks
- 3) The service program to improve the national economy by improving the welfare of independent palm oil smallholders is a national strategic program
- 4) The service program is supported by *stakeholders*, i.e. the palm oil industry players, smallholders, and the government

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Prospek dan Strategi Usaha Business Prospect and Strategy

Aspek Keuangan

1. Pendapatan meningkat seiring peningkatan kinerja ekspor kelapa sawit
2. Tarif pungutan ekspor menjadi tools untuk menjaga *competitiveness* produk domestik di luar negeri terutama dengan Malaysia
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas lebih di dalam mendukung pelaksanaan anggaran program sawit

Aspek SDM dan Organisasi

1. SDM yang berasal dari berbagai latar belakang (PNS dan profesional swasta) memperkaya sudut pandang implementasi kinerja
2. BDPKKS memiliki fleksibilitas untuk bekerjasama dengan pihak profesional di dalam memberikan pandangan dan rekomendasi independen untuk setiap keputusan bisnis seperti komite litbang yang terdiri atas peneliti, surveyor, dan konsultan IT
3. Status BDPKKS sebagai lembaga pemerintah memberikan independensi di dalam membangun kerjasama *multi-stakeholders*

Aspek Sarana dan Prasarana

1. Lokasi kantor BDPKKS di jantung ibukota Jakarta mudah dijangkau sehingga meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders*
2. Operasional layanan didukung oleh sistem dan perangkat IT yang sangat memadai, seperti sistem e-billing pungutan ekspor, portal program peremajaan, dan sistem informasi perkantoran seperti persuratan dan absensi pegawai
3. BDPKKS memiliki website sebagai platform penyebaran informasi dan komunikasi yang terus berkembang

Financial Aspect

- 1) Increase of income in line with the increase in palm oil export performance
- 2) Export levies are tools to maintain the competitiveness of domestic products abroad, especially with Malaysia
- 3) The Public Service Agency's Financial Management Pattern provides more flexibility to support the palm oil program budget execution

HR and Organizational Aspects

- 1) Human resources from various backgrounds (civil servants and private professionals) enrich the perspective of performance execution
- 2) OPPFMA has the flexibility to work with professionals in providing independent perspectives and recommendations for every business decision, such as an R&D committee consisting of researchers, surveyors, and IT consultants
- 3) OPPFMA's status as a government institution provides independence in establishing multi-stakeholders cooperation

Facilities and Infrastructure Aspects

- 1) OPPFMA's office is located in the heart of the capital city of Jakarta, which is easy to reach, thereby improving coordination with stakeholders
- 2) Service operations are supported by adequate IT systems and tools, such as an e-billing system for export levies, a Replanting program portal, and office information systems, such as correspondence and employee attendance.
- 3) OPPFMA has a website as a platform for disseminating information and communication that continues to develop

KELEMAHAN WEAKNESS

Aspek Layanan

- 1) Penghapusan peran surveyor memberikan disinsentif bagi BDPKKS untuk menjalankan tugas verifikasi serta memastikan validitas data ekspor dan pungutan
- 2) Pelaksanaan program untuk peningkatan kesejahteraan pekebun sawit belum dilakukan secara terintegrasi
- 3) BDPKKS masih belum dapat memetakan seluruh target potensial penerima dana sehingga berdampak pada penyerapan dana sawit yang rendah
- 4) Birokrasi yang panjang atas penyaluran dana yang melibatkan banyak perangkat pusat dan daerah menambah waktu proses kerja penyaluran dana sawit
- 5) Diseminasi informasi layanan BDPKKS belum optimal kepada seluruh *potential customer*

Services Aspect

- 1) The elimination of the surveyor's role provides a disincentive for OPPFMA to carry out verification duties and ensure the validity of export and levy data
- 2) The program to improve the welfare of palm oil smallholders has not been carried out in an integrated manner
- 3) OPPFMA has not mapped all potential target as recipients of funds, which resulted in low absorption of palm oil funds
- 4) The long bureaucracy for fund disbursement involves many central and local officials, which adds more time in the process of disbursing palm oil funds
- 5) The dissemination of information on OPPFMA's services has not been conducted optimally to all potential customers

Aspek Keuangan

- 1) Kepastian pungutan sangat tergantung pada kinerja ekspor kelapa sawit dan kebijakan tarif pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah
- 2) Perencanaan anggaran belum efektif sehingga dana program banyak yang mengendap dan belum tersalurkan optimal (*opportunity lost*)
- 3) Investasi dana sawit sangat konservatif dan tidak mendispensasi kerugian akibat bisnis. Hal tersebut membuat imbal hasil investasi tidak berkontribusi besar di dalam menambah ketersediaan dana program

Financial Aspect

- 1) The levies certainty is highly dependent on the performance of palm oil exports and the levy policy set by the government
- 2) Ineffective budget planning, thus many program funds were settled and the funds have not been optimally distributed (*opportunity lost*)
- 3) Palm oil investment is very conservative and does not compensate for business losses. This prevents investment returns from contributing significantly to providing more funds into the program funds

Aspek SDM dan Organisasi

- 1) Pemberdayaan SDM yang berkompeten belum terencana dengan baik
- 2) Seluruh proses bisnis masih belum distandardisasi dalam Standar Prosedur Operasi. Hal tersebut berdampak pada standar waktu layanan yang bervariasi
- 3) Kurang optimalnya pengembangan kompetensi teknis pegawai untuk meningkatkan pelayanan

HR and Organizational Aspects

- 1) Empowerment of competent HR has not been well planned
- 2) All business processes are still not standardized in the Standard Operating Procedures. This impacts on varying service time standards
- 3) The employee's technical competence development was not optimal to improve service

Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana verifikasi dan pengujian komoditas ekspor seperti laboratorium dan perangkat pengujian lainnya pasca penghapusan peran surveyor
- 2) Pemanfaatan media website sebagai sarana promosi BDPKKS belum optimal
- 3) Penyaluran dana program relatif masih manual dan belum ditingkatkan menjadi berbasis IT
- 4) Belum tersedianya data industri sawit yang valid dan dinamis

Facilities and Infrastructure Aspects

- 1) Limited facilities and infrastructure for verification and testing of export commodities such as laboratories and other testing equipment after the surveyor's role was eliminated
- 2) The use of website as a means of promoting OPPFMA has not been optimal
- 3) The program's fund disbursement is still relatively manual, and has not been upgraded to IT-based
- 4) No data on the palm oil industry that is valid and dynamic

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal juga dilakukan dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu aspek layanan, keuangan, SDM dan organisasi, serta sarana dan prasarana. Berdasarkan analisa, faktor eksternal yang berpengaruh antara lain sebagai berikut:

b. External Environment Analysis

External environment analysis is also conducted taking into account four (4) aspects, i.e. services, finance, human resources and organization, as well as facilities and infrastructure. Based on the analysis, the influencing external factors are as follows:

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Prospek dan Strategi Usaha Business Prospect and Strategy

PELUANG OPPORTUNITY

Aspek Layanan

- 1) Potensi pasar minyak sawit sangat luas
- 2) Program green diesel dan biodiesel untuk kebutuhan energi berpotensi menyerap hasil produksi kebun dalam negeri khususnya pekebun swadaya
- 3) Pertumbuhan penggunaan media sosial yang besar menjadi peluang bagi BDPKKS untuk mempromosikan sawit nasional ke tingkat global secara efektif dan efisien
- 4) Moratorium lahan perkebunan menjadi peluang bagi BDPKKS untuk memberikan layanan optimal bagi peningkatan produktivitas kebun dan nilai tambah industri dalam negeri khususnya pekebun swadaya
- 5) Otonomi daerah membuka peluang bagi BDPKKS untuk bekerjasama langsung dengan Kepala Daerah di dalam membangun industri sawit lokal secara sinergis dan berkelanjutan

Aspek Keuangan

- 1) Potensi penerimaan lain selain pungutan ekspor seperti iuran dan dana pihak ketiga menjadi peluang bagi BDPKKS untuk meningkatkan sumber penerimaan.

Aspek SDM dan Organisasi

- 1) Terbukanya kesempatan meningkatkan kompetensi pegawai melalui program beasiswa S2 dan S3 dari kementerian keuangan dan/atau diklat-diklat profesi yang didanai oleh dana dukungan manajemen BDPKKS
- 2) Berlakunya sistem reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja SDM melalui penempatan SDM sesuai dengan kompetensinya dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan prima

Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Terbuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga dari dalam dan/atau luar negeri dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan program perbaikan data industri sawit
- 2) Terbukanya kerjasama dengan peneliti dari dalam dan/atau luar negeri untuk pengujian bibit legitimate

Services Aspect

- 1) The market potential for palm oil is very big
- 2) Green diesel and biodiesel programs for energy needs have the opportunity to absorb domestic plantation production, especially from independent smallholders
- 3) The large growth in the use of social media is an opportunity for OPPFMA to promote national palm oil to the global level effectively and efficiently
- 4) The moratorium on the plantation is an opportunity for OPPFMA to provide optimal services to increase plantation productivity and added value to domestic industries, especially independent smallholders.
- 5) Regional autonomy provides opportunity for OPPFMA to work directly with local leaders to establish the local palm oil industry in a synergistic and sustainable manner

Financial Aspect

- 1) Other potential income in addition to export levies, such as fees and third-party funds are opportunities for OPPFMA to increase income sources.

HR and Organizational Aspects

- 1) The opportunities to improve employee competence through the Master and Doctorate scholarship programs from the Ministry of Finance and/or professional education and training funded by OPPFMA's management support fund
- 2) The enactment of the bureaucratic reform system to improve HR by placing the human resources according to their competence with adequate facilities and infrastructure for excellent service

Facilities and Infrastructure Aspects

- 1) Opportunities to cooperate with third parties domestically and/or abroad to provide facilities and infrastructure as well as implement palm oil industry data improvement programs.
- 2) The opportunity to cooperate with researchers domestically and/or abroad to test legitimate seeds



TANTANGAN CHALLENGES

Aspek Layanan

- 1) Distorsi pemahaman *stakeholders* akan tugas dan fungsi BDPDKS sebagai lembaga pengelola dana berpotensi memberikan publik ekspektasi berlebihan akan wewenang BDPDKS dan berdampak negatif bagi kredibilitas BDPDKS sebagai lembaga pemerintah
- 2) Teknologi industri kelapa sawit Malaysia lebih unggul dibandingkan Indonesia berdampak pada kualitas produksi kebun sawit yang lebih baik dan diterima masyarakat global
- 3) Kehadiran negara-negara Amerika Tengah dan Selatan serta Pantai Barat Afrika sebagai *new emerging palm oil producer* berpotensi menurunkan market share minyak sawit Indonesia di pasar global
- 4) Kampanye negatif dan kebijakan pelarangan impor produk sawit ke pasar Eropa yang terus dilakukan pasar Eropa dan Parlemen Uni Eropa berpotensi memberikan efek multiplier di pasar minyak nabati kawasan lainnya
- 5) Kehadiran *winter seed* Uni Eropa menjadi substitusi minyak sawit ketika musim dingin di Eropa. Hal tersebut berdampak pada potensi penurunan pasar sawit nasional

Aspek Keuangan

- 1) Tingkat inflasi berpotensi menggerus nilai dana program yang diberikan BDPDKS kepada pelanggan seperti pekebun sawit
- 2) Penguatan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar berpotensi menurunkan penerimaan dari pungutan ekspor
- 3) Penurunan pasar luar negeri akibat kompetisi dengan produk sejenis dan/atau hambatan dagang dari negara tujuan ekspor berpotensi menurunkan penerimaan dari pungutan ekspor
- 4) Intensifikasi program biodiesel dan rencana penerapan program biofuel berpotensi menyerap stok untuk pasar luar negeri.

Aspek SDM dan Organisasi

- 1) Perubahan lingkungan yang berlangsung cepat menuntut BDPDKS untuk dapat lebih responsif dalam memberikan layanan secara efektif dan efisien serta lebih adaptif di dalam menyesuaikan bentuk organisasi dengan tuntutan perubahan
- 2) Pembentukan BDPDKS melalui Peraturan Presiden menjadikan keberlanjutan bisnis organisasi bergantung pada arah kebijakan setiap pimpinan negara

Services Aspect

- 1) The distortion of stakeholder understanding of OPPFMA's duties and functions as a fund management institution has the potential to grant the public excessive expectations of OPPFMA's authority, which may have a negative impact on OPPFMA's credibility as a government institution
- 2) The technology of Malaysia's palm oil industry is superior to Indonesia, which results in a better quality of palm oil production, and is well-accepted by the global community
- 3) The new emerging palm oil producers, i.e. Central and South American countries, and West Coast countries of Africa, have the potential to reduce Indonesia's palm oil market share in the global market
- 4) The negative campaign and the policy to prohibit imports of palm oil products into the European market that were carried out by the European market and the European Union Parliament have the potential to provide a multiplier effect on the vegetable oil markets of other regions
- 5) The presence of the European Union's winter seeds is a substitute for palm oil during winter in Europe. This may impact the potential decrease of the national palm oil market

Financial Aspect

- 1) The inflation rate has the potential to erode the value of program funds disbursed by the OPPFMA to the customers, such as palm smallholders
- 2) The strengthening of the rupiah exchange rate against the US Dollar has the potential to reduce income from export levies
- 3) A decline in foreign markets due to competition with similar products and/or trade barriers from export destination countries has the potential to reduce income from export levies
- 4) The intensification of the biodiesel program and the plan to implement biofuel programs have the potential to absorb stocks allocated for foreign markets.

HR and Organizational Aspects

- 1) Dynamic environmental changes require OPPFMA to be more responsive in providing services effectively and efficiently as well as more adaptive in terms of organizational form, in line with the changes
- 2) OPPFMA's establishment through a Presidential Regulation causes the sustainability of the organization's business to be dependent on the policy direction of each state leader

Prospek dan Strategi Usaha Business Prospect and Strategy

Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil kebun seperti laboratorium bibit, prasarana perkebunan, dan pengolahan hasil perkebunan yang didominasi perusahaan besar berpotensi menurunkan kemandirian usaha kebun rakyat
- 2) Keterbatasan penyediaan bibit legitimate untuk pekebun swadaya serta mekanisme penyaluran bibit siap salur yang tepat sasaran berpotensi menurunkan kualitas output dari penyaluran dana sawit
- 3) Sarana dan prasarana pengolahan CPO menjadi biofuel yang saat ini belum tersedia di dalam negeri memerlukan investasi yang besar untuk membeli teknologi tersebut

Facilities and Infrastructure Aspects

- 1) The availability of facilities and infrastructure for processing plantation products such as seed laboratories, plantation infrastructure, and processing plantations, that is dominated by large companies, has the potential to reduce the independence of smallholders' plantations
- 2) Limited provision of legitimate seedlings for independent smallholders as well as a mechanism for distributing targeted ready-to-channel seedlings has the potential to reduce the output quality of the palm oil fund disbursement
- 3) Currently, there are no facilities and infrastructure to process CPO into biofuel domestically, which require large investment if one is to purchase this technology

Strategi usaha BPDPKS dalam rangka menghadapi tantangan dan menangkap peluang pada industri kelapa sawit mengacu pada Rencana Strategis Bisnis BPDPKS Tahun 2020-2024. Rencana Strategis BPDPKS yaitu:

In facing the challenges and seizing the opportunities in the palm oil industry, OPPFMA's business strategy refers to the 2020-2024 OPPFMA's Business Strategic Plan. OPPFMA's Strategic Plan includes:

01

Optimalisasi penerimaan dana sawit

- ▶ Keberlanjutan dari dana perkebunan kelapa sawit salah satunya ditentukan oleh keberlanjutan penerimaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundangan. Saat ini diperlukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundangan.

Optimizing palm oil fund receipts

The sustainability of palm oil plantation funds is determined by many factors, one of which is the sustainability of palm oil plantation funds receipt, in accordance with laws and regulations. Currently, it is necessary to optimize the income sources as regulated in the laws and regulations.

02

Konsolidasi data luas lahan dan produksi sawit

- ▶ Agar penyaluran dana untuk perbaikan kesejahteraan pekebun lebih efektif dan tepat sasaran diperlukan perbaikan data melalui konsolidasi data luas lahan dan produksi sawit. Proses pendataan dilakukan melalui perbaikan metodologi pendataan pekebun sawit, penambahan variabel pendataan termasuk profil pekebun, profil lahan dan status kepemilikan, penggunaan metode *proxy means test* (PMT) untuk penentuan tingkat kesejahteraan, dan pengelolaan data mikro pekebun sawit. Hasil dari pendataan tersebut digunakan untuk penentuan sasaran kelompok petani yang berhak mendapatkan dukungan dana perkebunan kelapa sawit serta pengungkapan informasi publik melalui data center sawit.

Data consolidation of land area and palm oil production

It is necessary to improve data by consolidating land area and palm oil production to distribute funds to improve the welfare of smallholders to be more effective and on target. The data collection process is carried out by improving the data collection methodology for smallholders, adding data collection variables, including the profile of the farmers, land profile, and ownership status, using the proxy means test (PMT) method to determine the welfare level, and managing the microdata of palm oil farmers. The data collection results are used to determine the target group of farmers who are entitled to receive funding for palm oil plantations and to disclose public information through the palm oil data center.



03 ▶ **Percepatan penyerapan sawit domestik**
Untuk mengimbangi *demand power* dari pasar luar negeri perlu peningkatan demand domestik. Fokus dari peningkatan demand domestik dengan peningkatan demand minyak goreng melalui pengemasan minyak goreng, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dan juga keberlanjutan program sawit untuk energi (program B30).

Acceleration of domestic palm oil absorption
Increasing domestic demand is necessary to balance the demand power from foreign markets. The focus is to increase domestic demand by increasing cooking oil demand through cooking oil packaging, promoting health and disease prevention, and the sustainability of the palm oil program for energy (B30 program).

04 ▶ **Perluasan pasar ekspor baru**
Diperlukan strategi perluasan pasar ekspor baru (utamanya negara-negara berkembang dan ex-konflik), serta ekspansi produksi sawit untuk energi (biodiesel) dalam rangka dukungan terhadap *renewable energy*.

Expansion of new export markets
Strategy to expand to new export markets (especially developing and ex-conflict countries), as well as to expand palm oil production for energy (biodiesel) programs to support renewable energy are necessary.

05 ▶ **Perbaiki dukungan untuk pekebun sawit melalui peningkatan ketepatan sasaran strategis**
Menindaklanjuti hasil pendataan pekebun sawit, diperlukan tindak lanjut identifikasi jenis program yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan pekebun sawit. Pemberian dana program tidak lagi berjalan secara parsial namun terintegrasi satu sama lain sesuai dengan kebutuhan pekebun sawit.

Improved support for palm oil smallholders by increasing the strategic targets accuracy
After the data is collected on palm oil smallholders, the type of programs needed shall be identified to improve the welfare of palm oil smallholders. Provision of program funds will no longer runs partially but in an integrated manner according to the needs of the palm oil smallholders.

06 ▶ **Perbaiki rantai pasok dan peningkatan daya saing pekebun rakyat**
Diperlukan penguatan koperasi/gapoktan yang lebih mandiri dan profesional untuk mendekatkan hasil usaha ke hilir (dalam hal ini dari TBS ke CPO).

Improvement of the supply chain and smallholders' competitiveness
It is necessary to strengthen cooperatives/farmers group associations that are more independent and professional to encourage their business closer to downstream (in this case, from FFB to CPO).

07 ▶ **Penyediaan layanan informasi kepada pekebun sawit rakyat**
Menindaklanjuti hasil pendataan pekebun, lahan, serta produksi sawit adalah penyediaan aplikasi pengungkapan informasi ke publik yang dapat diakses secara real time oleh pekebun sawit. Sehingga diharapkan pekebun sawit dapat memperoleh layanan informasi yang tepat, cepat, dan akurat.

Information services provision to palm oil smallholders
Following-up on the smallholders, area, and palm oil production, it is necessary to provide information disclosure to the public, accessible real-time by the smallholders. Therefore, smallholders may be able to obtain correct, fast, and accurate information services.

08 ▶ **Dukungan program konversi sawit untuk green fuel**
Diperlukan persiapan untuk memperluas program sawit untuk energi (tidak hanya untuk biodiesel). Hal tersebut untuk menjembatani persoalan *oversupply* serta keberlanjutan dari usaha perkebunan sawit nasional.

Support for the conversion of palm oil to green fuel
Preparation is needed to expand the palm oil program for energy (not just for biodiesel). This is to bridge the problem of oversupply and the sustainability of the national palm oil plantation business.

Prospek dan Strategi Usaha Business Prospect and Strategy

- | | | |
|------|--|--|
| 09 ▶ | <p>Mendorong investasi pada sektor oleokimia
Masih tingginya angka ekspor dalam bentuk produk hulu menjadi permasalahan kepemilikan nilai tambah dari rantai industri sawit dalam negeri. Industri oleokimia merupakan industri padat modal namun memberikan nilai tambah yang besar dari industri perkebunan kelapa sawit yang ditargetkan dapat dikembangkan melalui pertumbuhan investasi.</p> | <p>Encouraging investment in the oleochemical sector
The high amount of exports in the form of upstream products is a problem for the added value ownership of the domestic palm oil industry chain. The oleochemical industry is a capital-intensive industry that provides great added value from the palm oil plantation industry, which is targeted to be developed through capital investment.</p> |
| 10 ▶ | <p>Penyusunan dokumen perencanaan kebijakan yang berkualitas
Diperlukan penyusunan dokumen perencanaan baik tahunan maupun 5 tahunan yang mengedepankan prinsip SMART (<i>specific, measurable, achievable, realistic, and timely</i>) sehingga meminimalisir deviasi terhadap realisasi program.</p> | <p>Formulation of quality policy planning documents
Annual and 5-yearly planning documents are necessary to be formulated, which prioritizes SMART (specific, measurable, achievable, realistic, and timely) principles to minimize deviations from the program realization.</p> |
| 11 ▶ | <p>Pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang akuntabel
Diperlukan realisasi dari asas pengelolaan dana sawit yaitu keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara (Dana Perkebunan Kelapa Sawit)</p> | <p>Accountable management of palm oil plantation funds
Realization of the palm oil fund management is required, i.e. the transparency in the management of state finances (Oil Palm Plantation Fund).</p> |
| 12 ▶ | <p>Peningkatan kualitas SDM BDPKKS yang lebih kompetitif
Diperlukan dukungan struktur organisasi yang lebih adaptif dengan tuntutan <i>stakeholders</i> serta kompetensi staf yang sesuai dengan kebutuhan teknis organisasi.</p> | <p>Quality improvement of OPPFMA's HR to be more competitive
OPPFMA shall be supported by a more adaptive organizational structure to adjust to the demands of stakeholders and the competence of staff in accordance with the technical needs of the organization.</p> |
| 13 ▶ | <p>Penerapan manajemen risiko yang lebih matang
Untuk menjamin keberlanjutan layanan BDPKKS serta usaha mitigasi risiko yang muncul diperlukan penerapan manajemen risiko yang holistic secara matang.</p> | <p>A more mature risk management implementation
A holistic risk management implementation is necessary to ensure the sustainability of OPPFMA's services as well as to mitigate the risk that may arise.</p> |
| 14 ▶ | <p>Pengelolaan sarana dan TIK yang lebih optimal dan modern
Untuk mendukung layanan BDPKKS yang lebih profesional, diarahkan pengembangan sarana dan prasarana yang berbasis IT sehingga dapat memotong waktu layanan.</p> | <p>Management of more optimal and modern facilities and ICT
To provide more professional OPPFMA's service, IT-based facilities and infrastructure are being developed to cut the service time.</p> |



15 ▶

Pengelolaan anggaran yang lebih optimal

Untuk meningkatkan kualitas penganggaran yang tepat sasaran dan guna, diperlukan integrasi antara dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan dan pengelolaan anggaran dana perkebunan kelapa sawit.

More optimal budget management

Integration between planning document as the formulation basis and palm oil fund management is necessary to improve the budgeting quality to be utilized more appropriately and on target.



Pendahuluan

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan

Profil BPDPKS

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

Laporan Keuangan Audited

Tata Kelola BPDPKS

OPPFMA's Governance



**BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY**

BPDPKS merupakan instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/2015 tentang penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh.

OPPFMA is a government agency that implements BLU financial pattern through Minister of Finance's Decree No. 650/KMK.01/2015 on the Establishment of OPPFMA at the Ministry of Finance as a Government Agency Implementing Public Service Agency Financial Management (PK-BLU).



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Pendahuluan Background

BDPKKS meyakini, penerapan *Good Governance* (GG) secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh BDPKKS. Penerapan GG pada BDPKKS diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku lainnya.

OPPFMA believes that the Good Governance (GG) implementation systematically and consistently is a necessity of OPPFMA. GG implementation within OPPFMA is expected to drive the business development, accountability, and actualize shareholders' value in the long-term with due regards to the interests of other stakeholders.

Praktik GG terus dikembangkan BDPKKS sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implemetasi GG di lingkup keorganisasian BDPKKS, di mana hal ini memberikan BDPKKS kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan mempertahankan eksistensi BDPKKS dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang. Penerapan GG di lingkungan BDPKKS tercermin dalam Prinsip-prinsip GG yang diakomodasikan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha sehari-hari BDPKKS, dalam hal ini terdiri atas:

OPPFMA develops GG practices as a commitment to innovating in efforts to improve GG within OPPFMA's organization, thereby providing OPPFMA with confidence in facing any upcoming challenges and maintaining OPPFMA's existence in facing upcoming challenges and business competition. GG within OPPFMA is reflected in the GG Principles that are accommodated in carrying out OPPFMA's daily business activities, consisting of:

TRANSPARANSI TRANSPARENCY	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan bagi BDPKKS kepada <i>stakeholder</i> .	Transparency in the process of decision making and openness in disclosing material and relevant information regarding OPPFMA to stakeholders.
AKUNTABILITAS ACCOUNTABILITY	BDPKKS menjamin adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Insan BDPKKS yang memungkinkan pengelolaan BDPKKS terlaksana secara efektif.	OPPFMA guarantees clarity of functions, implementation, and accountability of OPPFMA's Personnel, who enable OPPFMA's management to be carried out effectively.
PERTANGGUNGJAWABAN RESPONSIBILITY	Prinsip pertanggungjawaban merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola BDPKKS serta etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan BDPKKS.	The responsibility principle is the compliance with prevailing laws and regulations, and the OPPFMA's governance principles, as well as sound business ethics in OPPFMA's management.
INDEPENDENSI INDEPENDENCE	Prinsip independensi merupakan pengelolaan BDPKKS secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Independence guarantees OPPFMA's management that is professional, free of conflict of interest, and influence/pressure from any parties that is not in accordance with the prevailing rules and legislations.
KEWAJARAN FAIRNESS	BDPKKS selalu memastikan serta menjamin keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	OPPFMA ensures and guarantees fairness and equality in fulfilling the rights of Stakeholders based on agreements as well as prevailing laws and regulations.



Disamping itu, sebagai bentuk komitmen BDPKKS dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik, BDPKKS menyusun kebijakan standar GG yaitu diantaranya adalah *Code of Conduct* sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-628/DPKS/2019 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mulai berlaku dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2019. BDPKKS juga secara bertahap melakukan penyempurnaan atas kelengkapan kebijakan dan prosedur di seluruh organisasi BDPKKS, Sehingga strategi BDPKKS dalam pencapaian visi dan misi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

In addition, as a form of OPPFMA's commitment to implementing Good Governance, has formulated GG standard policies, including the Code of Conduct, in accordance with the President Director Decree No. KEP-628/DPKS/2019 on the Code of Conduct within Oil Palm Plantation Fund Management Agency, which came into force and was implemented at the end of the 2019 fiscal year. OPPFMA's gradually refines the completeness of policies and procedures within OPPFMA's organization. Thus, OPPFMA's strategy in achieving its vision and mission shall run effectively and efficiently.

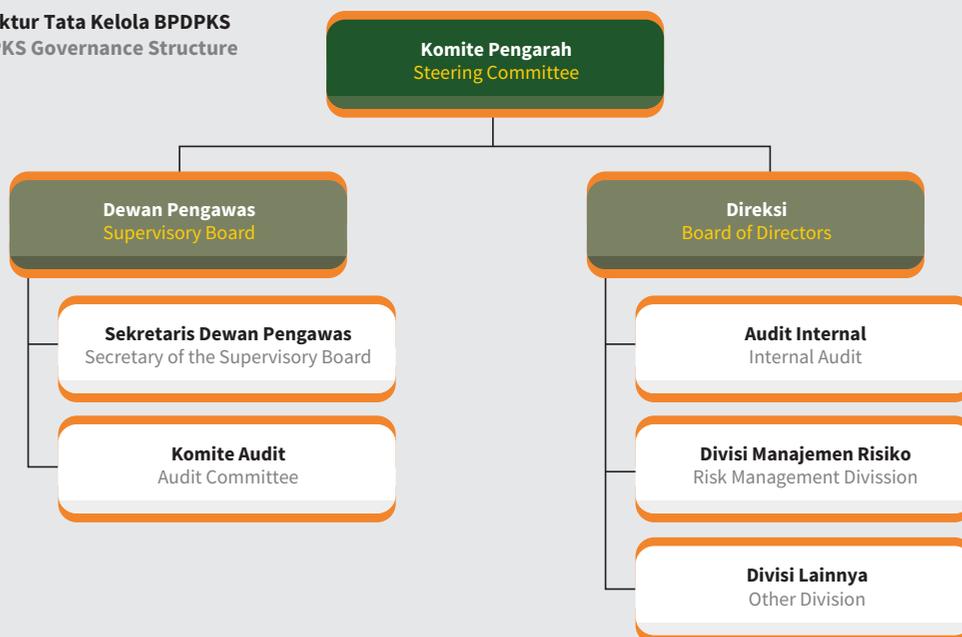
Struktur Tata Kelola BDPKKS

BDPKKS's Governance Structure

Organ tata kelola BDPKKS di dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola BDPKKS dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*. Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, telah dibentuk satu Komite yaitu Komite Audit dan Sekretaris Dewan Pengawas. Sedangkan organ pendukung Direksi terdiri dari Divisi Pengawasan Internal Audit, Divisi Manajemen Risiko serta Divisi lainnya.

The BDPKKS corporate governance is formed to ensure that the implementation of BDPKKS governance principles shall be done effectively with clear roles and responsibilities to create check and balance control mechanism. To assist the execution of the Supervisory Board's duties, the Audit Committee and the Supervisory Board's Secretary have been established. The Board of Directors' supporting organs consist of the Internal Audit Monitoring, Risk Management, and other Divisions.

Gambar Struktur Tata Kelola BDPKKS
 Figure: BDPKKS Governance Structure



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Komite Pengarah BPDPKS

OPPFMA's Steering Committee

Merupakan komite yang memiliki peran untuk memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas BPDPKS termasuk penentu penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Komite Pengarah BPDPKS ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

The Steering Committee is a committee with a role to provide policy direction for OPFMA's duties, including determining the use of palm oil plantation funds. The OPFMA's Steering Committee is stipulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2018 on the Second Amendment to the Presidential Regulation Number 61 of 2015 on the Funding and Utilization of Oil Palm Plantations Funds.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERTANIAN RI



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian PPN/
Bappenas

Komite Pengarah beranggotakan 8 (delapan) kementerian yang terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian selaku koordinator komite pengarah dan anggota dari yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian BUMN dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional.

The Steering Committee consists of eight (8) ministries, which include the Coordinating Ministry for the Economic Affairs as the coordinator of the Steering Committee and members of the Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Energy and Mineral Resources, and Ministry of SOEs, and Ministry of National Development Planning/Head of the National Development Agency.

Tugas dan Kewajiban Komite Pengarah Dana Perkebunan

Duties and Responsibilities of the Plantation Fund Steering Committee

Komite Pengarah BDPKKS memiliki dua tugas pokok utama yaitu 1). memberikan arahan kebijakan, visi, misi dan kebijakan dari penggunaan dana perkebunan kelapa sawit terutama menetapkan rancangan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan; dan 2). menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas dan Direktur Eksekutif.

Adapun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tugas Komite Pengarah Dana Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio; dan
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio.

Masing-masing Komite Pengarah berperan dalam perumusan kebijakan tentang dana perkebunan kelapa sawit. Adapun peranan masing-masing kementerian pada Dewan Pengarah sebagai berikut:

OPPFMA's Steering Committee has two main duties, i.e. 1) providing policy direction, vision, mission, and policies on the use of palm oil plantation funds, especially in establishing a policy design for the development and management of sustainable palm oil; and 2) appointing the Supervisory Board and Executive Director.

Based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2018 on the Second Amendment to the Presidential Regulation Number 61 of 2015 on the Funding and Utilization of Oil Palm Plantations Funds, the Plantation Fund Steering Committee has the duties as follows:

1. Formulating policies in the funding and fund utilization, including asset allocation policies based on the portfolio; and
2. Supervising the formulation of policies in the funding and fund utilization, including asset allocation policies based on the portfolio.

Each Steering Committee plays a role in formulating policies on palm oil plantation funds. The roles of each ministry in the Steering Committee are as follows:

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Komite Pengarah BDPKKS Komite Pengarah BDPKKS

Lembaga Komite Pengarah Steering Committee's Institution	Peranan Role	
 <p>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Kementerian Koordinator Perekonomian Coordinating Ministry for Economic Affairs</p>	<p>Koordinator Komite Pengarah. Koordinator Komite Pengarah.</p>
 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</p>	<p>Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture</p>	<p>Menetapkan peta jalan (<i>road map</i>) untuk kegiatan peremajaan, menetapkan pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit yang bersumber dari dana sawit, memberikan rekomendasi teknis dalam proses penyaluran dana sawit untuk kegiatan peremajaan.</p> <p>Establishing a road map for replanting activities, establishing guidelines for replanting palm oil trees from palm oil funds, providing technical recommendations in the process of disbursing palm oil funds for replanting activities.</p>
 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Kementerian Keuangan Ministry of Finance</p>	<p>Menetapkan tarif pungutan, menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas.</p> <p>Determining levy rates, determining the appointment and dismissal of the Supervisory Board.</p>
 <p>Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Kementerian Perindustrian Ministry of Industry</p>	<p>Menetapkan komoditas turunan perkebunan kelapa sawit yang dikenakan pungutan ekspor.</p> <p>Coordinating with the related Fund Management Agency for the appointment of surveyors.</p>
 <p>KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan</p>	<p>Berkoordinasi dengan Badan Pengelola Dana terkait dengan penunjukan surveyor.</p> <p>Coordinating with the related Fund Management Agency for the appointment of surveyors.</p>



Lembaga Komite Pengarah Steering Committee's Institution	Peranan Role
 <p>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ministry of Energy and Mineral Resources</p>	<p>Melakukan verifikasi terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk mendapatkan dana bagi kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Selain itu mengumpulkan laporan terkait kegiatan produksi dan distribusi (domestik maupun ekspor) jenis biodiesel oleh Badan Usaha Bahan Bakar nabati jenis biodiesel.</p> <p>Verifying the Biodiesel Type Biofuel Business Entity to obtain funds for the supply and utilization of biodiesel biofuels. In addition, collecting reports related to the production and distribution activities (domestic and export) of biodiesel by the Biodiesel Biofuel Business Entity.</p>
 <p>KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kementerian Badan Usaha Milik Negara Ministry of SoE</p>	<p>Melakukan pembinaan terhadap perusahaan BUMN dan merancang proses bisnis dalam program dana sawit.</p> <p>Guiding SOEs' companies and designing business processes in the palm oil fund program.</p>
 <p>KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS State Ministry of National Development Planning/ Bappenas</p>	<p>Menyusun rencana pembangunan nasional dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya; dan mengarahkan kebijakan program pemanfaatan dana sawit ke arah yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.</p> <p>Compiling national development plans and the draft of State Budget, as well as evaluating the implementation; and directing the policy for the utilization of palm oil funds that are in line with national development policies.</p>

Fungsi Komite Pengarah
 Steering Committee's Functions

Komite Pengarah Dana Perkebunan memiliki fungsi :

1. Mengarahkan strategi kebijakan umum pengelolaan DPKS oleh BDPDKS;
2. Menetapkan perencanaan jangka panjang serta tujuan BDPDKS;
3. Menetapkan kebijakan umum pengembangan dan penyaluran DPKS;
4. Menyetujui rencana umum target pemungutan biaya, penyaluran dana dan cadangan BDPDKS;

The Plantation Fund Steering Committee has the following functions:

1. Directing the general policy strategy for the management of Oil Palm Plantation Fund (DPKS) by OPPFMA;
2. Establishing long-term planning and objectives of OPPFMA;
3. Establishing general policies for the development and distribution of Oil Palm Plantation Fund (DPKS);
4. Approving the general plan for the target of OPPFMA's funding, fund disbursement, and reserves;

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Komite Pengarah BDPDKS Komite Pengarah BDPDKS

- Menetapkan proporsi alokasi DPKS terkait dana pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit, penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, promosi Perkebunan Kelapa Sawit, peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dan pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, dan hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit; dan
- Mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan BDPDKS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membentuk Sekretariat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS) yang selanjutnya disebut Sekretariat Komite Pengarah;
- Melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu; dan
- Menunjuk narasumber utama (prominent) yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit, dan eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya.

- Determining the DPKS allocation related to the human resource development fund for Palm Oil Plantation, research and development of Palm Oil Plantations, promotion of Palm Oil Plantations, Replanting of Palm Oil Plantations, Palm Oil Plantation facilities and infrastructure, and fulfillment of Palm Oil Plantation products for food needs, and downstream of Palm Oil Plantation industry; and
- Evaluating performance on the OPPFMA's achievement.

In carrying out its duties, the Steering Committee may perform the following:

- Establishing the Secretariat of the Steering Committee of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA), hereinafter referred to as the Secretariat of the Steering Committee;
- Involving ministries, agencies, local governments, and other parties deemed necessary; and
- Appointing prominent sources who come from palm oil plantation business players, industrial players with palm oil plantations as their raw materials, and exporters of palm oil plantation commodities and/or their derivatives.

Rapat Komite Pengarah

Steering Committee's Meeting



Rapat Komite Pengarah dilakukan dua kali setahun ataupun pada rapat yang diselenggarakan untuk membahas isu tertentu. Pertemuan komite pengarah merupakan *high level meeting* yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi masing-masing kementerian/ lembaga yang menjadi ketua dan anggota komite pengarah.

Steering Committee holds meetings twice a year or at any time necessary to discuss certain issues. The Steering Committee's meeting is a high-level meeting attended by the highest leadership of each ministry/institution as the chairman and members of the Steering Committee.

Sekretariat Komite Pengarah dan Perkebunan Secretariat of the Steering Committee's Plantation Fund

Sekretaris Komite Pengarah Dana Perkebunan diemban oleh Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretariat Komite Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
2. Membantu Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam melakukan pengawasan dan penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
3. Memberikan dukungan teknis penyelenggaraan diseminasi terhadap pelaksanaan kegiatan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); dan
4. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite Pengarah dan/atau anggota Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komite Pengarah dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan serta pihak lain yang dipandang perlu. Selanjutnya Sekretariat Komite Pengarah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komite Pengarah BPDPKS secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

The Secretary of the Steering Committee's Plantation Fund is held by the Deputy for Food and Agriculture Coordination at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. The Secretariat of the Steering Committee has the following duties:

1. Providing technical and administrative support for the duties of the Steering Committee of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA);
2. Assisting the Steering Committee of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency in supervising and utilizing the Oil Palm Plantation Fund (OPPFMA);
3. Providing technical support for the dissemination on the activities of the Steering Committee of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA); and
4. Carrying out other related tasks assigned by the Chairman of the Steering Committee and/or members of the Steering Committee of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA).

In carrying out its duties, the Secretariat of the Steering Committee may involve Ministries/Non-Ministerial Government Agencies, Local Governments, Stakeholders, and other parties deemed necessary. Further, the Secretariat of the Steering Committee reports the results of its duties to the Chairman of the OPPFMA's Steering Committee regularly or at any time if needed.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pengarah Dana Perkebunan Report on the Activities of the Plantation Fund Steering Committee

Selama tahun 2019, Komite Pengarah Dana Perkebunan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam pengawasan terhadap BPDPKS, di antaranya adalah:

1. Rapat alokasi anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Rapat pembiayaan litigasi dan advokasi atas kampanye negatif Uni Eropa.
3. Rapat revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 sebagai upaya percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
4. Rapat pembahasan calon pejabat pengelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
5. Rapat pembahasan pembiayaan floating storage dan tindak lanjutnya;
6. Rapat Pembahasan usulan alternatif kebijakan untuk keberlanjutan program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

During 2019, the Plantation Fund Steering Committee has carried out various activities to supervise OPPFMA, including:

1. Budget allocations meeting for the Oil Palm Plantation Fund Management Agency, Service tariff of the Public Service Agency of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency.
2. Litigation financing and advocacy meetings for the negative EU campaigns.
3. Revision meeting of the Minister of Agriculture Regulation No. 7 of 2019 as an effort to accelerate the Small-Scale Palm Oil Replanting (PSR).
4. Meeting to discuss candidates for managing officials of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency
5. Floating storage financing discussion meeting and follow-up;
6. Meeting to discuss alternative policy proposals for the sustainability of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency programs.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Dewan Pengawas Supervisory Board



**BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY**

Dewan Pengawas BPDPKS adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi BPDPKS dalam menjalankan pengelolaan BPDPKS. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Komite Pengarah atas pelaksanaan tugas pengawasan dan penasihatan tersebut secara kolektif maupun kolegial.

OPPFMA's Supervisory Board is an organ that supervises and provides advice to OPPFMA's Board of Directors to carry out OPPFMA's management. The Supervisory Board directly reports to the Steering Committee for these supervisory and advisory duties collectively or collegially.

Dewan Pengawas BPDPKS berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang unsur Pemerintah dan 3 (tiga) orang unsur Profesional. Unsur Pemerintah adalah Pejabat yang diusulkan oleh masing-masing Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas, dan untuk unsur profesional diusulkan oleh Komite Pengarah kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas.

OPPFMA's Supervisory Board has nine (9) members, consisting of six (6) members of the Government and three (3) Professionals. The members of the government element were proposed to the Minister of Finance to be appointed as the Member of the Supervisory Board. The members of the professional element were proposed by the Steering Committee to the Minister of Finance to be appointed as the Member of the Supervisory Board.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Dewan Pengawas Supervisory Board

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Appointment and Dismissal of the Supervisory Board

Sejalan dengan Anggaran Dasar BDPKKS, pengangkatan calon Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan Kemampuan dan Kepatutatan dalam hal memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha BDPKKS serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan, serta Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi BDPKKS. Masa Jabatan Dewan Pengawas maksimal 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa tugas 5 (lima) tahun berikutnya dengan tidak mengurangi hak Komite Pengarah untuk memberhentikan para Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu.

Adapun untuk masa jabatan Anggota Dewan Pengawas dapat berakhir apabila Masa jabatan berakhir; Meninggal dunia; Mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui; Diganti sebelum masa jabatan berakhir, baik diberhentikan menurut keputusan Komite Pengarah maupun diusulkan penggantinya oleh Kementerian/Lembaga asal; dan Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

In accordance with OPPFMA's Articles of Association, the appointment of candidates for the Supervisory Board shall meet the fit and proper requirements related to the understanding of one of the management functions, adequate knowledge in the OPPFMA's business field, and adequate integrity, competence, and reputation.

The appointment and dismissal of the Supervisory Board are carried out through a Minister of Finance's Decree, and the appointment of the Supervisory Board shall not coincide with the appointment of OPPFMA's Board of Directors. The term of office of the Supervisory Board is a maximum of five (5) years, and can be extended for another five (5) years without prejudice to the Steering Committee's right to dismiss the members of the Supervisory Board at any time.

The term of office of members of the Supervisory Board may end if the Terms ended; the member Died; the Member resigned and such resignation is approved; the member was replaced before the term ended, either dismissed in accordance with the Steering Committee's Decree or replaced by the Ministry/Agency of his/her origin; and the member was no longer complying with the prevailing terms.

Susunan dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas

Composition and Basis for the Supervisory Board's Appointment

Selama tahun 2019, komposisi Anggota Dewan Pengawas BDPKKS mengalami perubahan dengan adanya 2 (dua) kali pengangkatan dan 1 (satu) kali pemberhentian Anggota Dewan Pengawas berdasarkan:

- Keputusan Menteri Keuangan No.4/KMK.05/2019 tanggal 3 Januari 2019 telah dilakukan pengangkatan untuk 3 (tiga) anggota Dewan Pengawas (Sdr. Kasan; Sdr. Achmad Sigit Dwiwahjono; dan Sdr. Djoko Siswanto) serta telah memberhentikan 3 (tiga) Anggota Dewan Pengawas (Sdr. Bambang; Sdr. Arlinda; dan Sdr. Panggah Susanto) sebagai anggota Dewan Pengawas.
- Keputusan Menteri Keuangan No.605/KMK.05/2019 tanggal 1 Agustus 2019 terdapat 1 (satu) pengangkatan anggota Dewan Pengawas yaitu Sdr. Kasdi Subagyono sebagai Dewan Pengawas. Sehingga susunan Dewan Pengawas BDPKKS per 31 Desember 2019 adalah menjadi sebagai berikut:

During 2019, there were two (2) appointments and one (1) dismissal of the members of OPPFMA's Supervisory Board based on:

- Minister of Finance's Decree No. 4/KMK.05/2019 dated 3 January 2019, it appointed three (3) members of the Supervisory Board (Mr. Kasan; Mr. Achmad Sigit Dwiwahjono; and Mr. Djoko Siswanto) and dismissed three (3) Members of the Supervisory Board (Mr. Bambang; Mr. Arlinda; and Mr. Panggah Susanto) as members of the Supervisory Board.
- Minister of Finance's Decree No. 605/KMK.05/2019 dated 1 August 2019, in which there was one (1) appointed member of the Supervisory Board, i.e. Mr. Kasdi Subagyono as the Supervisory Board. Therefore, the composition of OPPFMA's Supervisory Board as of 31 December 2019 is as follows:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Representatif Representative		Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Profesional	Professional	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015
Loso Judijanto	Anggota Member	Profesional	Professional	Tanggal 26 Juni 2015 Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015
Joko Supriyono	Anggota Member	Profesional/GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)	Professional/GAPKI (Indonesian Palm Oil Assosiation)	
Musdhalifah Machmud	Anggota Member	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Coordinating Ministry for Economic Affairs	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2018 Tanggal 6 Juni 2018 Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018
Heru Pambudi	Anggota Member	Kementerian Keuangan	Ministry of Finance	
Djoko Siswanto	Anggota Member	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ministry of Energy and Mineral Resources	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 692/KMK.05/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 Minister of Finance's Decree No. 692/KMK.05/2018 dated 16 October 2018
Kasan	Anggota Member	Kementerian Perdagangan	Ministry of Trade	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Minister of Finance's Decree No. 4/KMK.05/2019 dated 3 January 2019
Achmad Sigit Dwiwahjono	Anggota Member	Kementerian Perindustrian	Ministry of Industry	
Kasdi Subagyo	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 605/KMK.05/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 Minister of Finance's Decree No. 605/KMK.05/2019 dated 1 August 2019

Jumlah dan komposisi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan BDPKKS serta diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif dan independen serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

The number and composition are adjusted to OPPFMA's needs so that the supervisory activity can be conducted effectively, objectively, and independently, and it does not have a conflict of interest that could interfere with the ability to carry out their duties and responsibilities.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Dewan Pengawas Supervisory Board

Dewan Pengawas Independen dan Independensi Dewan Pengawas Independence of the Supervisory Board and Independent Supervisory Board

Dewan Pengawas Independen merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau dengan Komite Pengarah atau hubungan lainnya dengan BDPKKS yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Keberadaan Dewan Pengawas Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan berbagai *stakeholder*.

Pada praktiknya BDPKKS telah memiliki Dewan Pengawas Independen yang dijabat oleh Sdr. Rusman Heriawan; Sdr. Loso Judijanto; dan Sdr. Joko Supriyono. Sehingga Jumlah Pengawas Independen BDPKKS adalah sebanyak 3 (tiga) orang dari total jumlah Dewan Pengawas sebanyak 9 orang atau sebesar 33% dari jumlah Dewan Pengawas.

Kriteria Dewan Pengawas Independen sebagai berikut:

1. Bukan Anggota Manajemen BDPKKS;
2. Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
3. Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi BDPKKS atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Pengawas;
4. Bukan pemasok atau pelanggan utama dari BDPKKS atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama.
5. Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan BDPKKS atau perusahaan afiliasi.

Independence of the Supervisory Board means the members of the Supervisory Board has no financial, management, shareholding ownership and/or familial relationship with fellow members of the Supervisory Board and/or the Steering Committee, or other relationships with OPPFMA which may affect their ability to act independently. The independence of the Supervisory Board shall create a more objective and independent climate, to maintain fairness and provide balance between the interests of various stakeholders.

In practice, OPPFMA has an Independent Supervisory Board, which is held by Mr. Rusman Heriawan; Mr. Loso Judijanto; and Mr. Joko Supriyono. Thus, there are three (3) independent supervisors of OPPFMA out of nine members of the Supervisory Board, or equivalent to 33% of the total number of Supervisory Board.

The criteria for the Independent Supervisory Board are as follows:

1. Shall not be a Member of OPPFMA's Management;
2. Shall be free from business and other relationships that can influence decision making;
3. Shall not be a professional principal advisor or consultant for OPPFMA or affiliates, or an employee who deal directly with service providers, at least three (3) years before becoming a member of the Supervisory Board;
4. Shall not be a supplier or main customer of OPPFMA or affiliates or an employee of/ or who has direct or indirect contact with the main supplier or customer.
5. Shall not have a relationship agreement with OPPFMA or affiliates.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Badan Lain Affiliation and Management Relationship in Other Agencies

Hubungan afiliasi Dewan Pengawas dilihat dari sifat hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan di Badan lain (rangkap jabatan) yang menimbulkan benturan kepentingan

The affiliation of the Supervisory Board can be seen from the familial, financial, share ownership, and management relationships in other Agencies (concurrent positions) that may cause a conflict of interest.



Keberadaan Dewan Pengawas Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan berbagai stakeholder.

The independence of the Supervisory Board shall create a more objective and independent climate, to maintain fairness and provide balance between the interests of various stakeholders.

Sifat Afiliasi Dewan Pengawas Berdasarkan Sifat Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepemilikan Saham
 Affiliation of the Supervisory Board Based on the Financial, Familial, and Shareholdings Relationship

Nama Anggota Dewan Pengawas Name of Supervisory Board's Member	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with			Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship with			Hubungan Kepemilikan Saham Shareholding Relationship		
	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemilik Modal Capital Owners	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemilik Modal Capital Owners	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemilik Modal Capital Owners
Rusman Heriawan	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Loso Judijanto	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Joko Supriyono	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Musdhalifah Machmud	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Heru Pambudi	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Djoko Siswanto	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Kasan	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Achmad Sigit Dwiwahjono	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Kasdi Subagyono	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Selama tahun 2019, tidak terdapat hubungan afiliasi keuangan, keluarga dan kepemilikan Saham Dewan Pengawas dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Pengarah

During 2019, there was no financial, familial, and shareholdings relationship of the Supervisory Board with the Board of Directors, fellow Supervisory Board, and the Steering Committee.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Dewan Pengawas Supervisory Board

Pedoman, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Guidelines, Duties, and Responsibilities of the Supervisory Board

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tugas Dewan Pengawas BDPKKS adalah melakukan pengawasan terhadap:

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola;
2. Menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan pengumpulan dan penggunaan Dana oleh Pejabat Pengelola kepada Komite Pengarah; dan
3. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Pengarah.

Kewajiban Dewan Pengawas BDPKKS adalah:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum (BLU);
2. Melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberi pendapat dan saran kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU; dan
4. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Based on the Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 on the Establishment of the Supervisory Board at the Oil Palm Plantation Fund Management Agency Public Service Agency, the duty of OPPFMA's Supervisory Board is to:

1. Supervise and foster the duties of the Managing Officer;
2. Deliver recommendations on the policies of collection and use of Funds by the Managing Officer to the Steering Committee; and
3. Carry out other related duties assigned by the Steering Committee.

The obligations of OPPFMA's Supervisory Board are:

1. Providing opinions and suggestions to the Minister of Industry and the Minister of Finance in terms of the Strategic Business and Budget Plan proposed by the Public Service Agency (BLU) Managing Officer;
2. Reporting to the Minister of Industry and the Minister of Finance in the event of any declining signs in the BLU's performance;
3. Following the development of BLU activities, providing opinions and advice to the Minister of Industry and the Minister of Finance on any issues deemed important for BLU's management; and
4. Providing input, suggestions, or responses to the BLU's financial statements to BLU Managing Officers.

The Supervisory Board reports its duties implementation to the Minister of Finance periodically at least once every one semester, and from time to time if necessary.

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Supervisory Board

Sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas telah melakukan berbagai tugas pengawasan sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Pengawas yang meliputi sebagai berikut:

During 2019, the Supervisory Board has carried out various tasks as a form of supervisory duties of the Supervisory Board, which includes:



01 ▶ Program Pengenalan Dewan Pengawas Baru
Pada tahun 2019 terdapat dua kali pengangkatan Dewan Pengawas baru dan telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya program pengenalan melalui rapat Dewan Pengawas.

Supervisory Board's Induction Program

In 2019, there were two new members appointed as the Supervisory Board. This is followed up by an induction program through a Supervisory Board's meeting.

02 ▶ Program Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas
Sepanjang tahun 2019 Dewan Pengawas telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab Profil BDPDKS dengan sub bab Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Kepala Divisi BDPDKS, Unit Audit Internal dan Unit/Divisi Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

Supervisory Board's Competency Development Program

During 2019, the Supervisory Board has participated in various training as described in the OPPFMA Profile under the Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Head of OPPFMA's Divisions, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit in this Annual Report.

03 ▶ Rapat Dewan Pengawas
Pelaksanaan Rapat Pengawas selama tahun 2019 terkait dengan frekuensi, agenda, dan peserta Rapat dibahas lebih lanjut pada Bab tersendiri dengan Judul Rapat Dewan Pengawas dan Direksi pada Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Supervisory Board's Meeting

During 2019, the Supervisory Board's Meetings in terms of frequency, agenda, and participants is further elaborated in the Meetings of the Supervisory Board and Board of Directors in the Corporate Governance chapter in this Annual Report.

04 ▶ Persetujuan dan Keputusan Dewan Pengawas
Selama tahun 2019, Dewan Pengawas telah memberikan persetujuan/keputusan kepada Direksi sebanyak 1 (satu) antara lain tentang: Indikator Keberhasilan BDPDKS terkait replanting diukur dari persentase penyaluran dana terhadap rekomtek

Approval and Decision of the Supervisory Board

During 2019, the Supervisory Board has approved/decided on one matter related to the Board of Directors: OPPFMA's achievement indicators related to replanting are assessed by the percentage of fund disbursement to rekomtek

05 ▶ Program Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas
Sepanjang tahun 2019 Dewan Pengawas telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab Profil Perusahaan dengan sub bab Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Kepala Divisi Perusahaan, Unit Audit Internal dan Unit/Divisi Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas

Sepanjang tahun 2019 Dewan Pengawas telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab Profil Perusahaan dengan sub bab Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Kepala Divisi Perusahaan, Unit Audit Internal dan Unit/Divisi Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Dewan Pengawas Supervisory Board

06 ▶

Kunjungan Kerja Dewan Pengawas

Dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas pejabat pengelola, Ketua dan atau anggota Dewan Pengawas melakukan peninjauan dan evaluasi ke lapangan, seperti mengikuti kegiatan launching program peremajaan kebun kelapa sawit, kegiatan kemitraan, sosialisasi sawit, serta sebagai nara sumber dalam pembentukan forum kelapa sawit berkelanjutan dan penyusunan rencana aksi provinsi. Dewan Pengawas juga berpartisipasi dalam promosi sawit di dalam dan beberapa di luar negeri, seperti mengikuti kegiatan ke Pakistan dan India serta ikut sebagai bagian dari delegasi Indonesia pada Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan ke Swiss dalam rangka negosiasi *Indonesia European Free Trade Association (EFTA) - Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

Supervisory Board's Working Visitation

The Chairman and/or members of the Supervisory Board conduct field visitations and evaluations to supervise and foster the duties of managing officers, such as participating in the launching of palm oil plantation Replanting programs, partnership activities, palm oil socialization, and as a speaker in the establishment of palm oil forum sustainability and preparation of provincial action plans. The Supervisory Board also participates in the promotion of palm oil domestically and internationally, such as participating in Pakistan and India, and as part of the Indonesian delegation to the Minister of Trade's Working Visitation to Switzerland for Indonesia's negotiations on the European Free Trade Association (EFTA) - Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Supervisory Board's Performance Assessment

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan penyampaian laporan kinerja Dewan Pengawas sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 tanggal 26 Juni 2015 bahwa Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pada tahun 2019, Dewan Pengawas telah menyusun Laporan Tugas Pengawasan yang dilakukan pada semester I diserahkan pada tanggal 31 Juli 2019 dan semester II pada tanggal 31 Januari 2020.

The performance assessment of the Supervisory Board is carried out based on the assessment criteria related to the Supervisory Board's duties and responsibilities and the submission of the Supervisory Board's performance report as stipulated in the Minister of Finance Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015, that the Supervisory Board reports its duties implementation to the Minister of Finance periodically at least once every one semester, and from time to time if necessary.

In 2019, the Supervisory Board has prepared the first-semester Supervisory Task Report, submitted on 31 July 2019, and the second-semester report, on 31 January 2020.



Penilaian Kinerja Direksi Board of Directors' Performance Assessment

Selain Dewan Pengawas menilai kinerja Dewan Pengawas sendiri, Dewan Pengawas juga melakukan penilaian kinerja terhadap Direksi baik secara individual maupun kolegiel dan kinerja terhadap masing-masing komite sebagai organ penunjang Dewan Pengawas yang berlandaskan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Pengawas menilai di tahun 2019 Komite di bawah Dewan Pengawas dan kinerja Direksi telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

In addition to the self-assessment of the Supervisory Board, the Supervisory Board also assesses the Board of Directors' performance, individually and collectively, and the performance of each committee as a supporting organ of the Supervisory Board, based on their duties and responsibilities. The Supervisory Board assessed that in 2019, the Committees under the Supervisory Board and the Board of Directors have performed their duties properly.



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Komite Audit Audit Committee

Dalam menunjang pelaksanaan BDPKKS telah membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Direktur Utama BDPKKS No.KEP-08/DPKS/2016 tentang Pembentukan Komite Audit pada BDPKKS.

Audit Committee is established to assist the Supervisory Board based on the President Director's Decree of OPPFMA No. KEP-08/DPKS/2016 on the Establishment of an Audit Committee at OPPFMA to support OPPFMA's implementation.

Tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan, memberikan opini profesional dan independen kepada Dewan Pengawas mengenai laporan atau hal-hal lain yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit (eksternal/internal) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

The purpose of the Audit Committee's establishment is to assist the Supervisory Board in carrying out its supervisory duties, providing a professional and independent opinion to the Supervisory Board regarding reports or other matters submitted by the Board of Directors to the Supervisory Board, as well as monitoring the follow-up of audit results (external/internal) to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.

Jumlah dan Komposisi Number and Composition

Pada Tahun 2019, jumlah dan komposisi Komite Audit BDPKKS mengalami perubahan dengan adanya pemberhentian 1 (satu) anggota Komite Audit yaitu Sdr. Moehammad Hatta berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-154/DPKS/2019, sehingga jumlah Komite Audit sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite Audit dan 1 (satu) anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

In 2019, OPPFMA's Audit Committee number and composition changed with the dismissal of one (1) member of the Audit Committee, i.e. Mr. Moehammad Hatta, based on the President Director's Decree No. KEP-154/DPKS/2019. Thus, the Audit Committee consists of two (2) people, i.e. one (1) Chairman of the Audit Committee and one (1) member of the Audit Committee, with the following structure:



Table: Members of the Audit Committee as of 31 December 2019
 Table: Members of the Audit Committee as of 31 December 2019

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Loso Judijanto	Ketua Komite Audit/Anggota Dewan Pengawas Chairman of the Audit Committee/Member of the Supervisory Board	Keputusan Direktur Utama BDPKKS No.KEP-154/DPKS/2019 tentang Pembentukan Komite Audit pada BDPKKS
Hary Nugroho S	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Decree of the President Director of OPPFMA No. KEP-154/DPKS/2019 on the Establishment of an Audit Committee at OPPFMA

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit

Appointment and Dismissal of Audit Committee's Members

Pengangkatan anggota Komite Audit diputuskan melalui Keputusan Direktur Utama BDPKKS No.KEP-154/DPKS/2019 tentang Pembentukan Komite Audit pada BDPKKS tanggal 15 April Tahun 2019. Anggota Komite Audit dapat berhenti atau diberhentikan meskipun jabatannya belum berakhir, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia.

The Audit Committee's members are appointed by the Decree of the President Director of OPPFMA No. KEP-154/DPKS/2019 on the Establishment of an Audit Committee at OPPFMA dated 15 April 2019. Audit Committee members may resign or be dismissed when their term of office has not ended, if the person concerned resigns and/or dies.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Educational Qualifications and Work Experiences of the Members of the Audit Committee

BDPKKS telah menentukan persyaratan dalam menentukan kualifikasi untuk dapat menjadi anggota Komite Audit, antara lain (1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan, (2) tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan terhadap perusahaan, (3) mampu berkomunikasi secara efektif, (4) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, (5) memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.

OPPFMA has determined the qualification requirements to become a member of the Audit Committee, i.e. (1) have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/audit, (2) do not have personal interests/relationships that may cause negative impacts and conflict of interest against the company, (3) able to communicate effectively, (4) able to provide sufficient time to complete their duties, (5) have expertise in finance or accounting.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Komite Audit Audit Committee

Pedoman Kerja Komite Audit Audit Committee Charter

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Keputusan Direktur Utama BDPKKS No.KEP-154/DPKS/2019 Tanggal 15 April 2019. Cakupan dari keputusan Direktur Utama tersebut terdiri dari penetapan Susunan Komite Audit Tahun 2016, Tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Audit, Fungsi Komite Audit dan Honorarium bagi Komite Audit.

The Audit Committee refers to the Decree of the President Director of OPPFMA No. KEP-154/DPKS/2019 dated 15 April 2019 in carrying out its duties and responsibilities. The President Director's Decree covers the 2016 Audit Committee's Composition, Duties and responsibilities as the Audit Committee, Functions of the Audit Committee, and Audit Committee's Honorarium.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Audit Committee's Duties and Responsibilities

Komite Audit BDPKKS sesuai dengan arahan Dewan Pengawas dan Keputusan Direktur Utama adalah bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Dewan Pengawas BDPKKS. Sejalan dengan Keputusan Direktur Utama BDPKKS No.KEP-08/DPKS/2016, fungsi Komite Audit BDPKKS adalah:

- a) Melakukan penelaahan atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola kepada Dewan Pengawas
- b) Melakukan supervisi atas pelaksanaan pengendalian internal BDPKKS
- c) Melakukan tugas lain yang ditetapkan Dewan Pengawas

Selain itu, Komite Audit juga senantiasa bertugas melakukan pengawasan pekerjaan Auditor Independen, memantau kepatuhan BDPKKS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau pengelolaan risiko BDPKKS.

Guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, Komite Audit memiliki kewenangan untuk mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, data keuangan, aset serta sumber daya BDPKKS lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BDPKKS yang diakses untuk keperluan tugas tersebut.

In accordance with the Supervisory Board's direction and the President Director's Decree, OPPFMA's Audit Committee is responsible and reports directly to OPPFMA's Supervisory Board. In line with the Decree of the President Director of OPPFMA No. KEP-08/DPKS/2016, the functions of OPPFMA's Audit Committee are:

- a) Reviewing reports submitted by the Managing Officers to the Supervisory Board
- b) Supervising OPPFMA's internal control
- c) Carrying out other duties as instructed by the Supervisory Board

In addition, the Audit Committee has the duty to supervise the work of the Independent Auditor, monitor OPPFMA's compliance with the prevailing laws and regulations, and monitor OPPFMA's risk management.

The Audit Committee has the authority to access records or information on the employee, financial data, assets, and other OPPFMA's resources that are relevant to the performance of its duties to ensure the optimal performance of its duties and responsibilities. The Audit Committee shall maintain the confidentiality of the OPPFMA's documents, data, and information to which it has gained access in the performance of its duties.



Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Report on the Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Pelaksanaan tugas Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit dan program atau rencana kerja yang telah disusun agar berjalan efektif dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

The duties of the Audit Committee refer to the Audit Committee Charter and the plan or work program plan that has been prepared, so that the Audit Committee can run effectively and achieve the predetermined targets. During 2019, the Audit Committee has carried out the following activities:

Rapat Komite Audit

Audit Committee's Meeting

Sejalan dengan Piagam Komite Audit, rapat Komite Audit dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan BDPKKS. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit. Selama tahun 2019, Komite Audit BDPKKS telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

In line with the Audit Committee Charter, Audit Committee holds meetings once a month or according to OPPFMA's needs. The meeting is chaired by the Chairman of the Audit Committee or a Member of the Audit Committee. During 2019, the OPPFMA's Audit Committee held 12 meetings, with attendance levels as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Meetings	Kehadiran Attended	% Kehadiran % Attended
Loso Judijanto	Ketua Chairman	12	12	100
Hary Nugroho S	Anggota Member	12	12	100
Moehammad Hatta	Anggota Member	12	-	0

Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak, dengan ketentuan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hasil pembahasan rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Dewan Pengawas.

Decisions in the Committee's meeting are made through deliberation. In the event that a deliberative consensus is not reached, the decision is made by vote, provided that the decision is made based on a majority vote. The Audit Committee's meeting results are the recommendations to be acted upon by the Supervisory Board.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Komite Audit Audit Committee

Tanggapan dan Rekomendasi Kepada Dewan Pengawas

Responses and Recommendations to the Supervisory Board

Komite Audit selama tahun 2019 memberikan tanggapan, laporan, telaahan dan masukan kepada Dewan Pengawas, antara lain:

1. Penelaahan dan pemantauan atas semua informasi keuangan yang disajikan Manajemen;
2. Penelaahan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal;
3. Penelaahan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan hasil pemeriksaan oleh unit Internal Audit;
4. Penelaahan dan pemantauan atas:
 - a. Independensi dan objektivitas kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan menjadi auditor eksternal;
 - b. Biaya jasa audit dan cakupan audit yang diajukan oleh KAP terpilih;
 - c. Pelaksanaan perkembangan audit yang dilakukan oleh KAP;
 - d. Laporan hasil audit yang disampaikan oleh KAP.
5. Penelaahan dan pemantauan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Penelaahan dan pemantauan serta melaporkan berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.

During 2019, the Audit Committee provided responses, reports, reviews, and input to the Supervisory Board, including:

1. Reviewing and monitoring all financial information presented by the Management;
2. Reviewing and monitoring the effectiveness of internal control;
3. Reviewing and monitoring the effectiveness of the audit results by the Internal Audit unit;
4. Reviewing and monitoring:
 - a. Independence and objectivity of the Public Accounting Firm (KAP) which will be appointed as the external auditor;
 - b. Audit service fees and audit coverage proposed by the selected KAP;
 - c. Implementation of audit by KAP; and
 - d. Audit report submitted by KAP.
5. Reviewing and monitoring the compliance with prevailing laws and regulations;
6. Reviewing and monitoring, as well as reporting various potential risks that may occur.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Audit Committee's Training and Competency Development

Sepanjang tahun 2019 Komite Audit telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab Profil BPDPKS dengan sub bab Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Kepala Divisi BPDPKS, Unit Audit Internal dan Unit/Divisi Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

During 2019, the Audit Committee has participated in various training as described in the OPPFMA Profile under the Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Head of OPPFMA's Divisions, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit in this Annual Report.



Kunjungan Kerja Komite Audit Audit Committee Work Visitation

Dalam rangka mendapatkan informasi, klarifikasi dan gambaran atas kemajuan/perkembangan serta permasalahan yang dihadapi atas pelaksanaan tugas pejabat pengelola dilapangan, Ketua dan atau anggota Komite Audit melakukan peninjauan dan evaluasi ke lapangan, seperti:

- a. Kunjungan kerja yang terkait program PSR antara lain melakukan kunjungan ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan, lokasi PSR di Pekanbaru dan kunjungan ke Dinas Perkebunan Sumatera Utara dan lokasi Program Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara.
- b. Peninjauan persiapan sistem verifikasi tunggal antara lain dengan melakukan kunjungan ke KPPBC TMP B Bandar Lampung dan kunjungan ke KPPBC TMP Gresik dan Surabaya-Jawa Timur.
- c. Meninjau dan mengevaluasi beasiswa vokasi SDM Kelapa Sawit antara lain menghadiri rapat koordinasi kegiatan program beasiswa pendidikan vokasi 2019 di Yogyakarta dan bertemu dengan para penerima beasiswa vokasi yang sedang magang di Kalimantan Tengah.
- d. Mengikuti dan berpartisipasi dalam upaya promosi dan kemitraan seperti berpartisipasi pada beberapa seminar yang berkaitan langsung atau bertema sawit yang diselenggarakan di Jakarta.
- e. Melakukan kunjungan ke luar negeri yang berhubungan dengan upaya promosi kelapa sawit atau kemitraan seperti ke Malaysia dan Belanda.

To obtain information, clarification, and description of progress/developments, as well as the problems in the duties of field managing officers, the Chairman and members of the Audit Committee conduct site visitation and evaluations, such as:

- a. Working visitation related to the PSR program, including visits to the Palm Oil Research Center in Medan, PSR in Pekanbaru, and visits to the North Sumatra Plantation Office, and the location of the Small-Scale Palm Oil Replanting Program in North Sumatra.
- b. Review of the preparation of a single verification system, including a visit to KPPBC TMP B Bandar Lampung and KPPBC TMP Gresik and Surabaya - East Java.
- c. Reviewing and evaluating palm oil human resources vocational scholarships, including attending a coordination meeting for the 2019 vocational education scholarship program in Yogyakarta, and meeting with vocational scholarship recipients who are currently interning in Central Kalimantan.
- d. Participating in promotion and partnership activities, such as several seminars related to palm oil or has the theme of palm oil, in Jakarta.
- e. Conducting international visits related to palm oil promotion efforts or partnerships, such as to Malaysia and the Netherlands.

Remunerasi Komite Audit Audit Committee's Remuneration

Remunerasi anggota Komite Audit mengacu pada KEP-08/DPKS/2016 dengan pembagian sebagai berikut:

Remuneration of the members of the Audit Committee refers to KEP-08/DPKS/2016 with the following distribution:

Nama Name	Honorarium per Bulan (Rp) Monthly Honorarium (Rupiah)
Loso Judijanto	Mengikuti Remunerasi sebagai Anggota Dewan Pengawas Remuneration as a Member of the Supervisory Board
Hary Nugroho S	10.000.000
Moehammad Hatta	10.000.000

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Sekretaris Dewan Pengawas Secretary of the Supervisory Board

Sekretaris Dewan Pengawas BPDPKS dijabat oleh Reni Kustiari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-22/DPKS/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas. Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Reni Kustiari holds the position of the Secretary of OPPFMA's Supervisory Board, in accordance with the President Director's Decree No. KEP-22/DPKS/2015 dated 30 December 2015 on the Establishment of the Supervisory Board's Secretariat. The appointment of the Supervisory Board's Secretary has been approved by the Supervisory Board.

Profil Ketua Sekretariat Dewan Pengawas sebagai berikut:

The profile of the Head of the Supervisory Board Secretariat is as follows:



Nama Name

Reni Kustiari

Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth

Bengkulu, 18 Oktober 1958 Bengkulu, 18 October 1958

Pendidikan Education

Doctor of Philosophy in Agricultural Economics, Bogor Agricultural University, Bogor, 2001-2007; Master of Agricultural Economics, University of Missouri, USA, 1992-1994; Bachelor in Agricultural Statistics, Bogor Agricultural University, Bogor, 1979-1982.

Sekretaris Dewan Pengawas memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan memastikan implementasi *Good Governance* terkait fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas beserta organnya telah memadai.

The Secretary of the Supervisory Board has an important role in facilitating the smooth administration and ensuring adequate *Good Governance* related to the supervisory function by the Supervisory Board and its organs.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

Tasks and Responsibilities of the Supervisory Board's Secretary

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh data dan informasi terkait dengan Dewan Pengawas; 2. Menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting tentang Rapat Dewan Pengawas kepada Direksi BDPKPS; 3. Memberikan dukungan kepada Dewan Pengawas guna memperlancar tugas-tugas Dewan Pengawas; dan 4. Sebagai penghubung antara Dewan Pengawas dengan Direksi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Administering and documenting all data and information related to the Supervisory Board; 2. Providing and conveying important information about the Supervisory Board's Meeting to the OPPFMA's Board of Directors; 3. Supporting the Supervisory Board to facilitate the duties of the Supervisory Board; and 4. Being a liaison between the Supervisory Board and the Board of Directors. |
|---|---|

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Duties Implementation of the Secretary of the Supervisory Board

Selama Tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Pengawas dalam rangka pengambilan keputusan;
2. Mempersiapkan rapat-rapat dalam lingkungan Dewan Pengawas baik yang bersifat rutin maupun non rutin dengan berbagai pihak;
3. Membuat risalah rapat atas rapat-rapat rutin maupun non rutin Dewan Pengawas dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
4. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Pengawas, baik untuk keperluan Dewan Pengawas dan Komite Audit, serta melakukan pengadministrasiannya.

During 2019, the Secretary of the Supervisory Board has conducted several activities:

1. Providing information for the Supervisory Board in making its decision;
2. Preparing regular and non-regular meetings within the Supervisory Board and with various parties;
3. Preparing minutes of meetings on regular and non-regular meetings of the Supervisory Board and delivering them to interested parties;
4. Organizing secretarial activities within the Supervisory Board, for the needs of the Supervisory Board and Audit Committee, and its administration.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Direksi Board of Directors



BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY



Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Kerja Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPDPKS sesuai kepentingan dan tujuan BPDPKS.

The Board of Directors has clear authority and responsibility in accordance with the Articles of Association and the Board Manual in carrying out the OPPFMA in accordance with the OPPFMA's interests and objectives.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Appointment and Dismissal of the Board of Directors

Sesuai dengan Anggaran Dasar BPDPKS, pengangkatan calon Direksi wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam hal memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Komite Pengarah melalui proses transparan (Pemegang Saham BPDPKS). Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan Komite Pengarah dan pencalonan tersebut mengikat bagi Komite Pengarah.

In accordance with OPPFMA's Articles of Association, the appointment of candidates for the Board of Directors shall meet the fit and proper requirements related to the understanding of one of the management functions, adequate knowledge in the Company's business field, and adequate integrity, competence, and reputation.

The appointment and dismissal of the Board of Directors are carried out by the Steering Committee through a transparent process (OPPFMA's Shareholders). The members of the Board of Directors are appointed from the candidates proposed by the Steering Committee, and such nominations are binding on the Steering Committee.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Komite Audit Audit Committee

Pemberhentian anggota Direksi sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi Induk Badan melalui Komite Pengarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite Pengarah dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan;
2. Masa jabatan anggota Pejabat Pengelola ditetapkan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
3. Anggota Pejabat Pengelola sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan;
4. Anggota Pejabat Pengelola dapat mengundurkan diri dari jabatan direksi dengan mengirimkan surat pengunduran diri. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengunduran diri tersebut, jika tidak ada jawaban dari Kementerian Keuangan, berarti persetujuan diri tersebut disetujui.

Dismissal of members of the Board of Directors is entirely the authority of the Parent Agency's Board of Directors through the Steering Committee, in accordance with the provisions of laws and regulations. The Steering Committee may dismiss members of the Board of Directors at any time with due reasons. The Appointment and Dismissal of Managing Officer are as follows:

1. The Managing Officer is appointed and dismissed by the Minister of Finance;
2. The term of office of the Managing Officer is set forth at five (5) years and thereafter can be reappointed for one (1) term of office;
3. Managing Officer may be dismissed at any time before the end of the term of office;
4. Managing Officer may resign from his/her position as a director by sending a resignation letter. If within thirty (30) days since the date of resignation there is no answer from the Ministry of Finance, the resignation is approved.

Susunan dan Dasar Pengangkatan Direksi

Composition and Basis for the Board of Directors' Appointment

Selama tahun 2019 jumlah dan komposisi Direksi BDPKKS mengalami perubahan dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian Direksi. Komite Pengarah BDPKKS telah mengangkat Sdr. Kabul Wijayanto sebagai Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana dan mengangkat Sdr. Sunari menggantikan Sdr. Hendrajat Natawidjaja sebagai Direktur Penghimpunan Dana. Sehingga Jumlah Direksi BDPKKS per 31 Desember 2019 berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan komposisi sebagai berikut:

During 2019, the number and composition of the OPPFMA's Board of Directors changed due to the appointment and dismissal of the Board of Directors. OPPFMA's Steering Committee has appointed Mr. Kabul Wijayanto as Director of Fund Planning and Management, and appointed Mr. Sunari to replace Mr. Hendrajat Natawidjaja as Director of Funding. Therefore, as of 31 December 2019, OPPFMA's Board of Directors consists of five (5) members with the following composition:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	
Dono Boestami	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017	Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
Catur Ariyanto Widodo	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372/KMK.01/2016 tanggal 20 Mei 2016	Minister of Finance's Decree No. 372/KMK.01/2016 dated 20 May 2016
Kabul Wijayanto	Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Fund Planning and Management	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019	Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019
Sunari	Direktur Penghimpun Dana Director of Funding	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019	Minister of Finance's Decree No. 739/KMK.05/2019 dated 19 September 2019
Edi Wibowo	Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Disbursement	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017	Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017

Independensi Direksi Board of Directors' Independence

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual maupun kolektif. Selama tahun 2019 seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan *Good Governance*. Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan ditandatangani pada awal pengangkatan sebagai Direktur dan diperbaharui setiap awal tahun sebagai pernyataan bahwa anggota Direksi maupun keluarganya tidak mempunyai kepemilikan saham maupun menjadi pengurus pada perusahaan maupun kegiatan usaha yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha BPDPKS.

Every member of Directors acts independently in carrying out duties and responsibilities, be it individually or collectively. During 2019, all members of the Board of Directors shall not hold concurrent position which is prohibited in the prevailing laws on the Good Governance implementation. The statement of Declaration of Absence of Conflict of Interest shall be signed at the appointment of the Directors, and shall be renewed annually as a statement that the members of the Board of Directors or their families do not have share ownership or become the Company's management, or have business activities that are related directly or indirectly to the OPPFMA's field of business.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Komite Audit Audit Committee

Pedoman, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Board of Directors' Guidelines, Duties, and Responsibilities

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 11 Juni 2015. Sejalan dengan pedoman tersebut, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut:

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Copy of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 113/PMK.01/2015 on the Organization and Work Procedure of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency dated 11 June 2015. In line with these guidelines, the Duties and Responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1 DIREKTUR UTAMA PRESIDENT DIRECTOR

Melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disebut Dana, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Conducting the management of the Oil Palm Plantation Fund, hereinafter referred to as the Fund, in accordance with the policies stipulated by the Minister of Finance and based on the provisions of laws and regulations.

2 DIREKTORAT PENGHIMPUNAN DANA DIRECTORATE OF FUNDING

Direktorat Penghimpunan Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan iuran pelaku usaha dan penghimpunan dana lainnya.

Directorate of Funding has the duty to coordinate the planning and funding for the palm oil plantation Replanting, research and development, palm oil promotion, and the development of facilities and infrastructure for palm oil plantations that originate from collecting fees and dues from business actors and collecting other funds.

3 DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DANA DIRECTORATE OF FUND PLANNING AND MANAGEMENT

Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan strategi bisnis, mengembangkan rencana pengalokasian dana, pengembangan dan penempatan dana yang dikelola pada instrumen investasi.

Directorate of Planning and Fund Management has the responsibility to formulate the business strategy planning policies, develop plans for fund allocation, developing and placing managed funds in investment instruments.

4 DIREKTORAT KEUANGAN, UMUM, KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO DIRECTORATE OF FINANCE, GENERAL AFFAIRS, COMPLIANCE, AND RISK MANAGEMENT

Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (settlement), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Directorate of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management coordinates the preparation of strategic plans and business plans for the annual budget, work program and budget of the work unit, management of budget, accounting, and reporting, settlement, human resource management, general affairs, organization's risk management and compliance with statutory provisions.



5 | **DIREKTORAT PENYALURAN DANA**
 DIRECTORATE OF FUND DISBURSEMENT

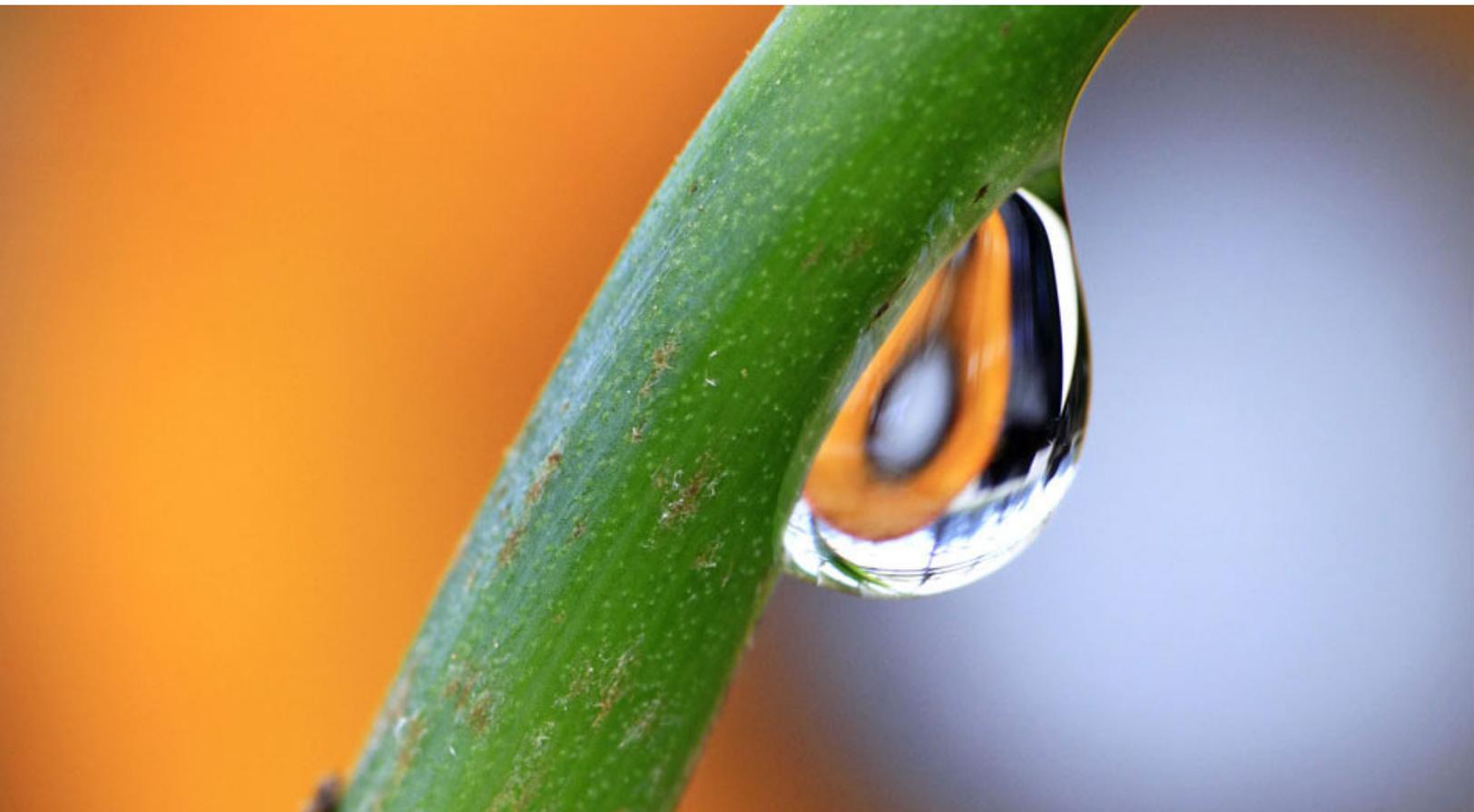
Direktorat Penyaluran Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penyaluran Dana, verifikasi dan penilaian atas proposal pengembangan komoditas kelapa sawit dan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran Dana, serta melakukan fungsi kustodian atas Dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan atas penyimpanan Dana.

Directorate of Fund Disbursement is responsible for coordinating the Fund disbursement plan, verification and assessment of palm oil commodity development proposals, and Fund disbursement for development financing, monitoring and evaluation of the Fund disbursement, as well as performing custodial functions on Funds, including recording, monitoring, and reporting the Fund balance.

6 | **DIREKTORAT KEMITRAAN**
 DIRECTORATE OF PARTNERSHIP

Direktorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi perusahaan Lembaga Kemasyarakatan, dan civil society untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Directorate of Partnership has the duty to formulate the partnership management plan with Small and Medium Enterprises and Cooperatives, companies, Social Organizations, and civil society, for sustainable palm oil development.



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Komite Audit Audit Committee

Pembidangan Tugas Direksi

Segregation of Duties of the Board of Directors

Direksi BDPDKS bertanggung jawab penuh atas pengurusan BDPDKS untuk kepentingan dan tujuan BDPDKS. Direksi bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan BDPDKS sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BDPDKS. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut merupakan tugas khusus masing-masing Anggota Direksi BDPDKS:

OPPFMA's Board of Directors is fully responsible for the OPPFMA's management for the interests and objectives of OPPFMA. The Board of Directors is responsible to the Minister of Finance as the embodiment of OPPFMA's management accountability, in accordance with the governance principles of OPPFMA. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors has clear duties and responsibilities in accordance with their respective functions. The following are the specific duties of each member of OPPFMA's Board of Directors:

Jabatan Position	Fungsi Function
Direktur Utama President Director	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja; 2. Penghimpunan Dana termasuk rencana dan strategi pemungutan biaya dan pengembangan dana; 3. Pengelolaan dana yang meliputi penempatan/investasi dana; 4. Perencanaan dan penyaluran dana ; 5. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan penyelesaian transaksi (<i>settlement</i>), serta pelaporan; 6. Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas BDPDKS.
Direktorat Penghimpunan Dana Directorate of Funding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit; 2. Pelaksanaan penghimpunan biaya dan iuran pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan turunannya; 3. Pelaksanaan penghimpunan dana lainnya; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit; 5. Pelaporan realisasi penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit.



**Jabatan
 Position**

**Fungsi
 Function**

**Direktorat
 Perencanaan
 dan Pengelolaan
 Dana**
 Directorate of Fund
 Planning and
 Management

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan rencana usaha berupa rencana strategis bisnis; 2. Penyiapan bahan penyusunan alokasi dan rencana bisnis tahunan sebagai bahan penyusunan RBA tahunan; 3. Pengembangan rencana pengalokasian dana; 4. Pengembangan dan penempatan dana yang dikelola dan pendapatan pada instrumen investasi; 5. Pengelolaan kerjasama pengelolaan dana; 6. Penyusunan rencana penyaluran dana terkait biodiesel, peremajaan, pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi, sarana dan prasarana; 7. Pengelolaan riset, data, dan informasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulation of business plan policies in the form of strategic business plan; 2. Preparation of materials for the allocation planning and annual business plan as materials for the annual RBA; 3. Development of fund allocation plan; 4. Development and placement of managed funds and income in investment instruments; 5. Management of joint fund management; 6. Plan for fund disbursement related to biodiesel, replanting, palm oil human resource development, research and development, promotion, facilities and infrastructure; 7. Management of research, data, and information. |
|---|---|

**Direktorat
 Keuangan, Umum,
 Kepatuhan dan
 Manajemen Risiko**
 Directorate of Finance,
 General Affairs,
 Compliance, and
 Risk Management

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran; 2. Pengelolaan Anggaran dan Keuangan; 3. Penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi 4. Pelaksanaan setelmen; 5. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia; 6. Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan; 7. Pengelolaan risiko dan kepatuhan internal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation of strategic plans, business and budget plan (RBA), work program and budgets; 2. Budget and Financial Management; 3. Preparation of accounting systems and manuals, financial statements and performance reports, and accounting for each transaction 4. Settlement; 5. Planning, development, and management of human resources; 6. General and household affairs; 7. Internal risk management and compliance. |
|---|--|

**Direktorat
 Penyaluran Dana**
 Directorate of
 Fund Disbursement

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran pengembangan kelapa sawit berkelanjutan; 2. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan kelapa sawit dan penyaluran untuk kegiatan pengembangan kelapa sawit; 3. Pelaksanaan kegiatan penyaluran dana kegiatan biodiesel, peremajaan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, sarana dan prasarana; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan; 5. Pelaporan realisasi penyaluran dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation of materials and coordination for the plan distribution for sustainable palm oil development; 2. Verification and assessment of proposals for palm oil activities and disbursement for palm oil development; 3. Fund disbursement related to biodiesel, replanting, palm oil human resource development, research and development, promotion, facilities and infrastructure; 4. Monitoring and evaluation of the fund disbursement for the development of sustainable palm oil development; 5. Report on the fund disbursement for sustainable palm oil development. |
|--|---|

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Komite Audit Audit Committee

Jabatan Position	Fungsi Function
Direktorat Kemitraan Directorate of Partnership	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan rencana kemitraan; 2. Pelaksanaan identifikasi kemitraan kegiatan pengembangan kelapa sawit; 3. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Perusahaan, Lembaga, Kemasyarakatan, dan civil society; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kemitraan kelapa sawit berkelanjutan; 5. Pelaporan realisasi kemitraan kelapa sawit berkelanjutan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Report on the Board of Directors' Duties

Selama tahun 2019, Direksi telah melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tertuang pada Program Kerja Direksi diantaranya adalah sebagai berikut:

During 2019, the Board of Directors has carried out various duties and responsibilities as stated in the Board of Directors' Work Program, including:

Program Pengenalan Direksi Baru

Board of Directors' Induction Program

Pada tahun 2019 terdapat pengangkatan Direksi baru dan telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya program pengenalan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019. Program tersebut diselenggarakan oleh Divisi Umum dan SDM dengan materi sebagai berikut:

In 2019, there were newly appointed Directors. This has been followed-up with an induction program on 29 October 2019. The program is organized by the Division of General Affairs and HR with the following materials:

- Sosialisasi penerapan kode etik di BDPKKS
- Gambaran mengenai BDPKKS berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya
- Keterangan mengenai kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta hak-hak Direksi.
- Socialization of OPPFMA's code of conduct
- OPPFMA's overview on objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position, risk, internal control, and other strategic issues.
- Information regarding the obligations, duties, and responsibilities, as well as the rights of the Board of Directors.



Rapat Direksi

Board of Directors' Meeting

Pelaksanaan Rapat Direksi selama tahun 2019 terkait dengan frekuensi, agenda, dan peserta Rapat dibahas lebih lanjut pada Bab tersendiri dengan Judul Rapat Dewan Pengawas dan Direksi pada Bab Tata Kelola BPDPKS pada Laporan Tahunan ini.

During 2019, the Board of Directors' Meetings in terms of frequency, agenda, and participants is further elaborated in the Meetings of the Supervisory Board and Board of Directors in the OPPFMA's Governance chapter in this Annual Report.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Directors' Competency Development Program

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab Profil BPDPKS dengan sub bab Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Kepala Divisi BPDPKS, Unit Audit Internal dan Unit/Divisi Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

During 2019, the Board of Directors has participated in various training as described in the OPPFMA Profile under the Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Head of OPPFMA's Divisions, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit in this Annual Report.

Penilaian atas Kinerja Komite Di bawah Direksi

Performance Assessment of Committees Reporting Directly to the Board of Directors

Sampai dengan tahun 2019, BPDPKS belum memiliki Komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi mengenai Penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi termasuk landasan penilaian Komite di bawah Direksi.

As of 2019, OPPFMA does not have any Committee reporting directly to the Board of Directors. Therefore, there is no information regarding the performance assessment of the Committees reporting directly to the Board of Directors, including the basis for the assessment of the Committees reporting directly to the Board of Directors.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi

Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors

Rapat Dewan Pengawas

Supervisory Board's Meeting

Keputusan Rapat Dewan Pengawas baik yang internal maupun gabungan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak, atau Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas telah disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

The decisions in the internal and joint Supervisory Board's Meetings are made based on deliberation. If a consensus cannot be reached, the decision is made based on the majority of votes agreed, or the Supervisory Board can make a legal and binding decision without holding a meeting, provided that all members of the Supervisory Board have approved the decision in writing and signed it.

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Frequency of the Supervisory Board's Meeting

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas bersama Direksi sebanyak 12 kali dan Rapat Internal Dewan Pengawas sebanyak 12 kali dengan tingkat kehadiran Dewan Pengawas sebagai berikut:

During 2019, the Supervisory Board has conducted 12 Joint Meeting with the Board of Directors and 12 Internal Supervisory Board's Meetings. The attendance of the Supervisory Board is as follows:

Nama Name	Rapat Internal Dewan Pengawas Supervisory Board's Internal Meeting			Rapat Gabungan Dewan Pengawas bersama Direksi Joint Meetings of the Supervisory Board and the BOD		
	Jumlah Total	Kehadiran Attended	%	Jumlah Total	Kehadiran Attended	%
Rusman Heriawan	12	11	91.7	12	11	91.7
Loso Judijanto	12	12	100.0	12	12	100.0
Joko Supriyono	12	8	66.7	12	8	66.7
Musdhalifah Machmud	12	10	83.3	12	10	83.3
Heru Pambudi	12	7	58.3	12	7	58.3
Djoko Siswanto	12	10	83.3	12	10	83.3
Kasan	12	9	75.0	12	9	75.0
Achmad Sigit Dwiwahjono	12	6	50.0	12	6	50.0
Kasdi Subagyo*	5	4	80.0	5	4	80.0

*Menjabat sejak 1 Agustus 2019 Served since 1 August 2019

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors

Agenda dan Peserta Rapat Pengawas

Agenda and Participants of the Supervisory Board's Meeting

Agenda dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Pengawas & Direksi Tahun 2019

Agenda and Participants of the Joint Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors in 2019

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant	
1	25-01-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan Desember 2018 Laporan Komite Audit bulan Januari 2019 Kemajuan Program Biodiesel, Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in December 2018 Audit Committee's Report in January 2019 Progress of the Biodiesel Program, Small-Scale Palm Oil Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Achmad Sigit, Kasan Muhri, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p> <p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Achmad Sigit, Kasan Muhri President Director, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>
2	26-02-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan Januari 2018 Laporan Komite Audit bulan Februari 2019 Kemajuan Program Biodiesel, Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in January 2018 Audit Committee's Report in February 2019 Progress of the Biodiesel Program, Small-Scale Palm Oil Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Heru Pambudi, Achmad Sigit, Joko Suprijono, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p> <p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Heru Pambudi, Achmad Sigit, Joko Suprijono, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>
3	29-03-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan Februari 2018 Laporan Komite Audit bulan Maret 2019 Kemajuan Program Biodiesel, Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in February 2018 Audit Committee's Report in March 2019 ? Progress of the Biodiesel Program, Small-Scale Palm Oil Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Djoko Siswanto, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana</p> <p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Djoko Siswanto, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana</p>
4	26-04-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan Maret 2018 Laporan Komite Audit bulan April 2019 Kemajuan Program Biodiesel, Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in March 2018 Audit Committee's Report in April 2019 Progress of the Biodiesel Program, Small-Scale Palm Oil Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p> <p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono, President Director, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant	
5	24-05-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan April 2019 Laporan Komite Audit bulan Mei 2019 Kemajuan Program Biodiesel, Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in April 2019 Audit Committee's Report in May 2019 Progress of the Biodiesel Program, Small-Scale Palm Oil Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p> <p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono, President Director, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>
6	25-06-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan Mei 2019 Laporan Komite Audit bulan Juni 2019 Kemajuan Program Biodiesel, Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in May 2019 Audit Committee's Report in June 2019 Progress of the Biodiesel Program, Small-Scale Palm Oil Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p> <p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono, President Director, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>
7	23-07-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan Juni 2019 Laporan Komite Audit bulan Juli 2019 Kemajuan Program Biodiesel, Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in June 2019 Audit Committee's Report in July 2019 Progress of the Biodiesel Program, Small-Scale Palm Oil Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p> <p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono, President Director, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>
8	27-08-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan Juli 2019 Laporan Komite Audit bulan Agustus 2019 Perkembangan On-line Rekomtek, B30, Pungutan Ekspor, dan E-Billing Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in July 2019 Audit Committee's Report in August 2019 Progress of Rekomtek Online, B30, Export Levies, and E-Billing Levy 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Kasdi Subagyono, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p> <p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Kasdi Subagyono, President Director, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant		
9	30-09-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan Agustus 2019 Laporan Komite Audit bulan September 2019 Perkembangan On-line Rekomtek, B30, Pungutan Ekspor, dan E-Billing Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in August 2019 Audit Committee's Report in September 2019 Progress of Rekomtek Online, B30, Export Levies, and E-Billing Levy 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Achmad Sigit, Joko Suprijono, Kasdi Subagyono, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p>	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Achmad Sigit, Joko Suprijono, Kasdi Subagyono, President Director, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>
10	25-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan September 2019 Laporan Komite Audit bulan Oktober 2019 Perkembangan On-line Rekomtek, B30, Pungutan Ekspor, dan E-Billing Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in September 2019 Audit Committee's Report in October 2019 Progress of Rekomtek Online, B30, Export Levies, and E-Billing Levy 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Kasan Muhri, Djoko Siswanto, Joko Suprijono, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p>	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Kasan Muhri, Djoko Siswanto, Joko Suprijono, President Director, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>
11	28-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan Oktober 2019 Laporan Komite Audit bulan November 2019 Perkembangan On-line Rekomtek, B30, Pungutan Ekspor, dan E-Billing Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in October 2019 Audit Committee's Report in November 2019 Progress of Rekomtek Online, B30, Export Levies, and E-Billing Levy 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan Muhri, Heru Pambudi, Achmad Sigit, Kasdi Subagyono, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p>	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan Muhri, Heru Pambudi, Achmad Sigit, Kasdi Subagyono, President Director, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>
12	26-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja dan Keuangan bulan November 2019 Laporan Komite Audit bulan Desember 2019 Perkembangan On-line Rekomtek, B30, Pungutan Ekspor, dan E-Billing Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Report and Financial Statements in November 2019 Audit Committee's Report in December 2019 Progress of Rekomtek Online, B30, Export Levies, and E-Billing Levy 	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan Muhri, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Kasdi Subagyono, Joko Suprijono, Dirut, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Direktur Kemitraan</p>	<p>Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan Muhri, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Kasdi Subagyono, Joko Suprijono, President Director, Director of Funding, Director of Fund Disbursement, Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, and Director of Partnerships</p>

Agenda dan Peserta Rapat internal Dewan Pengawas Tahun 2019
Agenda and Participants of Supervisory Board's Internal Meeting in 2019

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant	
1	25-01-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan Januari 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan Desember 2018 Laporan Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Riset, Kerja Sama dan Promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in January 2019 Financial Statements and Performance Report in December 2018 Progress Report on Biodiesel, Replanting, Research, Cooperation, and Promotion Programs 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Achmad Sigit, Kasan Muhri
2	29-03-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan Maret 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan Februari 2019 Laporan Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Riset, Kerja Sama dan Promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in March 2019 Financial Statements and Performance Report in February 2019 Progress Report on Biodiesel, Replanting, Research, Cooperation, and Promotion Programs 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Djoko Siswanto
3	26-04-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan April 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan Maret 2019 Laporan Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Riset, Kerja Sama dan Promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in April 2019 Financial Statements and Performance Report in March 2019 Progress Report on Biodiesel, Replanting, Research, Cooperation, and Promotion Programs 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono
4	24-05-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan Mei 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan April 2019 Laporan Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Riset, Kerja Sama dan Promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in May 2019 Financial Statements and Performance Report in April 2019 Progress Report on Biodiesel, Replanting, Research, Cooperation, and Promotion Programs 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono
5	25-06-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan Juni 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan Mei 2019 Laporan Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Riset, Kerja Sama dan Promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in June 2019 Financial Statements and Performance Report in May 2019 Progress Report on Biodiesel, Replanting, Research, Cooperation, and Promotion Programs 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono
6	23-07-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan Juli 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan Juni 2019 Laporan Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Riset, Kerja Sama dan Promosi 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in July 2019 Financial Statements and Performance Report in June 2019 Progress Report on Biodiesel, Replanting, Research, Cooperation, and Promotion Programs 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Bambang, Joko Suprijono

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant	
7	27-08-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan Agustus 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan Juli 2019 Perkembangan On-line Rekomtek, B30, Pungutan Ekspor, dan E-Billing Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in August 2019 Financial Statements and Performance Report in July 2019 Progress of Rekomtek Online, B30, Export Levies, and E-Billing Levy 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Kasdi Subagyono
8	30-09-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan September 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan Agustus 2019 Perkembangan On-line Rekomtek, B30, Pungutan Ekspor, dan E-Billing Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in September 2019 Financial Statements and Performance Report in August 2019 Progress of Rekomtek Online, B30, Export Levies, and E-Billing Levy 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Achmad Sigit, Joko Suprijono, Kasdi Subagyono
9	25-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan Oktober 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan September 2019 Perkembangan On-line Rekomtek, B30, Pungutan Ekspor, dan E-Billing Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in October 2019 Financial Statements and Performance Report in September 2019 Progress of Rekomtek Online, B30, Export Levies, and E-Billing Levy 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Kasan Muhri, Djoko Siswanto, Joko Suprijono
10	28-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan November 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan Oktober 2019 Perkembangan On-line Rekomtek, B30, Pungutan Ekspor, dan E-Billing Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in November 2019 Financial Statements and Performance Report in October 2019 Progress of Rekomtek Online, B30, Export Levies, and E-Billing Levy 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan Muhri, Heru Pambudi, Achmad Sigit, Kasdi Subagyono
11	26-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit untuk bulan Desember 2019 Laporan Keuangan dan Kinerja bulan November 2019 Perkembangan On-line Rekomtek, B30, Pungutan Ekspor, dan E-Billing Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee's Report in December 2019 Financial Statements and Performance Report in November 2019 Progress of Rekomtek Online, B30, Export Levies, and E-Billing Levy 	Rusman Heriawan, Loso Judijanto, Musdhalifah Machmud, Kasan Muhri, Djoko Siswanto, Heru Pambudi, Kasdi Subagyono, Joko Suprijono

Rapat Direksi

Board of Directors' Meeting

Rapat Direksi terdiri dari rapat Internal Direksi dan Rapat Direksi mengundang Dewan Pengawas. Rapat Direksi baik rapat internal maupun rapat gabungan bersama Dewan Pengawas diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Direksi diambil dengan suara terbanyak biasa.

The Board of Directors' meeting consists of the Board of Directors' internal meeting and Board of Directors' Meeting inviting the Supervisory Board. The Board of Directors' internal meeting and the joint meeting with the Supervisory Board are held regularly at least once (1) a month.

Decisions in the Board of Directors' meeting are made through deliberation. If the deliberation did not result in any consensus, the decision of the Board of Directors' meeting will be made by a majority vote.

Frekuensi Rapat Direksi

Frequency of the Board of Directors' Meeting

Selama tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Internal Direksi sebanyak 22 kali rapat, dan rapat gabungan bersama Dewan Pengawas 12 rapat dengan tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

During 2019, the Board of Directors has held 22 internal meetings of the Board of Directors, and 12 joint meetings with the Supervisory Board. The attendance of the Board of Directors is as follows:

Nama Name	Rapat Internal Direksi Board of Directors' Internal Meeting			Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Pengawas Joint Meeting of the Board of Directors with the Supervisory Board		
	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Total	Kehadiran Attendance	%
Dono Boestami	22	21	95	12	11	92
Catur Ariyanto Widodo	22	14	64	12	11	92
Kabul Wijayanto*	8	8	100	4	4	100
Sunari*	8	8	100	4	4	100
Edi Wibowo	22	20	91	12	12	100

*) menjabat sejak 19 September 2019 served since 19 September 2019

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors

Agenda dan Peserta Rapat Direksi

Agenda and Participants of the Board of Directors' Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant		
1	2-01-19	ISPO, PSR & Sarana Prasarana, Biodiesel, Riset Sawit BPDP, Video Informasi Sawit	ISPO, PSR & Facilities Infrastructure, Biodiesel, OPPFMA's Palm Oil Research, Palm Oil Information Video	Seluruh Direksi	All Members of Board of Directors
2	15-01-19	Laporan terkait BPK, Persiapan Temu Kangen Mantan Dewas & Direksi, Perpanjangan Kontrak Special Advisor, monitoring mandatori B20, Pengembangan POME	BPK-related reports, Preparation for Gathering of Former Supervisory Board and Board of Directors, Special Advisor Contract Extension, B20 mandatory monitoring, POME Development	Direktur Kemitraan, Direktur Penghimpunan Dana, dan Direktur Penyaluran Dana	Director of Partnership, Director of Funding, and Director of Fund Disbursement
3	25-01-19	Laporan BPK, Program Biodiesel, GlobOil India, Laporan Gabungan Dewas, Silaturahmi dan Ramah Tamah Dewas	BPK Reports, Biodiesel Program, GlobOil India, Joint Report with the Supervisory Board, Gathering with Supervisory Board	Direktur Utama, Direktur Kemitraan, Direktur Penghimpunan Dana, dan Direktur Penyaluran Dana	President Director, Director of Partnership, Director of Funding, and Director of Fund Disbursement
4	29-01-19	Laporan BPK, Monev Replanting, Proyek Floating Storage Balikpapan, Paparan Laporan Dewas, Verifikasi Data Ekspor & Pungutan LS, Rencana Bisnis Tahunan, Indikator Kinerja Unggulan, Administrasi Advertorial Media, Penyaluran Dana PSR, Biomass Expo Jepang	BPK Reports, Replanting Monitoring and Evaluation, Balikpapan Floating Storage Project, Supervisory Board's Report Exposure, Export Data Verification & Surveyor's Report Levies, Annual Business Plan, Flagship Key Performance Indicators, Advertorial Media Administration, PSR Fund Disbursement, Biomass Expo Japan	Direktur Utama, Direktur Kemitraan, Direktur Penghimpunan Dana, dan Direktur Penyaluran Dana	President Director, Director of Partnership, Director of Funding, and Director of Fund Disbursement
5	12-03-19	Jawaban Permintaan Dokumen BPK, Floating Storage, Laporan Surveyor (LS), Co Processing, Komite Manajemen Risiko, Program Kerja Direktorat.	Answers to Requests for BPK Documents, Floating Storage, Surveyor's Reports (LS), Co-Processing, Risk Management Committee, Directorate's Work Programs.	Seluruh Direksi	All Members of Board of Directors
6	1-04-19	Monev Verifikasi, Program B30, Bantuan Riset, Program Kerja Asosiasi 2019, Economic Challenge Metro TV	Monitoring and Evaluation Verification, B30 Program, Research Assistance, 2019 Association Work Program, Metro TV Economic Challenge	Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Penghimpunan Dana, dan Direktur Penyaluran Dana	President Director, Director of Finance, Director of Funding, and Director of Fund Disbursement
7	16-04-19	Konsultan Fed Insight, Tindak lanjut BPK, Kegiatan Kemenko Maritim, Sistem Billing, Update Kegiatan Brussel, Update Kepengurusan Apkasindo	Fed Insight Consultant, BPK Follow-up, Activities of the Coordinating Ministry for Maritime Affairs, Billing Systems, Update on Brussels Activities, Update on Apkasindo Management	Seluruh Direksi	All Members of Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant	
8	23-04-19	Perdirut Board Manual, Renstra 2019, Update IKU, Proses Penilaian KPI, Project Management Officer (PMO) untuk PSR, Sosialisasi RED II dan ILUC dan Lawyer untuk WTO	Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Penghimpunan Dana, dan Direktur Kemitraan	President Director, Director of Finance, Director of Funding, and Director of Partnership,
9	7-05-19	Renstra 2019. Update Kajian yang disusun LMC Internasional, Tindak lanjut BPK, Tindak lanjut B30, HIP Biodiesel, EPOA, Kartu Pekebun, Harga Refrensi CPO, Pertemuan dengan UNDP di Beijing, IPOC 2019, Permasalahan Staf LKC, HUT BPDP, Pekan Raya Jakarta 2018	Seluruh Direksi	All Members of Board of Directors
10	25-06-19	Kunker Komisis DPR, Data Ekspor, Proposal DNA, Surat Rakor Bio Energi, Update SDM, Pekan Riset Sawit, Agenda Petemuan dengan Dirjen Listrik	Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Penyaluran Dana, dan Direktur Kemitraan	President Director, Director of Finance, Director of Funding, and Director of Partnership
11	23-07-19	Rekomtek PSR, Video Profile BPDP, Struktur Organisasi, Rapat Gabungan Dewas, Pemilihan Lawyer WTO Red II dan ILUC, Keanggotaan EPOA	Seluruh Direksi	All Members of Board of Directors
12	30-7-19	Booklet Info Sawit, Tindak lanjut Audiensi, Kartu Nama Baru BDPKKS, Sosialisasi Levy, Perubahan Permentan, Penyaluran PSR, Update Program Biodiesel, Kajian Tarif LPEM, Kegiatan seminar CORE	Direktur Utama, Direktur Penyaluran Dana, dan Direktur Kemitraan	President Director, Director of Fund Disbursement, and Director of Partnership
13	9-09-19	Launching PSR Online, Kajian Tarif, Survey Itjen, Kegiatan Workshop Portugal, Update Assesment profiling SDM, Tindak lanjut kegiatan stunting	Direktur Utama, Direktur Penghimpunan Dana, dan Direktur Kemitraan	President Director, Director of Funding, and Director of Partnership
14	17-9-19	Tindak lanjut Launching PSR Online, Proses Kegiatan Survey, Tindak lanjut Kegiatan Workshop Portugal, Isu standar audit pengelolaan negara, Laporan Kegiatan Komisis XI DPR, Kegiatan Influencer Meeting Sawit Baik, Update Uji Layak B30, IPOC 2019, Lawyer WTO	Seluruh Direksi	All Members of Board of Directors

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Peserta	
15	24-9-19	Kajian Tarif, Update setelah Survey, Kegiatan Rakortas, Update audit PWC, Tindak lanjut proposal Orion Bio Science, Tindak lanjut riset pemadam kebakaran dari Pome Sawit, Short course Mr Fabrege, Pengeloaan Dana Investasi	Tariff Study, Update after Survey, Limited Coordination Meeting, Update on PWC audit, Follow-up on Orion Bio Science's proposal, Follow-up on firefighting research from Pome Sawit, Short course from Mr. Fabrege, Investment Fund Management	Seluruh Direksi All Members of the Board of Directors
16	21-10-19	Tugas dan Fungsi Direksi, arahan presiden di pidato pelantikan 20 Oktober 2019, Survey Itjen, Update Penyaluran Dana Sarpras, FGD Bio Avtur ITB Bandung	Duties and Functions of the Board of Directors, President's Instruction in the inauguration speech of 20 October 2019, Inspectorate General Survey, Update on the Fund Disbursement of Facilities and Infrastructure, FGD Bio Avtur at ITB Bandung	Seluruh Direksi All Members of Board of Directors
17	29-10-19	Tindak lanjut temuan Itjen, Update EBTKE Conex 2019, Update IPOC 2019 Bali, Konsolidasi Data Sawit, Green Fuel, Update Kegiatan Direktorat	Follow-up on the findings of the Inspectorate General, Update on 2019 EBTKE Conex, Update for 2019 IPOC Bali, Consolidation of Palm Oil Data, Green Fuel, Update on Directorate's Activities	Seluruh Direksi, dan Kepala SPI All Members of Board of Directors, and Head of SPI
18	5-11-19	Tindak Lajut Temuan Itjen, Kerjasama BDPD dengan Wamenlu, Konsolidasi Data Sawit, Green Fuel, Update Kegiatan Direktorat	Follow-up on the Findings of the Inspectorate General, OPPFMA's Cooperation with Vice Minister of Foreign Affairs, Consolidation of Palm Oil Data, Green Fuel, Update on Directorate's Activities	Seluruh Direksi, dan Kepala SPI All Members of Board of Directors, and Head of SPI
19	12-11-19	Tindak Lanjut Temuan Itjen, Update Investasi, Update Program B30, Usulan Kegiatan Misi Dagang Kemendag	Follow-up to the Findings of the Inspectorate General, Investment Update, B30 Program Update, Proposals for the Ministry of Trade's Trade Mission	Seluruh Direksi All Members of Board of Directors
20	19-11-19	Update Tanggapan temuan, Perjalanan Dinas Luar Negeri, Konsolidasi Data Sawit, tindak lanjut IKU 2019, Update Kampanye sawit GAPKI DCI, Finalisasi Pedum, Proses Billimh tahap II dan MOU BPN/ATR, Update Investasi, RBT,RJP,Renstra dan Kajian luran	Update on Findings Response, International Business Trip, Consolidation of Palm Oil Data, follow-up of the 2019 KPI, Update on the GAPKI DCI Palm Oil Campaign, Finalization of General Guidelines, Phase II of Billing Process and BPN/ATR MOU, Investment Update, RBT, RJP, Strategic Plan, and Tariff Studies	Seluruh Direksi All Members of Board of Directors
21	3-12-19	Housekeeping, Rapat Gabungan Dewas, Update Nota Dinas SMI, Update RBT dan Investasi, Program Kerja Asosiasi, Launchng Program B30, Riset Hilirisasi	Housekeeping, Joint Meeting with the Supervisory Board, SMI Memo Update, RBT and Investment Update, Association Work Program, B30 Program Launching, Downstream Research	Seluruh Direksi All Members of Board of Directors
22	16-12-19	Rapat dengar Pendapat Komis IV, Laporan Housekeeping, Update Pelaksanaan e-billing, Alokasi Belanja 2020, Update ALCO	Commission IV Hearing Meeting, Housekeeping Report, Update on e-billing Implementation, 2020 Expenditure Allocation, ALCO Update	Seluruh Direksi All Members of Board of Directors

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Remuneration Policy of the Supervisory Board and Board of Directors

BPDPKS dalam menentukan Remunerasi Bagi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan No.176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum tanggal 27 November 2017. Besaran remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan yang selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi.

In determining the Remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors, OPPFMA refers to the Copy of the Minister of Finance Regulation No. 176/PMK.05/2017 on the Remuneration Guidelines for Public Service Agencies dated 27 November 2017. The amount of remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors is proposed by the Minister/Institution Chairman to the Minister of Finance cq. Director-General of Budget and Fiscal Balance. Afterward, the Minister of Finance shall stipulate Minister of Finance Regulation on the amount of remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Indicators to Determine the Remuneration of the Supervisory Board and Board of Directors

Besaran Remunerasi ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan;
2. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
3. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan;
4. Kinerja operasional BLU yang ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

The remuneration is determined by considering the following factors:

1. Proportion, a consideration of the size and number of assets managed by BLU and the level of service;
2. Equality, by paying attention to similar service industries;
3. Compliance, adjusting the ability of the BLU's income concerned;
4. The BLU's operational performance as determined by the Minister/Institutional Chairman, by taking into account at least financial, service, quality, and benefit indicators for the community.

Struktur Remunesari Dewan Pengawas dan Direksi Remuneration Structure of the Supervisory Board and Board of Directors

No	Remunerasi Dewan Pengawas Supervisory Board's Remuneration	Remunerasi Direksi Board of Directors' Remuneration
1	Honorarium	Gaji Salary
2	Insentif Incentive	Insentif Incentive
3	Bonus atas prestasi Achievement bonus	Bonus atas prestasi Achievement bonus
4	Pensiun Pension	Pensiun Pension
5	Pesangon Severance Pay	Pesangon Severance Pay

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Dewan Pengawas dan Direksi Non-Performance Bonuses and Share Options of the Supervisory Board and the Board of Directors

Tidak terdapat bonus non kinerja dan opsi saham yang diberikan kepada setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

There are no non-performance bonuses and share options granted to any member of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Diversity Policy for the Composition of the Supervisory Board and Board of Directors

Dalam rangka mendapatkan komposisi Dewan Pengawas dan Direksi yang optimal, BPDPKS menentukan komposisi Dewan Pengawas senantiasa memperhatikan keberagaman masing-masing Dewan Pengawas maupun Direksi dengan aspek pengetahuan, usia, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan BPDPKS. Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi yang beragam diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif.

OPPFMA determines the composition of the Supervisory Board with due regards to the diversity of each member of the Supervisory Board and Board of Directors, based on the knowledge, age, gender, education, and experience, in accordance with the OPPFMA's needs, to obtain the optimal composition of the Supervisory Board and Board of Directors. The diverse composition of the Supervisory Board and Board of Directors shall provide alternative solutions to problems and encourage more objective and comprehensive decision-making.

Saat ini, komposisi anggota Dewan Pengawas BPDPKS yang berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Currently, OPPFMA's Supervisory Board has nine (9) members, consisting of eight (8) people from the elements of State Ministry/Institution/Regional Council officials and one from the expert element as regulated in the Minister of Finance Regulation No. 95/PMK.05/2016 on the Supervisory Board of the Public Service Agencies.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Diversity Policy for the Composition of the Supervisory Board and Board of Directors

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas Diversity of the Composition of the Supervisory Board

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	
RUSMAN HERIAWAN	Laki-laki Male	66 Tahun 66 Years	<ul style="list-style-type: none"> ● S1 Ekonomi Bachelor of Economics ● S2 Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Master of Regional and Rural Planning ● S3 Institut Pertanian Bogor Doctorate's Decree from the Bogor Agricultural University 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Badan Pusat Statistik (2006-2011) ● Deputy Bidang Statistik Sosial (2004-2006) ● Direktur Statistik Perdagangan dan Jasa (2001-2004) ● Peneliti Utama, Balitbang Pertanian-Kementerian Pertanian, (2006 s.d. sekarang) ● Ketua Dewan Pengawas BPDPKS 	<ul style="list-style-type: none"> ● Head of the Statistics Indonesia (2006-2011) ● Deputy for Social Statistics (2004-2006) ● Director of Trade and Service Statistics (2001-2004) ● Main Researcher, Agriculture Research and Development - Ministry of Agriculture (2006-present) ● Chairman of OPPFMA's Supervisory Board
LOSO JUDIANTO	Laki-laki Male	46 Tahun 46 Years	<ul style="list-style-type: none"> ● S1 Sains Bachelor of Science ● S2 Manajemen Master of Management ● Master of Statistics The University of New South Wales 	<ul style="list-style-type: none"> ● Peneliti Kebijakan Publik di Center for Policy and Implementation Studies (Oktober 1995 - Juni 1996) ● Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (Januari 1999 - Desember 2003) ● Partner and Managing Partner - SDP Corporate Governance Specialists (Januari 2001 - November 2004) ● Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (November 2004 - Maret 2007) ● Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Desember 2007 - Mei 2009) ● Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Mei 2009 - Februari 2011) ● Komisaris Independen PT Bank Bukopin Tbk (Maret 2009 - Maret 2010) ● Ketua Komite Risk Management Oversight PT Bank Bukopin Tbk, Komisaris PT Telkomsel (Juli 2007 - Mei 2012) ● Komite Audit PT Indonesia Infrastructure Finance (2012 - 2014) ● PT Berau Coal Energy Tbk (2010 - 2014) ● PT Trimegah Securities Tbk (2010 - 2014) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Public Policy Researcher at the Center for Policy and Implementation Studies (October 1995 - June 1996) ● Secretary of the Board of Commissioners of PT Pupuk Iskandar Muda (January 1999 - December 2003) ● Partner and Managing Partner - SDP Corporate Governance Specialists (January 2001 - November 2004) ● Special Staff of the Minister of Communication and Information Technology (November 2004 - March 2007) ● Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (December 2007 - May 2009) ● Expert Staff of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (May 2009 - February 2011) ● Independent Commissioner of PT Bank Bukopin Tbk (March 2009 - March 2010) ● Chairman of the Risk Management Oversight Committee of PT Bank Bukopin Tbk, Commissioner of PT Telkomsel (July 2007 - May 2012) ● Audit Committee of PT Indonesia Infrastructure Finance (2012 - 2014) ● PT Berau Coal Energy Tbk (2010 - 2014) ● PT Trimegah Securities Tbk (2010 - 2014)



Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
JOKO SUPRIYONO	Laki-laki Male	54 Tahun 54 Years	<ul style="list-style-type: none"> ● S1 Pertanian Bachelor of Agriculture 	<ul style="list-style-type: none"> ● PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007 - 2009) ● Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Oktober 2014 - Agustus 2015) ● Staf Khusus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Agustus 2015 - Agustus 2016) ● Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Agustus 2016 - sekarang) ● PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007 - 2009) ● Special Staff of the Coordinating Minister for Economic Affairs (October 2014 - August 2015) ● Special Staff of the State Minister for National Development Planning/Head of Bappenas (August 2015 - August 2016) ● Special Staff of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (August 2016 - present) ● Afdeling Assistant at PT Perkebunan II, Medan (1986-1994) ● Instruktur at PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986-1994) ● Head of Human Resources of PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai Departemen Head-Human Resources (1995 - 1999) ● Division Head - Human Resources (2000 - 2002) ● Area Director - Riau Region (2002 - 2005) ● Deputy Director - Operation (2005 - 2007) ● Director - Human Resources (2007 - 2009) ● Director - Env & Social Responsibility (2009 - 2011) ● Director in charge of Sustainability and Public Relation ● President Director of Sumatera Operation (2011 - 2015) ● Director in charge of Sustainability and Public Relation ● President Commissioner of Sumatera Operation (2015 - sekarang)

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Diversity Policy for the Composition of the Supervisory Board and Board of Directors

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
MUSDHALIFAH MACHMUD	Perempuan Female	57 Tahun 57 Years	<ul style="list-style-type: none"> ● S1 Manajemen Hutan Bachelor of Forest Management ● Diploma of Monitoring Indonesian Environment di International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC) ● S2 Pembangunan Master of Development 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dewan Pengawas Perum BULOG ● Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian. ● Anggota Dewan Pengawas BDPKKS
HERU PAMBUDI	Laki-laki Male	48 Tahun 48 Years	<ul style="list-style-type: none"> ● D3 STAN Young Diploma from STAN ● S2 University of Newcastle, Upon Tyne Master's Degree from the University of Newcastle Upon Tyne 	<ul style="list-style-type: none"> ● Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai pada tahun 2015 ● Direktur Jenderal Bea Dan Cukai sejak tanggal 25-06-2015. ● Anggota Dewan Pengawas BDPKKS
DJOKO SISWANTO	Laki-laki Male	54 Tahun 54 Years	<ul style="list-style-type: none"> ● S1 Teknik Perminyakan Bachelor of Petroleum Engineering ● S2 MBA Program, Edinburgh Business School MBA from Edinburgh Business School ● S2 MBA Specialist Oil & Gas Management MBA in Oil & Gas Management ● S3 Teknik Perminyakan Doctor of Petroleum Engineering 	<ul style="list-style-type: none"> ● PT. Sarana Putra Makmur : Petroleum Engineer. Melakukan analisa tekanan, volume dan temperatur minyak dan gas bumi dengan menggunakan software Eclipse 100 dan 200. ● Direktorat Teknik, Direktorat Jenderal Migas. Melakukan inspeksi lapangan kegiatan keselamatan kerja dan lingkungan pada kegiatan eksplorasi dan produksi migas. ● Direktorat Explorasi & Produksi, Direktorat Jenderal Migas. Memantau produksi migas, membuat Plan of Development lapangan migas. ● Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Migas. ● Kepala Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan Minyak dan Gas Bumi, Sekretariat Direktorat Jenderal Migas.



Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
			<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Pokja Direktorat BBM, BPH Migas. • Kepala Pokja Tarif, Iuran, Akun Pengaturan dan Harga Gas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Direktorat Gas Bumi, BPH Migas • Plh. Direktur Gas Bumi. • Direktur BBM • Direktur Gas Bumi BPH Migas • Komisaris PT DS-LNG dan PT. PLI • Direktur Hulu Migas, Ditjen Migas KESDM • Direktur Teknik Migas, Ditjen Migas KESDM • Deputy Pengendalian Pengadaan SKK Migas • Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 	<ul style="list-style-type: none"> • Member of the Working Group for the Directorate of Oil Fuel, BPH Migas. • Head of Working Group on Tariffs, Fees, Regulating Accounts, and Prices for Household Gas and Small Customers, Directorate of Natural Gas, BPH Migas • Acting Director of Natural Gas. • Director of Oil Fuel • Director of Natural Gas BPH Migas • Commissioners of PT DS-LNG and PT PLI • Director of Upstream Oil and Gas, Directorate General of Oil and Gas, MEMR • Director of Oil and Gas Engineering, Directorate General of Oil and Gas, MEMR • Deputy for Procurement Control of SKK Migas • Director-General of Oil and Gas
KASAN	Laki-laki Male	54 Tahun 54 Years	<ul style="list-style-type: none"> • <i>S1 Resource Economic of Agriculture</i> • <i>S2 International Management</i> • <i>S3 Agricultural Economic</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Head of Trade Analysis and Development Agency (TREDA), Ministry of Trade, The Republic of Indonesia • Expert Staff to the Minister of Trade for International Relation • Director of Centre for Foreign Trade Policy, Trade Policy Analysis and Development Agency, Ministry of Trade • Executive Secretary - Indonesia Safeguards Committee Authority (KPPI) • Deputy Director of Centre for Foreign Trade Research and Development, Trade Research and Development Agency, Ministry of Trade • Deputy Director of Trade Data Centre, Trade Research and Development Agency, Ministry of Trade • Head of Multilateral and Regional Cooperation Section. Centre for Foreign Trade Research and Development, Ministry of Trade. 1999-2005 • Head of Trade Analysis and Development Agency (TREDA), Ministry of Trade, The Republic of Indonesia • Expert Staff to the Minister of Trade for International Relation • Director of Centre for Foreign Trade Policy, Trade Policy Analysis and Development Agency, Ministry of Trade • Executive Secretary - Indonesia Safeguards Committee Authority (KPPI) • Deputy Director of Centre for Foreign Trade Research and Development, Trade Research and Development Agency, Ministry of Trade • Deputy Director of Trade Data Centre, Trade Research and Development Agency, Ministry of Trade • Head of Multilateral and Regional Cooperation Section. Centre for Foreign Trade Research and Development, Ministry of Trade. 1999-2005

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Diversity Policy for the Composition of the Supervisory Board and Board of Directors

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	
ACHMAD SIGIT DWIWAHJONO	Laki-laki Male	60 Tahun 60 Years	<ul style="list-style-type: none"> ● S1 Sarjana Teknik Bachelor of Engineering ● S2 Master of Public Policy Master of Public Policy 	<ul style="list-style-type: none"> ● Plt Direktur Jenderal Industri Agro ● Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka ● Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional ● Direktur Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III ● Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> ● Acting Director-General of Agro-Industry ● Director-General of Chemical, Textile, and Miscellaneous Industries ● Director-General of Resilience and Development of International Industrial Access ● Director of Industrial Facilitation Development Region III ● Directorate General of Industrial Regional Development
KASDI SUBAGYONO	Laki-laki Male	56 Tahun 56 Years	<ul style="list-style-type: none"> ● S1 Soil Science Bachelor of Soil Science ● S2 Soil Science Master of Soil Science ● S3 GeoScience Doctor of GeoScience 	<ul style="list-style-type: none"> ● Head of Soil Conservation and Water Management ● Director of Indonesian Agro-climate and Hydrology Research Institute ● Director on West Java Assessment Institute for Agricultural Technology (West Java AIAT), Lembang-Bandung ● Director on Central Java Assessment Institute for Agricultural Technology (Central Java AIAT), Ungaran-Semarang ● Director on Indonesian Center for Agricultural Technology Assessment and Development (ICATAD), Bogor ● Executive Secretary of Indonesian Agency for Agricultural Research and Development, Jakarta ● Director of Planning Bureau, Secretariat General, Ministry of Agriculture, Jakarta ● Director General of Estate Crops, Ministry of Agriculture 	<ul style="list-style-type: none"> ● Head of Soil Conservation and Water Management ● Director of Indonesian Agro-climate and Hydrology Research Institute ● Director on West Java Assessment Institute for Agricultural Technology (West Java AIAT), Lembang-Bandung ● Director on Central Java Assessment Institute for Agricultural Technology (Central Java AIAT), Ungaran-Semarang ● Director on Indonesian Center for Agricultural Technology Assessment and Development (ICATAD), Bogor ● Executive Secretary of Indonesian Agency for Agricultural Research and Development, Jakarta ● Director of Planning Bureau, Secretariat General, Ministry of Agriculture, Jakarta ● Director-General of Estate Crops, Ministry of Agriculture

Keberagaman Komposisi Direksi Diversity of the Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
DONO BOESTAMI	Laki-laki Male	54 Tahun 54 Years	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Science Civil Engineering • Master of Science Project & Construction Management dari Golden Gate University 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Investment Banking pada PT Danareksa (Persero) (2001) • Direktur Utama PT Citigroup Securities Indonesia (2004) • Direktur PT Barclays Capital Securities Indonesia (2006) • Direktur Keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2011) • dan Direktur Keuangan PT Atlas Resources Tbk (2012) Anggota Komite Pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) (2008-2011) • Direktur PT MRT (2013-2017) • Direktur Utama BPDPKS (2017-Sekarang).
CATUR ARIAYANTO WIDODO	Laki-laki Male	46 Tahun 46 Years	<ul style="list-style-type: none"> • D3 STAN Young Diploma from STAN • S1 Ekonomi Bachelor of Economics 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Instansi III • Kepala Seksi Analisis Laporan Keuangan • Kabid Pembinaan Perbendaharaan • Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU • Kasubdit PPK BLU II • Kabag Umum Kanwil DJPB Prov. Sulbar dan jabatan terakhir sebagai Kakanwil DJPB Prov. Sulbar sebelum diangkat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS.
EDI WIBOWO	Laki-laki Male	54 Tahun 54 Years	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Mekanisasi Pertanian Bachelor of Agricultural Mechanization • S2 Teknik Mesin Master of Mechanical Engineering 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Pemanfaatan Energi di Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional • Kepala SubDirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi-DJ EBTKE KESDM • Kepala SubDirektorat Pengusahaan dan Pengawasan Bioenergi DJ EBTKE KESDM • Kepala SubDirektorat Program Bioenergi DJ EBTKE KESDM sejak Juli 2016

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Diversity Policy for the Composition of the Supervisory Board and Board of Directors

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
KABUL WIJAYANTO	Laki-laki Male	49 Tahun 49 Years	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Administrasi Negara Bachelor of State Administration • S2 Manajemen Keuangan Master of Financial Management 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan • Head of Sub-Directorate of Local Government Investment/ Regional-Owned Enterprises at the Directorate of Investment Management Systems, Ministry of Finance
SUNARI	Laki-laki Male	56 Tahun 56 Years	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Teknologi Benih Bachelor of Seed Technology • S2 Ekonomi Pertanian Master of Agricultural Economics • S3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Doctor of Natural Resources and Environmental Management 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Direktorat Perkebunan dan Hortikultura - Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. • Head of Sub-Directorate of Plantation and Horticulture - Directorate of Food and Agriculture, Ministry of National Development Planning/ Bappenas.



**BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY**

Satuan Pemeriksa Internal Internal Audit Unit

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLU. BPDPKS membentuk Fungsi Pemeriksaan Internal yang dijalankan oleh Satuan Pemeriksaan Internal (SPI). Pembentukan SPI BPDPKS berdasarkan PMK No.113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDPKS.

OPPFMA established an Internal Audit Function, carried out by the Internal Audit Unit (SPI) to actualize the governance of the Public Service Agency (BLU) to increase the accountability and transparency of BLU's financial management. The OPPFMA's SPI is established based on PMK No. 113/PMK.01/2015 on the Organization and Work Procedure of OPPFMA.

SPI mulai melaksanakan tugas dan fungsinya pada pada Juli tahun 2016 dengan tujuan membantu Direksi dan Dewan Pengawas dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), melalui penilaian Sistem Pengendalian Internal, pengawasan, dan pemeriksaan obyektif dan independen, dengan menerapkan etika profesi dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Visi dan Misi SPI BPDPKS sebagai berikut:

Visi : Menjadi Satuan Pemeriksa Internal yang profesional, Independen, mandiri dan terpercaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPDPKS

Misi :

1. Mewujudkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola BPDPKS (*Good Governance*);
2. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Menjadi *Strategic Business Partner* yang independen dan obyektif bagi manajemen BPDPKS;
4. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi dengan Pemeriksa Eksternal lain.

SPI began to perform its duties and functions in July 2016 with the objective to assist the Board of Directors and the Supervisory Board to actualize Good Governance, through assessment of the Internal Control System, monitoring, and objective and independent audits, by implementing professional ethics in its duties.

The vision and mission of OPPFMA's SPI are as follows:

Vision : Be a professional, independent, autonomous, and trusted Internal Audit Unit to support the achievement of OPPFMA's vision and mission

Mission :

1. Realizing the effectiveness of the risk management, internal control, and Good Governance of OPPFMA;
2. Encouraging compliance with laws and regulations;
3. Becoming an independent and objective Strategic Business Partner for OPPFMA's management;
4. Realizing harmonization and synergy with other External Auditors.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Satuan Pemeriksa Internal Internal Audit Unit

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SPI Appointment and Dismissal of the Head of SPI

Saat ini Kepala SPI BDPKKS di jabat oleh Sdr. Hari Kuncoro menggantikan Sdri. Triana Meinarsih berdasarkan Surat Keputusan Direksi Direktur Utama Nomor Kep-272/DPKS/2019 tentang Mutasi Pegawai Tingkat Jabatan Kepala Divisi di Lingkungan BDPKKS Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal BDPKKS dengan persetujuan Dewan Pengawas. Pengangkatan Kepala SPI BDPKKS telah berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, aspek interitas dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan PMK No.200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum (BLU).

Currently, OPPFMA's Head of SPI is held by Mr. Hari Kuncoro, who replaced Mrs. Triana Meinarsih, based on the Decree of the Board of Directors of the President Director No. Kep-272/DPKS/2019 on the Employees Mutation at the Head of Division Level within OPPFMA in 2019 dated 23 July 2019.

The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director based on the OPPFMA's internal mechanism with the approval of the Supervisory Board. The appointment of OPPFMA's Head of SPI is based on the educational qualifications, work experience, integrity, and is in accordance with the requirements of PMK No. 200/PMK.05/2017 on the Public Service Agency (BLU) Internal Control System.

Profil Kepala Satuan Pemeriksa Internal BDPKKS Profile of OPPFMA's Head of Internal Audit Unit



Hari Kuncoro
Kepala SPI

47 Tahun, lahir di Cilacap, 25 Mei 1977, berdomisili di Kota Depok Jawa Barat. Lulusan D IV Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) tahun 2005 dan Lulusan S2 Magister Manajemen dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKKS (2015 - 2019), beliau masih aktif di Lingkungan Kementerian Keuangan menjabat sebagai Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi (2015-sekarang), Kepala Divisi Keuangan dan Umum. Adapun jabatan yang pernah diemban sebelum bergabung dengan kementerian Keuangan & BDPKKS beliau juga pernah menjabat sebagai Internal Auditor di Sempati Air Cabang Medan, Auditor di Kanaka Puradireja Jakarta (2000), Sekretaris Dewan Komisaris di PT Kertas Leces (2011-2012) dan Sekretaris Komite Audit di PT Kertas Leces (2012-2013).

47 years, born in Cilacap, 25 May 1977, domiciled in Depok, West Java. Young Diploma (D-IV) from the State Finance Polytechnic STAN (PKN-STAN) in 2005. Master of Management from Jenderal Sudirman Purwokerto University.

Before serving as Head of the Finance and Accounting Division of the Directorate of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management of OPPFMA (2015 - 2019), he was still active in the Ministry of Finance as Head of the Budget and Accounting Division (2015-present), Head of the Finance and General Division. Before joining the Ministry of Finance & OPPFMA, he served as Internal Auditor at Sempati Air Medan Branch, Auditor at Kanaka Puradireja Jakarta (2000), Secretary of the Board of Commissioners at PT Kertas Leces (2011-2012), and Secretary of the Audit Committee at PT Kertas Leces (2012-2013).



Selain itu, beliau juga telah meraih berbagai sertifikasi diantaranya adalah Chartered Financial Analyst Financial Risk Management Certified Risk Management Profesional (CRMP) dan Project Financial Model (PFM).

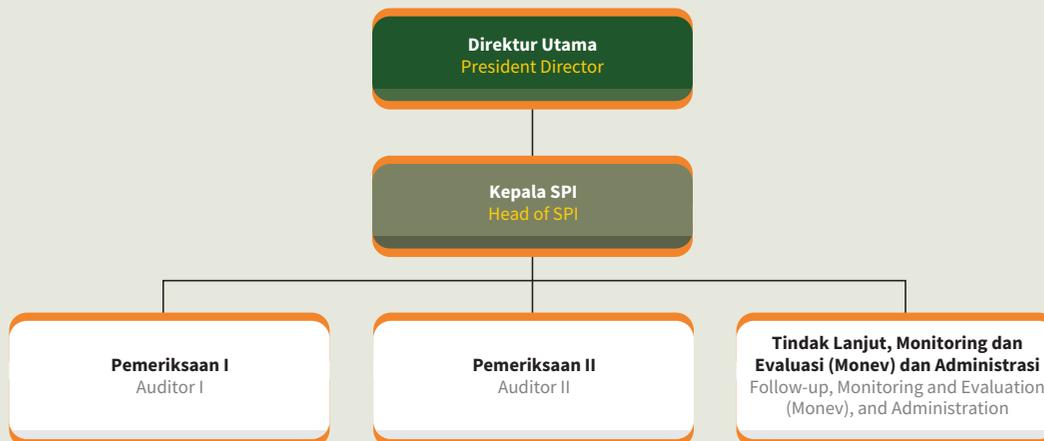
In addition, he has also received various certifications including Chartered Financial Analyst Financial Risk Management Certified Risk Management Professional (CRMP) and Project Financial Model (PFM).

Struktur dan Kedudukan SPI BDPKS

Structure and Position of OPPFMA's SPI

SPI merupakan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan berkedudukan dan bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Utama BDPKS Nomor KEP-66/DPKS/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penyesuaian Struktur Jabatan dan Uraian Tugas Kepala SPI BDPKS.

SPI is an organization established based on the Minister of Finance Regulation, and is structured under and reports directly to the President Director, as stated in the OPPFMA President Director's Decree No. KEP-66/DPKS/2016 dated 26 December 2016 on the Adjustment of Structure and Job Description of OPPFMA's Head of SPI.



Kedudukan SPI:

1. SPI merupakan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan berkedudukan langsung dibawah Direktur Utama BDPKS;
2. SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;

SPI's Position:

- is an organization established by the Minister of Finance Regulation and is directly under the OPPFMA's President Director;
2. SPI is chaired by a Head who is directly responsible to the President Director;

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Satuan Pemeriksa Internal Internal Audit Unit

- Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas BDPDKS;
- Kepala SPI akan menjadi Mitra Kerja Manajemen yang Independen dan Profesional;
- Personil SPI tidak diperbolehkan merangkap tugas ataupun bekerja yang ada pada Direktorat teknis didalam BDPDKS;
- Direktur Utama memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya Independensi SPI dan wajib menjaga serta mengevaluasi kualitas fungsi SPI.
- The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director after receiving approval from OPPFMA's Supervisory Board;
- The Head of SPI shall be an Independent and Professional Managing Partner;
- SPI personnel shall not have concurrent duties or work at the technical Directorate within OPPFMA;
- The President Director fully supports the SPI's Independence, and is obliged to maintain and evaluate the quality of SPI's function.

Komposisi Personil dan Pendidikan SPI

Composition and Education of SPI's Personnel

Sesuai dengan Struktur SPI, jumlah tenaga Auditor Internal BDPDKS adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Kepala SPI dan 2 (dua) orang sebagai Auditor/Pemeriksa.

In accordance with SPI structure, OPPFMA has three (3) Internal Auditors, consisting of one (1) Head of SPI and two (2) Auditors.

Jabatan Position	Jumlah Auditor Number of Auditors	Informasi Riwayat Pendidikan Auditor Auditor's Education				
		Nama Name	Tingkat Level	Bidang Studi Field of Study	Lembaga Institution	Tahun Year
Kepala SPI Kepala SPI	1	Hari Kuncoro	D-IV S2	Akuntansi Accounting Manajemen Management	STAN Unsoed	2000 2005
Pemeriksaan I Pemeriksaan I	1	Edy Sucipto	S-1	Akuntansi Accounting	STIE	2013
Pemeriksaan I Pemeriksaan I	1	Zulkifly	S-1	Akuntansi Accounting	UT	2012
Jumlah Total			3			

Pedoman Kerja SPI

SPI's Charter

Pedoman Kerja SPI mengacu pada Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Direktur Utama dan Dewan Pengawas tanggal 15 Juli 2018. Internal Audit Charter SPI mengatur antara lain tentang visi, misi, struktur dan kedudukan SPI, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal.

SPI's Working Guidelines refer to the Internal Audit Charter, which was established based on the Joint Decree of the President Director and the Supervisory Board dated 15 July 2018. SPI's Internal Audit Charter regulates, among others, the vision, mission, structure, and position of the SPI, as well as aspects relating to the Internal Audit.

Di samping mengacu pada Piagam Audit Internal, SPI juga mengacu pada beberapa kebijakan yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum; dan
3. Audit Program, beserta manual-manual pemeriksaan antara lain:
 - a. Pedoman Audit Kinerja;
 - b. Pedoman Audit Laporan Keuangan;
 - c. Pedoman Umum SPI;
 - d. Pedoman Teknis SPI;
 - e. Kode Etik yang dikeluarkan IIA Global.

In addition to referring to the Internal Audit Charter, SPI also refers to several policies:

1. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 113/PMK.01/2015 on the Organization and Work Procedure of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency;
2. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 200/PMK.05/2017 on the Internal Control System for Public Service Agencies; and
3. Program Audit, including inspection manuals:
 - a. Performance Audit Guidelines;
 - b. Financial Statement Audit Guidelines;
 - c. SPI General Guidelines;
 - d. SPI Technical Guidelines;
 - e. IIA Global Code of Conduct.

Tugas dan Tanggung Jawab SPI

SPI's Duties and Responsibilities

Sesuai dengan Internal Audit Charter, tugas dan tanggung jawab SPI sebagai berikut:

In accordance with the Internal Audit Charter, the duties and responsibilities of the SPI are as follows:

TUGAS SPI SPI'S DUTIES:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern; 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko; 3. Membuat/mengembangkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dengan menggunakan metode risk based audit dan menyampaikan kepada Direktur Utama BDPKKS untuk mendapatkan pengesahan; 4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; 5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen; 6. Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan BLU dan Dewan Pengawas; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Developing and implementing an internal control plan; 2. Examining and evaluating the implementation of internal control and risk management systems; 3. Creating/developing an Annual Audit Work Program (PKAT) using the risk-based audit method and submitting it to OPPFMA's President Director for approval; 4. Auditing and assessing the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities; 5. Providing refinement suggestions and objective information on the activities audited to every level of management; 6. Compiling reports on the results of internal control and submitting the reports to the BLU's Management and the Supervisory Board; |
|---|--|

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Satuan Pemeriksa Internal Internal Audit Unit

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU; 8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan khusus apabila diperlukan; 9. Melaksanakan reviu laporan keuangan; 10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; 11. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 12. Melaksanakan pemeriksaan/pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan berdasarkan permintaan dari Direksi BDPKKS/aparat pemeriksa intern pemerintah, | <ol style="list-style-type: none"> 7. Providing recommendations for improvement/enhancement of governance processes and efforts to achieve the BLU's business strategy; 8. Monitoring, analyzing, and reporting the follow-up on recommendations for supervision by the SPI, the special supervisory apparatus if needed; 9. Reviewing financial statements; 10. Conducting special audit if needed; 11. Carrying out other tasks based on assignments in accordance with the provisions of the legislation; and 12. Carrying out unscheduled and/or confidential inspection/supervision based on a request from OPPFMA's Board of Directors/government internal inspection apparatus, |
|--|--|

TANGGUNG JAWAB SPI SPI'S RESPONSIBILITY

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Direktur Utama dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan BDPKKS dengan cara melakukan pengawasan/pemeriksaan (audit) atas ketaatan, operasional, dan program kegiatan yang menjadi tugas pokok BDPKKS; 2. Mementau kinerja seluruh kegiatan unit kerja BDPKKS secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dan pengendalian administrasi, akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran BDPKKS yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja sesuai Keputusan Komite Pengarah, RBA dan DIPA BDPKKS; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Assisting the President Director in fulfilling OPPFMA's management responsibilities by conducting supervision/audit of compliance, operations, and program activities as the main tasks of OPPFMA; 2. Monitoring the performance of all OPPFMA work unit activities in an integrated manner for compliance, comprehensiveness, and use and control of the administration, accounting, finance, etc., as well as providing suggestions for improvements for the achievement of OPPFMA's predetermined targets and objectives as the responsibility of each unit work in accordance with the Steering Committee's Decree, RBA, and OPPFMA DIPA; |
|---|---|

3. Membantu Direksi dan Dewan Pengawas dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), melalui penilaian Sistem Pengendalian Internal, pengawasan, dan pemeriksaan yang obyektif dan independen, dengan menerapkan etika profesi dalam setiap pelaksanaan tugasnya;
 4. Memberikan informasi awal (*Early Warning Signal*) kepada Direksi dan Dewan Pengawas atas terjadinya risiko bisnis/kegiatan yang mungkin timbul dan memberi usulan alternatif untuk peningkatan daya guna yang bertujuan untuk menjaga kinerja BDPKKS;
 5. Mendorong Direktorat Teknis pada BDPKKS untuk terus meningkatkan pelaksanaan pengendalian internal agar pelaksanaan berjalan efektif dalam rangka mencapai visi, misi BDPKKS dapat terwujud dengan tetap memperhatikan *Good Governance* serta Risk Management (*Pengelolaan Risiko*);
 6. Memberikan laporan atas hasil-hasil pelaksanaan pemeriksaan serta laporan evaluasi yang disesuaikan dengan kecukupan sumber daya manusia pada unit kerja SPI;
 7. Memberikan evaluasi, analisa perbaikan atas proses pengelolaan operasional dan program kerja pada BDPKKS;
 8. Memantau pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor internal/eksternal berdasarkan rencana aksi yang disepakati.
3. Assisting the Board of Directors and the Supervisory Board to actualize *Good Governance*, through assessment of the Internal Control System, monitoring, and objective and independent audits, by implementing professional ethics in its duties;
 4. Providing *Early Warning Signal* to the Board of Directors and the Supervisory Board on the occurrence of business risks/activities that may arise and providing alternative suggestions for increased effectiveness to maintain OPPFMA's performance;
 5. Encouraging the Technical Directorates at OPPFMA to bolster the internal control so that implementation runs effectively to achieve OPPFMA's vision, mission, while still paying attention to *Good Governance* and Risk Management;
 6. Providing reports on the results of the audits as well as evaluation reports that are adjusted to the adequacy of human resources in the SPI work unit;
 7. Providing evaluation, analysis of improvements to the operational management process and work programs at OPPFMA;
 8. Monitoring the implementation and completion of follow-ups on the internal/external auditors' Audit Result Report (LHP) based on the agreed action plan.

Program Pengembangan Auditor SPI

SPI Auditor Development Program

Wujud komitmen SPI dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai Audit Internal, SPI senantiasa melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan antara lain melalui program sertifikasi nasional dan internasional, keikutsertaan dalam seminar nasional/internasional maupun pelatihan rutin internal.

Internal Audit is committed to continuously improving the competence and knowledge of Internal Audit's employees, through continuous education and training, including through national and international certification programs, participation in national/international seminars, and routine internal training.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Satuan Pemeriksa Internal Internal Audit Unit

Sepanjang tahun 2019, SPI telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan antara lain sebagai berikut:

During 2019, SPI has participated in various training:

Tabel Pengembangan Auditor SPI BDPKKS Tahun 2019

Table: OPPFMA SPI's Auditor Development in 2019

No	Nama Sertifikasi Certifications	Jumlah Jamlat Training Hours
1	Training Standar Akuntansi Pemerintah Government Accounting Standards Training	16
2	<i>Risk Based Internal Auditor</i> Risk-Based Internal Auditor	16
3	Seminar Nasional Audit di Era Digital: Implementasi <i>Data Analytics</i> National Audit in the Digital Era Seminar: Data Analytics	6
4	Konferensi Nasional Internal Auditor : <i>Empowering Internal Auditors: Embracing The 4IR</i> Internal Auditor National Conference: Empowering Internal Auditors: Embracing The 4IR	14
5	Pelatihan Wakil Manajer Investasi (WMI) Program Moduler Deputy Investment Manager (WMI) Training Modular Program	40

Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Tahun 2019

SPI's Report in 2019

1. Reviu Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan SAP masing-masing sebanyak 2 laporan reviu;
 2. Penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK RI dengan capaian 90%;
 3. Pendampingan kunjungan lapangan bersama KAP/BPK-RI;
 4. Penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan 90%;
 5. Penguatan kelembagaan SPI dengan mengikuti berbagai training SDM SPI sebanyak 5 (lima) training;
 6. Melakukan reviu SOP BDPKKS;
 7. Melakukan pendampingan dalam menjalankan fungsi consulting SPI berdasarkan permintaan Direktorat teknis;
 8. Rapat bersama Komite Audit dilakukan tiap bulan (12 kali);
 9. Dan tugas lain berdasarkan penugasan direksi.
1. Review of Financial Statements based on SAK and SAP, 2 reviews each;
 2. Completion of follow-up on LHP BPK RI of 90% achievements;
 3. Work visitation assistance with KAP/BPK-RI;
 4. 90% completion of follow-up monitoring and evaluation results conducted by the Directorate General of Treasury;
 5. Strengthening the SPI institution by participating in five (5) SPI HR training;
 6. Review of OPPFMA's SOP;
 7. Assistance in carrying out the SPI consulting function based on the request of the technical Directorate;
 8. Joint meetings with the Audit Committee are held monthly (12 times);
 9. Other duties based on the assignment of the Board of Directors.



Tabel Status tindak lanjut Audit Eksternal tahun 2019
 Table: External Audit Follow-Up Status in 2019

Auditor Eksternal External Audit	Jumlah rekomendasi Number of recommendations	Tindak lanjut rekomendasi Follow-up on the recommendations		
		Selesai Finished	Dalam Proses In Progress	Belum Not Yet
BPK - RI	16	12	4	0
Dit PPK BLU	17	17	0	0
Dit SMI	20	18	2	0

Penilaian Atas Kinerja SPI

Assessment of SPI's Performance

Penilaian Atas Kinerja SPI dilakukan berdasarkan kinerja SPI sebagaimana yang diatur dalam komponen KPI (*Key Performance Indicators*) tentang realisasi pencapaian kinerja Satuan Pemeriksaan Internal tahun 2019 sebesar 112% dari target 100%.

SPI's performance is assessed based on the regulation as stated in the KPI (*Key Performance Indicators*) component regarding the realization of the 2019 Internal Audit Unit performance achievement. In 2019, SPI achieved 112% of the targeted 100%.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management



Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKKS) merupakan salah satu badan yang sarat dengan risiko, karena melibatkan pengelolaan uang dalam berbagai bentuk pembiayaan. Namun demikian, tingkat risiko tersebut bergantung pada kemampuan dan kompetensi manajemen dalam mengantisipasi risiko dengan penanganan yang tepat.

The Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) is one of the agencies laden with risks, as it involves money management in various forms of financing. However, the risk level depends on the ability and competence of management to anticipate risks with proper management.



Untuk itu, BDPKKS mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan framework ISO 31000:2018 untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di BDPKKS. Penerapan Sistem Manajemen Risiko di BDPKKS terdiri dari tahapan pengelolaan risiko yang sistematis. Fungsi Manajemen Risiko BDPKKS dijalankan oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKKS yang dipimpin oleh Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Therefore, OPPFMA implements a Risk Management System in accordance with the ISO 31000:2018 framework to generate risk management with a broader, easily understandable, and assessed perspective, and support coordination and integration between work units in OPPFMA. The Risk Management System in OPPFMA consists of systematic risk management stages. OPPFMA's Risk Management function is carried out by the Compliance and Risk Management Division of OPPFMA, which is led by the Head of the Compliance & Risk Management Division.

Komitmen Penerapan Manajemen Risiko BDPKKS OPPFMA's Commitment to Implementing Risk Management

Wujud mandat dan komitmen Penerapan Manajemen Risiko BDPKKS dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko, penjabaran tugas pokok dan tanggung jawab utama pengelolaan risiko di seluruh lingkungan BDPKKS sebagaimana Surat Keputusan Direktur Utama Nomor Kep-590/2019 tentang Komite Pemantau Risiko sebagai perubahan dari keputusan Direktur Utama Nomor KEP 85/DPKS/2019 dan Nomor KEP 36/DPKS/2016 tentang pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

OPPFMA's mandate and commitment to implementing Risk Management are based on the risk management principles, job description of the main duties and responsibilities of risk management within OPPFMA as stated in the President Director's Decree No. Kep-590/2019 on the Risk Monitoring Committee, as the amendment of the President Director's Decree No. KEP 85/DPKS/2019 and No. KEP 36/DPKS/2016 on the establishment of the Risk Management Monitoring Committee.

Pihak/Pengelola Party/Manager

Pokok dan Tanggung Jawab Utama Main Responsibilities

Dewan Pengawas Supervisory Board

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) BDPKKS. b. Memantau dan mengevaluasi kebijakan operasional BDPKKS yang dilakukan oleh Direksi. c. Konsisten untuk menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja. d. Memastikan bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berjalan dengan efektif sesuai jenjang organisasi. e. Optimalisasi fungsi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Sistem Pengawasan Internal dengan memberikan masukan/saran kepada Dewan Pengawas melalui proses penelaahan sesuai rencana kerja f. Memastikan saran/rekomendasi setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti. | <ul style="list-style-type: none"> a. Endorsing the Risk Management policy, including the Risk Management strategies and framework set in accordance with OPPFMA's risk appetite and risk tolerance. b. Monitoring and evaluating OPPFMA's operational policies, conducted by the Board of Directors. c. Holding regular meetings consistently with the Board of Directors to evaluate the follow-up achievements of every work program. d. Ensuring that the delegation of authority and responsibility runs effectively according to the organizational levels. e. Optimizing the functions of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Internal Monitoring System Committee by providing input/advice to the Supervisory Board through a review process according to the work program f. Ensuring that the recommendations/suggestions of each Internal and External Auditors' Audit Reports (LHP) have been followed-up. |
|---|---|

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management

Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee

- Menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
 - Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal BPDPKS yang mempengaruhi kecukupan pungutan, profil Risiko, dan ketidakefektifan penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
 - Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis BPDPKS yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko BPDPKS memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing Direktorat dan dievaluasi sesuai kebutuhan.
- Risk Management strategies, the level of risk taken and Risk tolerance, Risk Management framework and contingency plans to anticipate abnormal conditions.
- Refining the Risk Management process regularly or occasionally as a result of changes in the external and internal conditions of OPPFMA which affect the adequacy of levies, Risk profile, and the ineffectiveness of Risk Management based on evaluation results.
 - Determining policies and/or business decisions that are not in accordance with normal procedures, such as significant business expansion decisions compared to the predetermined OPPFMA's business plan, or a position/risk exposure that exceeds the limits set.
 - Adequacy of the risk identification, assessment, monitoring, and control process, as well as the OPPFMA's Risk Management Information System, having risk management policies in accordance with the size, complexity, and business risks. Risk-based procedures cover all products/activities with risks. Risk limits have been set by each Directorate and evaluated as necessary.

Direktur Utama President Director

- Menjalankan visi misi Badan Layanan Umum BPDPKS sesuai sasaran yang sudah ditetapkan.
 - Direktur utama wajib menunjuk Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai anggota tetap Komite Manajemen Risiko yaitu Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang membidangi penerapan Manajemen Risiko bagi BPDPKS.
- Carrying out the OPPFMA Public Service Agency's vision and mission in accordance with the predetermined targets.
 - President Director shall appoint the Director responsible for the Compliance and Risk Management functions as a permanent member of the Risk Management Committee, i.e. the Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management, that is responsible for the OPPFMA's Risk Management.

Direksi Board of Directors

- Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) badan.
 - Memantau, mengevaluasi dan memastikan Rencana Bisnis BPDPKS, strategi, dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala dan berdampingan kunjungan bersama Direktorat.
 - Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan dan prosedur telah dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh seluruh karyawan.
 - Memastikan bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berjalan dengan efektif sesuai jenjang organisasi
- Formulating policies, strategies, and Risk Management framework with due regards to risk appetite and risk tolerance of the agency.
 - Monitoring, evaluating, and ensuring that OPPFMA's Business Plan, strategy, and action plan, have been carried out according to plan through regular meetings and side-by-side visits with the Directorate.
 - Ensuring Standard Operating Procedures (SOPs), policies, and procedures have been properly understood and implemented by all employees.
 - Ensuring that the delegation of authority and responsibility runs effectively according to the organizational levels



**Divisi
Manajemen
Risiko**
Risk Management
Division

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> e. Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Audit Internal maupun Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif f. Melakukan kunjungan mendadak berdampingan dengan Direktorat ke stakeholder untuk mengetahui dan meyakini proses kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai kebijakan dan prosedur BPDPKS. g. Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang. h. Pengawasan aktif Direksi tersebut dilakukan melalui unit kerja masing-masing Direktorat. | <ul style="list-style-type: none"> e. Ensuring and conducting corrective actions or recommendations from Internal and External Audits that have been implemented effectively f. Conducting unannounced visits with the Directorate to stakeholders to understand and ensure that the operational activity is going well and in accordance with OPPFMA's policies and procedures. g. Establishing a risk management culture and improving risk awareness at all levels. h. Active supervision of the Board of Directors is carried out through the work units of each Directorate. |
| <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengendalian internal melalui serangkaian kegiatan yang mencakup: b. Penyusunan rencana pengawasan; c. Penyusunan indikator kontrol; d. Penyusunan standarisasi pengendalian dan perencanaan kebijakan dasar terkait pengawasan dan pengendalian; serta e. Melakukan kontrol secara langsung atas praktik bisnis dan pengelolaan risiko satuan kerja termasuk penyusunan profil risiko. | <ul style="list-style-type: none"> a. Carrying out internal control through a series of activities that include: b. Preparation of a supervisory plan; c. Formulation of control indicators; d. Formulation of control standardization and basic policy planning in terms of supervision and control; and e. Exercising direct control over business practices and risk management for work units, including the risk profile preparation. |

Selain itu, sejak tahun 2016-2019 BPDPKS telah menerapkan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Menyempurnakan laporan profil risiko badan sesuai dengan peraturan PMK Nomor 191/PMK.09/2008 dan telah diubah menjadi PMK Nomor 12/PMK.09/2016, PMK Nomor 171 2016_KMK 845/2016. Dan pada tahun 2019, peraturan tersebut kembali diharmonisasi menjadi KMK Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Profil risiko BPDPKS digambarkan dalam laporan profil risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPDPKS dan kualitas penerapan manajemen risiko. Proses pengidentifikasian risiko-risiko yang melekat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dari unit kerja terkait/*risk taking unit* dan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Identifikasi risiko-risiko tersebut terus dilakukan dan disempurnakan bersama-sama dengan penentuan *limit/risk appetite* dan penghitungan bobot untuk masing-masing risiko sehingga dapat lebih menggambarkan profil risiko BPDPKS yang sebenarnya.
2. Memperbaiki kualitas penerapan manajemen risiko BPDPKS sesuai profil risiko masing-masing Direktorat dengan cara melakukan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa merugikan baik di bidang risiko Penerimaan, Belanja, Pembiayaan, Strategik, Fraud, Kepatuhan, Operasional dan Reputasi.

In addition, since 2016-2019, OPPFMA has implemented the following risk management:

1. Refinement of risk profile report in accordance with PMK Regulation No. 191/PMK.09/2008, as amended by PMK No. 12/PMK.09/2016, PMK No. 171 2016_KMK 845/2016. In 2019, the regulation was again adjusted into KMK No. 577/KMK.01/2019 on Risk Management within the Ministry of Finance. OPPFMA's risk profile is described in the risk profile report inherent in the OPPFMA's business activities and the quality of risk management. The process of identifying inherent risks is conducted in accordance with prevailing regulations and from the related risk-taking unit and the Compliance and Risk Management Division. These risks are identified and refined, in line with the determination of the risk appetite and the weight calculation for each risk to better describe the true risk profile of OPPFMA.
2. Refining the quality of OPPFMA's risk management in accordance with the risk profile of each Directorate by mitigating potential risks that can be detrimental in the areas of Income, Expenditures, Financing, Strategic, Fraud, Compliance, Operations, and Reputation.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management

Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy

Kebijakan manajemen risiko BDPDKS berpedoman pada ISO 31000:2018 yang diwujudkan dalam pedoman manajemen risiko BDPDKS dan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 10 Juli 2019 yang telah mengalami berbagai perubahan. Berikut proses perubahan pedoman Manajemen Risiko dari tahun 2008-2019:

OPPFMA's risk management policy refers to ISO 31000:2018, which is embodied in OPPFMA's risk management guidelines and has been adjusted to the Minister of Finance's Decree No. 577/KMK.01/2019 on the Risk Management within the Ministry of Finance on 10 July 2019, which has been amended several times. The following is the changes in the Risk Management guidelines from 2008-2019:

Proses Perubahan Peraturan Manajemen Risiko | Terakhir 577/KMK.01/2019 Risk Management Regulation Change | Lastly amended by 577/KMK.01/2019

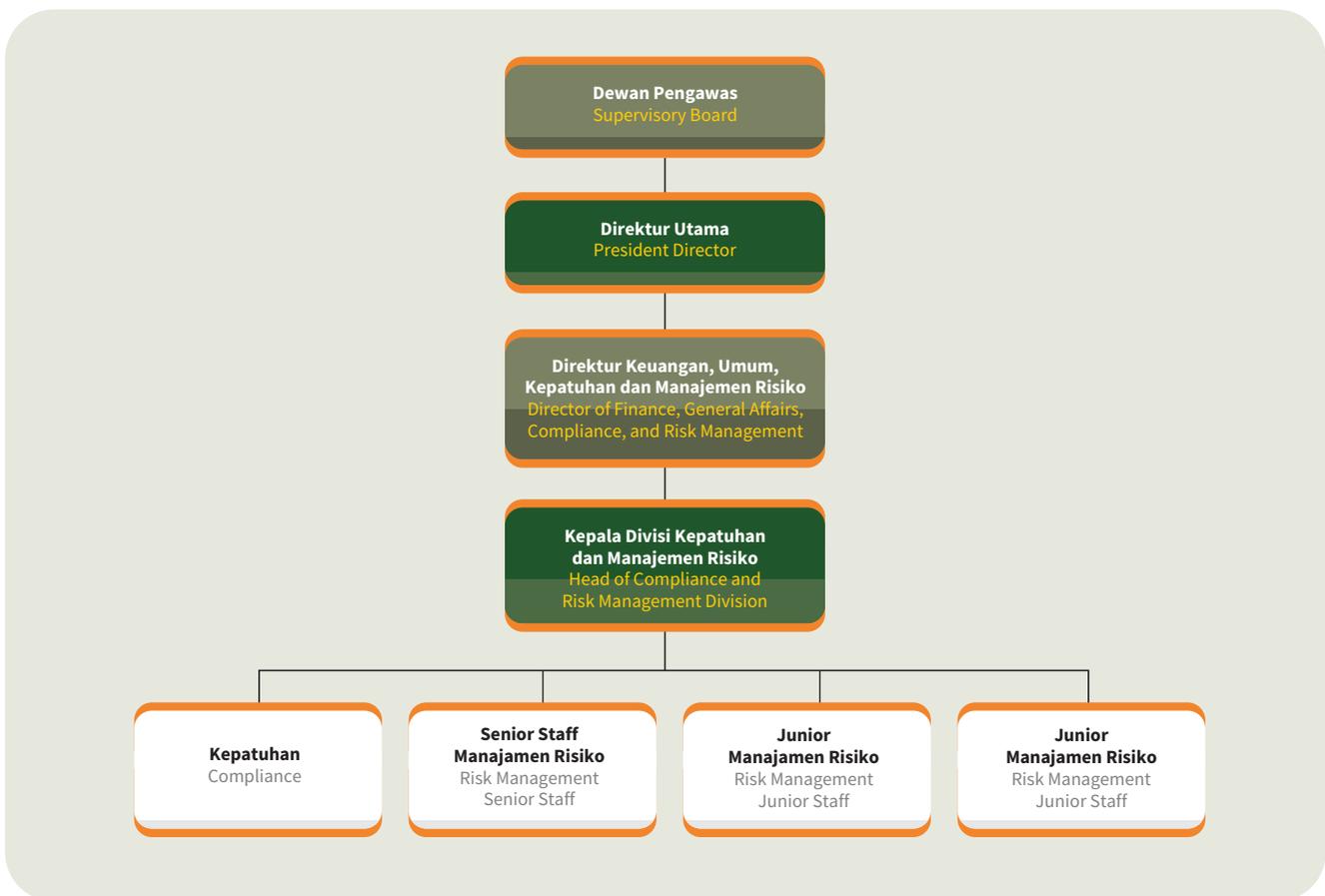
No	Proses dan Kategori Processes and Categories	PMK 191/2008	PMK 12/2016	PMK 171/2016 KMK 845/2016	KMK 577/2019
1	Alur Proses process flow	Penetapan Konteks s.d Komunikasi & Konsultasi Context up to Communication & Consultation	Komunikasi & Konsultasi s.d Pemantauan & Review Communication and Consultation up to Monitoring & Review		
2	Time Horizon	6 Bulan (Semesteran) 6 Month (Semester)	1 tahun 1 Year		
3	Struktur Structure	1. Komite Manajemen Risiko (MR) MR Committee 2. Ketua MR dan Unit Pemilik Risiko (UPR) MR Chairman and Risk Owner Unit (UPR) 3. Itjen & Auditor Eksternal Inspectorate General & External Auditor	1. Komite MR MR Committee 2. Ketua MR Es I MR Es I Committee 3. Pem Unit Es II Pem Unit Es II 4. Compliance Office MR MR Compliance Officer	1. Komite MR MR Committee 2. Ketua MR Es I MR Es I Committee 3. UPR 4. Unit Kepatuhan MR MR Compliance Unit 5. Itjen Inspectorate General	
4	Kategori Risiko Risk Category	5 Risiko (Strategik, Finansial, Operasional, Kepatuhan dan Fraud) 5 Risks (Strategic, Financial, Operational, Compliance, and Fraud)	8 Risiko (Penerimaan, Belanja, Pembiayaan, Strategis, Fraud, Kepatuhan, Operasional dan Reputasi) 8 Risks (Receipt, Expenditures, Financing, Strategic, Fraud, Compliance, Operational, and Reputation)	7 Risiko (Fiskal, Kebijakan, Kepatuhan, Legal, Fraud, Reputasi dan Operasional) 7 Risks (Fiscal, Policies, Compliance, Legal, Fraud, Reputation, and Operational)	7 Risiko (Keuangan, Kebijakan, Reputasi, Fraud, Legal, Kepatuhan dan Operasional) 7 Risk (Financial, Policies, Reputation, Fraud, Legal, Compliance, and Operational)
5	Level Risiko Risk Level	3 Level (Rendah, Sedang, Tinggi) 3 Levels (Low, Medium, High)	5 Level (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) 5 Levels (Very Low, Low, Medium, High, Very High)		
6	Kriteria Risiko Risk Criteria	Diserahkan Kepada UPR Submitted to UPR	2 Kriteria Kemungkinan 2 Possibility Criteria 5 Kriteria Dampak 5 Impact Criteria	2 Kriteria Kemungkinan 2 Possibility Criteria 6 Kriteria Dampak 6 Impact Criteria	



Struktur Organisasi Manajemen Risiko Risk Management Organization Chart

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko secara efektif dan terintegrasi BDPKKS telah memiliki Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

OPPFMA has a Compliance and Risk Management Division to implement Risk Management in an effective and integrated manner, with an Organizational Structure as follows:



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko Appointment and Dismissal of the Head of Compliance & Risk Management Division

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas dengan telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis BDPKKS.

The appointment and dismissal of the Head of Compliance & Risk Management Division are carried out by the President Director, with the approval of the Supervisory Board, with due regards to the education, work experience, and qualifications, in accordance with OPPFMA's business needs.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management

Saat ini, Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko BDPKKS dijabat oleh Sdr. Sidik Haryadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 373/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan pada BLU BDPKKS.

Currently, the Head of the Compliance & Risk Management Division of BDPKKS is held by Mr. Sidik Haryadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 373/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan pada BLU BDPKKS.

Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko Head of Compliance & Risk Management Division



Sidik Haryadi
Kepala Divisi Kepatuhan
& Manajemen Risiko
Head of Compliance &
Risk Management Division

Lahir di Sleman, tanggal 8 November 1987. Lulusan Sarjana Hukum Dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 11 (1996) dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (2010)

Pengalaman Kerja:

Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko di BDPKKS, beliau pernah menjabat berbagai jabatan diantaranya adalah Pelaksana pada Subbagian Sistem Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia di Sekretariat Direktorat Jenderal (2018), Kepala Seksi Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum II di Direktorat Sistem Perbendaharaan (2016), Kepala Seksi Peraturan I Subdirektorat Hukum di Direktorat Sistem Manajemen Investasi (2015) dan berbagai jabatan lainnya.

Born in Sleman, 8 November 1987. Bachelor of Law from University of Gadjah Mada, Yogyakarta 11 (1996) and Master of Law from University of Gadjah Mada (2010)

Employment History:

Prior to serving as Head of the Compliance & Risk Management Division at OPPFMA, he held various positions, including Implementer in the Information Systems and Human Resources Service Subdivision at the Secretariat of the Directorate General (2018), Head of Section II of Business Process and Legal at the Directorate of Treasury System (2016), Head of Section I Regulations, Sub-Directorate of Law at the Directorate of Investment Management System (2015), and various other positions.

Komposisi dan Informasi Riwayat Pendidikan Composition and Education

Jumlah Pegawai Divisi Manajemen Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 4 (empat) orang, dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

As of 31 December 2019, the Risk Management Division consists of four (4) people, with a history of education as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah SDM Total HR	Informasi Riwayat Pendidikan Auditor Education			
			Tingkat Level	Bidang Studi Field of Study	Lembaga Institution	Tahun Year
Sidik Haryadi	Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Head of Compliance and Risk Management Division	1	S1	Hukum Law	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 11	1996
			S2		Universitas Gadjah Mada Kodya Yogyakarta	2010
Gelly Susantry	Senior Staff Manajemen Risiko Risk Management Senior Staff	1	Master	Manajemen Management	Institut Pertanian Bogor	1993
			S1	Manajemen Management	Universitas Tridianti	1989
			S1	Hukum Law	Universitas Sriwijaya	1985
			D3	Ekonomi Economy	STIE Perbana Palembang	1984
Julia Rahmi	Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	2	LL.M	Global Environment and International Climate Change Law	Edinburgh University	2013
			S1	Hukum Law	Universitas Padjajaran	2007
Mina Hidayah			S2	Ilmu Ekonomi Economics	Universitas Gadjah Mada	2015
			S1	Ekonomi Pembangunan Economic Development	Universitas Syiah Kuala	2012

Sertifikasi Sebagai Profesi Manajemen Risiko

Certification as a Risk Management Professional

Berikut adalah daftar penambahan sertifikasi profesi manajemen risiko sampai dengan 31 Desember 2019:

The following is a list of additional risk management professional certifications up to 31 December 2019:

No	Nama Sertifikasi Certification	Jumlah Sertifikasi Number of Certifications
1	Governance, Risk & Compliance (GRC) and Three Line of Defence (TLD) & Strategic Trend in Indonesia Banking	1
2	BIMTEK Mitigasi Risiko & Strategi Menghadapi Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Antisipasi Pemutusan Kontrak di Akhir Tahun Anggaran	1
3	Risk Based Internal Audit	1

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management

Penerapan Manajemen Risiko BDPDKS OPPFMA's Risk Management Implementation

Penerapan manajemen risiko BDPDKS diimplementasikan melalui kegiatan pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penyelenggaraan proses manajemen risiko. Budaya sadar risiko dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai BDPDKS dengan memberikan pemahaman bahwa pengelolaan risiko menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

Disamping itu, secara berkala Divisi Manajemen Risiko menyusun profil risiko sampai dengan pemantauan dan mitigasi risiko dalam rangka tercapainya visi, misi dan sasaran bisnis Badan Layanan Umum.

Profil Risiko Risk Profile

Profil risiko BDPDKS di susun berdasarkan pada sasaran, faktor internal dan eksternal. Dalam penyusunan profil risiko tersebut, BDPDKS telah melaksanakan risk assessment di semua proses bisnis untuk menggali potensi-potensi risiko dan mengklasifikasikan level risiko menjadi peringkat Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi.

The risk management in OPPFMA is realized by developing a risk awareness culture, establishing a risk management structure, and implementing a risk management process. Risk awareness culture is developed in accordance with BDPDKS's values by providing an understanding that risk management is part of every decision making process at all levels of the organization.

In addition, the Risk Management Division regularly compiles a risk profile up to risk monitoring and mitigation to achieve the vision, mission, and business objectives of the Public Service Agency.

OPPFMA's risk profile is compiled based on targets, and internal and external factors. In preparing the risk profile, OPPFMA has carried out risk assessments in all business processes to explore potential risks and classify risk level ratings of Very Low, Low, Medium, High, and Very High.

Tingkatan Level	Level Risiko Risk Level	Besaran Risiko Risk	Warna Colour
5	Sangat Tinggi Very High	20 - 25	Red
4	Tinggi High	16 - 19	Brown
3	Sedang Moderate	12 - 15	Yellow
2	Rendah Low	6 - 11	Green
1	Sangat Rendah Very Low	1 - 5	Blue

Sepanjang tahun 2019, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPDKS memfokuskan pengelolaan kualitas perbaikan dan mitigasi dari profil risiko tahun 2019 yang mengakibatkan potensi risiko-risiko yang bisa merugikan BDPDKS baik di bidang Keuangan, Kebijakan, Kepatuhan, Fraud, Operasional dan Reputasi. Jenis risiko (Profil Risiko) yang dihadapi BDPDKS adalah sebagai berikut:

During 2019, OPPFMA's Compliance and Risk Management Division focused on managing the quality of improvement and mitigation of the 2019 risk profile, which resulted in potential risks that could harm OPPFMA in the fields of Finance, Policy, Compliance, Fraud, Operations, and Reputation. OPPFMA faces several types of risks (Risk Profile) as follows:



Peta Risiko Berdasarkan Kategori Risiko
 Risk Map Based on Risk Categories

Risiko Finansial Financial Risk	Risiko Kebijakan Policy Risk	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Risiko Legal Legal Risk	Risiko Fraud Fraud Risk	Risiko Reputasi Reputation Risk	Risiko Operasional Operational Risk
<p>Harga CPO di bawah batas threshold pungutan dana ekspor CPO price below the threshold of export levies</p> <p>Realisasi pendapatan tidak sesuai target RBA Income realization is not in line with RBA</p>	<p>Rekomendasi Teknis setelah diteliti masih terdapat kesalahan After being reviewed, Technical Recommendation still contained errors</p> <p>Dana yang tersalurkan tidak mencapai target 100.000Ha Fund disbursed did not achieve target of 100,000 Ha</p>	<p>Dana Riset tidak mencukupi untuk membayar jumlah target riset sesuai IKU Research Fund was not sufficient to finance research target as per KPI</p> <p>Target jumlah pengelolaan riset tidak tercapai Research management target is not achieved</p>	-	-	<p>Jumlah mitra program pengembangan SDM yang sangat terbatas The total of HR Development Program partners are not sufficient</p> <p>Target jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak tercapai Target of number of education and development training was not achieved</p>	<p>Data profil BDPKPS pada aplikasi BIOS tidak valid OPPFMA's profile data in BIOS application is invalid</p> <p>Gangguan terhadap layanan organisasi Disruption to the organization's services.</p>

RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK	Berkaitan kondisi fiskal pemerintah pusat meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan serta berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.	Related to the fiscal condition of the central government, including the macroeconomic framework, budgeting, taxation, customs, treasury, and financial supervision, and state assets, which include State-Owned Assets (BMN), separated state assets, government investment, and other state assets.
RISIKO KEBIJAKAN POLICY RISK	Berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.	Related to the formulation and establishment of internal and external policies of the organization.
RISIKO REPUTASI REPUTATION RISK	Berkaitan dengan persepsi negatif atau menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi	Related to negative perceptions or a decline in trust of the external stakeholders in the organization
RISIKO FRAUD FRAUD RISK	Berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyikan atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih.	Related to actions that contain elements of intent, intention, benefit oneself or others, fraud, concealment, or embezzlement, and abuse of trust aimed to obtain unauthorized benefits in the form of money, goods/assets, services, and free services, performed by one or more individuals.
RISIKO LEGAL LEGAL RISK	Berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lain kepada organisasi/jabatan.	Related to lawsuits and other legal remedies against organizations/positions.
RISIKO KEPATUHAN COMPLIANCE RISK	Berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.	Related to non-compliance of the organization or external parties with laws and regulations, international agreements, or other prevailing provisions.
RISIKO OPERASIONAL OPERATIONAL RISK	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu	Risks related to a non-functioning of the organization's business processes, information systems, or individual work safety

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management

Disamping itu, BDPKS juga telah menyusun peta risiko berdasarkan pada sasaran program/kegiatan selama tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Disamping itu, BDPKS juga telah menyusun peta risiko berdasarkan pada sasaran program/kegiatan selama tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Sasaran Program/Kegiatan Program/Activity Target	Peta Risiko Risk Map						Rencana Penanganan Risiko Risk Management Plan					
	28 Jenis Risiko 28 Risk Types						28 Jenis Risiko 28 Risk Types					
	Sangat Rendah Very Low	Rendah Low	Sedang Moderate	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High	Jumlah Total	Sangat Rendah Very Low	Rendah Low	Sedang Moderate	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High	Jumlah Total
Terwujudnya pengelolaan dana kelapa sawit yang sustainable			1	2	3	6	1	1	3		1	6
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi					1	1		1				1
Perencanaan kebijakan yang berkualitas			1			1	1					1
Penyelenggaraan penghimpunan dana yang optimal				1		1		1				1
Penyelenggaraan penyaluran dana untuk petani dan pengembangan SDM sawit	1	1			4	4				1	3	4
Penyelenggaraan penyaluran dana untuk biodiesel dan pengembangan produk						2						0
Penyelenggaraan penyaluran dana untuk promosi dan kemitraan				4		4			3	1		4
Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel			1			1			1			1
SDM yang kompetitif				1		1			1			1
Organisasi yang kondusif			3			3		3				3
Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern			3			3		3				3
Pengelolaan anggaran yang optimal					1	1			1			1
Jumlah Risiko Total Risk	1	1	9	8	9	28	2	10	8	2	4	26

Matriks Analisis Risiko Risk Analysis Matrix			LEVEL DAMPAK IMPACT LEVEL				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan Not Significant	Minor	Moderat Moderate	Signifikan Significant	Sangat Signifikan Very Significant
LEVEL KEMUNGKINAN POSSIBLE LEVEL	5	Hampir Pasti Terjadi Very likely	7	12	17	4★ 22	5★ 25
	4	Sering Terjadi Frequently	4	9	14	6★ 19	2★ 24
	3	Kadang Terjadi Sometimes	3	8	13	18	3★ 23
	2	Jarang Terjadi Rarely	2	6	11	16	21
	1	Hampir Tidak Terjadi Unlikely to Happen	1	5	10	15	20



Selera Risiko dan Toleransi

Selera Risiko dan Toleransi

Kriteria Selera Risiko (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Criteria of Risk appetite and risk tolerance

Pernyataan Selera Risiko Risk appetite statement	Risiko dengan tingkat eksposur saat ini (<i>current risk level</i>) berada di level Sedang atau lebih tinggi, tidak bisa diterima sehingga harus dibuatkan perlakuan risiko untuk pengendaliannya.	Risk is in accordance with current risk level at Medium or higher, cannot be accepted, thus risk tolerance must be formulated for its control
Batasan Selera Risiko Limit of Risk Appetite	Nilai risiko yang dapat diterima: 1 – 11	Accepted risk value: 1-11
Pernyataan Toleransi Risiko Risk tolerance statement	Risiko tersisa (<i>residual risk level</i>) dengan tingkat eksposur berada di level Sedang atau lebih rendah sudah dapat ditolerir, sebaliknya di level Tinggi dan Sangat Tinggi tidak dapat ditolerir, sehingga perlu optimalisasi tindakan pencegahan atau mempersiapkan tindakan responsif sebagai antisipasi terhadap terjadinya risiko.	Residual risk level with exposure on Medium or lower can be tolerated. However, if the residual risk level is High or Very High, this cannot be tolerated. Thus, optimization is necessary to avoid or formulate responsive actions as anticipation to the risk event.
Batasan Tolerance Limit Tolerance Limit	Nilai risiko yang tidak dapat diterima tapi dapat ditolerir: 12 – 15	Risk value unaccepted but tolerable: 12-15
	Nilai risiko yang tidak dapat diterima dan ditolerir: 16 – 25	Risk value unaccepted and intolerable: 16-25

Laporan Pemantauan Risiko (Jenis Risiko dan Mitigasi Risiko)

Risk Monitoring Report (Types of Risk and Risk Mitigation)

Setiap risiko yang telah dipetakan akan dirancang upaya penyelesaian (mitigasi) risiko sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan risiko yang muncul dalam proses bisnis di masa yang akan datang. Berdasarkan pengelompokan dan peta risiko di atas, BDPKKS melakukan mitigasi guna mengurangi dampak ataupun kerugian yang dapat mengganggu kinerja BDPKKS.

Every mapped risk will have its mitigation as anticipation of possible risks that may arise in the upcoming business processes. Based on the classification and risk map above, OPPFMA performs mitigation to reduce impacts or losses that could disrupt OPPFMA's performance.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management

Sasaran Target	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation	
<p>Terwujudnya pengelolaan dana kelapa sawit yang sustainable Realization of a sustainable palm oil fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Eksportir tidak membayar pungutan atas ekspor CPO dan/atau produk turunannya dikarenakan adanya perubahan harga referensi, sehingga tidak ada penerimaan atas pungutan ekspor CPO dan produk turunannya pada bulan berjalan. ● Gagal bermitra dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society dikarenakan tidak tersosialisasinya program kerja BDPKKS sesuai Renstra, RBT dan roadmap promosi serta stakeholder sawit belum memahami bagaimana prosedur dalam pengajuan kerja sama dukungan pendanaan dan tata kelola keuangan di BDPKKS, sehingga tidak tercapainya target kegiatan dan penyaluran dana promosi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Exporters do not pay levies on the export of CPO and/or its derivative products due to changes in the reference price. Thus, there are no export levies on CPO and its derivative products in the current month. ● Failure to partner with Social Institutions and Civil Society because OPPFMA's work program is not disseminated according to the Strategic Plan, RBT, and promotion roadmap. In addition, the palm oil stakeholders do not understand how to propose cooperation for funding support and financial governance at OPPFMA. Thus, the target for activities and disbursement of promotional funds are not achieved 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan monitoring harga referensi pungutan ekspor 2. Sosialisasi program kerja BDPKKS kepada stakeholder sawit. 3. Update informasi kegiatan BDPKKS melalui website. 4. Memperluas cakupan stakeholder sawit <ol style="list-style-type: none"> 1. The monitoring of the reference price of export levies 2. Socialization of OPPFMA's work programs to palm oil stakeholders. 3. Information update on OPPFMA's activities at the website. 4. Expanding the coverage of palm oil stakeholders
<p>SDM yang kompetitif Competitive HR</p>	<p>Jumlah peserta /pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai SKJ kurang dari jumlah yang dipersyaratkan dikarenakan jadwal pelatihan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dinas unit/divisi dan terdapat kesulitan mencari tempat penyelenggara pelatihan yang sesuai dengan SKJ, sehingga terdapat penurunan kinerja.</p>	<p>The number of participants/employees who participate in the training according to SKJ is less than the number required because the training schedule coincides with the unit/division business trip and it is difficult to find a training venue that is in accordance with the SKJ. Thus, there is a decrease in performance.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun jadwal pelatihan berikutnya 2. Melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan <ol style="list-style-type: none"> 1. Arranging the next training schedule 2. Cooperating with training institutions
<p>Penyelenggaraan penyaluran dana untuk promosi dan kemitraan Fund disbursement for promotion and partnership</p>	<p>Gagal bermitra dengan perusahaan dikarenakan tidak tersosialisasinya program kerja BDPKKS sesuai Restra, RBT dan roadmap promosi serta stakeholder sawit belum memahami bagaimana prosedur dalam pengajuan kerja sama dukungan pendanaan dan tata kelola keuangan di BDPKKS, sehingga tidak tercapainya target kegiatan dan penyaluran dana kemitraan.</p>	<p>Failure to partner with companies because OPPFMA's work program is not disseminated according to the Strategic Plan, RBT, and promotion roadmap. In addition, the palm oil stakeholders do not understand how to propose cooperation for funding support and financial governance at OPPFMA. Thus, the target for activities and disbursement of partnership funds are not achieved</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program kerja BDPKKS kepada stakeholder sawit. 2. Update informasi kegiatan BDPKKS melalui website. 3. Memperluas cakupan stakeholder sawit <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialization of OPPFMA's work programs to palm oil stakeholders. 2. Information update on OPPFMA's activities at the website. 3. Expanding the coverage of palm oil stakeholders



Sasaran Target	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
<p>Perencanaan kebijakan yang berkualitas Quality policy planning</p>	<p>Data dan informasi yang diterima dari stakeholder tidak tepat waktu dikarenakan pelaksanaan pengumpulan data tidak sesuai dengan waktu yang diatur di dalam Perdirut no-14/DPKS/2017, sehingga penyelesaian kebijakan strategis tidak tepat waktu.</p>	<p>Data and information received from stakeholders are not on time because the data collection is not in accordance with the time stipulated in President Director's Decree No. 14/DPKS/2017. Thus, the strategic policy is not completed on time.</p>
<p>Organisasi yang kondusif Conducive organization</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai pengelolaan kinerja berbasis SFO dibawah syarat yang ditentukan dikarenakan kurangnya dokumentasi kegiatan pengelolaan kinerja dan kurang terlibatnya manajemen dalam proses pengelolaan kinerja, sehingga terdapat penurunan kinerja. • Penyelesaian legal drafting produk hukum tidak tepat waktu dikarenakan kurangnya pemahaman unit terkait terhadap regulasi dan proses bisnis yang akan menjadi dasar penyusunan legal drafting sehingga perlu banyak perubahan dan perbaikan dan jumlah permintaan review draft legal sangat besar, sementara jumlah staf legal hanya satu orang, sehingga legal drafting produk hukum tidak memenuhi target waktu dan tidak tepat sasaran • Penyelesaian draft kontrak perjanjian kerjasama BPD PKS dengan pihak lain tidak tepat waktu dikarenakan dokumen pendukung kontrak perjanjian kerjasama BPD PKS dengan pihak lain tidak lengkap dan jumlah permintaan review draft legal sangat besar, sementara jumlah staf legal hanya satu orang, sehingga draft kontrak perjanjian kerjasama BPD PKS dengan pihak lain tidak memenuhi target waktu dan tidak efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • The SFO-based performance management has value below the specified conditions due to lack of documentation of performance management activities and management's involvement in the performance management process, resulting in a performance decrease. • Legal drafting of legal products is not completed on time because of the lack of understanding of the related units of regulations and business processes that will form the basis for legal drafting. Thus, there are various changes and refinement, while there are several requests for legal draft reviews although the legal staff only consists of one person. Thus, legal drafting for legal products did not finish on time and target • The draft of OPPFMA's cooperation agreement with other parties is not completed on time because the supporting documents for OPPFMA's cooperation agreement with other parties are incomplete and there are several requests for legal draft reviews although the legal staff only consists of one person. Thus, the draft of OPPFMA's cooperation agreement with other parties did not finish on time and is not effective
<p>Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal dan modern Management of optimal and modern facilities and ICT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi yang diselesaikan kurang dari target dikarenakan kurangnya jumlah personil /SDM yang mengerti per programan/software serta permintaan dari user/unit yang bersifat mendadak dan/atau dalam jumlah yang banyak, sehingga terdapat penurunan kinerja • Data profil BPD PKS pada aplikasi BIOS tidak valid dikarenakan adanya salah input data oleh petugas, sehingga terdapat gangguan terhadap layanan organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Completed applications were not on target due to lack of personnel/HR who understands the program/software, equipped with requests from users/units that are incidental under large numbers. Thus, there is decrease in performance • OPPFMA's profile data in the BIOS application is invalid due to incorrect data input by officers. Thus, there is disruption to organizational services.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management

Sasaran Target	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya database yang terpusat dikarenakan kemampuan petugas kurang memadai dan database berdiri sendiri sesuai aplikasi yang ada, sehingga terdapat gangguan terhadap layanan organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> The unavailability of a centralized database due to inadequate capacity of officers and independent database of the existing applications. Thus, there is disruption to organizational services. 	<ol style="list-style-type: none"> Establishing an application team Coordinating internally to compile application requirements Performing UAT and bimtek Coordinating with all related division users Coordinating with the BLU financial administration coach (Dit PPKBLU)
<p>Pertanggung jawaban pengelolaan dana yang akuntabel Accountability of fund management</p>	<p>Dokumen pendukung belum tersedia dikarenakan dokumen yang bersifat ketentuan/peraturan memerlukan proses pembuatan dan penyelesaian yang memakan waktu yang lebih lama, sehingga target penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/APIP tidak tercapai.</p>	<p>Supporting documents are not available because provisions/regulatory documents require more time in their preparation and completion. Thus, the target for completing the follow-up of BPK/APIP findings is not achieved.</p>
		<p><i>One-on-one meeting</i> dengan pihak terkait One-on-one meeting with related parties</p>

Laporan Kegiatan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKKS OPPFMA's Compliance and Risk Management Division Report

Sepanjang tahun 2019, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu antara lain:

- Membuat profil risiko setiap tahun sesuai dengan kontrak kinerja BDPKKS dan Dirjen Pembendaharaan selaku Badan Layanan Umum (BLU);
- Melakukan pemantauan dari profil risiko tersebut dan kuartalan I-IV tahun 2019;
- Melakukan penilaian profil risiko BDPKKS sesuai dengan matriks penilaian kematangan risiko.
- Mengikuti berbagai pelatihan sebagai berikut:
 - Compliance and Manajemen risiko
 - Training Governance Risk
 - Training Audit Internal
 - Training Pengadaan

During 2019, the Compliance and Risk Management Division has carried out activities in accordance with its duties and responsibilities:

- Creating a risk profile annually in accordance with the OPFMA's performance contract and the Director-General of Treasury as the Public Service Agency (BLU);
- Monitoring the annual and quarterly risk profile in 2019;
- Assessing OPFMA's risk profile in accordance with the risk maturity assessment matrix.
- Participated in various training as follows:
 - Compliance and risk management
 - Governance Risk training
 - Internal Audit training
 - Procurement training



- 5. Melakukan rapat dengan SPI sebanyak 3 (tiga) kali rapat, yaitu terkait 1).Evaluasi hubungan SPI dan Manajemen Risiko; 2). Penyusunan Program Audit SPI; dan 3).Pembahasan Kerjasama temuan baik internal maupun eksternal
- 6. Melakukan kajian atas temuan dari eksternal
- 7. Melakukan kajian pendampingan semua divisi dari Direktorat

- 5. Conducted three (3) meetings with SPI, related to 1) Evaluation of the relationship between SPI and Risk Management; 2) SPI Audit Program Preparation; and 3) Discussion on cooperation for internal and external findings
- 6. Conducting studies on external findings
- 7. Performing mentoring study for all divisions of the Directorate

Penilaian Atas Kinerja Bidang Manajemen Risiko

Assessment of the Risk Management Performance

Penilaian Atas Kinerja Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dilakukan berdasarkan Kinerja Bidang Manajemen Risiko sebagaimana yang diatur dalam komponen KPI (*Key Performance Indicators*). Realisasi pencapaian Kematangan Manajemen Risiko tahun 2019 melebihi 80% dari target 75% dengan tingkat kematangan di manajemen sudah dapat mengelola risiko (Risiko Dikelola), serta adanya komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko yang tinggi dan dapat menurunkan level risiko yang tinggi.

The Performance of the Compliance and Risk Management Division is assessed based on the Performance of the Risk Management Sector as stipulated in the KPI (Key Performance Indicators). The realization of the Risk Management Maturity in 2019 exceeded 80%, out of the target 75%, with the maturity level of Managed Risk, equipped with the leadership's commitment and understanding of the implementation of risk management that can reduce high levels of risk.

Berikut level tingkat Kematangan Manajemen Risiko di BDPKS sampai dengan 31 Desember 2019.

The following are the levels of Risk Management Maturity at OPPFMA as of 31 December 2019.

Tingkat Kematangan Maturity Level	Parameter Penilaian Assessment Parameter			
	Kepemimpinan Leadership	Proses Manajemen Risiko Risk Management Process	Aktivitas Penanganan Risiko Risk Management Activities	Hasil Penerapan Manajemen Risiko Results of Risk Management
Belum Sadar Risiko Risk Naive	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen Risiko sangat rendah Commitment and understanding of the management towards Risk Management is very low	Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif The Risk Management process is very incomplete and the identification is not comprehensive	Jumlah Persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat rendah Total mitigation carried out and the success rate in reducing the level of risk is very low	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah The success of achieving strategic objectives is very low

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPD PKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPD PKS
Tanggung Jawab Sosial BPD PKS
Laporan Keuangan Audited

Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management

Tingkat Kematangan Maturity Level	Parameter Penilaian Assessment Parameter			
	Kepemimpinan Leadership	Proses Manajemen Risiko Risk Management Process	Aktivitas Penanganan Risiko Risk Management Activities	Hasil Penerapan Manajemen Risiko Results of Risk Management
Sadar Risiko Risk Aware	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko rendah Commitment and understanding of the management towards risk management is low	Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif The Risk Management process is incomplete and the identification is not comprehensive	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko rendah Total mitigation carried out and the success rate in reducing the level of risk is low	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah The success of achieving strategic objectives is low
Risiko Ditetapkan Risk Defined	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sedang Commitment and understanding of the management towards risk management is moderate	Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif The Risk Management process is carried out in an adequate manner and the identification is quite comprehensive	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sedang Total mitigation carried out and the success rate in reducing the level of risk is moderate	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang The success in achieving strategic objectives is moderate
Risiko Dikelola Risk Managed	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko tinggi Commitment and understanding of the management towards risk management is high	Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi komprehensif The Risk Management process is carried out in an adequate manner and the identification is comprehensive	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko tinggi Total mitigation carried out and the success rate in reducing the level of risk is high	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi The success in achieving strategic objectives is high
Dapat Menangani Risiko Risk Enabled	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sangat tinggi Commitment and understanding of the management towards risk management is very high	Proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif The Risk Management process is carried out in a comprehensive manner and the identification is very comprehensive	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat tinggi Total mitigation carried out and the success rate in reducing the level of risk is very high	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi The success of achieving strategic objectives is very high

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem pengendalian internal BDPKKS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum.

Internal Control System is a series of integral processes in the continuous actions and activities carried out by the management and all employees to provide adequate confidence in the achievement of the organization's objectives through effective and efficient activities, the reliability of financial reporting, security of state assets, and adherence to legislation. OPPFMA's internal control system refers to the Minister of Finance Regulation No. 200/PMK.05/2017 on the Internal Control System at Public Service Agencies.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen BDPKKS dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu menjaga aset BDPKKS, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan managerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan BDPKKS terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan BDPKKS terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Pemeriksa Internal berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan, keputusan BDPKKS dan seluruh aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

An effective Internal Control System is an important component in the OPPFMA's management and forms the basis for sound and safe operations. An effective Internal Control System assists in safeguarding OPPFMA's assets, ensures the availability of reliable financial and managerial reporting, enhances OPPFMA's compliance with prevailing laws and regulations, and reduces the risk of loss, deviation, and violations of prudential aspects to improve the OPPFMA's compliance with the prevailing laws and regulations. The Internal Audit Unit strives to ensure that OPPFMA's policies, decisions, and all business activities, are carried out in accordance with prevailing laws and regulations.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Sistem Pengendalian Internal Internal Control

Direksi BDPKKS menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur secara konsisten, baik terkait dengan kegiatan usaha BDPKKS, manajemen risiko, perencanaan strategis yang akurat, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas, serta kebijakan akuntansi yang memadai. Sedangkan Dewan Pengawas mengawasi kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit.

Sejalan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal yang efektif, BDPKKS memiliki Fungsi Internal Audit sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengendalian Internal Audit secara keseluruhan. Konsep Sistem Pengendalian Internal sejalan dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO dimana di dalamnya terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian diciptakan dengan disiplin dan terstruktur melalui:

- Penegakan integritas dan nilai etika;
- Komitmen terhadap kompetensi sumber daya manusia;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

2. Identifikasi dan Analisis Risiko (*Risk Assessment*)

Identifikasi risiko bertujuan untuk menentukan semua risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi BDPKKS. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak risiko. Analisis risiko bertujuan untuk menentukan besaran risiko dan level risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada. (Dapat dilihat pada Bab Tata Kelola BDPKKS bagian Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini).

OPPFMA's Board of Directors applies the internal control system through the implementation of policy and procedures consistently and in compliance with prevailing regulations, related to OPPFMA's business activities, risk management, strategic planning, segregation of duties, and delegation of authorities, as well as adequate accounting policy. Meanwhile, the Supervisory Board supervises the adequacy and fairness in the preparation of financial statements and risk management, with due regards to the prudent principle, assisted by the Audit Committee.

In line with the effective Internal Control System, OPPFMA has an Internal Audit Function as an integral part of the Internal Audit Control. The Internal Control System has aligned concept with the Internal Control System framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), which consists of five interrelated main elements:

1. Control Environment

The control environment is created in a disciplined and structured manner through:

- Upholding of integrity and ethical values;
- Commitment to human resources' competency;
- Conducive leadership;
- Establishment of an organizational structure in accordance with the needs;
- Appropriate delegation of authorities and responsibilities; and
- Formulation and implementation of sound policies on human resource development.

2. Risk Assessment

Risk assessment has the objective to determine all risks that affect the achievement of OPPFMA's organizational targets. These risks include the events, causes, and impacts of risks. Risk analysis has the objective to determine the risk unit and the risk level. Risk analysis is performed by determining the likelihood and impact level of a risk-based on the risk criteria, after considering the reliability of the existing control system. (Can be referred to in the OPPFMA's Governance chapter in the Risk Management section in this Annual Report).

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pengendalian, dilakukan tindakan-tindakan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan BLU BDPKKS pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BLU BDPKKS, melalui:

- a. Reviu kinerja BLU BDPKKS;
- b. Pengendalian atas perekrutan dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas asset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern dan transaksi.

4. Sistem informasi dan Komunikasi (Information System and Communication)

Sistem Informasi merupakan proses penyajian informasi mengenai kegiatan operasional, keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui:

- a. Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b. Pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian (Monitoring Control)

Pemantauan pengendalian dilakukan melalui proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BLU BDPKKS termasuk fungsi pengawasan intern, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Control Activities

To implement the control activities, certain actions are conducted in the control process of the OPPFMA BLU activities at each level and unit in the OPPFMA BLU organizational structure, through:

- a. Review of OPPFMA BLU performance;
- b. Control of the recruitment and development of human resources;
- c. Control of the information system management;
- d. Assets' physical control;
- e. Determination and review of performance indicators and measures;
- f. Separation of functions;
- g. Authorisation on transactions;
- h. Accurate and timely recording of transactions and events;
- i. Restrictions on access to resources and their records;
- j. Accountability to the resources and records; and
- k. Documentation of Internal Control Systems and transactions.

4. Information System and Communication

Information System is the process of presenting information in terms of the operational, financial, and compliance with laws and regulations, through:

- a. Provision and use of various forms and means of communication; and
- b. Construction, management, development, and updating of information systems continuously.

5. Monitoring Control

Monitoring control is carried out by assessing the quality of the internal control system at each level and unit in OPPFMA BLU organizational structure, including the internal control function, to be implemented optimally.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Sistem Pengendalian Internal Internal Control

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Evaluation of the Effectiveness of Internal Control Systems

Tahun 2019, SPI melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal BPDPKS melalui:

- Audit atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Kemitraan;
- Menguji serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- reviu laporan keuangan baik yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh tujuan dari pelaksanaan kegiatan dapat dicapai/dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan penilaian mandiri atas penerapan sistem pengendalian internal BPDKS dilakukan secara berkala.

In 2019, SPI evaluated the implementation of the OPPFMA's Internal Control System through:

- Audit on the duties at the Directorate of Partnership;
- Examining and evaluating the implementation of internal control and risk management systems;
- Reviewing financial statements based on Government Accounting Standards (SAP) and Financial Accounting Standards (SAK).

These are implemented to provide adequate confidence that all objectives of the activities can be achieved/implemented properly. Self-assessment on the OPPFMA's internal control system is carried out regularly.



Kode Etik BPDPKS OPPFMA's Code of Conduct

Penerapan Etika Bisnis dan Etika Kerja secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan sikap disiplin Pegawai serta dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

The consistent application of Business and Work Ethics shall improve employees' disciplinary attitudes and encourage the actualization of professional, responsible, reasonable, proper, and trustworthy behavior in conducting business relationships with colleagues and work partners.

BPDPKS merupakan unit organisasi non eselon berbentuk Badan Layanan Umum yang di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kementerian Keuangan sebagai induk organisasi telah mempunyai kode etik yang diwujudkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk BPDPKS, secara umum mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan tersebut, akan tetapi terdapat penyesuaian mengingat pegawai di BPDPKS tidak hanya berasal dari PNS, melainkan banyak berasal dari profesional non Pegawai Negeri Sipil.

OPPFMA is a non-echelon organizational unit in the form of a Public Service Agency engaged in the management of Palm Oil Plantation Fund, which reports directly and is responsible to the Minister of Finance through the Directorate General of Treasury.

The Ministry of Finance as the parent organization has a code of conduct manifested in the Minister of Finance Regulation No. 190/PMK.01/2018 on the Code of Conduct for Civil Servants within the Ministry of Finance. OPPFMA generally refers to the guidelines set forth by the Minister of Finance. However, there are adjustments considering that employees at OPPFMA are not only civil servants, but also non-civil servant professionals.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Kode Etik BDPKKS OPPFMA's Code of Conduct

BDPKKS sebagai BLU telah menerbitkan pedoman kode etik dengan menetapkan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-628/DPKS/2019 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mulai berlaku dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2019. Kode Etik tersebut menuntun pegawai dalam bersikap dan berperilaku. Pegawai dapat dikenakan sanksi moral apabila melanggar kode etik yang penyampaian dilakukan secara tertutup atau terbuka.

OPPFMA as a BLU has issued Code of Conduct guidelines by stipulating the President Director's Decree No. KEP-628/DPKS/2019 on the Code of Conduct of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency, which is enacted and implemented at the end of the 2019 fiscal year. The Code of Conduct guides employees in terms of attitude and behavior. Employees may be subject to moral sanctions if they violate the code of conduct, be it privately or openly.

Pokok Muatan Kode Etik

Core of Code of Conduct

Kode Etik tersebut terdiri dari Etika Bisnis dan Etika Kerja yang merupakan tanggung jawab seluruh manajemen BDPKKS mencakup pegawai, Direksi, Dewan Pengawas dan Komite di bawah Dewan Pengawas untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya BDPKKS.

The Code of Conduct consists of Business and Work Ethics, as the responsibility of all OPPFMA's management, including employees, Board of Directors, Supervisory Board, and Committees reporting directly to the Supervisory Board, to act in accordance with OPPFMA's culture.

Nilai-Nilai Budaya BDPKKS

OPPFMA's Cultural Values

Kode Etik BDPKKS berlandaskan pada nilai-nilai dan budaya BDPKKS, dimana nilai-nilai tersebut sebagai landasan Insan BDPKKS dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Nilai-nilai dan budaya BDPKKS terdiri dari "Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan". Uraian lebih lengkap mengenai Nilai-Nilai dan Budaya BDPKKS telah diuraikan pada Bab Profil BDPKKS bagian Nilai-Nilai dan Budaya BDPKKS.

OPPFMA's Code of Conduct is based on OPPFMA's culture and values. These values are the basis for OPPFMA's Personnel to carry out their duties and responsibilities. OPPFMA's values and culture consist of "Integrity, Professionalism, Synergy, Service, and Perfection". A more elaborate description of the OPPFMA's Values and Culture can be referred to in the OPPFMA's Profile chapter in the OPPFMA's Values and Culture section.

Pemberlakuan Kode Etik

Enactment of Code of Conduct

Dalam menjalankan usahanya, BDPKKS menerapkan etika bisnis/usaha dan etika kerja, dimana etika bisnis menjadi acuan bagi BDPKKS dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan stakeholder. Sementara etika kerja merupakan sistem yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Pegawai dan BDPKKS.

In carrying out its business, OPPFMA implements business and work ethics, in which business ethics are references for OPPFMA in carrying out business activities, including interacting with stakeholders. Work ethics is a system adopted by every Leader and Employee in carrying out their duties, including relationship ethics between Employees and OPPFMA.



Di samping hal tersebut, dalam rangka untuk menciptakan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BDPKKS mengikuti pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

In addition, OPPFMA follows the guidelines set forth by the Government, i.e. Government Regulation No. 53 of 2010 on the Civil Servant Discipline to actualize employees' discipline in conducting their main duties and functions.

Upaya Penegakan Kode Etik Enforcement Effort of Code of Conduct

Dalam rangka penegakan kode etik, BDPKKS membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi dengan melakukan sosialisasi Nilai-Nilai Budaya BDPKKS pada Pegawai BDPKKS melalui acara-acara besar BDPKKS seperti Employee Gathering yang secara rutin dilakukan oleh BDPKKS dalam rangka membangun menambah semangat dan kekompakan dalam berkerja.

OPPFMA establishes a culture of compliance in all organizational lines by disseminating OPPFMA's Cultural Values to OPPFMA's employees through large events, such as Employee Gatherings, which are regularly conducted by OPPFMA to build enthusiasm and cohesiveness in the working environment to enforce the code of conduct.

Jumlah Pelanggaran Disiplin Disciplinary Violations

Sepanjang tahun 2019, jumlah pelanggaran Disiplin BDPKKS sebanyak 2 (dua) pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

During 2019, OPPFMA received two (2) disciplinary violations with the following details:

Tabel Jumlah Pelanggaran Kode Etik tahun 2019
 Table: Code of Conduct Violations in 2019

No	Sanksi Sanction		2019
1	Tindakan Disiplin Ringan	Minor Disciplinary Actions	1
2	Tindakan Disiplin Sedang	Serious Disciplinary Actions	1
3	Tindakan Disiplin Berat	Gross Disciplinary Actions	-
Jumlah		Total	2

Jumlah pelanggaran sebanyak 2 (dua) tersebut dikenakan pada 1 (satu) orang pegawai yang melakukan pelanggaran atas kepatuhan jam kerja. Pegawai tersebut melakukan pelanggaran dengan tidak masuk kerja (X), melakukan keterlambatan masuk kerja (TL), dan pulang sebelum waktu (PSW) dengan akumulasi pelanggaran di atas 10 hari kerja.

The two (2) violations were imposed on one (1) employee who violated the working hours' compliance. The employee committed violations by not coming to work (X), coming to work late (TL), and leaving before the working hours (PSW), with accumulated violations of more than 10 working days.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi BDPKKS

Important Cases Faced by the OPPFMA

"Sepanjang tahun 2019, anggota Dewan Pengawas maupun anggota Direksi BDPKKS yang sedang menjabat tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana".

"During 2019, current members of the OPPFMA's Supervisory Board and the Board of Directors did not have any legal issues, either civil or criminal".

Permasalahan Hukum

Legal Issues

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh BDPKKS. Sehingga tidak ada informasi terkait dengan pokok perkara, status penyelesaian, pengaruh terhadap BDPKKS, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada BDPKKS.

During 2019, there were no legal problems faced by OPPFMA. Therefore, there is no information related to the subject matter, status of settlement, impact on OPPFMA, nominal value of claims, and administrative sanctions imposed on OPPFMA.

Permasalahan Hukum Pada Entitas Anak BDPKKS

Legal Issues in Subsidiaries

Sampai dengan tahun 2019, BDPKKS belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak ada informasi terkait dengan permasalahan hukum, pokok perkara, status penyelesaian, pengaruh terhadap BDPKKS, nilai nominal tuntutan dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada BDPKKS.

During 2019, OPPFMA did not have any Subsidiaries. Therefore, there was no information related to the subject matter, status of settlement, impact on OPPFMA, the nominal value of claims, and administrative sanctions imposed on OPPFMA.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing Reporting Mechanism

BPDPKS telah menerapkan Aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) yang digunakan sebagai media penyampaian pelanggaran (pengaduan) yang diketahui baik oleh stakeholders, dimana aplikasi WBS BPDPKS tersebut masih mengacu pada WBS Kementerian Keuangan.

OPPFMA implements the Whistleblowing System (WBS) as a medium for submitting known violations (complaints) to stakeholders. The WBS of OPPFMA still refers to the WBS of the Ministry of Finance.

WBS Kementerian Keuangan adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi individu yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

The Ministry of Finance's WBS is an application provided by the Ministry of Finance for individuals who have information and want to report an action that has the indication of violation that occurred within the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Penerapan WBS WBS Implementation

Semua laporan pelanggaran akan diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan/atau Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) yang merupakan pihak eksternal BPDPKS. Seluruh organ BPDPKS, yaitu Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh elemen maupun pegawai BPDPKS hingga pemangku kepentingan lainnya dapat melaporkan adanya pelanggaran. Sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran adalah Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pegawai.

All reports of violations will be forwarded to the Compliance and Risk Management Division and/or the Inspectorate of Investigation (IBI), which is an external party to the OPPFMA. All OPPFMA's organs, i.e. the Supervisory Board, the Board of Directors, and all elements and employees, as well as other stakeholders, can report violations. Meanwhile, parties that can be reported as offenders of violations are the Supervisory Board, Board of Directors, and all employees.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing Reporting Mechanism

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan Type of Violations to be Reported

Sistem pelaporan pelanggaran adalah sistem yang mengelola pengaduan, penyingkapan mengenai korupsi, kecurangan (fraud), pencurian, menyuap dan atau menerima suap, gratifikasi, benturan kepentingan, pembocoran rahasia BDPDKS, pelanggaran etika, penggelapan aset, penipuan, pemerasan, tindakan melanggar hukum dan kebijakan prosedur perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BDPDKS dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BDPDKS.

The Whistleblowing System (WBS) is a system that manages complaints/disclosures regarding corruption, fraud, theft, and/or bribery, gratuities, conflicts of interest, leakage of OPPFMA's secrets, ethical violations, asset fraud, fraud, extortion, acts of violation of law and policy or unlawful, unethical/improper conduct confidentially, anonymously, and independently. The WBS has the objective to optimize the participation of OPPFMA's Personnel and other parties to disclose violations that occur within OPPFMA.

Media Komunikasi dan Penyampaian Laporan Pelanggaran Communication Media and Submission of Violation Reports

BDPDKS memiliki 4 (lima) media komunikasi sebagai sistem saluran WBS dalam penyampaian Laporan pelanggaran atau pengaduan dari stakeholders, yaitu:

OPPFMA has four (4) communication media as a WBS channel system to deliver reports of violations or complaints from stakeholders:



Perlindungan Bagi Pelapor Whistleblower's Protection

Proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme, oleh karenanya BDPKKS mengatur kebijakan perlindungan terhadap pelapor yang meliputi aspek sebagai berikut:

1. Menjamin perlindungan kerahasiaan atas identitas dari pelapor dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang terjadi di BDPKKS dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya;
2. Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh BDPKKS. Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas ia juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini sebagai bukti komitmen BDPKKS dalam melindungi pelapor;
3. Perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya;
4. Pemecatan yang dilakukan secara tidak adil;
5. Penurunan jabatan atau pangkat;
6. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
7. Catatan yang merugikan dalam dokumen data pribadi pelapor (personal file record).

Selain itu, mengacu pada Pasal 5 PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, perlindungan diberikan kepada pelapor berupa:

1. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
2. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
3. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
4. Kerahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor;
5. Pemberian keterangan tanpa bertatap.

Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai UU No.13 tahun 2006.

The follow-up process for each complaint prioritizes confidentiality, the presumption of innocence, and professionalism. Therefore, OPPFMA's policy regulates the whistleblower's protection policy, which includes the following aspects:

1. Ensuring the confidentiality protection of the whistleblower and utilizing various means to maintain the confidentiality of the whistleblower's identity. This shall encourage reporting of violations that occur at OPPFMA and ensure the safety of the whistleblower and his family;
2. All reports of violations will be confidential and secure, guaranteed by OPPFMA. If the whistleblower includes his/her identity clearly, he/she is guaranteed the right to obtain information regarding the follow-up to the report. This is proof of OPPFMA commitment to protecting the whistleblower;
3. Protection from harmful records in whistleblower's data files;
4. Unfair dismissal;
5. Demotion of rank;
6. Harassment or discrimination in any form;
7. Adverse records in the personal data of the whistleblower (personal file record).

In addition, with reference to Article 5 PP No. 57 of 2003 on the Special Protection Procedures for Reporters and Witnesses in the Money Laundering Crime, protection is provided to the reporter in the form of:

1. Protection from criminal and/or civil charges;
2. Protection of personal safety and/or family of the Whistleblower from physical and/or mental threats;
3. Protection of the Whistleblower's assets;
4. Whistleblower's confidentiality and disguise of identity;
5. Provisions of information without meeting in person.

The Whistleblower may also ask for assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), in accordance with Law No. 13 of 2006.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing Reporting Mechanism

Kebijakan perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan merupakan laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan internal BDPKKS.

The policy for confidentiality and guarantee shall not be provided to Whistleblower who is proven to have made false and/or slanderous reports. If the investigation resulted in a false or slanderous Violation Report without a clear basis, the Whistleblower may be sued back or subject to sanctions in accordance with prevailing laws and regulations or OPPFMA's internal regulations.

Pihak Pengelola Pengaduan Reporting Management

BDPKKS telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur Nomor SOP-28/DPKS/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*) dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Melalui SOP tersebut, unit yang diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan pengaduan ialah Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

OPPFMA has issued Standard Operating Procedure No. SOP-28/DPKS/2020 dated 10 June 2020 on the Whistleblowing and Public Complaints within the Oil Palm Plantation Fund Management Agency. Through this SOP, the Compliance and Risk Management Division is authorized to manage complaints.

Sosialisasi WBS WBS Information Dissemination

Untuk memberikan pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan maupun pihak terkait lainnya untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran guna meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin muncul, BDPKKS senantiasa melakukan sosialisasi terkait WBS baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal.

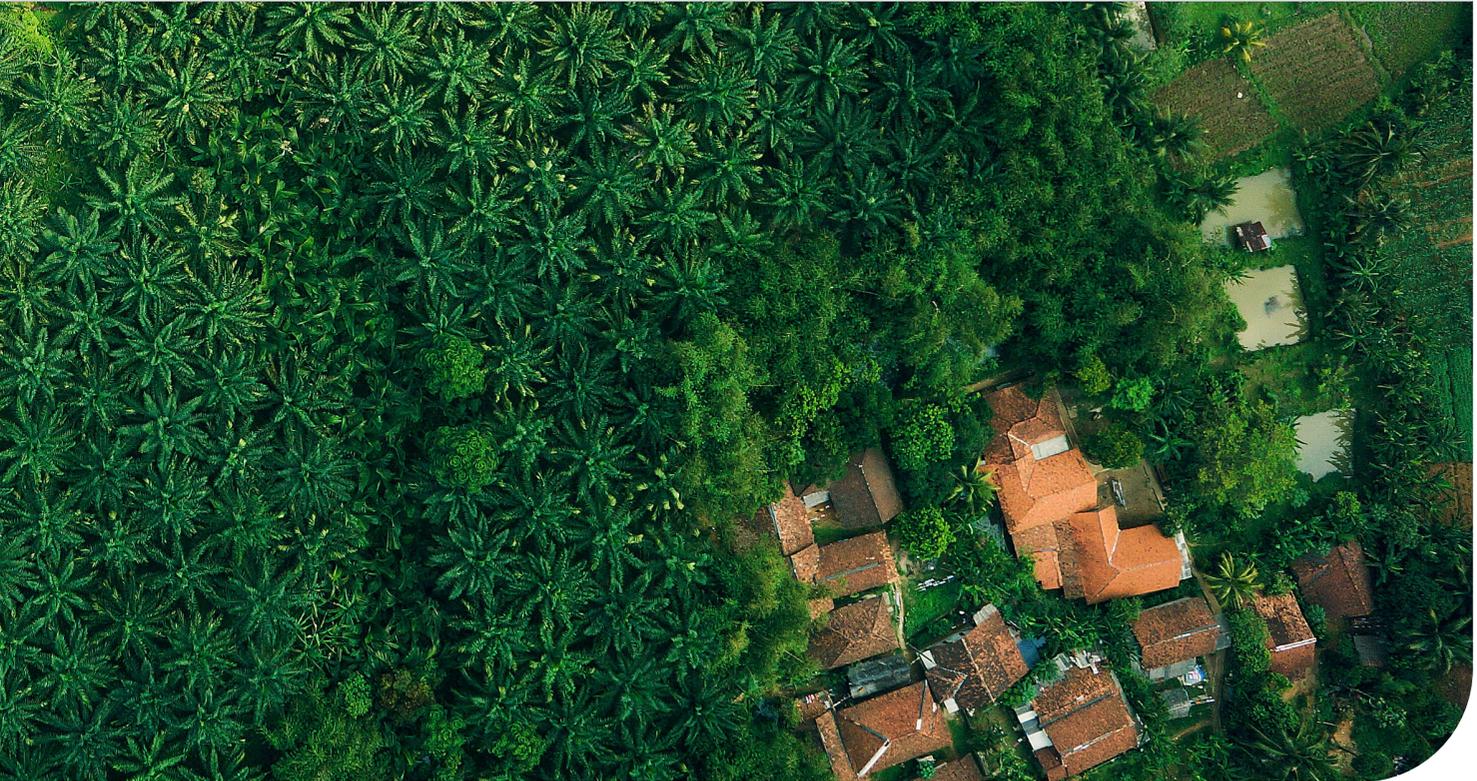
OPPFMA conducts socialization related to WBS to both internal and external parties to provide understanding and awareness to all employees and other related parties to report all forms of violations in order to minimize the occurrence of violations that may arise.

Sosialisasi WBS kepada pihak internal melalui pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi kode etik pada tanggal 29 Oktober 2019.

WBS dissemination to internal parties through the socialization was held simultaneously with the socialization of the Code of Conduct on 29 October 2019.

Sedangkan sosialisasi kepada pihak eksternal dilakukan pada saat melakukan kegiatan Dinas Luar (DL) pada masing-masing unit, seperti pada saat melakukan rapat koordinasi terkait dengan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pungutan ekspor kelapa sawit, pengembangan SDM sawit ataupun kegiatan sejenis lainnya.

Dissemination to external parties is carried out when conducting External Service (DL) activities in each unit, such as during coordination meetings related to biodiesel, small-scale palm oil Replanting, palm oil export levies, palm oil human resource development, or other similar activities.



Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya Number of Reports and Follow-Up

Selama tahun 2019, tidak terdapat pelaporan pelanggaran sehingga tidak ada informasi terkait dengan sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai.

During 2019, there were no reports of violations. Thus, there is no information regarding sanctions/follow-up on complaints that have been completed.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Whistleblowing System* Monitoring and Evaluation of Whistleblowing System

BPDPKS melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Pelaporan Pelanggaran secara berkala minimal satu tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan WBS. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direksi melalui Satuan Pemeriksa Internal atau dapat menggunakan pihak luar yang independen. Monitoring dan evaluasi diharapkan dapat meningkatkan implementasi WBS di lingkungan BPDPKS. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.

OPPFMA monitors and evaluates the Whistleblowing System regularly, at least once a year. This is conducted to ensure the effectiveness of WBS implementation. Monitoring and evaluation are carried out by the Board of Directors through the Internal Audit Unit or an independent external party. Monitoring and evaluation shall improve WBS implementation within OPPFMA. The monitoring and evaluation resulted in a written report to the Board of Directors.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Akuntan Publik Public Accountant



BDPKKS secara rutin menunjuk Auditor eksternal (independen) untuk melakukan audit terkait laporan Keuangan dan operasional BDPKKS guna memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatan dan kesesuaian laporan keuangan BDPKKS dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OPPFMA regularly appoints (independent) External Auditors to audit the OPPFMA's Financial Statements and Operational Report to provide independent and objective opinion regarding the fairness, compliance, and conformity of the OPPFMA's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and the prevailing laws and regulations.

Penunjukan Akuntan Publik dan Fee Audit Appointment of Public Accountant and Audit Fee

Pemilihan auditor eksternal telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan dilakukan melalui mekanisme tender pengadaan jasa audit, dengan peserta tender sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh BPDPKS. Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Pengawasan dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Dewan Pengawas sepakat menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan BPDPKS Tahun Buku 2019 dengan fee audit sebesar RpRp287.100.000.

The appointment of external auditors has met the provisions of the Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 on the Public Accountant Services, and is carried out through procurement by tender for audit services, with tender participants in accordance with the qualifications determined by OPPFMA. Public Accounting Firm (KAP) may only conduct an audit for a maximum of six (6) consecutive fiscal years, and Public Accountant shall only conduct an audit for a maximum of three (3) consecutive fiscal years.

The appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm shall be conducted by the Supervisory Board by taking into account the Audit Committee's recommendation. The Supervisory Board appointed KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan to conduct Audit of OPPFMA's Financial Statements for the 2019 Fiscal Year with an audit fee amounted to Rp287.100.000.

Informasi Akuntan Publik Public Accountant's Information

Informasi Akuntan Publik terkait Nama Akuntan, Nama Kantor Akuntan Publik, dan Jasa Lain yang Diberikan selama kurun waktu 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Public Accountant Information on the Accountant's Name, Public Accounting Firm's Name, and Other Services Provided during 2015 - 2019 can be referred to in the following table:

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Akuntan Publik Public Accountant

Tabel Auditor Eksternal BPDPKS Tahun 2015-2018
Table: OPPFMA's External Auditors in 2015-2018

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Publik Public Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jasa Lain Other Services	Opini Opinion	
2019	Eddy Rintis, SE, CPA	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tidak Ada None	Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	The attached financial statements presented fairly, in all material respects, or granted unqualified opinion for the financial position of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency as of 31 December 2018, as well as its financial activities and cash flows for the year ending on 31 December 2018, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2018	Eddy Rintis, SE, CPA	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tidak Ada None	Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	The attached financial statements presented fairly, in all material respects, or granted unqualified opinion for the financial position of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency as of 31 December 2018, as well as its financial activities and cash flows for the year ending on 31 December 2018, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2017	Eddy Rintis, SE, CPA	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tidak Ada None	Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 31 Desember 2017, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	The attached financial statements presented fairly, in all material respects, or granted unqualified opinion for the financial position of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency as of 31 December 2017, as well as its financial activities and cash flows for the year ending on 31 December 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Publik Public Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jasa Lain Other Services	Opini Opinion	
2016	Rudi M, Tambunan, CA, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Penyusun Pedoman Akuntansi Accounting Guidelines Formulation Laporan Financial Managerial Financial Managerial Report	Laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BLU-BDPKKS tanggal 31 Desember 2015, dan aktivitas usaha seta arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	The financial statements are presented with an unqualified opinion. The financial position of OPPFMA BLU as of 31 December 2015, and its business activities and cash flows for the year ending on 31 December 2015, are in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
2015	Rudi M, Tambunan, CA, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Tidak Ada None	Laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BLU-BDPKKS tanggal 31 Desember 2015, dan aktivitas usaha seta arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	The financial statements are presented with an unqualified opinion. The financial position of OPPFMA BLU as of 31 December 2015, and its business activities and cash flows for the year ending on 31 December 2015, are in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Jasa dan Fee Audit Lainnya Other Services and Audit Fee

Selama pelaksanaan audit, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tidak memberikan jasa lain kepada BDPKKS selain jasa audit, sehingga sangat independen dan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit telah dilaksanakan berdasarkan rencana, dan pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

During the audit, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan did not provide other services to OPPFMA apart from audit services. Thus, it was very independent and there was no conflict of interest during the audit process. Auditors conduct the audits based on the auditing standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. The audit has been carried out based on the plan, and testing the evidence that supports the amounts and disclosures in the Financial Statements.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Akuntan Publik Public Accountant

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Effectiveness of the External Audit

Guna memastikan pelaksanaan audit tidak menemui hambatan dan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan, SPI BDPDKS melakukan pendampingan audit dan melakukan monitoring tindak lanjut temuan atau rekomendasi dari yang diberikan oleh KAP. Selain itu Direksi juga secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal agar pelaksanaan audit berjalan efektif dan apabila terjadi kendala dalam obyek pemeriksaan dapat segera dicari solusi dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Direksi juga secara aktif melakukan pemantauan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Dewan Pengawas secara berkala.

The Internal Control Unit of OPPFMA conducts audit assistance and monitors the follow-up of findings or recommendations given by the KAP to ensure that the audit does not encounter any obstacles, and all findings can be followed-up in accordance with the authorities granted. In addition, the Directors actively coordinates and communicates with the external auditor, so the audit implementation functions effectively, and in the event of obstacle in the examination objects, the solution can be found quickly to overcome any existing problems. Directors also actively monitor the follow-up of external audit findings in every coordination meeting between the Board of Directors and the related work units, and report the follow-up action to the Supervisory Board regularly.

Direksi juga secara aktif melakukan pemantauan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Dewan Pengawas secara berkala.

Directors also actively monitor the follow-up of external audit findings in every coordination meeting between the Board of Directors and the related work units, and report the follow-up action to the Supervisory Board regularly.

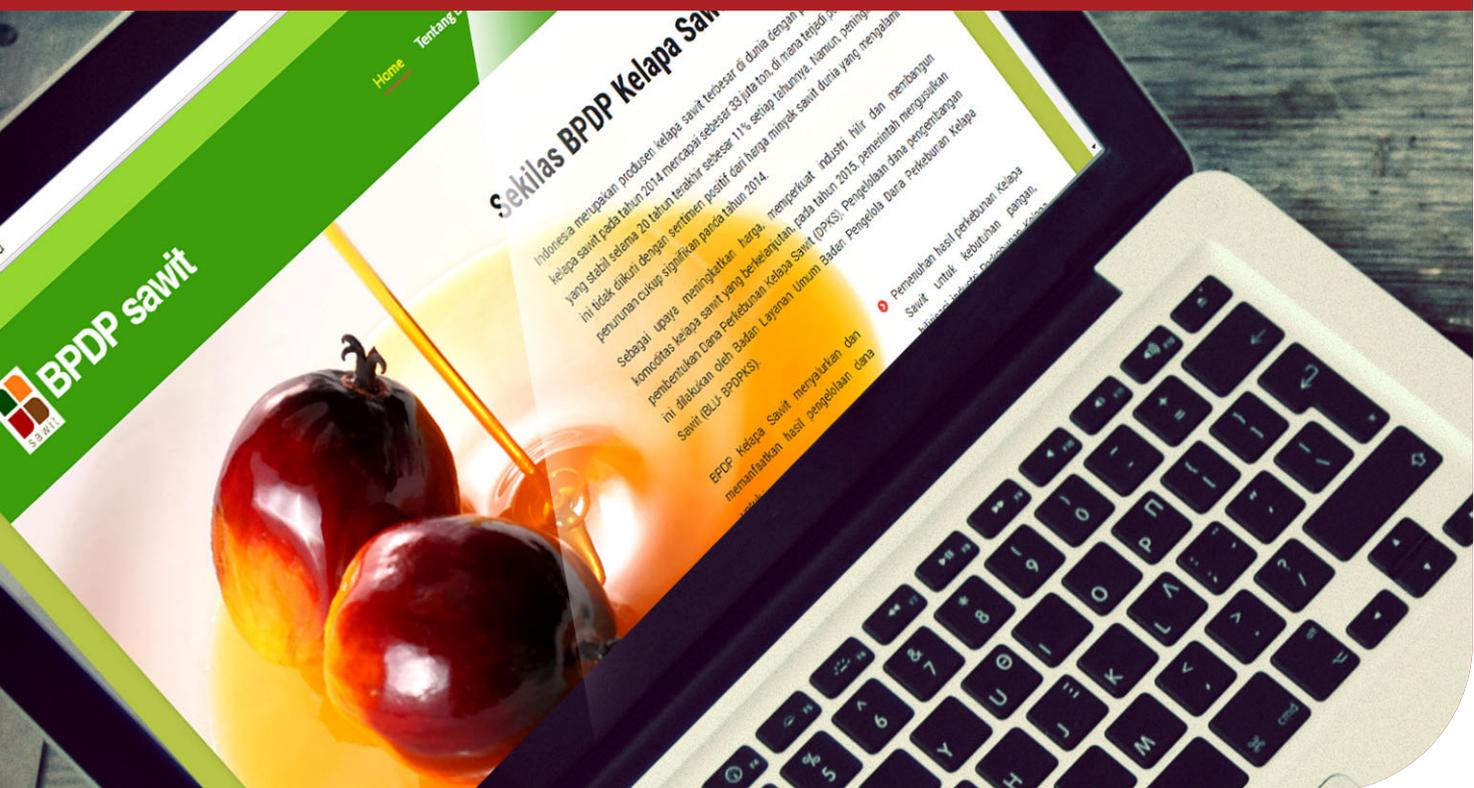


Akses Informasi dan Data BDPKKS

Access to OPPFMA's Information and Data

Ketersediaan informasi kepada segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum menjadi komitmen BDPKKS demi kelancaran komunikasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dari aspek transparansi dan keterbukaan informasi, untuk itu BDPKKS memiliki situs web resmi yang dapat diakses di <https://www.bdpd.or.id> yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

The availability of information to all stakeholders and the general public is OPPFMA's commitment to facilitating smooth communication in accordance with the good governance principle in terms of transparency and information disclosure. Thus, OPPFMA has an official website accessible at <https://www.bdpd.or.id>, available in Bahasa Indonesia and English.



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Akses Informasi dan Data BDPKKS Access to OPPFMA's Information and Data

BDPKKS merupakan unit organisasi non eselon berbentuk Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, sehingga untuk Kebijakan mengenai keterbukaan informasi BDPKKS masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tanggal 6 September 2019.

BDPKKS senantiasa memberikan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan pengelolaan media informasi BDPKKS. Kebijakan tersebut disusun untuk melindungi keamanan informasi dan memastikan BDPKKS mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara transparan dan fair sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BDPKKS is a non-echelon organizational unit in the form of a Public Service Agency, which is under and responsible to the Minister of Finance. Therefore, the policy regarding information disclosure of OPPFMA refers to the Minister of Finance Regulation No. 129/PMK.01/2019 on the Guidelines for Public Information Services by Information and Documentation Managing Officer within the Ministry of Finance, and Information and Documentation Managing Officer's Equipment within the Ministry of Finance dated 6 September 2019.

OPPFMA provides information in an integrated, timely, and targeted manner, in accordance with OPPFMA's information media management policy. The policy was formulated to protect information security and ensure that OPPFMA discloses information to interested parties transparently and fairly, in accordance with prevailing regulations.

Media Informasi dan Komunikasi Communication and Information Media

Akses informasi BDPKKS dapat dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Website BDPKKS <https://www.bdp.or.id>

yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta menyampaikan informasi mengenai:

- Tentang BDPKKS dengan konten Profil Manajemen, Profil BDPKKS dan Program
- Publikasi dengan konten Media Rilis, Info Grafis, Kegiatan yang dilengkapi dengan Video
- Berita dengan konten berita seputar kegiatan BDPKKS
- Pengumuman dengan konten pengumuman Pengadaan, Hasil Pengadaan, Prospek Perusahaan, Info Lowongan Kerja dan berita lainnya.
- Tentang Sawit dengan konten Energi, Kesehatan dan Nutrisi serta Sawit Berkelanjutan
- Statistik
- Riset dengan konten tentang Riset Bidang Bioenergi, Biomaterial, Pangan dan Kesehatan, pasca Panen Pengolahan, Budi Daya Lahan Tanah Bibit, Lingkungan serta Daftar Riset, Jurnal Riset dan Bidang Sosek/Bisnis/Pasar/IT
- Regulasi Sawit.

Access to OPPFMA's information can be conducted through the following media:

1. The OPPFMA's Website <https://www.bdp.or.id>

presented in Bahasa Indonesia and English, and conveys information regarding:

- About OPPFMA consisting of Management Profile, OPPFMA's Profile, and Program
- Publication consisting of Press Release, Infographic, Activities with Videos
- News consisting of news related to OPPFMA's activities
- Announcement consisting of Procurement Announcement, Procurement Result, Company's Prospect, Job Vacancies, and other news.
- About Palm Oil consisting of Energy, Health and Nutrition, and Sustainable Palm Oil
- Statistics
- Research consisting of Research in the Field of Bioenergi, Biomaterials, Food and Health, Post-Harvest Processing, Cultivation of Soil Seeds, Environment, and Research List, Research Journals, and Social and Economy/Business/Market/IT
- Palm Oil Rules and Regulations.



2. Press Release

Selama tahun 2019 BDPKKS telah menerbitkan siaran pers (press release) sebanyak dua kali yaitu:

1. BDPKKS Tandatangani Perjanjian Pembiayaan Insentif Biodiesel tanggal 16 Januari
2. Aplikasi PSR Online Tingkatkan Penyaluran Dana BDPKKS tanggal 17 Desember 2019

3. Surat Edaran

BDPKKS menggunakan surat edaran sebagai salah satu media komunikasi yang digunakan dalam rangka menyampaikan keputusan, peraturan, pemberitahuan dan lain-lain.

4. Forum Komunikasi Internal

BDPKKS menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi pegawai dengan manajemen yaitu sharing knowledge, siraman rohani, family gathering / team building yang dilaksanakan setiap tahun dll.

5. Laporan Tahunan

BDPKKS menyediakan sarana informasi melalui laporan tahunan yang menggambarkan kinerja BDPKKS. Laporan ini disusun setiap tahun dan disampaikan kepada seluruh stakeholders BDPKKS.

6. Media Sosial

BDPKKS juga menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi. Saat ini BDPKKS memiliki 4 (empat) akun media sosial antara lain:

2. Press Release

In 2019, the Company has issued two press releases:

1. OPPFMA Signed Biodiesel Incentive Financing Agreement on 16 January
2. PSR Online Application Increased OPPFMA's Fund Disbursement dated 17 December 2019

3. Circular Letter

OPPFMA uses circular letters as one of the communication media to convey decisions, regulations, notifications, etc.

4. Internal Communication Forum

OPPFMA provides a means of communication as a means of discussion for employees and management, i.e. sharing knowledge, spiritual sharing knowledge, annual family gathering/team building, etc.

5. Annual Report

OPPFMA provides a means of information through annual reports that describe the OPPFMA's performance. This report is prepared annually and submitted to all of OPPFMA's stakeholders.

6. Social Media

BDPKKS also uses social media as a communication channel to provide information. To date, OPPFMA has four(4) social media accounts:



Facebook
@bpdpsawit



Twitter
@bmdp_sawit



Instagram
@bdpkelapasawit



Youtube
BLU BDPDsawit

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

Dalam setiap aktivitasnya, BPDPKS selalu berupaya untuk mengimplementasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance/GG*), termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Implementasi GG dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan guna menjamin proses pengadaan barang dan jasa yang sehat, cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian.

In every activity, OPPFMA strives to implement Good Governance (GG), including in the process of procuring goods and services. In the process of procuring goods and services, GG is conducted to ensure a healthy, fast, flexible, efficient, and effective procurement of goods and services to not lose any business momentum which may cause losses.

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Policy of Procurement of Goods and/or Services

Kebijakan internal terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa, BPDPKS mengacu pada Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor 06/DPKS/2018 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan dan tata cara Pengadaan Barang / Jasa di lingkup BPDP Kelapa Sawit.

In terms of procurement of goods and/or services, OPPFMA refers to the internal policies, i.e. OPPFMA's President Director Regulation No. 06/DPKS/2018 dated 20 December 2020 on the Guidelines for the Procurement of Goods/Services at the Public Service Agency of Oil Palm Plantation Fund Management Agency. This regulation stipulates the provisions and procedures for the procurement of goods/services within OPPFMA.

Struktur Organisasi Organizational Structure

BPDPKS telah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang terdiri dari Kepala, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pemilihan dan Staf Pendukung. UKPBJ dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor 10/DPKS/KPA/2019 tentang Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Komposisi personil tim UKPBJ BPDPKS adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala UKPBJ;
2. 1 (satu) orang Sekretaris UKPBJ;
3. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) I : 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota:
 - Pengadaan dan/atau Penunjukan Langsung Barang dan/atau Jasa Lainnya diatas 50 s/d 500 juta;
 - Pengadaan dan/atau Penunjukan Langsung Jasa Konstruksi dan/atau Jasa Konsultansi diatas 50 s/d 300 juta;
 - Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko; dan
 - Direktorat Kemitraan.
4. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) II : 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota:
 - Pengadaan dan/atau Penunjukan Langsung Barang dan Jasa Lainnya diatas 50 s/d 500 juta;
 - Pengadaan dan/atau Penunjukan Langsung Jasa Konstruksi atau Jasa Konsultansi diatas 50 s/d 300 juta;
 - Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana;
 - Direktorat Penghimpunan Dana; dan
 - Direktorat Penyaluran Dana.
5. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) III : 1 (satu) ketua dan 4 (empat) anggota
 - Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi atau Konsultansi diatas 300 juta;
 - Penunjukan Langsung Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya diatas 500 juta; dan
 - Etendering/Tender/Seleksi.

OPPFMA has established a Procurement of Goods/Services Unit (UKPBJ), consisting of the Head, Secretariat, and Elected Working Group and Supporting Staff. UKPBJ was established based on the President Director Decree No. 10/DPKS/KPA/2019 on the Work Unit for the Procurement of Goods/Services in the Oil Palm Plantation Fund Management Agency.

The composition of OPPFMA's UKPBJ team personnel is as follows:

1. one (1) Head of UKPBJ;
2. one (1) Secretary of UKPBJ;
3. Elected Working Group (Elected Pokja) I: one (1) head and two (2) members:
 - Procurement and/or Direct Appointment of Goods and/or Other Services of 50 up to 500 million;
 - Procurement and/or Direct Appointment of Construction and/or Consultancy Services of 50 up to 300 million;
 - Directorate of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management; and
 - Directorate of Partnership.
4. Elected Working Group (Elected Pokja) II: one (1) head and two (2) members:
 - Procurement and/or Direct Appointment of Goods and Other Services of 50 up to 500 million;
 - Procurement and/or Direct Appointment of Construction or Consultancy Services of 50 up to 300 million;
 - Directorate of Fund Planning and Management;
 - Directorate of Funding; and
 - Directorate of Fund Disbursement.
5. Elected Working Group (Elected Pokja) III: one (1) head and four (4) members
 - Direct Appointment of Procurement of Construction or Consultancy Services above 300 million;
 - Direct Appointment of Procurement of Goods or Other Services above 500 million; and
 - E-tendering/Tender/Selection.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services

Tugas dan Kewenangan UKPBJ BDPKKS Duties and Authorities of OPPFMA's UKPBJ

Pokja Pemilihan UKPBJ BDPKKS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung pengadaan Jasa Konsultansi/Pekerjaan Konstruksi yang bernilai di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d paling tinggi Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d paling tinggi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- d. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- e. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

ULP BDPKKS mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pekerjaan yang akan dilakukan proses pengadaan;
2. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak kepada PPK;
3. Mengusulkan pemenang penyedia barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk paket pekerjaan yang bernilai diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) s/d Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);

The Elected Working Group of OPPFMA's UKPBJ has the following tasks:

- a. Preparing and conducting the Direct Procurement of Consultancy/Construction Services of Rp50,000,000 (fifty million rupiahs) up to Rp300,000,000 (three hundred million rupiahs);
- b. Preparing and conducting the Direct Procurement of Goods/Other Services of Rp50,000,000 (fifty million rupiahs) up to Rp300,000,000 (three hundred million rupiahs);
- c. Preparing and conducting the Direct Appointment of Construction/Consultancy Goods/Services above Rp50,000,000 (fifty million rupiahs);
- d. Preparing and conducting the Supplier's selection;
- e. Determining the appointed winner/Provider for the selection method:
 1. Tender/Direct Appointment/Direct Procurement for packages of Procurement of Goods/Construction/Other Services with a budget ceiling value of Rp50,000,000 (fifty million rupiah) up to Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah); and
 2. Selection/Direct Appointment/Direct Procurement for packages of Procurement of Consultancy Services with a budget ceiling value of Rp50,000,000 (fifty million rupiah) up to Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah). and

OPPFMA's ULP has the following authorities:

1. Reviewing the technical specifications and Owner Estimate (OE) of work to be carried out in the procurement process;
2. Proposing changes to the Owner Estimate (OE), Terms of Reference, Technical Specifications, and Contract Design to PPK;
3. Proposing the winner of the goods/services provider to the Budget User Proxy for work packages with a value of Rp10,000,000,000 (ten billion rupiahs) up to Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiahs);



4. Mengusulkan pemenang penyedia barang/jasa kepada Direktur Utama untuk paket pekerjaan yang bernilai diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) s/d Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 5. Mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
4. Proposing the winner of the goods/services provider to the President Director for work packages with a value of Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiahs) up to Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiahs);
 5. Proposing to the PA/KPA so that Goods/Services Providers who commit acts and actions such as fraud, forgery, and other violations to be subject to sanctions in the form of Black List.

Konsep Pengadaan Barang dan Jasa BDPKS

Concept of Procurement of Goods and Services at OPPFMA

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Principles of Procurement of Goods and Services

Pengadaan Barang dan Jasa di BDPKS dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

In OPPFMA, Procurement of Goods and Services is carried out with the following basic principles:



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services



Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Mechanism of Procurement of Goods and Services

Mengacu pada Peraturan Direktur Utama BDPKKS Nomor 06/DPKS/2018 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum BDPKKS, Proses pengadaan barang/jasa BDPKKS dilaksanakan melalui mekanisme Pemilihan Penyedia dan Swakelola.

Referring to OPPFMA's President Director Regulation No. 06/DPKS/2018 dated 20 December 2020 on the Guidelines for the Procurement of Goods/Services at the Public Service Agency of OPPFMA, the process of procuring goods/services in OPPFMA is carried out by Selection and Self-Managed mechanism.

1	PENGADAAN LANGSUNG DIRECT PROCUREMENT	Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pekerjaan Konstruksi/Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).	Selection method to obtain Other Goods/Services Providers with a value of at most Rp500,000,000 (five hundred million rupiahs) and Construction/Consultancy of at most Rp300,000,000 (three hundred million rupiahs).
2	PENUNJUKAN LANGSUNG DIRECT APPOINTMENT	Metode pemilihan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang berdasarkan keadaan tertentu atau kriteria khusus.	Selection method by directly appointing one (1) Provider of Goods/Services based on certain circumstances or special criteria.
3	E-PURCHASING E-PURCHASING	Tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.	Procedures for purchasing Goods/Services through an electronic catalog system.

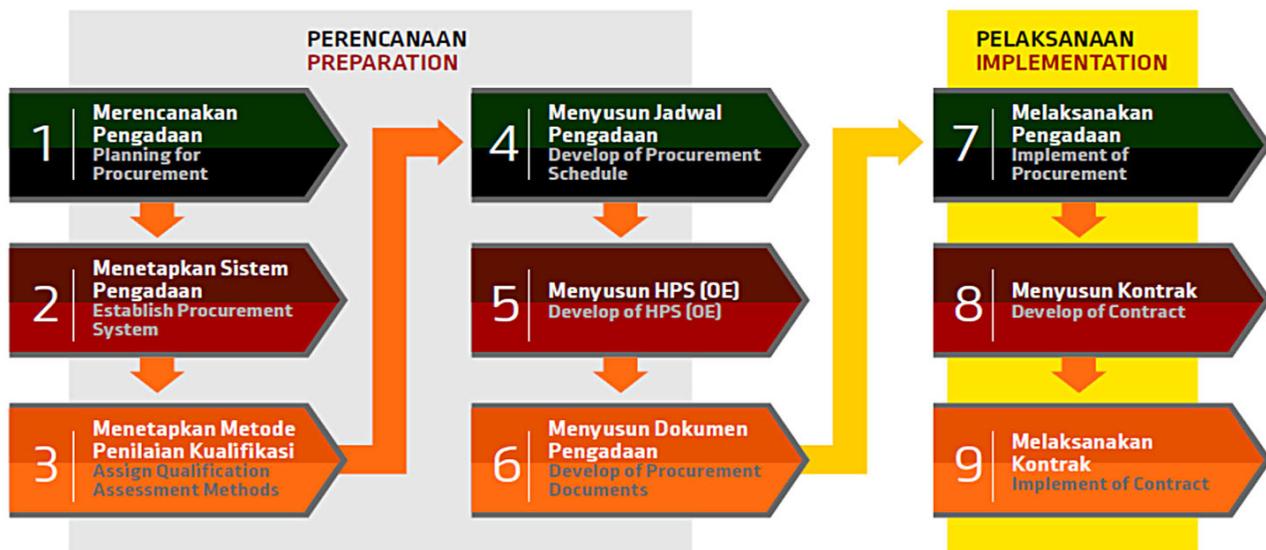


4 TENDER TENDER	Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.	Selection method to obtain Providers of Goods/Construction/Other Services.
5 SELEKSI SELECTION	Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.	Selection method to obtain Consultancy Service Provider.
6 SWAKELOLA SELF-MANAGED	Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat lain, Organisasi Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat.	Method to obtain goods/services which are carried out by the Ministries/Institutions/other Apparatus, Community Organizations, or Community Groups.

Siklus Proses Pengadaan Barang dan Jasa
 Process Cycle of Procurement of Goods and Services

Pengadaan adalah seluruh proses akuisisi dari pihak lain (termasuk aspek logistik) dan mencakup barang, jasa lainnya, jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi. Proses ini mencakup seluruh daur hidup sejak konsep awal dan penentuan kebutuhan hingga ke akhir masa manfaat atau akhir kontrak jasa. Siklus proses pengadaan barang dan jasa BDPKPS memiliki 9 (Sembilan) tahapan yang digambarkan dalam skema berikut ini :

Procurement is the entire acquisition process from another party (including logistical aspects) which includes goods, other services, consulting services, and construction work. This process covers the whole life cycle, starting from the initial concept and determination of requirements, to the end of the life or service contract. OPPFMA's goods and service procurement process cycle has nine (9) stages, which are described in the following scheme:



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Activity of Procurement of Goods and Services

Selama tahun 2019, Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan operasi BPDPKS adalah sebagai berikut:

During 2019, the number of procurement of goods and service that have been completed to meet OPPFMA's operational needs are as follows:

No	Metode Pelelangan Method Auction	Jumlah Total
1	Tender / Seleksi Tender/Selection	0 Paket Package
2	E-Purchasing E-Purchasing	0 Paket Package
3	Penunjukan Langsung Direct Appointment	153 Paket Packages
4	Pengadaan Langsung Direct Procurement	277 Paket Packages
5	Swakelola Self-managed	1 Paket Package
	Jumlah Total	431 Paket Packages



Sistem Manajemen Mutu Quality Management System

Dalam rangka menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan para stakeholder, BDPKKS telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 /PMK.05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

OPPFMA has implemented a Public Service Agency Financial Management Pattern using the Minimum Service Standards (SPM) in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 80/PMK.05/2016 on the Minimum Service Standards of Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) to ensure the suitability of the process and product to the stakeholders' needs or requirements.

SPM merupakan pedoman dalam memberikan layanan minimum yang diberikan kepada masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang dilaksanakan oleh BDPKKS. Dalam pelaksanaannya Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BDPKKS yang dilakukan oleh Direksi.

Kebijakan terkait Sistem Pelayanan Minimum BDPKKS, meliputi:

- a. Pengelolaan Dana;
- b. Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;
- d. Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan Turunannya;
- e. Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;
- f. Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- g. Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan
- h. Pelaksanaan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan.

SPM is a guideline in providing minimum services to the community for the management of sustainable palm oil development funds carried out by OPPFMA. In its implementation, the Supervisory Board supervises OPPFMA's management, which is carried out by the Board of Directors.

Policies related to OPPFMA's Minimum Service System include:

- a. Fund Management;
- b. Fund Disbursement for Human Resources Development;
- c. Fund Disbursement for Research and Development;
- d. Fund Disbursement for Promotion of Palm Oil and Its Derivatives;
- e. Fund Disbursement for Plantation Replanting;
- f. Fund Disbursement for Plantation Facilities and Infrastructure;
- g. Fund Disbursement for Biodiesel Financing; and
- h. General and Household Affairs.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Sistem Manajemen Mutu Quality Management System

Tujuan Sistem Pelayanan Minimum BPDPKS, antara lain:

1. Menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan; dan
3. Menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Objectives of OPPFMA's Minimum Service System are:

1. Ensuring the implementation of procedures for the management of palm oil plantation funds in a transparent and accountable manner in accordance with statutory provisions;
2. Ensuring the fulfillment of service quality in the management of sustainable palm oil development funds; and
3. Ensuring consistency in planning, implementing, monitoring, and evaluating the management of funds for sustainable palm oil development.

Pemantauan dan Evaluasi Monitoring and Evaluation

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pengembangan BPDPKS telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pemantauan yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi, dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima layanan.

Pelaksanaan pemantauan meliputi:

- Membandingkan layanan yang diberikan dengan indikator SPM yang ditetapkan;
- BLU BPDPKS yang berkoordinasi dengan unit/lembaga terkait;
- Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala.

Selanjutnya untuk melihat pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja BPDPKS, maka dilakukan evaluasi meliputi secara berkala dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan BPDPKS.

Monitoring is carried out to ensure that the OPPFMA's service development is carried out in accordance with the set standards. The monitoring methods include field visitation, documentation studies, and meetings with service providers and recipients.

Monitoring includes:

- Comparing service provided with the predetermined SPM indicator;
- OPPFMA BLU coordinates with related unit/institution;
- Monitoring is conducted regularly.

Further, regular evaluation is conducted by means of field visitation, interviews, observations, and documentation studies to understand the achievements and impacts of the programs based on the results of monitoring to improve OPPFMA's performance. The results of this evaluation are used as input to improve OPPFMA's service performance.



Teknologi Informasi Information Technology

Teknologi Informasi memegang peranan strategis untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan keamanan pengolahan data dan informasi. Selain itu, pengelolaan Teknologi Informasi yang baik juga dapat memberikan peningkatan efisiensi kelancaran proses bisnis yang efektif dan efisien. Hal ini mendorong BDPKS memanfaatkan Teknologi Informasi guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi.

Information Technology plays a strategic role in supporting the operational activities and security of data and information. In addition, good governance of Information Technology shall provide increased efficiency of effective and efficient business processes. This encourages OPPFMA to utilize Information Technology to provide the best service and minimize business operational risks that may be faced.



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Teknologi Informasi Information Technology

BDPKKS terus berupaya melaksanakan pengelolaan teknologi informasi secara optimal melalui penyusunan dan penerapan Road Map IT yang telah didesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya.

OPPFMA strives to implement information technology management optimally by preparing and implementing an IT Road Map that has been designed up to the data level and security system.

Pengelolaan Informasi Information Management

Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi BDPKKS dikelola oleh Divisi Umum dan SDM yang dipimpin oleh Bapak Suharman dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang pegawai.

OPPFMA's Information Technology Management function is managed by the General Affairs and HR Division, led by Mr. Suharman, assisted by three (3) employees.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Sistem Informasi Duties and Responsibilities of Information Technology Management

1. Mengkoordinir, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan transaksi elektronik yang terintegrasi dan mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BDPKKS;
 2. Mengkoordinir penyiapan data/informasi yang dibutuhkan baik untuk kepentingan pencatatan seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh BPDP Sawit maupun untuk menunjang kebutuhan laporan kepentingan internal maupun eksternal;
 3. Membuat dan menganalisa atas permintaan kebutuhan teknologi informasi pada setiap unit BDPKKS;
 4. Pengembangan SDM di Deputy Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan & Manajemen Risiko.
1. Coordinating, establishing, and developing integrated information systems and electronic transactions which cover all activities conducted by OPPFMA;
 2. Coordinating the data/information preparation, required for recording all OPPFMA's transactions, and supporting the needs of internal and external reports;
 3. Creating and analyzing requests for information technology necessity at each OPPFMA's unit;
 4. HR Development at the Deputy Directorate of Finance, General, Compliance & Risk Management.

Roadmap Teknologi Informasi Information Technology Roadmap

Target yang ingin dicapai oleh BDPKKS dari penerapan Teknologi Informasi untuk tahun 2019 adalah Peningkatan dan pemeliharaan sistem informasi/infrastruktur. Saat ini Teknologi Informasi BDPKKS masih berada pada tahap pengembangan sistem informasi dan infrastruktur. Roadmap Divisi Pengelolaan Sistem Informasi BDPKKS Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

In 2019, OPPFMA wants to achieve the improvement and maintenance of information/infrastructure systems in the Information Technology aspect. To date, OPPFMA's Information Technology is still in the stage of development for its information and infrastructure systems. The Roadmap for the 2016-2021 OPPFMA Information System Management Division is as follows:



SISTEM INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR INFORMATION AND INFRASTRUCTURE SYSTEMS

- Jaringan Wireless, Server File Sharing, Internet Provider, Ruang Server Operasional, PABX
- Server Anti Virus, Server Active Directory, Server Backup, Server Mgmt & Monitoring
- Lisensi Tambahan untuk Office 365, Call Center 14036
- Wireless Network, File Sharing Server, Internet Provider, Operational Server Room, PABX
- Anti Virus Server, Active Directory Server, Backup Server, Management & Monitoring Server
- Additional License for Office 365, 14036 Call Center

PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI/ INFRASTRUKTUR IMPROVEMENT AND MAINTENANCE OF INFORMATION /INFRASTRUCTURE SYSTEMS

- Dukungan berkelanjutan terhadap ERP Sistem
- Dukungan Sistem Operasional Harian
- Dukungan Infrastruktur Operasional
- Dukungan sistem untuk program-program Unit teknis
- Continuous support for ERP systems
- Daily Operational System Support
- Operational Infrastructure Support
- System support for Technical Unit programs

IMPLEMENTASI IT GOVERNANCE IT GOVERNANCE IMPLEMENTATION

- Standarisasi Prosedur dan Manajemen IT (ISO 20000)
- Standarisasi Keamanan Informasi (ISO 27001)
- Standardization of IT Management and Procedures (ISO 20000)
- Information Security Standardization (ISO 27001)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Divisi Pengelolaan Informasi Information Management Division Implementation Report

Sepanjang Tahun 2019, Divisi Umum dan SDM bagian Pengelolaan Informasi telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dengan Pusintek Kemenkeu dalam tata cara pengelolaan Arsitektur untuk Cloud Server BPDPKS dalam menjaga performance aplikasi Program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat);
2. Rapat Penyusunan SOP Pengembangan Perangkat Lunak.

During 2019, the Information Management of the General Affairs and Human Resources Division has carried out various activities as follows:

1. Coordination meeting with the Ministry of Finance's Financial Information System and Technology Centre in the architectural management procedures for the OPPFMA's Cloud Server to maintain the performance of PSR (Small-Scale Palm Oil Replanting) Program application;
2. Meeting to Prepare Software Development SOP.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Teknologi Informasi Teknologi Informasi

Pencapaian Pengembangan Sistem Informasi BDPKKS Tahun 2019

OPPFMA's Information System Development Achievement in 2019

1. Pendampingan pengembangan lanjutan Sistem Peremajaan Sawit Rakyat yang berfungsi sebagai pemberkasan dari proposal peremajaan kebun sawit dari lembaga pekebun serta persetujuan secara digital dengan alamat yang dapat diakses di <http://program-psr.bpdp.or.id>;
 2. Pengembangan lanjutan terhadap sistem rekonsiliasi data pungutan Ekspor Kelapa Sawit guna melakukan rekonsiliasi antara data rekening koran Bank dengan data LS dari Sucofindo;
 3. Telah diimplementasikan pembuatan Call Center 14036 dengan Operator Bersama Jasnita;
 4. Telah diimplementasikan Website informasi Program B20 Biodiesel dengan alamat yang dapat diakses di <http://b20.bpdp.or.id>;
 5. Pengembangan aplikasi Web Program Grant Riset Sawit untuk proses pendaftaran dan input proposal Riset pada tahap proses administrasi;
 6. Telah diimplementasikan Notifikasi SMS untuk informasi pembayaran yang telah disetujui oleh Bendahara Keuangan.
1. Assistance in the continuous development of the Small-Scale Palm Oil Replanting System functions as the archiving of palm oil plantation Replanting proposals from smallholders' organizations, as well as digital approval, accessible at <http://program-psr.bpdp.or.id>;
 2. Further development is planned to be the data reconciliation system for Palm Oil Export levies to reconcile the Bank's current account data with the LS data from Sucofindo;
 3. 14036 Call Center has been created, in coordination with Jasnita Joint Operator;
 4. Information website for the B20 Biodiesel Program has been launched, accessible at <http://b20.bpdp.or.id>;
 5. Development of the Palm Oil Research Grant Web Program for the registration process and proposal input for Researches is at the administrative stage;
 6. SMS notification has been implemented for payment information that has been approved by the Treasurer.

OPPFMA'S Governance
OPPFMA'S Social Responsibility
Audited Financial Statements

Background
Report to The Regulators and Stakeholders
OPPFMA'S Profile
Operational & Financial Performance Discussion and Analysis



**BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY**

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS

OPPFMA'S Social Responsibility



OPPFMA'S Governance
OPPFMA'S Social Responsibility
Audited Financial Statements

Background
Report to The Regulators and Stakeholders
OPPFMA'S Profile
Operational & Financial Performance Discussion and Analysis



**BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY**

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial BPDPKS OPPFMA's Social Responsibility Governance



**BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY**

BPDPKS berupaya memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan melalui program Tanggung Jawab Sosial untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Upaya ini ditempuh sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam mengoptimalkan nilai BPDPKS bagi Komite Pengarah dengan memperhatikan hak pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

"OPPFMA strives to provide benefits to all stakeholders through the Social Responsibility program to support the actualization of sustainable development. These efforts are part of the implementation of good corporate governance principles in optimizing OPPFMA's value for the Steering Committee with due regards to the stakeholders' rights to support sustainable development"

Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial Commitment to Social Responsibility

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial BPDPKS, yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan. *International Organization for Standardization (ISO)*, sebagai induk organisasi standarisasi Internasional dibidang industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance Standard on Social Responsibility*).

In Indonesia, regulators encourage the harmonization in the form of OPPFMA's Social Responsibility, which requires business entities to have policies and programs in terms of their commitment to developing sustainable relationships with stakeholders. The International Organization for Standardization (ISO), as the parent organization for International standardization in the industrial and commercial world, has released ISO 26000 on Guidance Standards on Social Responsibility.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial BDPDKS OPPFMA's Social Responsibility Governance

BDPDKS merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit, tidak terlepas hubungannya dengan berbagai *stakeholders*. BDPDKS menyadari bahwa kesinambungan dan pencapaian kinerja Badan ditentukan diantaranya oleh hubungan yang harmonis antara BDPDKS dengan *stakeholders*. Sejalan dengan visinya untuk menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia, BDPDKS berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*. Berangkat dari pemahaman tersebut, BDPDKS memandang tanggung jawab sosial sebagai wujud tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan.

BDPDKS bertekad merealisasikan program tanggung jawab sosial secara terpadu guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip praktik usaha yang baik, keadilan sosial dan keadilan lingkungan. Karena itu, BDPDKS bertekad untuk menjalankan program tanggung jawab sosial yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (*community development*). Dalam tata kelola keberlanjutan, BDPDKS juga telah menerapkan tanggung jawab sosial berbasis ISO 26000. *Core subject* ISO 26000 terdiri atas tata kelola, praktik ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan, prosedur operasi yang wajar, isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Strategi dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial oleh BDPDKS senantiasa disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BDPDKS. BDPDKS melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi BDPDKS, komunitas setempat, maupun masyarakat secara umum.

OPPFMA is a work unit at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the form of a Public Service Agency (BLU) to collect, administer, organize, store, and distribute palm oil plantation funds, notwithstanding its relationships with various stakeholders. OPPFMA understands continuity and achievement of the Agency's performance is determined, among others, by the harmonious relationship between OPPFMA and the stakeholders. In line with its vision to be a fund manager that plays a role in the development of sustainable palm oil as one of Indonesia's strategic commodities, OPPFMA is committed to providing the best service to stakeholders. From this understanding, OPPFMA views social responsibility as a form of responsibility towards all stakeholders.

OPPFMA is committed to actualizing integrated social responsibility programs to achieve sustainable development goals, in accordance with prevailing regulations and uphold the good practice principles, social justice, and environmental justice. Therefore, OPPFMA is determined to conduct social responsibility programs that emphasize more on sustainable community development. In sustainability governance, OPPFMA has also implemented ISO 26000-based social responsibility. The core subject of ISO 26000 consists of governance, employment practices, Human Rights (HAM), environment, fair operating procedures, consumer issues, and community involvement and development.

The strategies and policies governing the implementation of OPPFMA's social responsibility programs are constantly being refined by referring to Government Regulation No. 47 of 2012 on the Social and Environmental Responsibility of OPPFMA. OPPFMA carries out social responsibility in an effort to improve the quality of life and the environment that benefits the OPPFMA, the local community, and the people.

Metode dan Lingkup *Due Diligent* terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktifitas Badan

Due Diligence Methods and Scope related to the Social, Economic, and Environmental Impacts of the Agency's Activities

BPDPKS telah melaksanakan *due diligence* atas dampak sosial BPDPKS secara terintegrasi. *Due diligence* merupakan sebuah proses yang komprehensif dalam menilai dampak positif dan negatif keputusan dan kegiatan Badan yang dapat memengaruhi lingkungan hidup, ekonomi dan aspek sosial. BPDPKS menjalankan *due diligence* untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif agar BPDPKS tahu dampak positif apa yang perlu ditingkatkan dan dampak negatif apa yang harus dikurangi atau dihilangkan melalui kegiatan tanggung jawab sosial.

Untuk mendukung keberlanjutan bisnis BPDPKS terus melaksanakan aktivitas berkelanjutan sebagai tanggung jawab sosial BPDPKS yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada kegiatan yang dilakukan. Badan senantiasa memastikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial BPDPKS telah memenuhi prinsip:

1. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Memenuhi harapan para *stakeholder*;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Konsisten dengan norma perilaku internasional;
5. Terintegrasi ke seluruh kegiatan usaha dan hubungan kerjasama BPDPKS.

Metode dan lingkup uji tuntas terhadap dampak dari aktivitas operasional BPDPKS antara lain:

1. Menetapkan dan meninjau secara berkala kebijakan tanggung jawab sosial BPDPKS;
2. Menilai dampak sosial, ekonomi, Lingkungan kegiatan Badan (*Social Mapping* dan SAg);
3. Mengintegrasikan pengelolaan dampak tersebut ke dalam budaya Badan dan sistem manajemen dengan melibatkan dan membangun kesadaran kepada setiap unsur yang ada di BPDPKS akan pentingnya pengelolaan dampak risiko dari aktivitas BPDPKS; dan
4. Menetapkan indikator kinerja, melaporkan kinerja pelaksanaan, serta mengevaluasi indikator dan capaian kinerja tanggung jawab sosial BPDPKS.

OPPFMA has carried out an integrated due diligence on the OPPFMA's social impacts. Due diligence is a comprehensive process in assessing the positive and negative impacts of decisions and activities of the Agency, which may affect environmental, economic, and social aspects. OPPFMA performs due diligence to identify positive and negative impacts to understand positive impacts that need to be increased and negative impacts that must be reduced or eliminated through social responsibility activities.

OPPFMA strives to carry out sustainable activities as OPPFMA's social responsibility to provide positive impact and reduce the negative impact on the activities carried out to support its business sustainability. The Agency ensures that OPPFMA's social responsibility activities meet the following principles:

1. Contributing to sustainable development, including public health and welfare;
2. Meeting the expectations of the stakeholders;
3. Complying with laws and regulations;
4. Consistent with international standards;
5. Integrated into all business activities and cooperative relations of OPPFMA.

Methods and scope of due diligence on the impact of OPPFMA's operational activities include:

1. Establishing and periodically reviewing OPPFMA's social responsibility policies;
2. Assessing the social, economic, environmental impacts of the Agency's activities (*Social Mapping* and *Social Engineering*);
3. Integrating the impact management into the Agency's culture and management system by involving and building awareness to every OPPFMA's element in terms of the importance of managing the risk impacts of OPPFMA's activities; and
4. Establishing performance indicators, reporting implementation performance, and evaluating indicators and achievements of the OPPFMA's social responsibility performance.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial BPDPKS OPPFMA's Social Responsibility Governance

Dasar Hukum dan Pendekatan

Legal Basis and Approaches

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial BPDPKS berlandaskan pada beberapa aspek hukum dan pendekatan, di antaranya:

1. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Pelanggan;
5. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

OPPFMA's Social Responsibility program is implemented based on several aspects of the law and approaches, including:

1. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management;
2. Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety;
3. Law No. 13 of 2003 on Employment;
4. Law No. 8 of 1999 on Customer Protection;
5. Law No.5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Stakeholder Penting yang Terdampak atau Berpengaruh Pada Dampak dari Kegiatan Badan

Important Stakeholders Affected or Influenced by the Agency's Activities

Sesuai dengan hasil yang dilakukan, BPDPKS telah memetakan pemangku kepentingan yang berdampak dan terdampak dari aktivitas BPDPKS. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk dalam proses pemetaan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasi BPDPKS, dan respons BPDPKS terhadap dampaknya kepada pemangku kepentingan.

Untuk itu, BPDPKS mengintegrasikan *stakeholder engagement* ke dalam tata kelola dan seluruh kebijakan yang relevan dan/atau proses untuk pengambilan keputusan, pengembangan strategi, termasuk visi, misi, dan nilai yang mendasari strategi dan manajemen operasi. BPDPKS telah memetakan pemangku kepentingan yang terdampak dan berpengaruh pada kegiatan operasional BPDPKS melalui *stakeholder mapping* berdasarkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) BPDPKS terdiri antara lain:

In line with the results, OPPFMA has mapped the stakeholders impacted by OPPFMA's activities. The involvement of stakeholders is crucial in the mapping process. This relates to the impact arising from OPPFMA's operations and OPPFMA's response to its impact on the stakeholders.

As such, OPPFMA integrates stakeholder engagement into governance and all relevant policies and/or processes for decision making, strategy development, including the vision, mission, and values, that becomes the basis for operations' strategy and management. OPPFMA has conducted stakeholders mapping to map the affected and influential stakeholders in the OPPFMA's operational activities based on economic, social, environmental, and governance aspects. OPPFMA's stakeholders include:

Stakeholders penting Important Stakeholders

1 Komite Pengarah Steering Committee	5 Masyarakat Community
2 Pegawai Employee	6 Media Massa Mass Media
3 Pelanggan Customer	7 Rekanan/Mitra Kerja Partners
4 Pemasok Suppliers	8 Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia

Pengelolaan Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan atas Dampak Aktifitas Bisnis Perusahaan

Social, Economic, and Environmental Impact Management of the Company's Business Activities

Sesuai dengan hasil *due diligence* yang dilakukan, dalam menjalani kegiatan operasional BDPKKS terdapat beberapa dampak yang muncul dari aktivitas bisnis yang dijalani. Hal ini tentunya tidak hanya memberikan pengaruh kepada keberlangsungan BDPKKS secara materil, namun lebih jauh ada berbagai dampak yang ikut serta seiring terus berjalannya aktivitas tersebut dan keputusan yang diambil oleh BDPKKS. Dampak ini dapat mempengaruhi tercapainya tujuan yang menjadi komponen dalam proses pembangunan berkelanjutan. BDPKKS telah memetakan pemangku kepentingan yang berdampak dan terdampak dari aktivitas BDPKKS. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk dalam proses pemetaan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasi, dan respon BDPKKS terhadap dampaknya kepada pemangku kepentingan.

Based on the results of due diligence, there are several impacts that arise from OPPFMA's operational activities. This certainly does not only impact OPPFMA's sustainability materially, but also impacts further as OPPFMA continues its activities and decision-making. This impact can affect the achievement of objectives as the components in the sustainable development. OPPFMA has mapped the stakeholders impacted by OPPFMA's activities. The involvement of stakeholders is crucial in the mapping process. This relates to the impact arising from OPPFMA's operations and responses to its impact on the stakeholders.

Isu-Isu Penting Terkait Dampak Aktivitas BDPKKS

Important Issues Related to the Impact of OPPFMA's Activities

BDPKKS menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki dampak luas demi kebaikan bersama, dan mencegah penyaluran dana untuk kegiatan usaha yang mungkin memiliki dampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Dalam menjalani kegiatan bisnis BDPKKS, terdapat beberapa risiko yang akan berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat, lingkungan hidup, dan juga perekonomian secara umum. Isu-isu tersebut antara lain:

OPPFMA collaborates with various parties with wide impacts for the common good, and prevents the fund disbursement for business activities that may have direct and indirect negative impacts on the environment. In carrying out the business activities of OPPFMA, there are several risks that will have an impact on the conditions of the community, the environment, and the economy in general. These issues are:

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial BDPKKS OPPFMA's Social Responsibility Governance

Aspek Aspect		Isu-Isu Penting Sosial Ekonomi dan Lingkungan Important Social, Economic, and Environmental Issues	
Lingkungan Hidup	Environment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran Air; 2. Pencemaran Limbah B3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Water Pollution; 2. B3 Waste Pollution.
Pengembangan Sosial dan Masyarakat	Social and Community Development	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kerja; 2. Bantuan Tanggung Jawab Sosial; 3. Masalah Lingkungan; 4. Bantuan Pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Employment; 2. Social Responsibility Assistance; 3. Environmental Problems; 4. Educational Assistance.
Kenetagakerjaan dan K3	Employment and OHS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Kesehatan Tenaga Kerja; 3. Keselamatan Kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compliance with prevailing laws and regulations; 2. Employment Health; 3. Occupational Safety.
Konsumen	Customer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sosialisasi layanan dan produk; 2. Peningkatan kualitas produk dan layanannya; 3. Pemberian layanan dengan standar kualitas yang baik kepada pelanggan internal maupun eksternal; 4. Menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Pemenuhan komitmen BDPKKS atas harga, waktu, dan kualitas pelayanan; 6. Penerimaan, pelayanan, dan penanganan pengaduan pelanggan atas kinerja BDPKKS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Service and product socialization improvement; 2. Quality of products and services improvement; 3. Providing services with good quality standards to internal and external customers; 4. Respecting customer rights in accordance with applicable laws and regulations; 5. Fulfilling OPPFMA's commitment to price, time, and quality of service; 6. Receiving, servicing, and handling customer complaints regarding OPPFMA's performance.
HAM	Human Rights	Penguatan hubungan industri melalui penghargaan terhadap HAM dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Strengthening industrial relations through respect for human rights and obligations in accordance with applicable regulations.
Operasi yang Adil	Fair Operations	Kompetensi profesional dan integritas yang diandalkan dalam kegiatan bisnis BDPKKS.	Professional competence and integrity that are reliable in OPPFMA's business activities.
Anti Korupsi	Anti-Corruption	BDPKKS tidak menoleransi korupsi maupun fraud dalam bentuk apapun. Selama ini BDPKKS telah konsisten menerapkan anti-korupsi hingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas tinggi.	OPPFMA does not tolerate corruption or fraud in any form. To date, OPPFMA consistently implements anti-corruption to create a clean and high-integrity work environment.



Tanggung Jawab Sosial Bpdpks Merupakan Kewajiban Maupun Yang Melebihi Kewajiban

OPPFMA's Social Responsibility Obligation and Exceeding Obligation

BPDPKS juga melakukan review terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting tanggung jawab sosial. BPDPKS telah melaksanakan tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban dan yang melebihi kewajiban dengan baik. Peraturan-peraturan yang telah dipatuhi oleh BPDPKS antara lain sebagai berikut:

OPPFMA reviews all regulations related to key social responsibility issues. OPPFMA has carried out social responsibility which is its obligation and which exceeds its obligation properly. OPPFMA has complied with the following regulations:

Kegiatan Activity		Dasar Regulasi Regulation	
Ketenagakerjaan	Employment	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Law No. 13 of 2003 on Manpower
Keselamatan Kerja	Occupational Safety	Undang-Undang No.01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Law No. 1 of 1970 on the Occupational Health and Safety, and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 50 of 2012 on the Implementation of Occupational Health and Safety Management System
Lingkungan Hidup	Environment	Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.
Program Anti Korupsi	Anti-Corruption Program	Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Law No. 20 of 2001, on the Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Corruption Eradication.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial BDPDKS OPPFMA's Social Responsibility Governance

Informasi Tentang Strategi Dan Program Kerja BDPDKS Dalam Menangani Isu-Isu Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Dalam Upaya *Stakeholders Engagement* dan Meningkatkan *Value* Untuk *Stakeholder* dan *Shareholder*

Information About OPPFMA's Strategies and Work Programs in Handling Social, Economic, and Environmental Issues in the Efforts to Engage Stakeholders and Enhance Value for Stakeholders and Shareholders

Dalam membangun relasi dengan pemangku kepentingan, BDPDKS menggunakan dasar kedekatan (*proximity*) dan tingkat kepentingan (*level of interest*) sebagai dasar penentuan pemangku kepentingan BDPDKS. Secara internal, hubungan dibangun melalui berbagai saluran komunikasi untuk berinteraksi, seperti melalui surat elektronik dan rapat berkala. Secara eksternal, BDPDKS terlibat dengan klien dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan BDPDKS sehari-hari, serta di berbagai keanggotaan dan asosiasi industri. Melalui proses pendekatan yang dilakukan pada pemangku kepentingan, BDPDKS dapat menggali informasi yang menjadi topik kunci dan hal-hal yang menjadi kekhawatiran pemangku kepentingan.

In building relationships with stakeholders, OPPFMA uses the proximity and level of interest as the basis for determining OPPFMA's stakeholders. Internally, relationships are built through various interactive communication channels, such as electronic mail and regular meetings. Externally, OPPFMA engages with clients and other stakeholders through the day-to-day activities of OPPFMA, as well as in various industry memberships and associations. Through an approach to stakeholders, OPPFMA can gather the information that is key topics and concerns to stakeholders.

Informasi Tentang Berbagai Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal BDPDKS yang Relevan Dengan Bisnis yang Dijalankan

Programs that Exceed the Minimum Obligations of OPPFMA Relevant to the Business

Inisiatif-inisiatif BDPDKS yang melebihi tanggung jawab minimal adalah melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman mereka tentang dampak lingkungan, baik dampak langsung maupun tidak langsung dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan terkait. Tanggung jawab sosial untuk keberlanjutan mencakup komitmen untuk dapat memberi *value* dan dampak positif di manapun BDPDKS beroperasi. BDPDKS memiliki kebijakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar BDPDKS beroperasi. Dalam setiap pengerjaan kegiatan BDPDKS, BDPDKS selalu berupaya untuk mencapai kualitas maksimal, dan tanggung jawab untuk keberlanjutan.

OPPFMA's initiatives exceeded the minimum responsibility by involving stakeholders to ensure their understanding of direct and indirect environmental impacts, and contributing to the establishment of the public policies and related regulations. Sustainability responsibility covers a commitment to providing positive value and impact wherever OPPFMA operates. OPPFMA has the policy to implement social responsibility to the environment and the communities surrounding its operations. In every OPPFMA's activities, OPPFMA strives to achieve maximum quality and sustainable responsibility.



Pengukuran Capaian Program Tanggung Jawab Sosial

Assessment of the Social Responsibility Programs

Untuk mengukur seberapa tepat capaian BDPKKS dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dibandingkan dengan dampak yang ada dari kegiatan bisnis BDPKKS, maka dibuatlah laporan untuk mereview hasil realisasi program tanggung jawab sosial. Hal ini bertujuan agar apa yang telah direncanakan oleh pihak manajemen dapat lebih terukur dan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai pelaksanaan program tanggung jawab sosial kedepan. Pengukuran ini akan menimbulkan kesinambungan antara program tanggung jawab sosial yang terealisasi saat ini dengan rencana program tanggung jawab sosial ditahun berikutnya. Sehingga kedepannya diharapkan akan menjadi sebuah program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

OPPFMA compiled a report to review the realization of the social responsibility program to assess OPPFMA's achievements in the social responsibility program compared to the impacts of OPPFMA's business activities. The report has the objective to measure the planned social responsibility program implementation and to evaluate the future social responsibility program. This assessment will synchronize current social responsibility programs and the forecasted social responsibility programs for the following year. Therefore, it is expected that the social responsibility program will be sustainable.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPPPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPPPKS
Tanggung Jawab Sosial BPPPKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia

Social Responsibility to Human Rights



BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

OIL PALM PLANTATION
FUND MANAGEMENT
AGENCY

BDPKS menghormati Hak Asasi Manusia dan memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi HAM. BDPKS senantiasa berupaya memenuhi HAM dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku secara universal serta ketentuan BDPKS.

OPPFMA respects Human Rights and commits to upholding Human Rights. OPFMA strives to fulfill human rights by referring to the universally applicable provisions as well as OPFMA's provisions.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Core Subject Hak Asasi Manusia

Commitment and Policies of Corporate Social Responsibility to Human Rights

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan Sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, HAM mencakup hal-hak terkait analisa dampak keputusan dan kegiatan, situasi berisiko terkait HAM, menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, diskriminasi dan kelompok marjinal, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

Human Rights (HAM) are inherent, irrevocable, universal, inseparable, and interdependent rights associated with the Second Principle (Sila) of Pancasila, i.e. Just and Civilized Humanity. In ISO 26000 on Guidelines for Social Responsibility, human rights cover rights related to the analysis of the impact of decisions and activities, risky situations related to human rights, collusion avoidance, complaints handling, discriminated and marginalized groups, civil and political rights, economic, social, and cultural rights, and basic principles and rights at the workplace.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia Social Responsibility to Human Rights

BDPKKS menghormati Hak Asasi Manusia dan memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi HAM. BDPKKS senantiasa berupaya memenuhi HAM dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku secara universal serta ketentuan BDPKKS. Pemenuhan HAM di BDPKKS juga ditujukan untuk membangun citra BDPKKS dan menjadi daya tarik bagi investor, mitra kerja dan calon karyawan. Selain itu, BDPKKS juga menjamin terpenuhinya hak dasar tersebut bagi seluruh Pelanggan dan pihak terkait lainnya. Pemenuhan HAM di BDPKKS juga ditujukan untuk membangun citra BDPKKS dan menjadi daya tarik bagi mitra kerja dan calon karyawan.

OPPFMA respects Human Rights and commits to upholding Human Rights. OPFFMA strives to fulfill human rights by referring to the universally applicable provisions as well as OPFFMA's provisions. The fulfillment of human rights in OPFFMA has the objective to establish its image and attract business partners and prospective employees. In addition, OPFFMA guarantees the fulfillment of these basic rights for all Customers and other related parties. The fulfillment of human rights in OPFFMA has the objective to establish OPFFMA's image and attract business partners and prospective employees.

Rumusan BDPKKS Lingkup Tanggung Jawab Sosial Core Subject Hak Asasi Manusia

OPPFMA's Formulation on the Scope of Social Responsibility to Human Rights

Rumusan BDPKKS dalam lingkup hak asasi manusia adalah tanggung jawab BDPKKS untuk menghormati. BDPKKS dituntut untuk tidak melanggar hak asasi seseorang dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional BDPKKS. Lingkup tanggung jawab sosial BDPKKS terkait hak asasi manusia antara lain pemangku hak di tempat kerja dan pemangku hak di komunitas yang berpotensi terkena dampak negatif dari kegiatan BDPKKS. Beberapa pendekatan ini dilaksanakan sebagai upaya membahas isu-isu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka perlindungan hak pegawai termasuk aspek HAM. Beberapa isu tersebut antara lain jenjang karir dan penilaian kinerja yang jelas, setara dan tidak ada praktik diskriminasi; kesejahteraan pegawai beserta keluarga terjamin; serta suasana kerja yang kondusif, sehat, dan aman.

OPPFMA's formulation in terms of human rights is OPFFMA's responsibility to respect. OPFFMA shall not violate a person's human rights, which shall be conducted by avoiding, reducing, or preventing the negative impacts of the OPFFMA's operations. The scope of OPFFMA's social responsibility related to human rights includes the rights of the stakeholders at working place and the community who are potentially affected negatively by OPFFMA's activities. Several of these approaches are implemented as an effort to discuss issues of Human Resource (HR) management in the framework of protecting employee rights, including human rights. Some of these issues include transparent and equal career paths and performance assessments with no discriminatory practices; guaranteed employee and family welfare; as well as a conducive, healthy, and safe working atmosphere.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Planning of the Social Responsibility to Human Rights

Rencana BDPKKS terkait penerapan tanggung jawab sosial *core subject* hak asasi manusia sejalan dengan komitmen BDPKKS dan setiap unsur di lingkungan BDPKKS. Dalam kaitan perencanaan pada aktivitas bisnis yang mencerminkan lingkup *core subject* hak asasi manusia secara eksplisit dituangkan dalam Rencana Kerja BDPKKS. BDPKKS menargetkan untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

OPPFMA's plan related to the social responsibility of human rights core subject is in line with OPFFMA's commitment and every element within OPFFMA. The planning of business activities that reflect the human rights core subject is stipulated in OPFFMA's Work Program. OPFFMA targets to always carry out human rights principles.



Hal ini ditujukan untuk membina hubungan secara proporsional serta menciptakan hubungan yang sinergis, *mutual understanding, mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit*. Selain itu, kegiatan tanggung jawab terkait dengan hak asasi manusia diharapkan akan membawa dampak positif bagi peningkatan produktivitas dan kinerja BDPKKS, sehingga pada akhirnya dapat membawa pengaruh kepada peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan harapan *stakeholder*.

The objective is to establish proportional relationships and create synergistic relationships with mutual understanding, respect, trust, and benefits. In addition, social responsibility activities related to human rights shall have a positive impact to enhance OPPFMA's productivity and performance, thereby influencing the improvement of employee welfare in accordance with stakeholders' expectations.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia Initiative Implementation of the Social Responsibility to Human Rights

Melalui Laporan Tahunan BDPKKS menginformasikan realisasi dari kegiatan yang telah diimplementasikan berkaitan pelaksanaan inisiatif tanggung jawab sosial bidang HAM BDPKKS telah merumuskan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan aspek HAM. BDPKKS berkomitmen untuk dapat memenuhi berbagai ketentuan terkait HAM, baik yang berlaku bagi karyawan maupun masyarakat. Pemenuhan ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

OPPFMA Annual Report discloses the activities that have been implemented in terms of social responsibility initiatives in the field of human rights. OPFMA has formulated several activities related to human rights. OPFMA is committed to fulfilling various human rights-related provisions that apply to both employees and the community. The provisions are fulfilled as follows:

1

HAK UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI, MINAT DAN BAKAT
 THE RIGHT TO DEVELOP POTENTIAL, INTERESTS, AND TALENTS

Setiap karyawan berhak untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat yang ada didalam dirinya. Hak dasar ini diatur didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 21 Tahun 2000 serta didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 12 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut menjelaskan jika setiap karyawan berhak untuk mengembangkan potensi kerja dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat yang dimiliki. Selain itu didalam Undang-Undang tersebut, pemerintah juga menjelaskan jika setiap karyawan mempunyai hak untuk terlindungi dari tindak kejahatan asusila.

Every employee has the right to develop their potential, interests, and talents. These basic rights are regulated in Law of Employment No. 21 of 2000, and Law of Employment No. 12 of 2003. The Laws stipulate that every employee has the right to develop work potential and has the opportunity to develop their interests. In addition, the Laws set forth that every employee has the right to be protected from immoral crime.

2

HAK UNTUK MENDAPAT JAMINAN SOSIAL, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
 THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY, HEALTH, AND OCCUPATIONAL SAFETY

Didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1993, Peraturan Menteri No 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, pemerintah menjelaskan mengenai hak dasar yang diperoleh oleh setiap karyawan yaitu jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

In the Minister of Manpower Regulation No. 4 of 1993, Minister Regulation No. 1 of 1998, and Law No. 13 of 2003, the Government set the rights of every employee, i.e. health insurance, pension insurance, life insurance, and occupational accident insurance.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia Social Responsibility to Human Rights

3 HAK UNTUK MENDAPATKAN UPAH LAYAK THE RIGHT TO ELIGIBLE WAGES

Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku pada provinsi, kota atau kabupaten tempat BDPKKS berdiri. Selain itu BDPKKS juga diwajibkan untuk meninjau besaran upah setiap pergantian tahun agar upah yang didapat oleh karyawan tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan BDPKKS tidak boleh bertindak diskriminatif kepada setiap karyawan maupun karyawan. Aturan tersebut tertuang didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Every employee is entitled to obtain decent wage in accordance with the Minimum Wage provisions applied in the province, city, or regency where OPPFMA operates. In addition, OPPFMA shall review the amount of wages every year so that the wages earned by employees remain sufficient to meet their needs. OPPFMA shall not discriminate based on gender. The regulation is stipulated in the Law of Employment No. 13 of 2003.

4 HAK UNTUK CUTI, ISTIRAHAT DAN MEMPEROLEH PEMBASTAN WAKTU KERJA THE RIGHT TO LEAVE, REST, AND WORKING TIME LIMIT

BDPKKS wajib memberikan kompensasi apabila karyawan bekerja diluar jam kerja yang telah ditentukan dengan memberikan upah lembur. Selain itu karyawan juga mendapatkan hak untuk dapat menjalankan ibadah keagamaan seperti sholat, sembahyang dan lainnya sesuai dengan agama yang dianutnya.

OPPFMA shall provide compensation if the employee works in addition to the predetermined working hours by giving overtime pay. Also, employees have the right to be able to carry out religious worship, such as prayer, and other forms of worship in accordance with their religion.

5 HAK SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA SOCIAL, ECONOMIC, AND CULTURAL RIGHTS

BDPKKS sangat menghormati Hak Masyarakat Adat memberikan dukungan penuh bagi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Melalui Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis BDPKKS menerapkan standar terkait penghormatan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan mempertimbangkan 3 kemampuan BDPKKS, BDPKKS berkomitmen untuk melaksanakan program sosial kemasyarakatan dengan cara:

1. Memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan mengacu pada prosedur dan kebijakan BDPKKS.
2. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras, golongan dan/atau alasan apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan dan/atau kegiatan-kegiatan usaha kecil dan menengah.

OPPFMA highly respects the Rights of Indigenous Peoples to fully support the economic, social, and cultural development of the community. OPPFMA applies standards to respecting the economic, social, and cultural rights of the community in the Code of Conduct, in accordance with the mandate of Limited Liability Companies Law No. 40 of 2007, and with due regards to 3 OPPFMA's capabilities, OPPFMA is committed to implementing social responsibility programs by:

1. Providing assistance to the community in accordance with their needs and abilities with reference to OPPFMA's procedures and policies.
2. Not taking actions that lead to community discrimination based on ethnicity, religion, race, class, and/or any reason that is contrary to prevailing laws and regulations.
3. Empowering communities through education and skills and/or small and medium business activities.



6

PENCEGAHAN PRAKTIK TENAGA KERJA ANAK DAN KERJA PAKSA
PREVENTION OF CHILD LABOR AND FORCED LABOR

Dalam proses rekrutmen, BPDPKS memastikan bahwa tidak adanya praktik mempekerjakan anak dibawah umur. Hal ini telah dijelaskan BPDPKS dalam proses rekrutmennya bahwa persyaratan untuk pelamar yaitu minimal pendidikan SLTP yang telah berusia 18 tahun. Hal ini merupakan bentuk komitmen kepatuhan BPDPKS terhadap Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab X Pasal 68 tentang larangan mempekerjakan anak.

Selain terkait larangan mempekerjakan anak, BPDPKS juga memperhatikan batas-batas waktu bekerja karyawan sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 Pasal 77 dan Pasal 78. Hal ini bertujuan agar karyawan tidak merasa terpaksa bekerja, dan mendapat haknya jika melakukan pekerjaan diluar batas yang seharusnya. Penyesuaian antara upah jam kerja normal dan jam kerja lembur telah dijelaskan dalam pasal ini. BPDPKS juga telah berkomitmen untuk memberikan hak karyawan sesuai dengan apa yang telah dilakukan jika mereka bekerja diluar jam batas normal, dengan melakukan penyesuaian penghasilan dan program productivity reward.

In the recruitment process, OPFFMA ensures that the Company does not employ any minors. This has been explained by OPFFMA in its recruitment process. The applicants must be at least 18 years with junior high school diploma. This is OPFFMA's commitment to compliance with Law No. 13 of 2003 on Employment, Chapter X Article 68, on the prohibition of child labor.

In addition to the prohibition of child labor, OPFFMA takes into account the working time limits, in accordance with Law No. 13 of 2003 Articles 77 and 78 The objective is to ensure that employees do not feel forced to work, and shall be able to exercise their rights if working outside the working hours limit. The article also stipulates adjustments for normal hours and overtime hours. OPFFMA is also committed to providing employees their rights in accordance with the overtime hours, by conducting income adjustments and productivity reward programs.

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran HAM
Human Rights Violations Complaints Procedure and Mechanism

Jika terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh BPDPKS, Karyawan maupun masyarakat umum dapat melakukan pelaporan dengan menggunakan mekanisme WBS. BPDPKS akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk sesuai dengan kapasitasnya.

In the event of any violations of human rights committed by OPFFMA, Employees and the public can report the violation by using the WBS mechanism. OPFFMA will follow-up on every incoming report in accordance with its capacity.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia Social Responsibility to Human Rights

Dampak Kegiatan dan Pencapaian Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia Social Responsibility Activities Impact and Achievements in Human Rights

Berkat implementasi dan pengawasan yang baik, sepanjang tahun 2019 BPDPKS tidak pernah mendapat teguran dan sanksi dari pihak berwenang terkait pelanggaran hak asasi manusia seperti pengaduan tindakan diskriminasi, insiden pelanggaran maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkungan BPDPKS serta insiden kerja paksa yang dialami pekerja BPDPKS. Disamping itu tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh BPDPKS terkait dengan gugatan masyarakat terkait pelanggaran HAM. Hal ini merupakan hasil dari upaya penerapan dan pengawasan praktik ketenagakerjaan yang telah dijalankan dengan kebijakan-kebijakan BPDPKS dan Peraturan Perundang-Undangan oleh seluruh Karyawan BPDPKS.

Because of well-managed implementation and supervision, during 2019, OPPFMA did not receive any reprimands and sanctions from the authorities in terms of human rights violations, such as complaints of discrimination, incidents of violations, or complaints related to freedom of association within OPPFMA, or forced labor of OPPFMA's employees. In addition, OPPFMA did not face any legal cases of community lawsuits related to human rights violations. This is the result of the implementation and monitoring of employment practices that have been carried out under OPPFMA's policies and Legislation by all OPPFMA's Employees.



Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Social Responsibility to Fair Operations

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial *Core Subject* Operasi yang Adil

Commitment and Policies of Corporate Social Responsibility to Fair Operations

BPDPKS, penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik atau *Good Governance* bukan hanya sebatas pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, prinsip *Good Governance* juga melekat pada setiap karyawan BPDPKS. BPDPKS mengembangkan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Hal tersebut dilandasi atas penerapan *Good Governance* yang telah berjalan dengan baik di BPDPKS dan terus ditingkatkan kualitasnya. Penerapan prinsip *Good Governance* merupakan salah satu bentuk komitmen BPDPKS terhadap terlaksananya tanggung jawab BPDPKS terkait operasi yang adil. BPDPKS memastikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam membina hubungan dengan pemangku kepentingan juga tidak melanggar regulasi internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung aspek *fairness* dan jauh dari *conflict of interest*.

In OPPFMA, Good Governance implementation is not only complying with the laws and regulations. Good Governance principles are inherent in OPPFMA's personnel. OPPFMA develops clean business practices and avoids all forms of fraud. This is based on the good governance implemented in OPPFMA that is continuously improved. The implementation of good governance principles is a form of OPPFMA's commitment to implementing social responsibility to fair operations. OPPFMA ensures that all activities carried out in fostering relations with stakeholders do not violate internal regulations and prevailing laws and regulations, by upholding fairness and without conflicts of interest.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil Social Responsibility to Fair Operations

Rumusan Badan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Core Subject Operasi Yang Adil Agency's Formulation on Scope of Corporate Social Responsibility to Fair Operations

BDPDKS telah melakukan perencanaan yang matang dalam proses kegiatan tanggung jawab sosial, melalui Laporan Tahunan BDPDKS menginformasikan realisasi dari kegiatan yang telah diimplementasikan. *Stakeholder* memiliki ekspektasi terhadap praktik operasi yang adil di lingkungan BDPDKS melalui proses pengadaan yang jujur, transparan, dan profesional. Selain itu dengan adanya praktik pengendalian gratifikasi, serta pelaksanaan *whistleblowing system*. Oleh karena itu, dibuatlah rencana kegiatan terkait operasi yang adil dengan melakukan *Stakeholder Mapping*. Hal ini dilakukan untuk melibatkan seluruh *Stakeholder* BDPDKS dalam pembuatan rencana terkait hal tersebut. Serta untuk menentukan siapa pemangku kepentingan yang akan terdampak dengan adanya rencana kegiatan tersebut. Agar tujuan bisnis BDPDKS tercapai dan senantiasa berupaya menegakkan kebijakan-kebijakan terkait dengan operasi yang adil sehingga bisa meningkatkan nilai para pemangku kepentingan BDPDKS, selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai BDPDKS. Adapun rencana kegiatan ditahun 2019 terkait dengan operasi yang adil yaitu program anti korupsi, pengelolaan gratifikasi, aktivitas sosial dan politik, pencegahan benturan kepentingan dan pengadaan barang dan jasa yang transparan.

OPPFMA carefully plans the Social Responsibility activities process. In the Annual Report, OPPFMA discloses the realization of activities implemented. Stakeholders expect fair operating practices within OPPFMA through an honest, transparent, and professional procurement process. In addition, there are gratification control practices, as well as the whistleblowing system implementation. Therefore, Stakeholder Mapping was conducted to plan the fair operations. The mapping is conducted to involve all OPPFMA's Stakeholders in formulating the fair operations plans. It is also to determine which stakeholders will be affected by the planned activities. This is to achieve OPPFMA's business objectives and strive to enforce policies related to fair operations so as to increase the value to OPPFMA's stakeholders, which will impact OPPFMA's value improvement. The activity plan related to fair operations in 2019 includes anti-corruption programs, gratification management, social and political activities, prevention of conflicts of interest, and transparent procurement of goods and services.

Inisiatif Penerapan Praktik Operasi Yang Adil Initiative on the Fair Operating Practices

Upaya-upaya inisiatif yang telah dilakukan BDPDKS dalam rangka menjalankan operasi yang adil diantaranya:

OPPFMA has taken initiatives to carry out fair operations, which include:

1

PROGRAM ANTI KORUPSI ANTI-CORRUPTION PROGRAM

BDPDKS senantiasa melandaskan setiap kegiatannya pada prinsip *Good Governance*. Ketaatan pada prinsip-prinsip *Good Governance* ini diaplikasikan pada seluruh aktivitas BDPDKS sebagai BDPDKS yang profesional, independen, dan berintegritas. Isu anti Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) menjadi fokus manajemen BDPDKS dalam menjalankan aktivitas bisnis.

OPPFMA bases its activities on Good Governance principles. Compliance with the Good Governance principles is applied to all activities of OPPFMA as a professional, independent, and integrated company. The issue of anti-Corruption Collusion and Nepotism (KKN) is the focus of OPPFMA's management in carrying out business activities.



2 | **PENGELOLAAN GRATIFIKASI**
 GRATIFICATION MANAGEMENT

Oleh karena itu, BDPKKS mendukung upaya dalam mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme salah satunya melalui pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN merupakan laporan atas harta kekayaan yang wajib dilaporkan oleh setiap penyelenggara Negara. Pelaksanaan LHKPN merupakan salah satu wujud komitmen BDPKKS dalam penerapan *Good Governance* di lingkungan BDPKKS dengan mengacu pada ketentuan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Therefore, OPFFMA supports efforts to prevent the practices of Corruption, Collusion, and Nepotism, one of which is by reporting the Government Official Assets (LHKPN). LHKPN is an asset report that must be reported by every Government Official. LHKPN reporting is a form of OPFFMA's commitment to implementing Good Governance within OPFFMA, with reference to the provisions of KPK Regulation No. 7 of 2016 on the Procedures for the Registration, Announcement, and Examination of the Assets of Government Officials (LHKPN).

Dalam pedoman yang dimiliki BDPKKS telah mengatur sistem bagi penegakan pengendalian gratifikasi. BDPKKS menaruh perhatian pada kegiatan yang riskan terjadinya praktik suap atau gratifikasi, yang dapat merusak sendi-sendi etika bisnis yang jujur dan bersih. Aturan-aturan tersebut disosialisasikan ke seluruh karyawan BDPKKS untuk memberi pemahaman kepada mereka mengenai praktik gratifikasi, dan sebagai sarana untuk menghindari terjadinya praktik gratifikasi di lingkungan BDPKKS.

OPFFMA has a guideline that stipulates the system for enforcing gratification control. OPFFMA pays attention to activities that are risky to the practice of bribery or gratuity, which can damage the core of honest and clean business ethics. These rules are disseminated to all OPFFMA's personnel to give an understanding of the practice of gratification, and as a means to avoid the occurrence of gratification practices within the OPFFMA.

3 | **AKTIVITAS SOSIAL DAN POLITIK**
 SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

BDPKKS memberikan hak bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi politik, mengharuskan Direksi dan karyawan untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan BDPKKS dalam urusan politik.

OPFFMA respects the right of employees to express political aspirations, and requires all Board of Directors and employees to comply with all laws and regulations that govern the OPFFMA's involvement in political affairs.

4 | **PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN**
 CONFLICT OF INTEREST PREVENTION

Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada Karyawan BDPKKS yang memiliki hubungan keluarga atau pertemanan dengan kompetitor, vendor, atau rekan kerja. Dalam menghadapi adanya benturan kepentingan maka setiap Karyawan BDPKKS dilarang untuk:

Conflicts of interest may or may not occur between OPFFMA employees who have a familial relationship or friendship with competitors, vendors, or coworkers. In the face of a conflict of interest, OPFFMA Employee is prohibited from:

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan BDPKKS dalam proses pengadaan untuk kepentingan BDPKKS yang dimiliki keluarga atau teman, atau BDPKKS dimana keluarga atau teman adalah pejabat pengambil keputusan.

1. Being involved in decision-making or trying to influence OPFFMA decision in the procurement process for the benefit of OPFFMA, owned by family or friends, or a company where such family or friends are the decision-making officials.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil Social Responsibility to Fair Operations

5

PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TRANSPARAN TRANSPARENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

2. Berupaya selalu menghindari segala bentuk keterlibatan keluarga dalam hubungan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan keterlibatan yang harus dihindari dan didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan langsung, atasan tidak langsung maupun Pemimpin Unit Pengelola SDM.

2. Striving to avoid all forms of family involvement in business relationships to avoid conflicts of interest. All forms of related party transactions must be avoided and discussed in advance with direct superiors, indirect superiors, or HR Management Unit Leaders.

BDPKKS menjamin pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan BDPKKS berlangsung dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga tertuang dalam Ketentuan Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi pedoman bagi penanggung jawab dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ketentuan ini secara rinci dan operasional dituangkan dalam beberapa prosedur pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari penerapan *Good Governance* serta Etika Bisnis dan Etika Kerja. Dalam ketentuan ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan BDPKKS yang merupakan uraian dari Ketentuan Pembelian sebagaimana diatur dalam Sistem Mutu BDPKKS, elemen sistem mutu, pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan secara eksternal. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BDPKKS yang dimulai dari Seleksi Rekanan, Pembuatan *Purchasing Requisitions* (PR) sampai dengan Penerimaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa didasarkan atas prinsip-prinsip:

OPPFMA guarantees a transparent and accountable process of procurement of goods and services in the OPPFMA's environment. This is also set forth in the General Provisions for the Procurement of Goods and Services as the guideline for those responsible for the process of procurement of goods and services. These provisions are detailed and operationally outlined in several procedures for the procurement of goods and services as part of the Good Governance (GCG) and Code of Conduct (CoC). These provisions regulate the main things in terms of procurement of goods and services needed by OPPFMA, which describe the Purchasing Requirements as stipulated in the OPPFMA's Quality System, quality system elements, process control, products and services provided externally. The process of procurement of goods and services within OPPFMA shall be carried starting from the Partner Selection, Purchasing Requisitions (PR), up to Receipt of goods and services. The procurement of goods and services is based on the principles of:

1. Efisien berarti Pengadaan barang dan jasa diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya di dasarkan pada harga terendah;

2. Efektif berarti Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

1. Efficiency, that the Procurement of goods and services shall obtain optimal and best results fast by using the adequate funds and abilities as reasonably as possible, not just based on the lowest price;

2. Effectiveness, that the Procurement of goods and services is in accordance with the set forth requirements and provide maximum benefits in accordance with established targets;

- | | |
|---|--|
| <p>3. Kompetitif berarti Pengadaan barang dan jasa terbuka bagi Penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;</p> <p>4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan barang dan jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia barang dan jasa yang berminat;</p> <p>5. Adil dan wajar berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat;</p> <p>6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;</p> <p>7. Terarah dan terkendali, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran BDPKKS (RKAP) serta fungsi setiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direksi, dengan tetap memperhatikan peluang usaha yang akan memberikan keuntungan optimal kepada BDPKKS.</p> | <p>3. Competitiveness, that the Procurement of goods and services must be open to any qualified goods and services Provider and must be done in a healthy competition between the goods and services Providers and must meet certain requirements/criteria which are based on clear and transparent stipulations and procedures;</p> <p>4. Transparency, that all provisions and information regarding the Procurement of goods and services including technical requirements for procurement administration, evaluation procedures, results of evaluations, selection of prospective suppliers of goods and services, are open to interested Suppliers of goods and services;</p> <p>5. Fairness, that the Company shall treat all prospective Suppliers of goods and services that fulfill the requirements equally;</p> <p>6. Accountability, that the Procurement of goods and services shall achieve its goals and be accountable to avoid potential abuse and violations;</p> <p>7. Focused and controlled, that the procurement of goods and services must be in accordance with OPPFMA's Work Program and Budget (WP&B) and the function of each work unit determined by the Board of Directors, with due regard to business opportunities that will provide optimal benefits to OPPFMA.</p> |
|---|--|

Upaya Mempromosikan Rantai Nilai Operasi yang Adil

Efforts to Promote Value Chain of Fair Operations

Dalam upaya implementasi praktik operasi yang adil, BDPKKS secara berkala melakukan sosialisasi terkait penerapan kode etik. BDPKKS melakukan sosialisasi baik secara langsung dalam pelatihan dan sharing internal BDPKKS. Setiap tahunnya, seluruh pegawai BDPKKS diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen penerapan kode etik sesuai dengan Etika Bisnis dan Etika Kerja yang dilakukan secara berkala.

OPPFMA regularly conducts socialization related to the code of conduct implementation in an effort to implement fair operations. OPPFMA disseminates the information directly in training and by internal sharing within OPPFMA. Every year, all OPPFMA's employees are required to sign a statement of commitment to the code of conduct, in accordance with the Code of Conduct, which is carried out periodically.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil Social Responsibility to Fair Operations

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Operasi yang Adil

Fair Operations Violations Complaints Procedure and Mechanism

Penanganan konflik terkait operasi yang adil dilakukan melalui penerapan *whistleblowing system*. Uraian tentang *whistleblowing system* disajikan dalam tata kelola BPDPKS dalam laporan tahunan ini. *Stakeholder* berharap bahwa mekanisme *whistleblowing system* ditegakkan sehingga bisa meningkatkan nilai para pemangku kepentingan BPDPKS, selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai BPDPKS.

The handling of conflicts related to fair operations is carried out through a *whistleblowing system*. A description of the *whistleblowing system* is presented in the OPPFMA's Governance in this annual report. Stakeholders expect that OPPFMA upholds the *whistleblowing system* mechanism to improve the value of OPPFMA's stakeholders, which in turn will increase OPPFMA's value.

Penghargaan dan Capaian yang Diperoleh

Awards and Achievements

Selama tahun 2019 BPDPKS tidak memiliki kasus indikasi terjadinya korupsi, dan suap baik ditingkat Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan. Selain itu tidak terdapat gugatan yang ditujukan kepada BPDPKS terkait penyalahgunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan gugatan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Laporan Pelaksanaan *Whistleblowing System* dan Laporan Pengendalian Gratifikasi. Berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat pelaporan pada tahun 2019, dan tidak terdapat pelanggaran ketentuan Gratifikasi pada tahun 2019 di semua divisi BPDPKS.

During 2019, OPPFMA did not have indications of corruption and bribery, at the level of Board of Directors, Board of Commissioners, and employees. In addition, there were no lawsuits directed at OPPFMA related to the abuse of Intellectual Property Rights and lawsuits related to the procurement of goods and services. This is indicated by the *Whistleblowing System Implementation Report* and the *Gratification Control Report*. Based on the report, there was no reporting in 2019, and there were no violations of the Gratification provisions in 2019 in all OPPFMA's divisions.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

Social Responsibility to the Environment

Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan

Information on environmental commitment and policies

BPDPKS percaya bahwa keberlanjutan manusia tetap akan bergantung dengan alam, dan oleh karenanya pelestarian lingkungan menjadi hal mutlak yang harus dijaga. Dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan, BPDPKS memiliki kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjaga keanekaragaman hayati. Untuk itu, BPDPKS berupaya untuk mempraktikkan operasional BPDPKS yang ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dengan memaksimalkan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). BPDPKS pun terus menjaga kelestarian lingkungan dalam operasional kegiatan bisnis. Efektivitas dan efisiensi penggunaan energi dan material merupakan salah satu fokus kegiatan BPDPKS terhadap tanggung jawab sosial dalam menjaga kualitas lingkungan. Hal ini juga merupakan bentuk pengimplementasian kepatuhan BPDPKS terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan Lingkungan tersebut merupakan pedoman bagi BPDPKS dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

OPPFMA believes that human sustainability will depend on nature, and therefore environmental conservation is an absolute matter to be maintained. OPPFMA has the policy to conserve biodiversity to protect and preserve the environment. Therefore, OPPFMA strives to practice environmentally friendly OPPFMA's operations and minimize negative impacts on the environment by maximizing the 3R (*reduce, reuse, and recycle*) principle. OPPFMA strives to preserve the environment in operational business activities. Effectiveness and efficiency of energy and material consumption are one of many focuses of OPPFMA's activities for social responsibility in maintaining environmental quality. This is a form of compliance of OPPFMA with Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. These Environmental Policies are guidelines for OPPFMA to carry out environmentally-friendly operations.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup Social Responsibility to the Environment

Dampak dan Resiko Lingkungan Penting yang Terkait Secara Langsung atau Tidak Langsung dengan BPDPKS

Important Environmental Impacts and Direct and Indirect Risks to OPPFMA

BPDPKS berupaya meminimalisir dampak dan resiko dari kegiatan operasi BPDPKS. Identifikasi Potensi Dampak dan Resiko terhadap lingkungan baik yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan BPDPKS adalah sebagai berikut:

OPPFMA strives to minimize the impact and risk of OPPFMA's operations. Identification of Potential Impacts and Risks to the environment, directly or indirectly related to OPPFMA are as follows:

Potensi dampak teridentifikasi Potential impacts identified		Tindakan Penanggulangan Countermeasure	
Pencemaran Udara	Air Pollution	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian operasi dan Pengendalian baku mutu emisi; 2. Pemantauan emisi gas buang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operation control and emission-quality standards control; 2. Monitoring of exhaust gas emission
Pencemaran Air	Water Pollution	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian operasi dan pengelolaan limbah cair; 2. Pemantauan secara rutin baku mutu limbah cair. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operational control and liquid waste management; 2. Regular monitoring of liquid waste quality standards.
Pencemaran Limbah B3	Toxic and Hazardous Material (B3) Waste Pollution	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan syarat dan ketentuan didalam izin maupun sesuai dengan; 2. Upaya 3R limbah B3 dengan mengajukan izin pemanfaatan limbah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. B3 waste management is in accordance with the terms and conditions in the permit, or in accordance with 2. 3R efforts of B3 waste by applying for a waste utilization permit.

Selama tahun 2019, tidak terdapat pengaduan dari *stakeholder* terkait dengan pencemaran lingkungan, sehingga tidak ada informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan BPDPKS.

During 2019, there were no complaints from stakeholders related to environmental pollution. Hence, there was no information about significant environmental impacts and risks that were directly or indirectly related to OPPFMA.

Risiko dan Jangkauan Lingkungan Hidup Terkait Bisnis Badan, Baik Risiko Pada Badan Maupun *Stakeholder*

Environmental Risk and Extent Related to Corporate Business, Both Risks to the Agency and Stakeholders

Kegiatan BPDPKS memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, dampak tersebut terutama timbul dari konflik lahan dan sumber daya agraria, pemanfaatan air, perubahan bentang alam, sampah dan limbah serta perubahan kualitas udara ambien dari tingginya aktivitas peralatan dan manusia dengan demikian lingkup pengaruh BPDPKS pada para pemangku kepentingan terkait isu lingkungan adalah pada masyarakat di sekitar kegiatan operasional BPDPKS.

OPPFMA activities have a significant impact on the environment. These impacts mainly arise from conflicts over land and agrarian resources, water use, changes in landscapes, garbage, and waste, as well as changes in ambient air quality, from the high activity of equipment and people. Thus, the scope of OPPFMA's influence on stakeholders' interests related to environmental issues in the communities surrounding OPPFMA's operations.

Bila tidak ditangani dengan benar, hal-hal tersebut dapat berkembang menjadi masalah lingkungan seperti pencemaran (air, udara dan tanah), bersumber dari aktifitas pembukaan lahan perkebunan seperti erosi dan sedimentasi, pembakaran lahan dan hutan, penggunaan bahan kimia pertanian yang bersumber dari pestisida dan herbisida berbahaya, beracun dan sangat mematikan oleh kebun sawit serta gas-gas pencemar lainnya.

If not handled properly, these things can be the origin of environmental problems, such as pollution (water, air, and soil), originating from plantation lands clearing activities, such as erosion and sedimentation, land and forests fire, use of agricultural chemicals derived from pesticides and dangerous, poisonous, and stinging herbicides by palm oil plantations and other polluting gases.

Rencana Kerja Terkait Kegiatan Tanggung Jawab Sosial BDPKKS terhadap Lingkungan Hidup

OPPFMA's Work Program for Social Responsibility to Environment

Keberlangsungan bisnis merupakan tujuan dan tugas BDPKKS, namun pencapaian tersebut harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan memperhatikan keadaan lingkungan dan masyarakat. BDPKKS terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas bisnis BDPKKS agar tidak memberi dampak negatif bagi lingkungan. BDPKKS menyusun rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan dan program tanggung jawab sosial berdasarkan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam rangka menciptakan Badan yang ramah lingkungan, BDPKKS telah menetapkan rencana kegiatan pengelolaan lingkungan dengan uraian sebagai berikut:

1. Efisiensi Penggunaan Energi;
2. Efisiensi Konsumsi Air;
3. Penataan Sampah;
4. *Eco Office*;
5. Pengelolaan Limbah.

OPPFMA has the goal and task to ensure business continuity. However, the achievement must be carried out responsibly and attentively to the environment and society. OPPFMA improves the quality of environmental management, by planning and controlling its business activities to not impact the environment negatively. OPPFMA developed an environmental management/monitoring plan and social responsibility program based on an Environmental Impact Assessment (AMDAL) study. In order to cultivate an environmentally friendly Agency, OPPFMA has set activities plan to manage the environment, with details as follows:

1. Energy Consumption Efficiency;
2. Water Consumption Efficiency;
3. Garbage Arrangement;
4. Eco-Office;
5. Waste Management.

Kegiatan dan Inisiatif Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup

Activities and Initiatives for the Social Responsibility to the Environment

Dalam setiap aktifitas bisnisnya, BDPKKS selalu berupaya memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan di tahun 2019 sebagai berikut:

In every business activity, OPPFMA takes into account the environmental aspects through various activities in 2019 as follows:

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup Social Responsibility to the Environment

1 Efisiensi Penggunaan Energi Energy Consumption Efficiency

BDPDKS melakukan pengelolaan energi di lingkungan Badan, meliputi pengelolaan energi pada bangunan/gedung, peralatan, dan sistem utilitas. Pengelolaan energi ini penting untuk dilakukan terutama agar mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan dan menanggulangi dampak negatif perubahan iklim, yaitu memastikan adanya akses terhadap energi modern, meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi global, dan terakhir meningkatkan efisiensi energi dunia, hal yang dilakukan BDPDKS yaitu ikut berkontribusi dalam program efisiensi energi dengan cara penggunaan energi secara hemat dan sesuai kebutuhan.

OPPFMA conducts energy management within the Agency, including energy management in buildings, equipment, and utility systems. Energy management is important to be maintained to increase the efficiency of energy usage. In an effort to create sustainable development and handle the negative impacts of climate change, i.e. ensuring access to modern energy, increasing the share of renewable energy in the global energy mix, and improving world energy efficiency, OPPFMA contributes to the energy efficiency program by using energy efficiently and as needed.

2 Efisiensi Konsumsi Air Water Consumption Efficiency

Sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari, persediaan air bersih menjadi hal penting yang harus senantiasa diperhatikan. Maka, BDPDKS berupaya untuk terus menjaga persediaan air bersih yang dibutuhkan Badan dan pegawai melalui penghematan air bersih. Tindakan yang dilakukan dalam penghematan ini antara lain mematikan keran saat tidak digunakan dan menggunakan air secukupnya. Selain untuk menjaga persediaan air, penghematan ini berdampak pada stabilnya pengeluaran terkait biaya air bersih di BDPDKS.

As part of daily needs, the supply of clean water is an important matter to be considered. Thus, OPPFMA strives to maintain the supply of clean water needed by the Agency and the employees by clean water savings. Actions taken include turning off the tap when not in use and using enough water. In addition to maintaining water supplies, the saving impacts the stability of expenses related to the clean water cost at OPPFMA.

3 Penataan Sampah Garbage Arrangement

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan sehat BDPDKS selalu menatausahakan dan mengelola sampah dan limbah sesuai dengan SOP. Sesuai dengan SOP tersebut, BDPDKS secara kontinyu melakukan pembersihan sampah dari tempat kerja oleh petugas kebersihan untuk kemudian disatukan kedalam sebuah bak khusus penampungan sampah.

OPPFMA administers and manages the waste in accordance with the SOP to create a clean and healthy work environment. In line with the SOP, OPPFMA cleans the waste from the workplace, conducted by cleaners to then be integrated into a special garbage collection facility.

4 Eco Office Eco Office

BDPDKS melaksanakan program Eco Office sebagai upaya menerapkan prinsip ramah lingkungan di area kantor. BDPDKS telah memiliki sejumlah inisiatif terhadap lingkungan hidup yang secara konsisten dijalankan dalam kegiatan sehari-hari. Pelestarian lingkungan hidup dilakukan oleh BDPDKS mulai dari kegiatan bisnis sehari-hari dengan selalu menjaga efisiensi sumber daya seperti kertas, listrik dan air.

OPPFMA implements the Eco Office program in an effort to apply the environmentally-friendly principle in the office area. OPPFMA has several initiatives regarding the environment, which are consistently carried out in its daily activities. OPPFMA carries out environmental preservation in its daily business activities by always maintaining the efficiency of resources such as paper, electricity, and water.



5 | **Pengelolaan Limbah**
 Waste Management

BPDPKS berupaya melakukan pengelolaan limbah baik limbah Non Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) maupun limbah B3 berdasarkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mencemari lingkungan. Mekanisme pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional BPDPKS dilaksanakan dengan program *Eco Office* dan bekerjasama dengan pengelola limbah B3 diharapkan tidak akan menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan pegawai serta masyarakat sekitar lingkungan BPDPKS. Upaya ini sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tanggung jawab konsumsi dan produksi.

OPPFMA strives to manage waste, both Non-Toxic and Hazardous waste and Toxic and Hazardous Material (B3) waste based on procedures in accordance with prevailing regulations to ensure that the waste does not pollute the environment. The management mechanism of B3 waste generated from OPPFMA's operations is carried out with the *Eco Office* program in collaboration with B3 waste managers. It is hoped that the management mechanism shall not endanger the environment, employees' health, and the community surrounding OPPFMA's environment. This effort is in line with one of the sustainable development goals, i.e. Responsible consumption and production.

6 | **Pelibatan Stakeholder**
 Stakeholders' Involvement

Sampai saat ini BPDPKS masih menitikberatkan pada pelibatan *Stakeholder* internal BPDPKS yaitu Direksi dan seluruh pegawai dalam berbagai kegiatan lingkungan hidup yang dilakukan BPDPKS. Pencegahan, penurunan dan perbaikan lingkungan hidup secara umum masih dilakukan oleh pihak internal BPDPKS.

To date, OPPFMA focuses on the involvement of internal stakeholders, i.e. the Board of Directors and all employees, in various environmental activities carried out by OPPFMA. Prevention, reduction, and improvement of the environment generally are performed by OPPFMA internally.

Mekanisme dan Penanganan Pengaduan Lingkungan dan Masyarakat
 Mechanisms and Handling for Environmental and Community Complaints

BPDPKS membangun bisnis dengan tetap memperhatikan keberadaan para pemangku kepentingan. Untuk itu, BPDPKS telah menyediakan saluran pengaduan terkait masalah lingkungan melalui *Contact Center* di nomor (021) 3983-2095, dan di alamat email pelanggan pengaduan@bpdp.co.id

OPPFMA establishes a business with due regards to the presence of stakeholders. As such, OPPFMA has established channels for complaints or inquiries on environmental issues through its *Contact Center* at (021) 3983-2095, and email at pengaduan@bpdp.co.id

Dampak Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan
 Social Responsibility to the Environment Impact

Jika dilihat dari sisi keuangan, dampak yang dirasakan BPDPKS adalah terpengaruhnya anggaran BPDPKS dalam jangka pendek. Namun jika dilihat dalam jangka panjang pelaksanaan program ini akan berdampak bagi BPDPKS baik dari sisi keuangan maupun keberlangsungan bisnis kedepan.

In terms of finances, OPPFMA's budget was affected in a short period of time. However, in the long run, the program will have an impact on the OPPFMA both in terms of financial and business continuity.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup Social Responsibility to the Environment

Penghematan energi kini menjadi *concern* bagi seluruh BPDPKS untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, selain untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam yang mana menjadi *basic needs* dalam perputaran kegiatan operasional BPDPKS. Selain itu, pengelolaan limbah yang baik dan benar akan menjamin kelestarian lingkungan, ekosistem, dan keberlangsungan hidup. Pentingnya kepedulian terhadap lingkungan akan menjadi nilai tambah bagi BPDPKS. Karena tujuan BPDPKS tidak hanya bersifat *profit oriented* tetapi juga *environment oriented as a business process*.

Energy savings are now a concern for all OPPFMA to achieve sustainable development goals. In addition, the savings ensure the availability of natural resources as the basic needs in OPPFMA's operations. In addition, good and appropriate waste management will ensure environmental sustainability, ecosystems, and survival. Environmental care will add value to OPPFMA. OPPFMA has the objective to generate not only profit but also environmental sustainability (environment-oriented as a business process).



Tanggung Jawab Sosial BDPKKS Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

OPPFMA's Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety

Setiap insan BDPKKS bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Each OPFMA personnel is responsible for taking appropriate steps to prevent accidents and illnesses in the workplace and creating a safe and healthy working environment.

Komitmen dan Kebijakan Ketenagakerjaan dan K3

Employment and OHS Commitment and Policies

BDPKKS menaruh perhatian penuh pada terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan sinergis dengan seluruh pekerja melalui pemenuhan hak dan tanggung jawab yang adil dan patuh terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. BDPKKS juga memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan standar keselamatan, kesehatan, lingkungan dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan mengupayakan nihil kerugian pada manusia dan lingkungan (*zero accident*). Karena itu, BDPKKS selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain aspek ketenagakerjaan, BDPKKS juga memprioritaskan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Setiap insan BDPKKS bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

OPPFMA fully focuses on the creation of a harmonious and synergistic working relationship with all employees through the fulfillment of fair rights and responsibilities, and compliance with prevailing employment regulations. OPFMA is committed to implementing sustainable development by taking into account safety, health, environment, and community standards, in accordance with prevailing laws, and striving for zero accidents to humans and the environment. Therefore, OPFMA strives to fulfill the rights of employees in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, i.e. the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 on Employment. In addition to employment aspects, OPFMA prioritizes Occupational Health and Safety (OHS) aspects for employees as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1970 on Occupational Health and Safety, and Minister of Manpower Regulation No. 26 of 2014 on the Assessment of the Implementation of Occupational Health and Safety Management System. Each OPFMA personnel is responsible for taking appropriate steps to prevent accidents and illnesses in the workplace and creating a safe and healthy working environment.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPDPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPDPKS
Tanggung Jawab Sosial BPDPKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, & Keselamatan Kerja OPPFMA's Social Responsibility to Employment, Occupational Health & Safety

Risiko Bidang Ketenagakerjaan, Baik Risiko Pada Badan maupun Stakeholder Risks in the Employment for Agency and Stakeholders

BPDPKS berupaya untuk menjadi Badan yang taat asas dan selalu menaati setiap peraturan perundang-undangan termasuk di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat menurunkan dampak operasional BPDPKS pada ketenagakerjaan. BPDPKS berupaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam kegiatan BPDPKS sehingga BPDPKS berusaha untuk meminimalisir risiko-risiko pada kegiatan BPDPKS. Salah satunya yaitu kebakaran di area BPDPKS yang dapat berimbas pada masyarakat di sekitar BPDPKS. Untuk itu, BPDPKS telah memberikan saluran pengaduan agar dapat memberikan tindakan langsung pada risiko kebakaran tersebut.

BPDPKS senantiasa mempertimbangkan risiko terkait bidang ketenagakerjaan, baik risiko bagi BPDPKS maupun *Stakeholder* dalam melakukan perencanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan. Risiko yang dipertimbangkan antara lain tingginya *turnover* pegawai yang akan mengganggu kegiatan operasional BPDPKS. Ekspektasi pegawai terkait dengan kompensasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan kenyamanan kerja menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan. Dalam melakukan perencanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan, BPDPKS telah melakukan *due diligence* terhadap tanggung jawab sosial dengan memperhatikan data-data terkait *turnover* dan kepuasan pegawai.

OPPFMA strives to be an Agency that complies with principles and every statutory regulation, including regulation in the employment sector to reduce the operational impact of OPPFMA on employment. OPPFMA strives to create conducive conditions in OPPFMA's activities to minimize the risks. One of them is a fire within OPPFMA's areas, that can have an impact on the community around OPPFMA. Therefore, OPPFMA has provided a channel for complaints to provide direct action on the risk of fire.

OPPFMA considers risks related to the employment sector, both for OPPFMA and stakeholders in planning the activities in the employment sector. The risks considered include high employee turnover, which will disrupt OPPFMA's operations. Employees' expectations regarding compensation, freedom of association, and working comfort, are taken into consideration in planning the activities in the employment sector. In planning the employment activities, OPPFMA has conducted due diligence on social responsibility by taking into account the data related to employees' turnover and satisfaction.

Informasi Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan terkait Rencana Kegiatan Pada Tahun 2019 yang Ditetapkan Manajemen

Scope and Formulation of Social Responsibility to Employment in 2019 Set Forth by the Management

Bidang Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam rangka pengelolaan salah satu sumber daya BPDPKS yang merupakan penggerak operasional BPDPKS. Kebijakan ketenagakerjaan yang disusun di antaranya adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja yang semakin meningkat. Untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja, strategi yang disusun di antaranya melalui peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, benefit, kompensasi yang kompetitif dan berbasis kinerja. Adapun beberapa kegiatan/program yang direncanakan oleh BPDPKS yaitu:

The employment sector is an important aspect in managing one of OPPFMA's resources which is the operational driver of OPPFMA. Employment policies formulated include an increase in employment labor productivity, which keeps improving. The strategy to increase employees' productivity includes increasing competencies, improving welfare, benefits, and competitive compensation based on performance. Several activities/programs planned by OPPFMA:



1. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Pegawai
2. Pemberian Kesejahteraan
3. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja
4. Penggunaan Tenaga Kerja Lokal
5. Program Kesehatan
6. Penyesuaian Upah

1. Employees' Education, Training, and Competency Development
2. Welfare Provision
3. Gender Equality and Employment Opportunity
4. Use of Local Labor
5. Health Program
6. Wage Adjustment

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Badan Terhadap Ketenagakerjaan dan K3

Agency Social Responsibility to Employment and OHS Work Program Implementation

1 PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI EMPLOYEES' EDUCATION, TRAINING, AND COMPETENCY DEVELOPMENT

BPDPKS melakukan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan knowledge, skill, dan ability yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, *performance*, dan sikap mental pegawai BPDPKS. Terkait dengan pengembangan karir, BPDPKS memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai pria dan wanita. BPDPKS membuat sistem jenjang karir (*career path*) yang didasarkan pada kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. BPDPKS secara konsisten berupaya mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, maupun studi banding serta pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan BPDPKS.

OPPFMA conducts education and training programs to enhance the knowledge, skills, and abilities with the objective to increase the competence, performance, and mental attitude of OPPFMA's employees. In terms of career development, OPPFMA provides equal opportunities for male and female employees. OPPFMA establishes a career path system based on job qualifications and employee competencies, integrated with a performance appraisal system. OPPFMA consistently strives to develop employee competencies through various education and training programs, as well as comparative studies and management and technical training, tailored to OPPFMA's needs.

2 PEMBERIAN KESEJAHTERAAN WELFARE PROVISION

Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja agar semakin tertantang untuk berprestasi dapat memberikan kontribusi terbaik bagi BPDPKS serta untuk menarik calon pegawai potensial, dan mempertahankan pegawai kompeten sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai, BPDPKS menerapkan sistem remunerasi yang setara dan kompetitif dengan industri sejenis. Remunerasi yang diberikan kepada pegawai BPDPKS diantaranya gaji pokok, insentif prestasi serta berbagai tunjangan dan fasilitas.

OPPFMA implements an equal and competitive remuneration system with similar industries to improve the performance motivation to be more challenged and excel to provide the best contribution to OPPFMA and attract potential employees, and retain competent employees while simultaneously increasing employees' welfare. OPPFMA provides remuneration to employees which include basic salary, performance incentives, and various benefits and facilities.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial BDPDKS Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, & Keselamatan Kerja OPPFMA's Social Responsibility to Employment, Occupational Health & Safety

3 BIDANG KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN KERJA, KEAMANAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KERJA OCCUPATIONAL HEALTH, OCCUPATIONAL SAFETY, SECURITY, AND WORKING ENVIRONMENT MANAGEMENT

Pengembangan penerapan K3 dalam BDPDKS adalah sebuah kewajiban. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasi risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja, memberikan hak keselamatan terhadap tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan, dan melahirkan deretan tenaga kerja yang sehat serta produktif.

The development of OHS in OPPFMA is an obligation. This has the objective to minimize the risk of accidents in the workplace, provide safety rights for employees during work, and develop a healthy and productive workforce.

4 KESETARAAN GENDER DAN KESEMPATAN KERJA GENDER EQUALITY AND EMPLOYMENT OPPORTUNITY

BDPDKS berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi yakni dengan melakukan pengelolaan pegawai tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang. BDPDKS memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang khususnya pegawai BDPDKS terkait rekrutmen, program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, sampai dengan pemberian remunerasi dan kesejahteraan kepada pegawai tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, dan faktor keberagaman lainnya.

OPPFMA strives to implement equality and anti-discrimination principles by not discriminating against employees based on gender, education, and background. OPPFMA provides equal opportunities for everyone, especially OPPFMA's employees regarding recruitment, competency development programs, performance appraisal, career development, up to the provision of remuneration and welfare to employees regardless of gender, religion, and other diversity factors.

5 PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL USE OF LOCAL LABOR

BDPDKS senantiasa melakukan proses rekrutmen yang mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional.

OPPFMA processes recruitment that promotes the principles of openness, fairness, and competence of the candidates, with due regards to the availability of local/national workforce.

6 PROGRAM KESEHATAN HEALTH PROGRAM

Demi terwujudnya tenaga kerja yang kuat dan produktif serta menjaga agar kondisi pegawai selalu dalam kondisi terpantau kesehatannya, BDPDKS menyediakan dan memberikan fasilitas kesehatan kepada pegawainya. BDPDKS mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kepada seluruh pekerja berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

OPPFMA provides health facilities to its employees to create a strong and productive workforce and to keep employees in a healthy and monitored condition. OPPFMA ensures that all its employees are included in the BPJS Ketenagakerjaan program to provide guarantees to all employees in the form of Old Day Security, Work Accident Security, Death Security, and Pension Security.



7 | PENYESUAIAN UPAH WAGE ADJUSTMENT

Peningkatan kesejahteraan pegawai mempengaruhi produktivitas dan loyalitas kerja pegawai. Hal ini mendorong BDPKKS untuk senantiasa memberikan kompensasi yang layak dan adil sebagai imbal jasa terhadap hasil kinerja pegawai. Setiap tahun BDPKKS melaksanakan penyesuaian upah. Gaji seluruh pegawai baik wanita maupun laki-laki telah sesuai dengan ketentuan upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, BDPKKS juga memberikan sejumlah insentif berdasarkan kinerja pegawai sebagai bentuk apresiasi sehingga pegawai dapat senantiasa meningkatkan produktivitasnya.

Improvement of employee welfare affects employees' productivity and loyalty. This encourages OPPFMA to provide appropriate and fair compensation in return for employees' performance. OPPFMA carries out wage adjustments annually. The salaries of all employees, both women and men, are in accordance with the minimum wage stipulated by the Government. In addition, OPPFMA provides various incentives based on employees' performance as a form of appreciation so that employees can always increase their productivity.

Turnover Pegawai Employee Turnover

Pegawai yang keluar (*turnover*) merupakan hal yang lumrah atau jamak terjadi, termasuk BDPKKS. Pada pada 2019, jumlah turn over tercatat sebesar 5 orang, menurun dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar 9 orang. *Turnover* pegawai terjadi karena sejumlah penyebab, yakni mengundurkan diri, pension dan pelanggaran peraturan disiplin.

Employee turnover is common in the working place, including at OPPFMA. In 2019, there were 5 turnovers recorded, which decreased compared to 2018, which was 9 people. Employee turnover occurs due to several causes, i.e. resignation, retirement, and violation of disciplinary regulations.

Turn Over Pegawai 2018-2019
 Employees' Turnover in 2018-2019

Uraian Description	Jumlah Total	
	2019	2018
Mengundurkan Diri Resignation	2	4
Pensiun Pension	2	-
Pelanggaran peraturan disiplin Disciplinary violations	-	-
Pindah tugas / mutasi Mutation	1	4
Sebab lain Others	-	1

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, & Keselamatan Kerja OPPFMA's Social Responsibility to Employment, Occupational Health & Safety

Dampak Kuantitatif

Quantitative Impact

Pengelolaan tanggung jawab BDPKKS terhadap pekerja termasuk kesehatan dan keselamatan pekerja di tahun 2019 telah berjalan efektif. Melalui pengelolaan keselamatan kerja yang didukung dengan kegiatan sosialisasi dan berbagai pelatihan, selama tahun 2019 tidak terdapat kecelakaan kerja (*zero accident*), sehingga rasio kecelakaan kerja sebesar 0%.

OPPFMA's responsibilities to employees include the health and safety of the employees. In 2019, it has been effective. In 2019, there were no accidents (or zero accidents), or equal to work accident ratio of 0% because of the work safety management supported by socialization activities and various training

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Employment Problem Complaint Mechanism

Terkait dengan masalah ketenagakerjaan yang dapat terjadi di lingkungan BDPKKS, BDPKKS memberi perhatian besar dalam pengaduan atas keluhan pegawai terhadap praktik ketenagakerjaan. Wujud perhatian tersebut direalisasikan dengan menerapkan mekanisme dalam pengaduan masalah ketenagakerjaan, yakni penyampaian pengaduan yang dapat dilakukan secara lisan dan tertulis kepada Divisi Sumber Daya Manusia.

In relation to any employment issues within OPPFMA, OPPFMA focuses on the complaints from employees regarding the employment practices. This concern is realized by implementing a complaints mechanism about labor issues. The complaints can be submitted verbally and in writing to the Human Resources Division.

Biaya yang Dikeluarkan terkait Kegiatan Ketenagakerjaan, Kesehatan

Cost of the Corporate Social Responsibility towards Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Cost of the Corporate Social Responsibility towards Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Dana yang dianggarkan oleh BDPKKS untuk kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap Ketenagakerjaan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.220.000.000,- pembiayaan program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi pegawai. Sedangkan untuk kegiatan program jaminan pensiun, jaminan hari tua dan asuransi kecelakaan kerja sebesar Rp.132.356.238 dan program kesehatan kerja sebesar Rp. 7.601.812 di tahun 2019.

OPPFMA budgeted Rp2,220,000,000 for activities related to the responsibility to Employment in 2019, which include the funding for training, education, and employee competency development programs. Meanwhile, the pension security, old day security, and work accident insurance amounted to Rp132,356,238, and the occupational health program amounted to Rp7,601,812 in 2019.

Tanggung Jawab Sosial BPDPKS Terhadap Pelanggan

OPPFMA's Social Responsibility to Customers

Komitmen dan Kebijakan Terhadap Pelanggan

Commitment and Policy Towards Customers

BPDPKS memandang pelanggan sebagai pemangku kepentingan yang mampu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan usaha secara berkelanjutan, sehingga kepuasan pelanggan menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dan dipelihara dengan baik. Komitmen BPDPKS untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, yang mana dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bisnis BPDPKS menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPDPKS berusaha secara konsisten memenuhi harapan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan maksimal, serta bekerja dengan pemikiran yang inovatif dan kreatif. Dalam setiap proses pembuatan keputusan, dampak pada pelanggan akibat operasional BPDPKS merupakan isu penting yang harus dipertimbangkan, baik dampak bagi lingkungan sekitar, *stakeholder*, maupun Badan.

OPPFMA considers customers as stakeholders who are able to contribute to the success of its business in a sustainable manner. Therefore, customer satisfaction is one of the aspects that must be properly considered and maintained. OPFMA is committed to providing the best service to customers, which is explained in the OPFMA's business activities by respecting customers' rights in accordance with prevailing regulations. OPFMA strives to consistently fulfill the customers' expectations by providing quality and maximum service, as well as working innovatively and creatively. In every decision-making process, the impact on the customers due to OPFMA's operations shall be taken into account, be it the impact on the surrounding environment, stakeholders, and the Agency.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS Terhadap Pelanggan Tanggung Jawab Sosial BDPKKS Terhadap Pelanggan

Rencana Kerja Terkait Kegiatan Tanggung Jawab Sosial BDPKKS Terhadap Pelanggan

OPPFMA's Work Program for Social Responsibility to Customers

Program tanggung jawab terhadap pelanggan disusun berdasarkan hasil *stakeholder mapping* yang dilakukan oleh BDPKKS. Selain itu, BDPKKS juga melaksanakan survei kepada pelanggan setiap tahun untuk mengukur faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan, ketidakpuasan dan keterikatan pelanggan. Survei ini dipandang sebagai salah satu media efektif untuk memperoleh *feedback* dari pelanggan atas layanan yang diberikan terutama dalam upaya mengelola operasional bisnis. Selanjutnya BDPKKS menyusun rencana program tanggung jawab terhadap pelanggan untuk mendukung setiap program pengembangan bisnis sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan daya saing Badan.

Responsibility programs to customers are prepared based on the results of stakeholder mapping conducted by OPPFMA. In addition, OPPFMA conducts an annual customer survey to assess the factors that influence the level of customer satisfaction, dissatisfaction, and engagement. This survey is considered an effective medium for obtaining feedback from customers on services provided, especially in an effort to manage business operations. Further, OPPFMA prepares work programs for the responsibilities to customers to support any business development program, thereby increasing customer loyalty and competitiveness of the Agency.

Realisasi Kegiatan dan Dampaknya Tanggung Jawab Sosial BDPKKS Terhadap Pelanggan

OPPFMA's Social Responsibility to Customers Activities and Their Impacts

1

PENINGKATAN LAYANAN PELANGGAN CUSTOMER SERVICE IMPROVEMENT

BDPKKS memandang perlindungan Pelanggan merupakan suatu kewajiban, hal ini sejalan dengan setiap proses bisnis yang dijalankan oleh BDPKKS selalu memperhatikan kesesuaian rangkaian prosedur Standar Pelayanan BDPKKS, hal ini merupakan komitmen BDPKKS untuk terus meningkatkan mutu dan layanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial BDPKKS terhadap Pelanggan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan BDPKKS dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan yaitu:

1. Memberikan kemudahan layanan bagi Pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan operasional bisnis BDPKKS di *Call Center*, *website*, dan media sosial BDPKKS;
2. Melakukan survei kepuasan Pelanggan;
3. Menangani keluhan serta pendapat Pelanggan untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan;
4. Mempercepat rangkaian proses bisnis dan pekerjaan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lancar dan optimal;
5. Memberi kepastian dalam penyelesaian klaim sehingga dapat meningkatkan kepuasan Pelanggan.

OPPFMA considers Customer protection as an obligation. This is in line with every business process carried out by OPPFMA that complies with the OPPFMA's Service Standard. This is OPPFMA's commitment to improving quality and service as a form of OPPFMA's social responsibility to Customers. OPPFMA takes several measures to improve services to Customer:

1. Memberikan kemudahan layanan bagi Pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan operasional bisnis BDPKKS di *Call Center*, *website*, dan media sosial BDPKKS;
2. Melakukan survei kepuasan Pelanggan;
3. Menangani keluhan serta pendapat Pelanggan untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan;
4. Mempercepat rangkaian proses bisnis dan pekerjaan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lancar dan optimal;
5. Memberi kepastian dalam penyelesaian klaim sehingga dapat meningkatkan kepuasan Pelanggan.



2 | SURVEI KEPUASAN PELANGGAN CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Pada tahun 2019 telah dilakukan survei untuk mengukur persepsi dan penerimaan Pelanggan terhadap layanan yang disediakan dan dilakukan oleh BPDPKS. Survei tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang menjadi prioritas untuk dilakukannya perbaikan, selain itu untuk mengukur kepuasan Pelanggan, dan sebagai media untuk memperoleh saran dan masukan dari kebutuhan Pelanggan.

Indeks kepuasan pengguna layanan diukur secara tahunan dan dilaksanakan pada Triwulan IV setiap tahunnya. Pengukuran berdasarkan *Customer Satisfaction Index* (CSI) yang diperoleh dari hasil survei kepuasan atas layanan dari BPDPKS kepada *stakeholder* yang mewakili unsur pemerintah (K/L), asosiasi sawit, akademisi, perusahaan, petani, dan pihak lain yang merupakan mitra kerja dan *stakeholder* yang berhubungan langsung dengan BPDPKS. Survei dilakukan dengan mekanisme melakukan kontak langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim BPDPKS dan konsultan.

Pada tahun 2019 indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 3,60 (Skala 4) tercapai 108,43% dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 3,32 (Skala 4). Hal ini menunjukkan tercapainya target kepuasan pelayanan stakeholder pada tahun 2019.

In 2019, OPPFMA conducted a survey to assess Customers' perceptions and acceptance of the services provided and carried out. The survey has the objective to identify priority areas for improvement, assess Customer satisfaction, and as a medium for obtaining advice and input from Customers.

The service user satisfaction index is measured annually and conducted in the fourth quarter every year. Customer Satisfaction Index (CSI) is measured based on the results of the service satisfaction survey from OPPFMA to stakeholders who represent the Ministries/Institutions (K/L), palm oil associations, academics, companies, farmers, and other parties who are the related working partners and stakeholders in OPPFMA. The survey was conducted directly, by the method of asking questions prepared by the OPPFMA's team and consultants.

In 2019, the service user satisfaction index was 3.60 (out of 4.0) or 108.43% compared to the 2019 target of 3.32 (out of 4.0). This reflects the target achievement of service satisfaction of the stakeholders in 2019.

Pengaduan dan Penanganan Keluhan Pelanggan Customer Complaints Handling

Sebagai bentuk tanggung jawab BPDPKS kepada pelanggan, maka BPDPKS memberikan ruang bagi pelanggan yang mendapat pelayanan kurang memuaskan dari BPDPKS. Hal ini pun menjadi kesempatan bagi BPDPKS untuk terus mengevaluasi kinerja dan sebagai salah satu tindakan preventif kedepannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Di bawah ini saluran keluhan dan saran bagi pelanggan:

As a form of OPPFMA's responsibility to customers, OPPFMA provides media for customers who receive unsatisfactory services from OPPFMA. This also provides an opportunity for OPPFMA to continue evaluating performance and as a future preventive measure in improving service quality and meeting customers' expectations. The following is channels for complaints and suggestions for customers:

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial BDPKKS Terhadap Pelanggan

Kantor Office	Graha Mandiri Lt.5 Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310	Graha Mandiri 5th Floor Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng, Central Jakarta, DKI Jakarta 10310
Telepon Phone	(021) 3983-2095	(021) 3983-2095
Fax Facsimile	(021) 3982-2095	(021) 3982-2095
Email	pengaduan@bdp.or.id	pengaduan@bdp.or.id
Website	www.bdp.or.id	www.bdp.or.id
Media Sosial Social Media	Facebook BDP SAWIT, Twitter @infosawit, instagram bdpkelapasawit	Facebook BDP SAWIT, Twitter @infosawit, instagram bdpkelapasawit

Dampak atas Kegiatan BDPKKS terhadap Pelanggan

OPPFMA's Activities Impact on Customers

BDPKKS memberi perhatian yang besar terhadap program tanggung jawab sosial terhadap pelanggan karena bagi BDPKKS, program ini menjadi investasi yang memiliki dampak terhadap pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis BDPKKS, bukan sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Selain itu, program tanggung jawab sosial terhadap pelanggan menjadi bentuk komitmen BDPKKS dalam mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Maka, dengan pemahaman tersebut, program tanggung jawab sosial terhadap pelanggan berperan penting dalam membangun reputasi serta meningkatkan citra baik BDPKKS di mata para pelanggan, masyarakat, serta Komite Pengarah.

OPPFMA takes into account the social responsibility programs to customers because, for OPFMA, this program is an investment that has an impact on OPFMA's business growth and sustainability, not as a cost center but as a profit center. In addition, the social responsibility program for customers is a form of OPFMA's commitment to supporting sustainable development. Therefore, with this understanding, the social responsibility program to customers has an important role in establishing a reputation and enhancing OPFMA's good image in the eyes of customers, the community, and the Steering Committee.

Capaian Yang Diperoleh

Achievements

Pada tahun 2019 capaian positif yang diperoleh BDPKKS atas komitmennya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada pelanggan yaitu nilai kepuasan pelanggan dan keterikatan pelanggan mengalami peningkatan, sedangkan nilai ketidakpuasan pelanggan terus menurun. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas pelayanan BDPKKS secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat memuaskan pelanggannya.

In 2019, OPFMA obtained positive achievements for its commitment in carrying out social responsibility to customers, i.e. the increase in customer satisfaction and customer engagement, and a decline in customer dissatisfaction. This reflects that the quality of OPFMA services is categorized as very satisfying to its customers.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social Responsibility to Social and Community Development

Komitmen Tanggung Jawab Sosial Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Commitment to the Social Responsibility to Social and Community Development

BPDPKS secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kinerja terbaiknya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemangku kepentingan. Masyarakat dalam hal ini adalah salah satu pemangku kepentingan yang mendapatkan perhatian besar dari BPDPKS. BPDPKS meyakini bahwa pertumbuhan BPDPKS harus diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup komunitas sekitar, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antara BPDPKS dengan masyarakat. BPDPKS melaksanakan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan mengacu pada ISO 26000 juga menjadi rujukan implementasi program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terutama pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

OPPFMA strives to improve its best performance to provide maximum benefit for stakeholders. In this case, the community is one of the stakeholders who is a great concern for OPPFMA. OPPFMA believes that its growth must be followed by an increase in the welfare and standard of living of the surrounding community, thus establishing a harmonious relationship between OPPFMA and the community. OPPFMA carries out social and community development programs with reference to ISO 26000, as well as guidance for the corporate social responsibility program activities, especially social and community development.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengembangan Sosial dan Masyarakat Social Responsibility to Social and Community Development

Dasar Hukum

Legal Basis

- Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- PP No. 23 Tahun 2005 jo. PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
- PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
- Perpres 61 Tahun 2015 jo. Perpres 24 Tahun 2016 jo. Perpres 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- PMK No. 113 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS)
- KMK No. 650 Tahun 2015 tentang Pene-tapan BDPDKS sebagai BLU
- PMK No. 136 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan BLU BDPDKS
- Law No. 17 of 2003 on State Finance
- Law No. 1 of 2004 on State Treasury
- Law No. 39 of 2014 on Plantations
- Government Regulation No. 23 of 2005 jo. Government Regulation No. 74 of 2012 on BLU Financial Management
- Government Regulation No. 24 of 2015 on Plantations Funding
- Presidential Regulation No. 61 of 2015 jo. Presidential Regulation No. 24 of 2016 jo. Presidential Regulation No. 66 of 2018 on the Funding and Utilization of Palm Oil Plantation Funds
- Minister of Finance Regulation No. 113 of 2015 on the Organization and Work Procedure of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA)
- Minister of Finance Decree No. 650 of 2015 on OPPFMA Establishment as BLU
- Minister of Finance Regulation No. 136 of 2019 on the Service Tariff of OPPFMA BLU

Informasi Tentang Isu-Isu Sosial yang Relevan dan Risiko terkait Kegiatan Sosial yang Dikelola BDPDKS

Relevant Social Issues and Risks related to OPPFMA's Managed Social Activities

BDPDKS menyadari risiko sosial yang timbul atau berkaitan dengan lingkungan sosial dimana perusahaan beroperasi. Aspek sosial budaya seperti tingkat kesejahteraan, latar belakang budaya dan pendidikan dapat menimbulkan risiko baik yang positif maupun negatif. Budaya masyarakat yang tidak peduli terhadap aspek keselamatan akan mempengaruhi keselamatan operasi perusahaan. Oleh karenanya peran BDPDKS perlu dikelola dengan manajemen risiko. Risiko yang ditimbulkan oleh perusahaan dikelola dengan menggunakan kaidah yang ada dalam Manajemen BDPDKS sehingga tidak menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun reputasi.

OPPFMA is aware of the social risks that arise or relate to the social environment where the Company operates. Socio-cultural aspects such as the level of welfare, cultural background, and education may pose both positive and negative risks. People with a culture that do not care about safety will affect the safety of the Company's operations. Therefore, OPPFMA's roles shall be managed with risk management. The risks posed by the Company are managed by using the existing rules in OPPFMA Management to ensure the risks do not cause financial or reputation losses.



Rencana Kerja Terkait Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Tahun 2019

Social Responsibility to Social and Community Development Work Program in 2019

BPDPKS menyusun rencana program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan berdasarkan analisis kebutuhan lingkungan sekitar BPDPKS. Proses analisa yang dilaksanakan untuk menjadi pertimbangan dan dasar dalam pembuatan rencana program tanggung jawab sosial BPDPKS diharapkan mampu membantu menghasilkan program yang dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Harapan kedepan kehadiran BPDPKS turut serta berkontribusi dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan adanya program pengembangan sosial BPDPKS. Secara garis besar beberapa rencana program BPDPKS mendukung Sustainable Development Goals terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

OPPFMA prepares a plan for social responsibility program to social and community development based on analysis of the needs of the environment surrounding OPPFMA. The analysis carried out becomes the consideration and basis in making OPPFMA's social responsibility programs. The analysis is expected to be able to produce programs that can address the needs and problems that occur in the community. OPPFMA hopes that, in the future, its presence will contribute to improving the welfare of the surrounding community through OPPFMA's social development program. Generally, several of OPPFMA's program plans support the Sustainable Development Goals for social and community development.

<p>1 NO POVERTY</p>	<p>10 REDUCED INEQUALITIES</p>	<p>Sawit menciptakan lapangan kerja terutama di daerah pedesaan Palm oil creates employment opportunities, especially in rural areas</p>
	<p>13 CLIMATE ACTION</p>	<p>Mereduksi karbon melalui fotosintesis pada kebun yang sangat luas dan penggunaan sebagai bahan bakar nabati Reducing carbon through photosynthesis in massive plantations and using the plantation production as biofuel</p> <p>Kebun sawit menyediakan tempat hidup aneka ragam hayati baik flora maupun fauna Palm oil plantations provide a place to live for various flora and fauna</p>
	<p>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</p>	<p>Mendukung ketahanan energi melalui penggunaan energi terbarukan Supporting energy security through the use of renewable energy</p>
	<p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p>	<p>Memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan dan penghematan devisa. Has an important role in economic development, job creation, and foreign exchange savings.</p>

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPDKS
Tanggung Jawab Sosial BDPDKS
Laporan Keuangan Audited

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengembangan Sosial dan Masyarakat Social Responsibility to Social and Community Development

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengembangan Sosial dan Masyarakat

Social Responsibility to Social and Community Development Implementation

Jenis pelatihan (bagi Petani Sawit dan Masyarakat Umum)

1. Pelatihan penumbuhan kebersamaan pekebun (PKP);
2. Pelatihan penguatan kelembagaan;
3. Pelatihan pengembangan kelembagaan dan usaha;
4. Pelatihan Kepemimpinan;
5. Pelatihan Manajemen Administrasi dan Keuangan;
6. Pelatihan Teknik Budidaya;
7. Pelatihan ISPO;
8. Pelatihan Panen dan Pascapanen;
9. Pelatihan Informasi Pasar dan Promosi;
10. Pelatihan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkebunan;
11. Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan.

Program Studi Program Beasiswa Perkebunan Kelapa Sawit

1. Pembibitan Kelapa Sawit
2. Pemeliharaan Kelapa Sawit
3. Budidaya Tanaman Perkebunan
4. Budidaya Tanaman Perkebunan
5. Teknik Kimia
6. Teknik Mesin
7. Akuntansi
8. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan
9. Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit
10. Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit
11. Manajemen Logistik
12. Teknik Pengolahan Kelapa Sawit
13. Perawatan dan Perbaikan Mesin
14. Teknik Informatika
15. Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
16. Budidaya Perkebunan
17. Teknologi Pengolahan Sawit

Training type (for Smallholders and the Public)

1. Smallholders' togetherness (PKP) training;
2. Institution's strengthening training;
3. Institutional and business development training;
4. Leadership Training;
5. Administrative and Financial Management Training;
6. Cultivation Technique Training;
7. ISPO Training;
8. Harvest and Post-Harvest Training;
9. Market Information and Promotion Training;
10. Training on Management of Plantation Facilities and Infrastructure;
11. Plantation Location Mapping Techniques.

Palm Oil Plantation Scholarship Program

1. Palm Oil Cultivation of Seedlings
2. Palm Oil Nurturing
3. Plantation Cultivation
4. Plantation Cultivation
5. Chemical Engineering
6. Mechanical Engineering
7. Accounting
8. Plantation Crop Production Technology
9. Palm Oil Processing Technology
10. Palm Oil Plantation Cultivation
11. Logistics Management
12. Palm Oil Processing Techniques
13. Machinery Repair and Maintenance
14. Informatics Engineering
15. Plantation Product Processing Technology
16. Plantation Cultivation
17. Palm Processing Technology

Dampak Kegiatan CSR terhadap Masyarakat

CSR Activities' Impact on the Community

Kegiatan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat secara langsung dan tidak langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar area operasional BDPKKS. BDPKKS senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak mengganggu *going concern* BDPKKS. Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan tanggung jawab sosial ini, dapat menciptakan hubungan yang baik dan berkesinambungan antara BDPKKS dengan para *stakeholders*.

BDPKKS senantiasa mempertimbangkan risiko terkait dengan aspek kemasyarakatan, risiko tersebut antara lain komplain dari masyarakat sekitar atas dampak kegiatan BDPKKS seperti kondisi keamanan, kebisingan, polusi udara, dan lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu tercipta suasana lingkungan yang kondusif, nyaman dan sejahtera. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain bantuan sarana ibadah dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian akan menciptakan manfaat bersama bagi masyarakat dan BDPKKS.

Social responsibility activities to the community, directly and indirectly, have an impact on improving the quality of life of the community, especially the communities around OPPFMA's operational area. OPPFMA strives to ensure that social responsibility programs for the community are carried out properly, so that they do not interfere with OPPFMA's going concern. In addition, social responsibility activity shall create a good and sustainable relationship between OPPFMA and stakeholders.

OPPFMA considers risks related to social aspects, such as complaints from surrounding communities on the impact of OPPFMA's activities: security, noise, air pollution, etc. This shall meet the expectations of the community to create a conducive, comfortable, and prosperous environment. The efforts include religious facility assistance and poverty alleviation. Thus, it shall create mutual benefits for the community and OPPFMA.

Saluran Pengaduan Di Bidang Pengembangan Sosial kemasyarakatan

Complaints Channels in the Field of Social Development

Untuk saluran pengaduan di bidang pengembangan sosial kemasyarakatan dapat disampaikan pada melalui email: pengaduan@bpdp.or.id

Complaints in the field of community social development can be submitted via email to pengaduan@bpdp.or.id

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPPPKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BPPPKS
Tanggung Jawab Sosial BPPPKS
Laporan Keuangan Audited

Laporan Keuangan Audited

Audited Financial Statements



OPPFMA'S Governance
OPPFMA'S Social Responsibility
Audited Financial Statements

Background
Report to The Regulators and Stakeholders
OPPFMA'S Profile
Operational & Financial Performance Discussion and Analysis



Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
● **Laporan Keuangan Audited**

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS

**31 DESEMBER 2019/
31 DECEMBER 2019**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

GEDUNG GRAHA MANDIRI LANTAI 5, JALAN IMAM BONJOL NO.61, JAKARTA 10310
TELEPON (021) 39832091-94 FAKSIMILE (021) 39832095 EMAIL: bpdpsawit@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019**

***DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT
AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019***

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Eddy Abdurrachman
Alamat Kantor : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Alamat Rumah : Jl. Teratai IC/G-1
Tanjung Barat Indah
Jagakarta, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-3983 2091
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Zaid Burhan Ibrahim
Alamat Kantor : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Alamat Rumah : Gg. Harimau 2, LKI No. 25
Sukamenanti, Bandar Lampung
Nomor Telepon : 021-3983 2091
Jabatan : Direktur Keuangan, Umum,
Kepatuhan, dan Manajemen Risiko

1. Name : Eddy Abdurrachman
Office address : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Residential Address : Jl. Teratai IC/G-1
Tanjung Barat Indah,
Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telephone : 021-3983 2091
Title : President Director
2. Name : Zaid Burhan Ibrahim
Office address : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Residential Address : Gg. Harimau 2, LKI No. 25
Sukamenanti, Bandar Lampung
Telephone : 021-3983 2091
Title : Director of Finance, General Affairs,
Compliance, and Risk Management

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPD PKS");
 2. Laporan keuangan BPD PKS telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan BPD PKS telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan BPD PKS tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal BPD PKS.
1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPD PKS");
 2. BPD PKS' financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
 3. a. All information in the BPD PKS' financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. BPD PKS' financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material facts;
 4. We are responsible for the BPD PKS' internal control system.

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BPPDKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

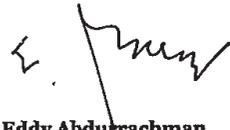
Tata Kelola BPPDKS
Tanggung Jawab Sosial BPPDKS
● Laporan Keuangan Audited

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

JAKARTA, 08 Mei/May 2020

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*



Eddy Abdurachman
Direktur Utama/
President Director



Zaid Burhan Ibrahim
Direktur Keuangan, Umum,
Kepatuhan, dan Manajemen Risiko/
*Director of Finance, General Affairs,
Compliance, and Risk Management*



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA DEWAN PENGAWAS**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE
BOARD OF SUPERVISORS**

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2019, and the statement of activities and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00844/2.1025/AU.1/11/0230-3/1/V/2020

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited



Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 14b atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang ketidakpastian terkait dengan dampak dari *Coronavirus 2019 Pandemic* ("Pandemi COVID-19") terhadap keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit secara keseluruhan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit as at 31 December 2019, and their financial activities and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 14b to these financial statements, which describes the uncertainty related to overall financial impact of the Coronavirus 2019 Pandemic ("the COVID-19 Pandemic") to Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Our opinion is not modified in respect of this matter.

JAKARTA
8 Mei/May 2020

Eddy Rintis, S.E., CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/ License of Public Accountant No. AP.0230

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**Lampiran - 1 - Schedule****LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	Catatan/ Notes	<u>2018</u>	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	16,372,330,615,236	4	20,922,802,360,212	Cash and cash equivalents
Piutang	51,151,156,701	5	32,075,041,641	Receivables
Investasi jangka pendek	190,245,300,000	6	-	Short-term investment
Aset lancar lainnya	<u>4,399,287,286</u>		<u>4,374,885,243</u>	Other current assets
Jumlah aset lancar	<u>16,618,126,359,223</u>		<u>20,959,252,287,096</u>	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset tetap - bersih	8,867,872,033		11,130,486,041	Fixed assets - net
Aset tidak lancar lainnya	<u>900,713,853</u>		<u>1,051,113,068</u>	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	<u>9,768,585,886</u>		<u>12,181,599,109</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET	<u>16,627,894,945,109</u>		<u>20,971,433,886,205</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Akrual	605,533,509,964	7	879,005,394,640	Accruals
Utang lainnya	<u>14,559,631,292</u>		<u>708,489,238</u>	Other payables
JUMLAH LIABILITAS	<u>620,093,141,256</u>		<u>879,713,883,878</u>	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto tidak terikat	<u>16,007,801,803,853</u>		<u>20,091,720,002,327</u>	Unrestricted net assets
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>16,627,894,945,109</u>		<u>20,971,433,886,205</u>	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Pendahuluan
Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Profil BDPKKS
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan

Tata Kelola BDPKKS
Tanggung Jawab Sosial BDPKKS
Laporan Keuangan Audited

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 2 - Schedule

LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF ACTIVITIES FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENDAPATAN				INCOME
(Pengembalian)/pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit	(4,594,369,072)	8	14,367,402,955,848	(Restitution)/income from fund collection of oil palm plantation
Pendapatan atas pengelolaan dana	1,494,484,215,931	9	1,047,535,154,334	Income from fund management
Pendapatan lainnya	<u>1,432,122,213</u>		<u>7,319,165,081</u>	Other income
Jumlah pendapatan	<u>1,491,321,969,072</u>		<u>15,422,257,275,263</u>	Total income
BEBAN				EXPENSES
Beban penyaluran dana	(5,492,822,594,875)	10	(6,247,423,275,382)	Fund disbursement expenses
Beban dukungan layanan manajemen	<u>(81,962,872,671)</u>	11	<u>(89,790,425,902)</u>	Management services support expenses
Jumlah beban	<u>(5,574,785,467,546)</u>		<u>(6,337,213,701,284)</u>	Total expenses
Penyesuaian nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	<u>(454,700,000)</u>		<u>-</u>	Fair value adjustment on available-for sale financial assets
(Penurunan)/kenaikan aset neto tidak terikat	<u>(4,083,918,198,474)</u>		<u>9,085,043,573,979</u>	(Decrease)/increase in unrestricted net assets
Aset neto tidak terikat awal tahun	<u>20,091,720,002,327</u>		<u>11,006,676,428,348</u>	Unrestricted net assets at the beginning of the year
Aset neto tidak terikat akhir tahun	<u>16,007,801,803,853</u>		<u>20,091,720,002,327</u>	Unrestricted net assets at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 3 - Schedule

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:			Cash received from:
(Pengembalian)/pungutan dana perkebunan kelapa sawit	(42,394,103,544)	14,413,921,271,119	(Restitution)/collection of oil palm plantation fund
Pengelolaan dana	1,471,062,662,732	745,879,089,056	Fund management
Pendapatan lainnya	796,602,919	7,243,473,738	Other income
Pengeluaran kas untuk:			Cash disbursement for:
Penyaluran dana	(5,719,325,013,052)	(6,277,994,284,706)	Fund distribution
Gaji dan tunjangan	(49,632,698,371)	(41,955,367,285)	Salaries and allowances
Pemasok	(29,854,056,851)	(42,995,565,809)	Supplier
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasi	(4,369,346,606,167)	8,804,098,616,113	Net cash flows (used for)/ provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
(Penempatan)/pencairan pada investasi jangka pendek	(192,113,400,000)	8,643,092,784,654	(Placement)/liquidation on short-term investment
Pendapatan bunga atas investasi jangka pendek	11,771,461,191	289,436,583,278	Income from short-term investment, net
Pembelian aset tetap	(290,180,000)	(666,214,091)	Acquisition of fixed assets
Pembelian aset tidak lancar lainnya	(493,020,000)	(78,505,627)	Acquisition of other non-current assets
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas investasi	(181,125,138,809)	8,931,784,648,214	Net cash flows (used for)/ provided from investing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih pada kas dan setara kas	(4,550,471,744,976)	17,735,883,264,327	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>20,922,802,360,212</u>	<u>3,186,919,095,885</u>	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>16,372,330,615,236</u>	<u>20,922,802,360,212</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BDPKKS") merupakan unit organisasi non-eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BDPKKS dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.01/2015 tentang Penetapan BDPKKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.

Badan Layanan Umum didirikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

BDPKKS berlokasi di Graha Mandiri, Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta Pusat.

BDPKKS melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.01/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BDPKKS.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

1. GENERAL INFORMATION

Oil Palm Plantation Fund Management Agency or Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BDPKKS") is a non-echelon unit reporting to the Minister of Finance through Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. BDPKKS was established based on the Decision of Minister of Finance No. 650/KMK.01/2015 regarding the Establishment of BDPKKS at the Ministry of Finance as a Government Agency that fully implements the Financial Management of Public Service Agency.

Public Service Agency was established to improve the services given to public in order to improve general welfare and educating nation by providing flexibility in financial management based on the economic and productivity principles and implementation of healthy business practice.

BDPKKS is located at Graha Mandiri, 5th Floor, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Central Jakarta.

BDPKKS carries out its duties based on the following laws and regulations:

1. *Constitution Law No. 17 of 2003 on State Finances.*
2. *Constitution Law No. 1 of 2004 on State Treasury.*
3. *Constitution Law No. 39 of 2014 on Plantations.*
4. *Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 24 of 2015 on Collection of Plantation Fund.*
5. *Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 74 of 2012 on the Amendment for Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 23 of 2005 on Financial Management of Public Service Agency.*
6. *Presidential Decree No. 66 of 2018 regarding the Second Amendment to Presidential Decree No. 61 of 2015 on Collection and Utilisation of Oil Palm Plantation Funds.*
7. *Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.113/PMK.01/2015 on Organisational Structure and Working Procedure of BDPKKS.*
8. *Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 220/PMK.05/2016 on Accounting and Financial Reporting System of Public Service Agencies.*

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**Lampiran - 4/2 - Schedule****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

BPDPKS melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan berikut (lanjutan):

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 80/PMK.05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum BPDPKS.
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum BPDPKS.
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi BPDPKS pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
Dewan Pengawas:	
Ketua	Rusman Heriawan
Anggota	Loso Judijanto
Anggota	Joko Supriyono
Anggota	Musdhalifah Machmud
Anggota	Heru Pambudi
Anggota	Djoko Siswanto
Anggota	Kasan
Anggota	Achmad Sigit Dwiwahjono
Anggota	Kasdi Subagyo

1. GENERAL INFORMATION (continued)

BPDPKS carries out its duties based on the following laws and regulations (continued):

9. *Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 136/PMK.05/2019 on Third Amendment for Regulation of the Minister of Finance No. 81/PMK.05/2018 on Tariff of Service of Public Service Agency of BPDPKS at the Ministry of Finance.*
10. *Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 80/PMK.05/2016 on Standar Pelayanan Minimum of BPDPKS.*
11. *Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 41 of 2018 on the Supply and Utilisation of Biofuel with Biodiesel Type in the Financing Framework by BPDPKS.*
12. *Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 82/PMK.05/2018 on Cash Management and Investment of Public Service Agency.*
13. *Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 84/PMK.05/2017 on Use of Replanting Fund of Oil Palm Plantations of Public Service Agency of BPDPKS.*
14. *Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 7 of 2019 on Human Resource Development, Research and Development, Replanting, Infrastructure and Facilities of Oil Palm Plantations.*

The composition of BPDPKS' Board of Supervisors and Directors as at 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018
Board of Supervisors:		
	Rusman Heriawan	Rusman Heriawan
	Loso Judijanto	Loso Judijanto
	Joko Supriyono	Joko Supriyono
	Musdhalifah Machmud	Musdhalifah Machmud
	Heru Pambudi	Heru Pambudi
	Djoko Siswanto	Djoko Siswanto
	Kasan	Bambang
	Achmad Sigit Dwiwahjono	Arlinda
	Kasdi Subagyo	Panggah Susanto

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/3 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi BDPKKS pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2019	2018	
Direksi :			Board of Directors:
Direktur Utama	Dono Boestami ¹⁾	Dono Boestami	<i>President Director</i>
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Catur Ariyanto Widodo ¹⁾	Catur Ariyanto Widodo	<i>Director of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management</i>
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana	Kabul Wijayanto	-	<i>Director of Planning and Fund Management</i>
Direktur Penghimpunan Dana	Sunari	Hendrajat Natawidjaja	<i>Director of Fund Raising</i>
Direktur Penyaluran Dana	Edi Wibowo	Edi Wibowo	<i>Director of Fund Distribution</i>
Direktur Kemitraan	-	Tulus Budhianto	<i>Director of Partnership</i>

¹⁾ Efektif tanggal 2 Maret 2020, Eddy Abdurachman dan Zaid Burhan Ibrahim masing-masing menggantikan Dono Boestami dan Catur Ariyanto Widodo (Catatan 14a).

¹⁾ Effective 2 March 2020, Eddy Abdurachman and Zaid Burhan Ibrahim replaced Dono Boestami and Catur Ariyanto Widodo, respectively. (Notes 14a).

Susunan Komite Audit BDPKKS pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of BDPKKS' Audit Committee as at 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Ketua Anggota	Loso Judijanto	Loso Judijanto	<i>Chairman</i>
Anggota	Hary Noegroho Soelistianto	Hary Noegroho Soelistianto	<i>Member</i>
Anggota	-	Mohammad Hatta	<i>Member</i>

Pada tanggal 31 Desember 2019, BDPKKS mempunyai 89 pegawai (tidak diaudit).

As of 31 December 2019, BDPKKS has a total of 89 employees (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan BDPKKS disusun oleh Dewan Direksi dan diotorisasi pada 8 Mei 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of BDPKKS were prepared by the Board of Directors and authorised on 8 May 2020.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan:

The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out below:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan BDPKKS telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of BDPKKS have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain yang dijelaskan pada masing-masing kebijakan akuntansi. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

The financial statements have been prepared on the basis of the historical cost concept, except for certain accounts which are prepared based on other measurement described in the respective accounting policies. The financial statements have also been prepared on the basis of accrual concept, except for the statement of cash flows.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statement of cash flows have been prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**Lampiran - 4/4 - Schedule****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)****a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional BPDPKS.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi BPDPKS. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Tidak ada standar/interpretasi standar baru atau revisi untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah mulai 1 Januari 2019 yang relevan terhadap BPDPKS.

Standar baru, amandemen standar dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi BPDPKS, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh BPDPKS, adalah sebagai berikut:

- ISAK 35 "Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan"
- PSAK 71, "Instrumen keuangan"
- PSAK 72, "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"
- PSAK 73, "Sewa"

Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan, kecuali untuk PSAK 73 "Sewa". Penerapan dini untuk PSAK 73 "Sewa" diperbolehkan hanya jika BPDPKS telah menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan".

Pada saat laporan keuangan diotorisasi, BPDPKS sedang mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan BPDPKS

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**a. Basis of preparation of the financial statements (continued)**

The presentation currency used in the financial statements is Rupiah, which is the BPDPKS' functional currency.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the BPDPKS accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Notes 3.

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISFAS")

No new or revised standards/interpretation of standards for the financial year beginning or after 1 January 2019 which relevant to BPDPKS.

New standards, amendments and interpretations issued and relevant to BPDPKS, that are mandatory for the financial year beginning or after 1 January 2020 and have not been early adopted by BPDPKS, are as follows:

- *ISFAS 35 "Presentation of not for profit oriented entity financial statements"*
- *Amendment to SFAS 1 "Presentation of financial statement"*
- *Amendment to SFAS 25 "Accounting policies, changes in accounting estimates, and errors"*
- *SFAS 71, "Financial instruments"*
- *SFAS 72, "Revenue from contract with customers"*
- *SFAS 73, "Leases"*

Early adoption of the above standards are permitted, except for SFAS 73 "Leases". Early adoption for SFAS 73 "Leases" is permitted only if the BPDPKS apply SFAS 72 "Revenue from contracts with customers".

As at the authorisation date of these financial statements, BPDPKS is evaluating the potential impact of the implementation of these new and amended standards to the BPDPKS' financial statements.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/5 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan

BDPKKS mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

BDPKKS mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, tersedia untuk dijual, serta dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, BDPKKS memiliki aset keuangan dalam bentuk pinjaman yang diberikan dan piutang serta tersedia untuk dijual.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang BDPKKS terdiri dari kas dan setara kas dan piutang dalam laporan posisi keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah instrumen non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Aset keuangan tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud melepasnya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset keuangan tersedia untuk dijual BDPKKS terdiri dari investasi jangka pendek dalam laporan posisi keuangan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments

BDPKKS classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

BDPKKS classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivables, available-for-sale, and held to maturity. The classification depends on purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

As at 31 December 2019, BDPKKS had financial assets classified as loans and receivables and available-for-sale.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

Loans and receivables are included in current assets for maturities shorter than 12 months after the end of reporting period, otherwise, they are classified as non-current assets. BDPKKS' loans and receivables comprise of cash and cash equivalents and receivables in the statement of financial position.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Available-for-sale financial assets are non-derivatives that are either designated in this category or not classified in any of the other categories. They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months of the end of the reporting period. BDPKKS' available-for-sale financial assets comprise of short-term investment in the statement of financial position.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/6 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya dicatat sebesar nilai wajar. Perubahan nilai wajar efek moneter dan non-moneter yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui pada laporan aktivitas sebagai kerugian/keuntungan penyesuaian atas nilai wajar investasi tersedia untuk dijual.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan – tanggal dimana BDPKKS berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan BDPKKS telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Liabilitas keuangan

BDPKKS mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori: liabilitas keuangan yang perlu diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan diukur dengan biaya perolehan amortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, BDPKKS hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang terdiri dari akrual dan utang lainnya. Setelah pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, BDPKKS mengukur seluruh liabilitas keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi yang menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan telah dilunasi.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, BDPKKS menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti yang objektif mengenai bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa kerugian") dan peristiwa kerugian (atau peristiwa) tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa yang akan datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Available-for-sale financial assets are initially recognised at fair value plus the transaction costs and subsequently carried at fair value. Changes in fair value of monetary and non-monetary securities classified as available-for-sale are recognised in statement of activities as loss/gain on fair value adjustment of available-for-sale investment.

Regular purchases and sale of financial assets are recognised on the trade-date – the date on which BDPKKS commits to purchase or sell the assets. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and BDPKKS has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

Financial liabilities

BDPKKS classified its financial liabilities into categories: financial liabilities measured at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortised cost.

As at 31 December 2019, BDPKKS only had financial liabilities measured at amortised cost that comprise of accruals and other payables. After initial recognition which is at fair value plus transaction costs, BDPKKS measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rates method. Financial liabilities are derecognised when they have been paid.

Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, BDPKKS assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment loss is incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a loss event) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/7 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah bersihnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

d. Kas dan setara kas

Pada laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan tanggal jatuh tempo awal dalam waktu tiga bulan atau kurang.

e. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

f. Provisi

Provisi diakui apabila BDPKKS mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

g. Pengakuan pendapatan

Pendapatan BDPKKS terdiri dari pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan pendapatan atas pengelolaan dana. BDPKKS mengakui pendapatan pada saat jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir kepada BDPKKS.

h. Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

d. Cash and cash equivalents

In the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits held at call with banks, and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less.

e. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment, if any.

f. Provision

Provisions are recognised when BDPKKS has a present obligation (legal as well as constructive) as a result of past events and when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

g. Income recognition

BDPKKS' income consist of income from fund collection of oil palm plantations and income from fund management. BDPKKS recognises income when the amount of income can be reliably measured and it is probable that future economic benefits will flow to BDPKKS.

h. Expenses recognition

Expenses are recognised when they are incurred on an accrual basis.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**Lampiran - 4/8 - Schedule****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)****i. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

BPDPKS melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Penyesuaian 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)****i. Transactions with related parties**

BPDPKS enters into transactions with related parties as defined in SFAS 7 (Improvement 2015) "Related party disclosures".

The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah aset dan liabilitas adalah terkait dengan akrual.

Pertimbangan yang signifikan terutama diperlukan untuk menentukan akrual peremajaan kebun kelapa sawit dan akrual selisih harga biodiesel. Akrual diakui ketika BPDPKS memiliki kewajiban masa kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi serta estimasi yang handal mengenai akrual tersebut dapat dibuat. BPDPKS memperkirakan jumlah akrual dengan mempertimbangkan peraturan yang mengatur dan data yang diperoleh dari pihak terkait yang dapat diandalkan.

Efektif sejak 5 Desember 2019, akrual atas penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit diakui ketika pengajuan atas Dana Peremajaan Sawit Rakyat ("PSR") oleh Pekebun telah memperoleh Rekomendasi Teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan, dan Rekomendasi Teknis tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama BPDPKS dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Direktur Utama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Direktur Utama No. PER-7/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana PSR yang diterbitkan pada tanggal tersebut, yang mengatur bahwa Rekomendasi Teknis disetujui berdasarkan ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

Estimates and judgments used in preparing the financial statements are periodically evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that may occur. Actual results may differ from these estimates. Significant estimates and assumptions that have significant effect on the amounts of assets and liabilities is related to accruals.

Significant judgment is required mainly in determining the accruals for palm oil plantation replanting and accruals for biodiesel price variance. Accruals are recognised when BPDPKS has a present obligation (legal as well as constructive) as a result of past events and it is more likely than not that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. BPDPKS estimates accruals with consideration of governing regulations and reliable data obtained from respective counterparties.

Effective on 5 December 2019, the accrual of the fund distribution of palm oil plantation replanting will be recognised when the proposal of the Peremajaan Sawit Rakyat ("PSR") Funds by the Farmers has obtained a Technical Recommendation from the Director General of Plantations, and the Technical Recommendation has been approved by the President Director of BPDPKS by the issuance of the President Director's Decree Letter. This is in accordance with President Director's Regulation No. PER-7/DPKS/2019 concerning Mechanism of the Distribution and Use of PSR Funds, which determined that the Technical Recommendations will be approved upon the availability of funds and the completeness of documents.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/9 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kas	84,206,913	176,735,241
Kas di bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	28,225,995,528	3,604,684,852
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10,352,182	10,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,060,609	10,940,115
	<u>28,246,408,319</u>	<u>3,625,624,967</u>
Deposito berjangka		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8,168,000,000,000	8,320,000,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,676,000,000,002	6,549,000,000,002
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<u>2,500,000,000,002</u>	<u>6,050,000,000,002</u>
	<u>16,344,000,000,004</u>	<u>20,919,000,000,004</u>
	<u>16,372,330,615,236</u>	<u>20,922,802,360,212</u>

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand
Cash in banks
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Time deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

5. PIUTANG

Piutang sebagian besar terkait dengan pendapatan bunga dari bunga deposito berjangka and investasi jangka pendek.

5. RECEIVABLES

Receivables mainly related to the interest income from time deposits and short-term investment.

6. INVESTASI JANGKA PENDEK

Tersedia Untuk Dijual

Investasi/Investment	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rate	Available-For-Sale		
			Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Surat Utang Negara/ Government Bonds					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	15 Mei/May 2023	5.6%	100,000,000,000	98,200,000,000	97,852,100,000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	15 Mei/May 2033	6.6%	100,000,000,000	92,500,000,000	92,393,200,000
			<u>200,000,000,000</u>	<u>190,700,000,000</u>	<u>190,245,300,000</u>

6. SHORT-TERM INVESTMENT

7. AKRUAL

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Peremajaan kebun kelapa sawit	315,927,957,500	807,177,522,500
Selisih harga biodiesel	267,283,092,134	5,556,855,810
Jasa surveyor	8,816,212,183	14,814,401,215
Pengembalian pungutan dana perkebunan kelapa sawit	8,718,580,799	46,518,315,271
Insentif pegawai	4,787,667,348	4,914,303,247
Lainnya	-	23,996,597
	<u>605,533,509,964</u>	<u>879,005,394,640</u>

7. ACCRUALS

Palm oil plantation replanting
Biodiesel price variance
Surveyor fee
Restitution of fund collection of oil palm plantation
Employee incentives
Others

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**Lampiran - 4/10 - Schedule****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***8. (PENGEMBALIAN)/PENDAPATAN PUNGUTAN
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit adalah pendapatan yang berasal dari pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya.

Tarif pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan/Regulation of the Minister of Finance	Periode pungutan/ Collection period	Harga CPO/ CPO Prices < US\$ 570	Harga CPO/ CPO Prices US\$ 570 - 619	Harga CPO/ CPO Prices US\$ > 619
No. 152/PMK.05/2018	4 Desember/December 2018 - seterusnya/onwards	US\$0	Bervariasi antara/varies between US\$ 5 - 25	Bervariasi antara/varies between US\$ 20 - 50
No. 23/PMK.05/2019	1 Maret/March - 31 Mei/May 2019	US\$0	US\$0	US\$0
	1 Juni/June - seterusnya/onwards	US\$0	Bervariasi antara/varies between US\$ 5 - 25	Bervariasi antara/varies between US\$ 10 - 50
No. 136/PMK.05/2019	1 Oktober/October - 31 Desember/December 2019	US\$0	US\$0	US\$0
	1 Januari/January 2020 - seterusnya/onwards	US\$0	Bervariasi antara/varies between US\$ 5 - 25	Bervariasi antara/varies between US\$ 10 - 50

Penentuan Harga CPO mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Pengembalian pungutan dana perkebunan kelapa sawit adalah pembayaran pengembalian dana kepada eksportir yang disebabkan oleh pembatalan ekspor, kelebihan pembayaran pungutan, perubahan tarif dan/atau hal lainnya yang ditetapkan oleh BPDPKS.

**8. (RESTITUTION)/INCOME FROM FUND
COLLECTION OF OIL PALM PLANTATION**

Income from fund collection of oil palm plantation is income which derived from levies on the export of oil palm products and its derivatives.

Levies tariff on the export of oil palm products and its derivatives were determined based on the Regulation of the Minister of Finance as follows:

Tarif pungutan/Levies tariff				
Peraturan Menteri Keuangan/Regulation of the Minister of Finance	Periode pungutan/ Collection period	Harga CPO/ CPO Prices < US\$ 570	Harga CPO/ CPO Prices US\$ 570 - 619	Harga CPO/ CPO Prices US\$ > 619
No. 152/PMK.05/2018	4 Desember/December 2018 - seterusnya/onwards	US\$0	Bervariasi antara/varies between US\$ 5 - 25	Bervariasi antara/varies between US\$ 20 - 50
No. 23/PMK.05/2019	1 Maret/March - 31 Mei/May 2019	US\$0	US\$0	US\$0
	1 Juni/June - seterusnya/onwards	US\$0	Bervariasi antara/varies between US\$ 5 - 25	Bervariasi antara/varies between US\$ 10 - 50
No. 136/PMK.05/2019	1 Oktober/October - 31 Desember/December 2019	US\$0	US\$0	US\$0
	1 Januari/January 2020 - seterusnya/onwards	US\$0	Bervariasi antara/varies between US\$ 5 - 25	Bervariasi antara/varies between US\$ 10 - 50

Detemination of CPO Prices refers to the reference price stipulated by the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia.

Restitution of fund collection of oil palm plantation is payment restitution of levies to exporter which resulted from export cancellations, overpayment of levies, changes in levies and/or other matters as determined by BPDPKS.

9. PENDAPATAN ATAS PENGELOLAAN DANA

	2019	2018
Pendapatan bunga dari deposito berjangka	1,480,468,851,034	746,009,166,695
Pendapatan bunga dari investasi jangka pendek	11,906,161,191	289,436,583,278
Pendapatan jasa giro	2,109,203,706	12,089,404,361
	<u>1,494,484,215,931</u>	<u>1,047,535,154,334</u>

9. INCOME FROM FUND MANAGEMENT

Interest income from time deposit
Interest income from short-term investment
Bank interest income

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/11 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. BEBAN PENYALURAN DANA

10. FUND DISBURSEMENT EXPENSES

	2019	2018	
Pembayaran selisih harga biodiesel	3,425,344,132,267	4,824,581,966,232	Biodiesel price variance payment
Penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	1,811,013,142,808	1,141,435,770,389	Oil palm plantation replanting fund
Dana riset	122,511,204,086	61,660,689,209	Research fund
Promosi kelapa sawit	66,742,022,793	56,565,155,693	Oil palm promotion
Pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit	37,143,619,079	29,239,304,402	Oil palm human resource development
Jasa surveyor	26,570,763,234	130,776,470,674	Surveyor fee
Perencanaan dan pengelolaan dana	3,016,927,828	2,290,041,744	Planning and fund management
Sarana dan prasarana	480,782,780	873,877,039	Infrastructure
	<u>5,492,822,594,875</u>	<u>6,247,423,275,382</u>	

11. BEBAN DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN

11. MANAGEMENT EXPENSES

SERVICE SUPPORT

	2019	2018	
Gaji dan tunjangan	49,506,062,472	43,503,008,279	Salaries and allowances
Sewa	12,274,704,364	15,874,460,153	Rent
Jasa profesional	6,689,259,480	14,465,665,095	Professional fee
Perlengkapan kantor	5,737,078,107	6,271,857,738	Office supplies
Lainnya	7,755,768,248	9,675,434,637	Others
	<u>81,962,872,671</u>	<u>89,790,425,902</u>	

12. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI

12. RELATED PARTIES INFORMATION

Personil manajemen kunci

Key management personnel

Kompensasi kepada personil manajemen kunci (terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Compensation of the key management personnel (consist of Board of Supervisors and Directors) for the years ended 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Imbalan kerja jangka pendek	<u>15,140,237,473</u>	<u>15,803,190,643</u>	Short-term employee benefits

13. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Faktor-faktor risiko keuangan

Financial risk factors

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan BDPKKS adalah risiko pasar (termasuk risiko tingkat suku bunga dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. BDPKKS menerapkan kebijakan manajemen risiko keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar keuangan terhadap kinerja keuangan BDPKKS.

The main risks arising from the BDPKKS' financial instruments are market risk (including interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. Management review and determine policies for managing each of these risks. BDPKKS applies financial risk management policies to minimise impact of unpredictability financial markets on BDPKKS' financial performance.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/12 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)**

Berikut ini ringkasan kebijakan manajemen risiko tersebut:

(1) Risiko pasar**Risiko tingkat suku bunga**

BPDPKS menghadapi risiko tingkat bunga yang timbul dari fluktuasi tingkat bunga pasar.

Pada tanggal 31 Desember 2019, aset keuangan BPDPKS yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi BPDPKS terdiri dari deposito berjangka dan investasi jangka pendek dengan pendapatan tetap, sehingga tidak memiliki eksposur signifikan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

Risiko harga

BPDPKS menghadapi risiko harga atas surat berharga utang yang berasal dari investasi jangka pendek yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

BPDPKS melakukan analisis terkait besarnya bunga kupon yang ditawarkan dengan tingkat imbal hasil umum yang diharapkan oleh pasar. Kinerja investasi tersedia untuk dijual dimonitor secara periodik, bersamaan dengan penilaian relevansi investasi tersebut terhadap rencana strategis BPDPKS.

(2) Risiko kredit

BPDPKS memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang dan investasi jangka pendek yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Piutang sebagian besar berasal dari pendapatan bunga dari penempatan deposito berjangka dan investasi jangka pendek.

Deposito berjangka dan kas di bank ditempatkan pada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki penilaian peringkat komposit bank yang sehat.

Untuk investasi yang ditempatkan pada surat utang dengan pendapatan tetap, BPDPKS menempatkan investasinya pada Surat Utang Negara.

Tidak ada dari aset keuangan tersebut yang telah melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai.

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**Financial risk factors (continued)**

Summary of financial risk management policies are as follows:

(1) Market risk**Interest rate risk**

BPDPKS is exposed to interest rate risk arising from the fluctuation in market interest rates.

As at 31 December 2019, BPDPKS' financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. BPDPKS' investments consist of time deposits and short-term investment with fixed income, thus no significant exposure on the effects of fluctuation in the prevailing levels of market interest rate.

Price risk

BPDPKS is exposed to debt securities price risk from short-term investment which was classified as available-for-sale.

BPDPKS performs an analysis of the number of coupon bonds offered and the required rate of return which is generally expected by the market. The performance of the BPDPKS's available-for-sale investments is monitored periodically, together with a regular assessment of their relevance to the BPDPKS's strategic plans.

(2) Credit risk

BPDPKS is exposed to credit risk primarily from deposits in banks, receivables and short-term investment classified as available-for-sale. Receivable mainly arise from interest income from placement of time deposit and short-term investment.

Time deposits and cash in banks are placed in Government Banks that has a healthy bank composite rating.

For investment placed in fixed income debt securities, BPDPKS placed their investment in Government Bonds.

None of these financial assets are either past due or impaired.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/13 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

(3) Risiko likuiditas

BPDPKS tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika BPDPKS mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. BPDPKS mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, liabilitas keuangan BPDPKS terutama terdiri dari akrual dan utang lainnya yang jumlahnya tidak signifikan terhadap aset likuid BPDPKS. BPDPKS memiliki likuiditas aset yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas, serta investasi jangka pendek – Surat Utang Negara.

(4) Estimasi nilai wajar

Untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal posisi keuangan, pengukuran nilai wajarnya diungkapkan dengan tingkat hirarki pengukuran nilai wajar sebagai berikut:

- a) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset yang identik ("harga yang tersedia di pasar yang aktif") – Tingkat 1.
- b) Input selain harga kuotasian dalam pasar aktif yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung ("transaksi pasar yang dapat diobservasi") – Tingkat 2.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang didiskonto dengan tingkat suku bunga pasar yang relevan.

- c) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi ("transaksi pasar yang tidak dapat diobservasi") – Tingkat 3.

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(3) Liquidity risk

BPDPKS has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where BPDPKS has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. BPDPKS manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

As at 31 December 2019, BPDPKS' financial liability is mainly accruals and other payables which are insignificant to the total BPDPKS' liquid assets. BPDPKS' assets are highly liquid in form of cash and cash equivalents, and short-term investment – Government Bonds.

(4) Fair value estimation

For financial instruments that are measured at fair value at balance sheet date, the corresponding fair value measurements are disclosed by level of following fair value measurement hierarchy:

- a) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities ("quoted price in active markets") – Level 1.
- b) Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly ("observable current market transactions") – Level 2.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows discounted by the relevant market rates.

- c) Inputs for asset and liability that are not based on observable market data ("non-observable current market transactions") – Level 3.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**Lampiran - 4/14 - Schedule****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***13. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)****Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)****(4) Estimasi nilai wajar (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2019, investasi jangka pendek – tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki pengukuran nilai wajar Tingkat 1.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lainnya mendekati nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto yang tidak signifikan.

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**Financial risk factors (continued)****(4) Fair value estimation (continued)**

As at 31 December 2019, short-term investment – available-for-sale was measured at fair value based on fair value hierarchy Level 1.

The fair value of the other financial assets and liabilities approximates the carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

14. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**a. Perubahan Komposisi Dewan Direksi pada BPDPKS**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Badan Layanan Umum BPDPKS dan No. 54/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan pada Badan Layanan Umum BPDPKS, mulai tanggal 2 Maret 2020, Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS masing-masing adalah Eddy Abdurachman dan Zaid Burhan Ibrahim.

b. Dampak *Coronavirus* 2019 *Pandemic* ("Pandemi COVID-19")

Sejak awal 2020, Pandemi COVID-19 telah merebak di beberapa negara. Pada bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia. Selanjutnya pandemi ini telah mempengaruhi kinerja dan kegiatan ekonomi dari BPDPKS dengan intensitas tertentu.

Dampak keseluruhan dari keuangan BPDPKS tidak dapat diestimasi secara andal pada tanggal laporan keuangan ini. Manajemen akan memonitor dengan intensif perkembangan dari Pandemi COVID-19 ini, dan secara berkelanjutan akan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja, posisi keuangan dan hasil operasi dari BPDPKS.

14. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**a. Change in the BPDPKS' Board of Directors Composition**

Based on Decision of Minister of Finance No. 53/KMK.01/2020 on Discharge and Appointment of President Director of the Public Service Agency of BPDPKS and No. 54/KMK.01/2020 on Discharge and Appointment of Position of Public Service Agency of BPDPKS, starting 2 March 2020, President Director and Director of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management of BPDPKS are Eddy Abdurachman and Zaid Burhan Ibrahim, respectively.

b. Impact of the *Coronavirus* 2019 *Pandemic* ("the COVID-19 Pandemic")

Since early 2020, the COVID-19 Pandemic has spread across countries. In March 2020, the Indonesian Government officially announced the first confirmed COVID-19 case in Indonesia. Subsequently, this pandemic has affected the performance and economic activities of BPDPKS to some extent.

The overall financial effect cannot be reliably estimated as of the date of these financial statements. Management will closely monitor the development of the COVID-19 Pandemic and continue to evaluate its impact on the performance, the financial position and operating result of BPDPKS.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/15 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

b. Dampak *Coronavirus 2019 Pandemic* ("Pandemi COVID-19") (lanjutan)

Manajemen mengantisipasi dampak keuangan dari Pandemi COVID-19 melalui:

- Mengevaluasi kembali Rencana Anggaran dan Biaya untuk tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-45/MK.5/2020 terkait dengan Langkah Strategis Badan Layanan Umum dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19.
- Menjaga kecukupan kas dan setara kas BPDPKS agar dapat membiayai beban penyaluran dana BPDPKS melalui pengajuan penyesuaian tarif pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya kepada Menteri Keuangan sesuai keputusan Komite Pengarah.
- Pengajuan penetapan *capping* atas pembayaran selisih harga biodiesel terkait kenaikan selisih kurang harga biodiesel kepada Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral sesuai keputusan Komite Pengarah.
- Menyusun Standar Pelayanan Minimum baru untuk menyesuaikan penerapan *work-from-home*.

14. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

b. *Impact of Coronavirus 2019 Pandemic* ("the COVID-19 Pandemic") (continued)

Management will anticipate the financial effect of the COVID-19 Pandemic by:

- *Re-evaluating the Budget and Cost Plans for the year 2020. This is in accordance with Circular Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-45/MK.5/2020 on Public Service Agency Strategic Moves in Managing the Impact of COVID-19 Pandemic.*
- *Maintaining the sufficiency of BPDPKS' cash and cash equivalents to finance BPDPKS' fund disbursement expenses by proposing the levies tariff adjustment on the export of oil palm products and its derivatives to the Minister of Finance in accordance with Steering Committee's decision.*
- *Proposing the capping on the payment of biodiesel price variance regarding the increase of biodiesel price variance shortage to the Minister of Energy and Mineral Resources in accordance with Steering Committee's decision.*
- *Determining a new Standar Pelayanan Minimum to adapt with the work-from-home arrangement.*

Efektivitas Operasional untuk Mempercepat Pertumbuhan Sawit Indonesia yang Berkelanjutan

Operational Effectiveness to Accelerate
Sustainable Growth of Indonesian Palm Oil

2019 Laporan Tahunan
Annual Report



Graha Mandiri Lt.5
Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
E-mail : info@bpdpi.or.id
(021) 3983 2095
www.bpdpi.or.id